KABUPATEN
MAJALENGKA





















RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2024 - 2026

bappedalitbang.majalengka
bappedalitbang.majalengka
bappedalitbang@majalengka.go.id
bappedalitbang.majalengka.go.id

SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Daerah dan dengan kabupaten yang berbatasan;

b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Majalengka berakhir pada tahun 2023 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2018-2023 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka yang baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan pengaturan dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang

Pembentukan ...

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis ...

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan ...

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor ...

Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 886);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14

Tahun ...

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

yang ...

yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2005 - 2025.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2024 sampai dengan 2026.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024 sampai dengan 2026.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi dalam RPD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi dalam RPD yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa basil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian basil (outcome) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

19. Arah ...

19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai Sasaran RPD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu kegiatan, program atau Sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), basil (outcome), dampak (impact).
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berlungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

Maksud dibentuknya RPD adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

RPD ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Daerah dan dengan kabupaten yang berbatasan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal sebagai berikut:

a. kedudukan;
b. sistematika, isi dan uraian; dan
c. pengendalian dan evaluasi;

BAB III...

BAB III
KEDUDUKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Kedudukan, RPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:

a. secara substansial, merupakan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator Kinerja, pagu indikatif, kelompok Sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab, yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam 3 (tiga) tahun;
b. secara normatif, menjadi dasar Perangkat Daerah untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
c. secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan Kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah; dan
d. secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Pasal 6

(1) Sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
   a. Bab I Pendahuluan;
   b. Bab II Gambaran Umum;
   c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
   d. Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis;
   e. Bab V Tujuan Dan Sasaran;
   f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas;
   g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
   h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   i. Bab IX Penutup.

(2) Isi dan uraian sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7 ...

Pasal 7

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RPD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 – 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan amanat di atas, RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka periode 2018- 2023. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majelengka

yang baru akan dilakukan pada tahun 2024 melalui pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023, dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Menteri Dalam Negeri memberikan instruksi kepada gubernur/bupati/walikota pada tahun 2022 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 juga Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Instruksi tersebut memerintahkan kepada Gubernur/Bupati/ Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, serta memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Kabupaten Majalengka menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berpikir, asumsi, dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan.

Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang dilaksanakan melalui musyawarah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, serta desa dan kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah berorientasi substantif terdiri atas.

Holistik-Tematik, pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Integratif, pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Spasial, pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam

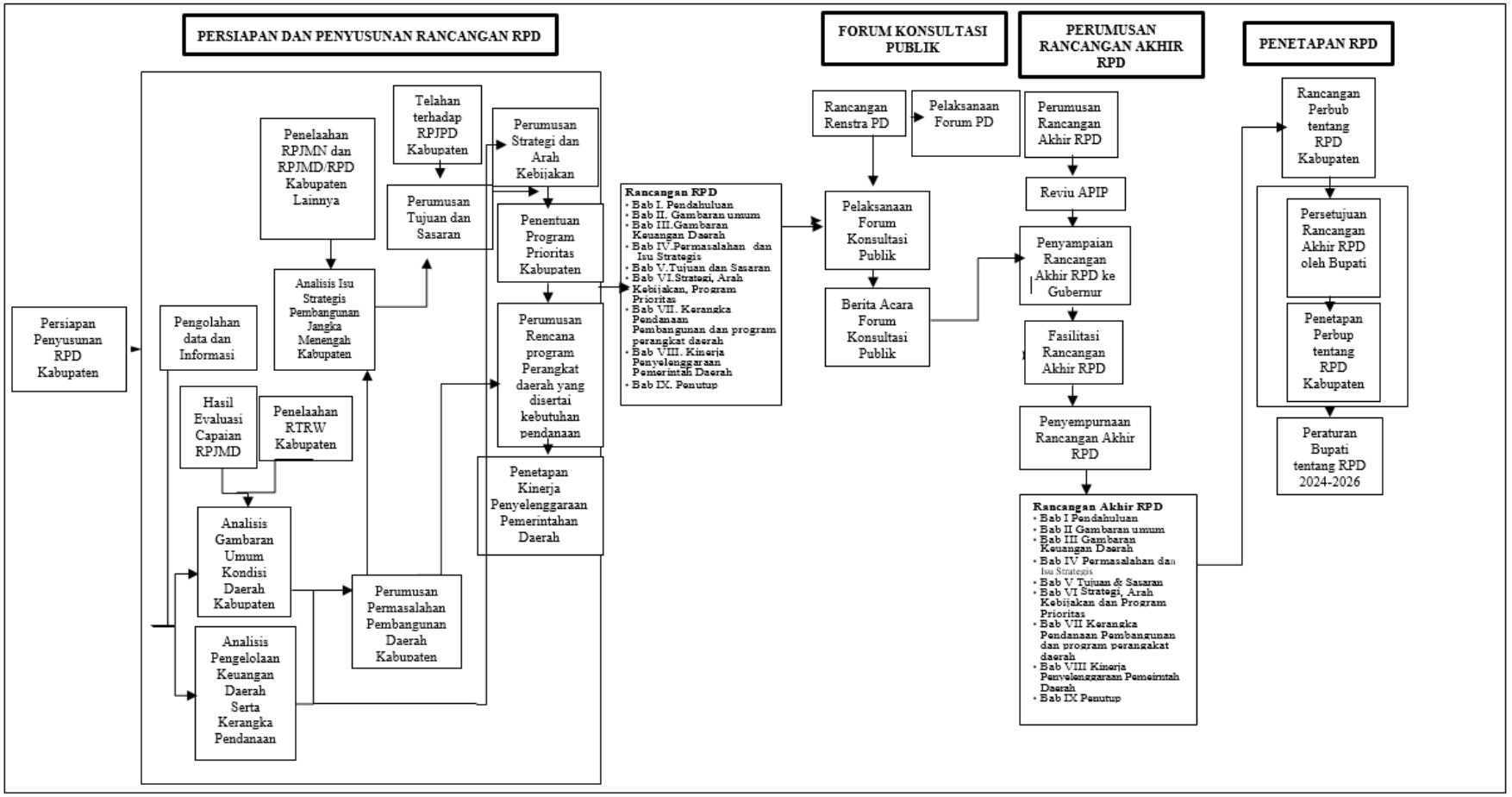
perencanaan.

Mengingat pentingnya dokumen RPD sebagaimana diuraikan di atas, maka Kabupaten Majalengka perlu melakukan persiapan dan perumusan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka untuk memberikan pedoman pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026. Penyusunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 yang dilakukan pada tahun ini merupakan tahap awal dalam penyusunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 yang disusun dengan pendekatan teknokratik.

Selanjutnya, RPD yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan periode 2024-2026, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Majalengka.

Alur penyusunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026



1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 juga
30. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 267);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan RPD Kabupaten Majalengka dengan RPJMN

Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pada RPD dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional pada RPJMN dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.2. Hubungan RPD Kabupaten Majalengka dengan RPD Provinsi Jawa Barat

RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program pembangunan daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program pembangunan daerah provinsi.

1.3.3. Hubungan RPD dengan RPJPD Kabupaten Majalengka

Dokumen RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan RPD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD pada periode berkenaan.

1.3.4. Hubungan RPD Kabupaten Majalengka dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

Dokumen RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penetapan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program Perangkat Daerah dalam Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan berpedoman pada RPD guna mendukung pelaksanaan RPD.

1.3.5. Hubungan RPD Kabupaten Majalengka dengan RKPD Kabupaten dan APBD

Dokumen RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2025 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.3.6. Hubungan RPD dengan RTRW

Penyusunan RPD Kabupaten Majalengka mempedomani RTRW Kabupaten Majalengka melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan

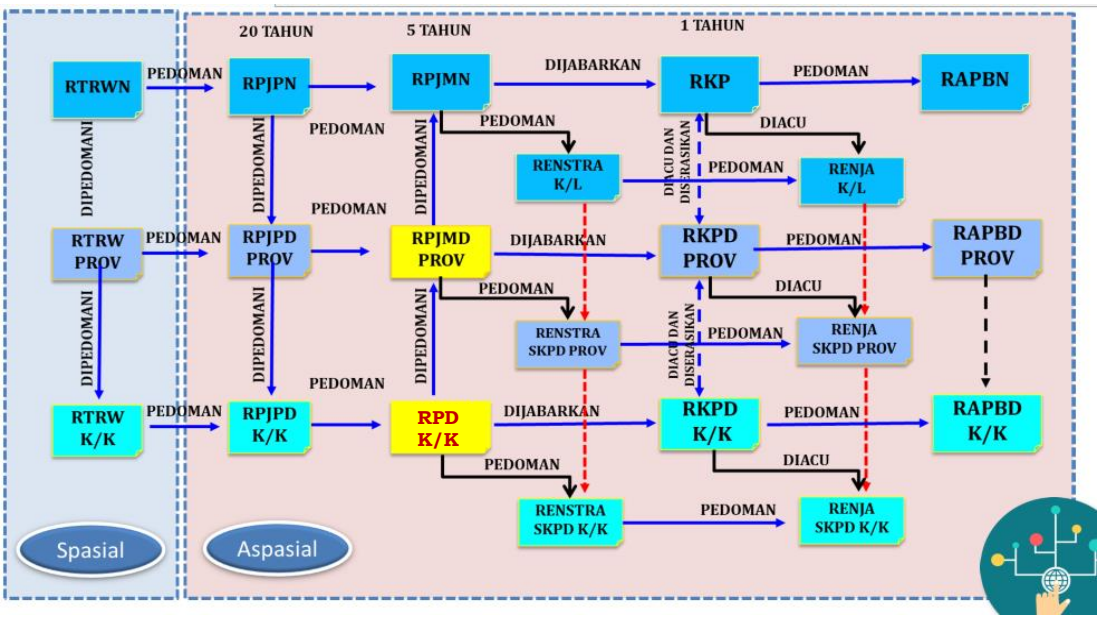
tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW pada periode berkenaan. RPD yang disusun diharapkan selaras dan mengadaptasi rencana yang dimuat dalam RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

1.3.7. Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RPD memiliki peran yang sangat strategis sebagai pedoman pembangunan jangka menengah periode 2024-2026. Dalam proses penyusunannya, RPD memperhatikan dokumen perencanaan lainnya sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang holistik. Setelah disusun, maka RPD menjadi pedoman bagi pembangunan sektoral maupun spasial.

Hubungan antara Rencana Pembangunan daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2.
Hubungan RPD dengan Dokumen Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 adalah memberikan arah pembangunan Kabupaten Majalengka 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah, dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, yaitu:

a. Menelaah kinerja pembangunan Pemerintah Daerah;
b. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan;
c. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan Daerah;
d. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah 3 (tiga) tahun kedepan;
e. Merumuskan program perangkat daerah untuk pembangunan Daerah 3 (tiga) tahun kedepan; dan
f. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) beserta target indikator tahun 2024 sampai dengan 2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 memuat 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPD.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan periode 2024-2026.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan pembangunan berdasarkan kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir. Selanjutnya dirumuskan isu strategis pembangunan dengan memerhatikan isu internasional, nasional, Provinsi dan Daerah.

BAB V : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka periode 2024-2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target per tahun.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dipilih untuk mencapai target sasaran pembangunan. Selanjutnya, ditetapkan program prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun pembangunan Kabupaten Majalengka, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target serta pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Pada setiap indikator dilengkali dengan target setiap tahun.

BAB IX : PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Majalengka

Dinamika pembangunan Kabupaten Majalengka menunjukkan pertumbuhan positif yang ditandai keberhasilan pembangunan ditunjukkan dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks tantangan pun semakin berkembang bagi pemerintah daerah untuk berusaha seoptimal mungkin dalam meningkatkan capaian hasil pembangunan.

Gambaran umum mengenai kondisi daerah Kabupaten Majalengka terkini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang telah diterapkan maupun sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Gambaran ini meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Diharapkan melalui uraian analisis berbasis data dan informasi yang akurat dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dan efektif.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 km^2 atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 km^2).

Secara geografis, Kabupaten Majalengka berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri

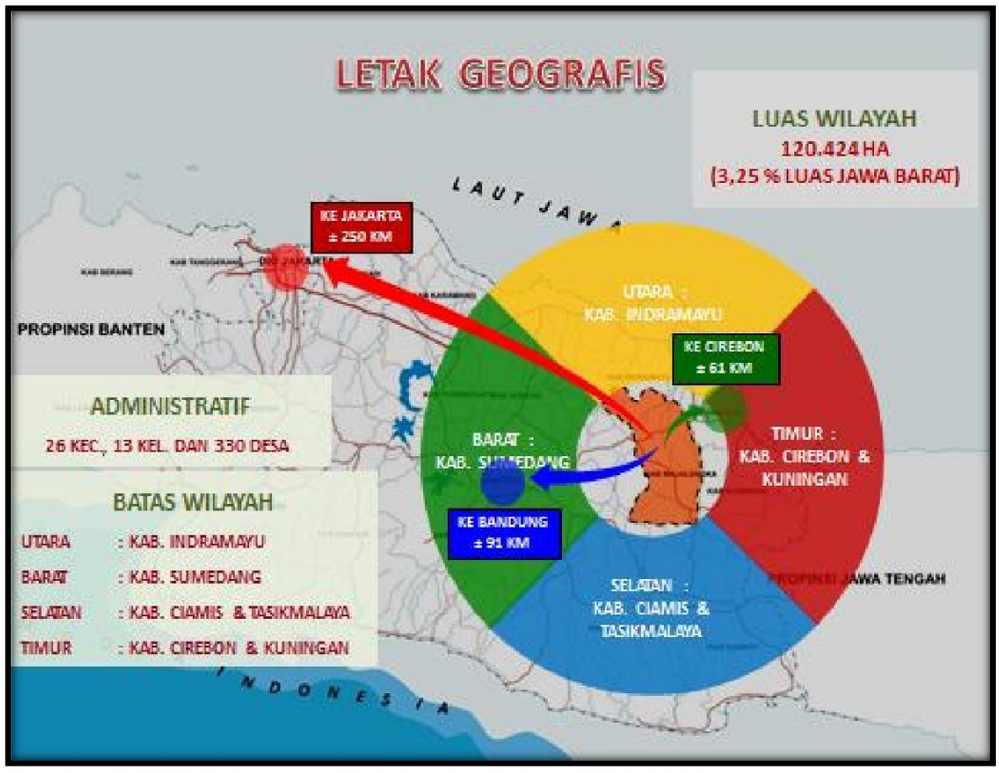
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;

3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya;
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Secara geografis Kabupaten Majalengka berada di bagian Timur Provinsi Jawa Barat, dengan posisi astronomis: Bagian Barat antara 108° 03'-108° 19' Bujur Timur, bagian Timur antara 108° 12'-108° 25' Bujur Timur, Bagian Utara antara 6° 36'-6° 58' Lintang Selatan dan Bagian Selatan antara 6° 43'-7° 03' Lintang Selatan.

Dalam konteks zona waktu Indonesia yang merupakan negara tropis dengan 3 wilayah waktu yaitu WIB (Waktu Indonesia Barat), WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan WIT (Waktu Indonesia Timur), seluruh wilayah Kabupaten Majalengka termasuk ke dalam zona WIB (Waktu Indonesia Barat).

Gambar 2.1
Peta Geografis Kabupaten Majalengka



Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahnn 2011-2031.

Secara geostrategis, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam kawasan utama regional metropolitan rebana di wilayah timur laut provinsi Jawa Barat bersama dua kabupaten lain, seperti Cirebon, Subang, dan tiga daerah penyangga, seperti Indramayu, Sumedang dan Kuningan. Bukan hanya itu, Kabupaten Majalengka juga digadang-gadang menjadi kawasan industri baru seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur.

Seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Tol Cikopo Palimanan, Pelabuhan Patimban dan Tol Cisumdawu kini sedang dikebut pengerjaannya. Bahkan rencananya pemerintah provinsi juga akan merelokasi industri dari Bandung Raya ke wilayah timur laut yang tidak lain salah satunya adalah Majalengka.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Majalengka	4	10	14.	Sindangwangi	10	-
2.	Panyingkiran	9	-	15.	Sukahaji	13	-
3.	Kadipaten	7	-	16.	Sindang	7	-
4.	Dawuan	11	-	17.	Cigasong	7	3
5.	Kasokandel	10	-	18.	Maja	18	-
6.	Kertajati	14	-	19.	Argapura	14	-
7.	Jatitujuh	15	-	20.	Banjaran	13	-
8.	Jatiwangi	16	-	21.	Talaga	17	-
9.	Palasah	13	-	22.	Cikijing	15	-
10.	Ligung	19	-	23.	Cingambul	13	-
11.	Sumberjaya	15	-	24.	Bantarujeg	13	-
12.	Leuwimunding	14	-	25.	Lemahsugih	19	-
13.	Rajagaluh	13	-	26.	Malausma	11	-
Jumlah		**Kecamatan**					**26**
		Desa					**330**
		Kelurahan					**13**

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka Tahun 2023.

Topografis Kabupaten Majalengka secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: landai atau dataran rendah (0 – 15 persen),

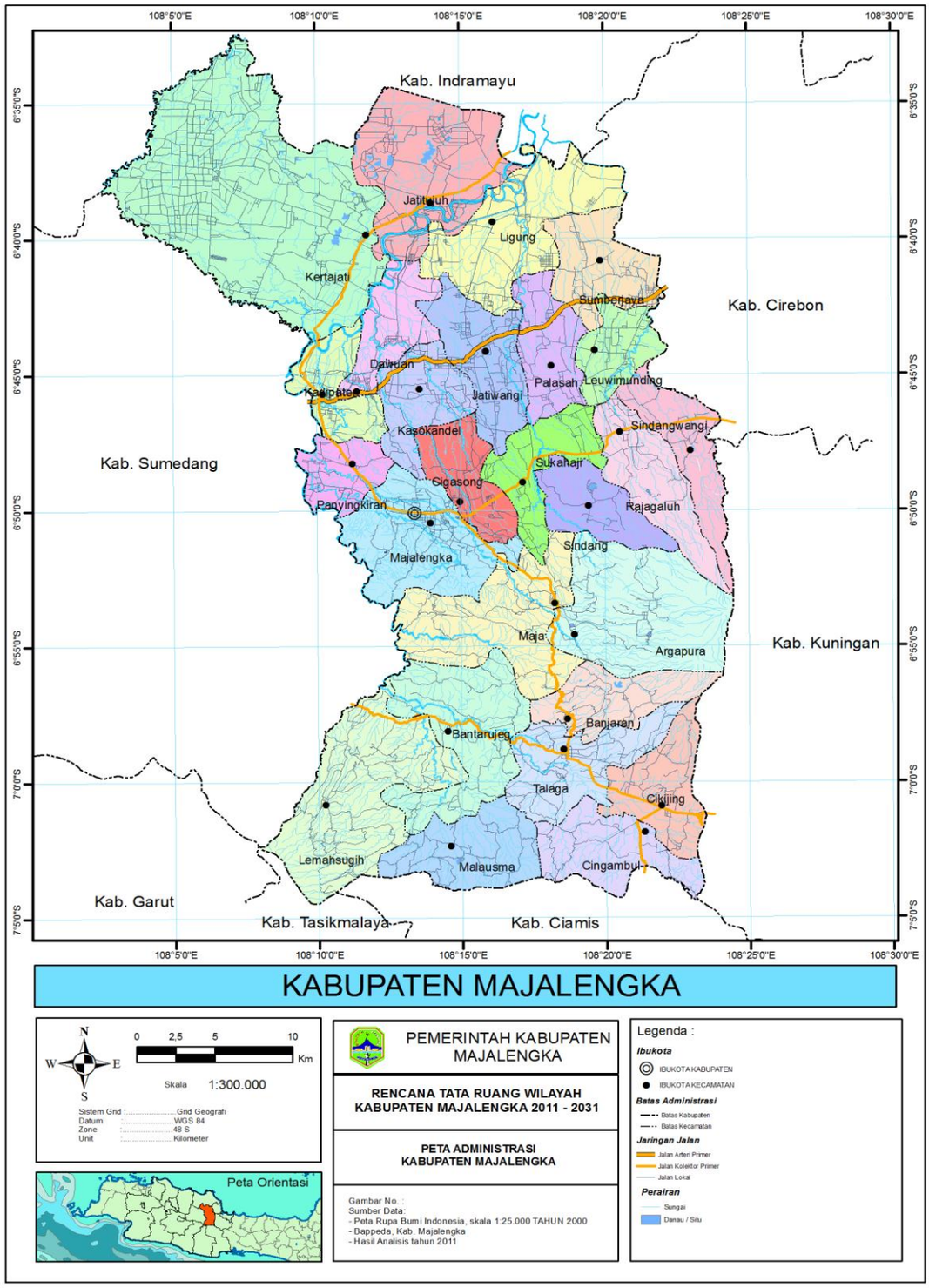
berbukit bergelombang (15 – 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Sebesar 13,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen berada dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen. Kondisi bentang alam yang melandai ke daerah Barat Laut, menyebabkan sebagian besar aliran sungai dan mata air mengalir ke arah Utara, sehingga pada wilayah bagian Utara Kabupaten Majalengka terdapat banyak persawahan. Perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di lereng Gunung Ciremai dan daerah lereng Gunung Cakrabuana. Kondisi topografis ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang dan potensi pengembangan wilayah, juga menyebabkan dampak yang mengakibatkan terdapatnya daerah yang rawan terhadap gerakan tanah yaitu daerah yang mempunyai kelerengan curam.

Adapun distribusi ketiga topografi yang ada di Kabupaten Majalengka sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Dataran rendah, mempunyai kemiringan tanah antara 0-15%, meliputi semua kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Kecamatan yang mempunyai kemiringan 0-15% seluruh wilayahnya terdiri atas Kecamatan Cigasong, Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kertajati, Ligung, dan Palasah;
2. Berbukit gelombang, kemiringan tanahnya berkisar antara 15%-40%, meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Dawuan, Kasokandel, Lemahsugih, Maja, Majalengka, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, dan Talaga; dan
3. Perbukitan terjal, kemiringan tanahnya >40%, meliputi daerah sekitar Gunung Ciremai, Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, Leuwimunding, Maja, Majalengka, Panyingkiran, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, Sumberjaya, dan Talaga.

Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 3 klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 m dpl), dataran sedang (>100 - 500 m dpl) dan dataran tinggi (> 500 m dpl).

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Majalengka



Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Adapun untuk mengetahui luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Majalengka dijelaskan pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase	No.	Nama Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase
1.	Majalengka	57,00	4,73	14.	Sindangwangi	31,76	2,64
2.	Panyingkiran	22,98	1,91	15.	Sukahaji	32,52	2,7
3.	Kadipaten	21,86	1,82	16.	Sindang	23,97	1,99
4.	Dawuan	23,80	1,98	17.	Cigasong	24,17	2,01
5.	Kasokandel	31,61	2,62	18.	Maja	65,21	5,42
6.	Kertajati	138,36	11,49	19.	Argapura	60,56	5,03
7.	Jatitujuh	73,66	6,12	20.	Banjaran	41,98	3,49
8.	Jatiwangi	40,03	3,32	21.	Talaga	43,50	3,61
9.	Palasah	38,69	3,21	22.	Cikijing	43,54	3,62
10.	Ligung	62,25	5,17	23.	Cingambul	37,03	3,07
11.	Sumberjaya	32,73	2,72	24.	Bantarujeg	66,52	5,52
12.	Leuwimunding	32,46	2,7	25.	Lemahsugih	78,64	6,53
13.	Rajagaluh	34,37	2,85	26.	Malausma	45,04	3,74
Kabupaten Majalengka		**Luas Kabupaten Majalengka (Km^2)**				**1.204,24**	
		Persentase				**100,00**	

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.3
Peta Posisi Kabupaten Majalengka dalam
Rencana Struktur Ruang Jawa Barat Tahun 2025



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat, Tahun 2009-2029.

Berdasarkan sebaran dan struktur batuannya, kondisi geologis Kabupaten Majalengka meliputi: *Aluvium* seluas 17.162 Ha (14,25%), *Pleistocene Sedimentary Facies* seluas 13.716 Ha (13,39%), *Miocene Sedimentary Facies* seluas 23,48 Ha (19,50%), *Undiferentionet Vulcanic Product* seluas 51.650 Ha (42,89%), *Pliocene Sedimentary Facies*, seluas 3.870 Ha (3,22%), *Liparite Dacite* seluas 179 Ha (0,15%), *Eosene* seluas 78 Ha (0,006%), *Old Quartenary Volkanik Product* seluas 10.283 Ha (8,54%). Kondisi geologi Kabupaten Majalengka juga terdapat formasi Sesar Baribis yang berpotensi menyebabkan patahan rawan gempa, terutama untuk daerah Selatan dan Timur.

Kondisi hidrologi Kabupaten Majalengka dibagi kedalam dua bagian yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan, dilewati 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung yang menjadi sumber air baku terutama untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung, Sangiang, dan Talagaherang. Air Tanah, berdasarkan kondisi potensi yang ada secara umum Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang memiliki potensi Air Bawah Tanah (ABT) yang cukup baik. Untuk lebih jelasnya gambaran kondisi hidrologi Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Potensi Air Permukaan di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Sungai	Bendungan	Areal Layanan (Ha)	Debit (Liter/detik)	
				Maksimal	Minimal
1.	Cilutung	Kamun	9.289	50,73	0,41
2.	Cideres	Tirtanegara, Cigasong	2.741	3,94	0,65
3.	Cikeruh	Cikeruh, Cibutul	3.354	10,68	0,99
4.	Ciherang	Ciherang	1.009	1,76	0,3
5.	Cikadongdong	Cikemangi, Cikondang	2.411	1,47	0,4
6.	Ciwaringin	Ciwaringin	3.387	6,36	0,44
7.	Cilongkrang	Ciminggiri	Suplai ke Bd Ciawi	0,79	0,29
8.	Ciawi	Ciawi	151	1,02	0,28
9.	Cimanuk	Rentang	571	900	500
10.	Cihikeu	Citeureup	348	1.252	0,26

No.	Nama Sungai	Bendungan	Areal Layanan (Ha)	Debit (Liter/detik)	
				Maksimal	Minimal
11.	Cihieum	Cihieum	556	4.512	0,25
12.	Cisampora	Cimingking	383	1.439	0,18
JUMLAH			**24.230**	**8.179,75**	**504,45**

Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031.

Tabel 2.4
Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka

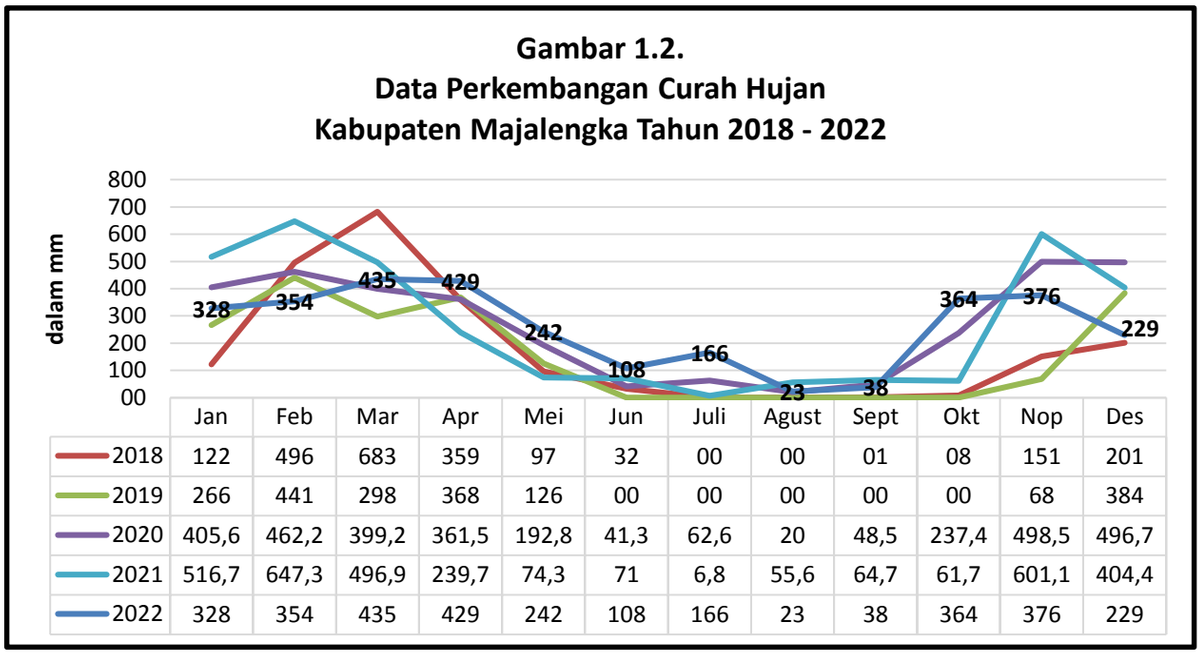
No.	Kisaran Indeks Rata-Rata	Kecamatan	Kelas	Keterangan
1.	1,64 – 2,01	Kertajati – Ligung – Dawuan dan Kasokandel – Jatiwangi	D	Kurang Berpotensi
2.	2,01 – 2,31	Palasah – Leuwimunding - Panyingkiran – Majalengka – Cigasong – Sukahaji dan Sindang – Bantarujeg dan Malausma– Talaga – Cingambul	C	Potensi Sedang
3.	2,31 – 2,61	Sumberjaya – Rajagaluh – Maja – Lemahsugih – Banjaran	B	Berpotensi
4.	2,61 - 3,14	Kadipaten – Sindangwangi – Argapura – Jatitujuh – Cikijing	A	Sangat Berpotensi

Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 – 2031.

Kondisi klimatologis di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 435 mm dan terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 23 mm. Kecepatan angin rata-rata berkisar 3 knot dan kecepatan tertinggi 26 knot dan kecepatan angin terendah 1 knot. Kabupaten Majalengka terkenal dengan sebutan Kota Angin karena memang pada bulan-bulan tertentu di musim kemarau angin berhembus dengan kecepatan yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Suhu terendah di Kabupaten Majalengka selama tahun 2022 mencapai 19,8°C dan suhu tertinggi mencapai 36,2°C. Sementara kelembapan udara terendah mencapai 39% dan kelembapan udara tertinggi mencapai 99%.

Gambar 2.4
Data Perkembangan Curah Hujan Bulanan Kabupaten Majalengka



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
2018	122	496	683	359	97	32	00	00	01	08	151	201
2019	266	441	298	368	126	00	00	00	00	00	68	384
2020	405,6	462,2	399,2	361,5	192,8	41,3	62,6	20	48,5	237,4	498,5	496,7
2021	516,7	647,3	496,9	239,7	74,3	71	6,8	55,6	64,7	61,7	601,1	404,4
2022	328	354	435	429	242	108	166	23	38	364	376	229

Sumber: BMKG Stasiun Meteorologi Jatiwangi Tahun 2023 (diolah).

Tabel 2.5
Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Lahan Sawah						
1.	Irigasi	36.870	36.816	36.802	36.462	36.101
2.	Tadah Hujan	13.535	13.506	13.479	13.555	13.364
Luas Lahan Sawah		**50.405**	**50.405**	**50.281**	**50.017**	**49.465**
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/bangunan	13.566	13.649	13.690	3.693	14.245
2.	Tegal/Kebun	23.694	23.694	23.694	23.958	23.958
3.	Ladang/Huma	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	495	495	495	495	495
5.	Ditanami pohon/Hutan Rakyat	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622
6.	Hutan Negara	14.641	14.641	14.641	14.641	14.641
7.	Perkebunan	739	739	739	739	739
8.	Lahan lainnya	7.714	7.813	7.813	7.711	7.712
9.	Rawa-rawa	99	99	99	99	99
10.	Kolam/empang	1.521	1.422	1.422	1.521	1520
Luas Lahan Bukan Sawah		**70.019**	**70.019**	**70.143**	**70.407**	**70.959**
Luas Lahan Keseluruhan		**120.424**	**120.424**	**120.424**	**120.424**	**120.424**

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

Penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada.

Berdasarkan data di atas, penggunaan lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2022 didominasi lahan non sawah, yaitu seluas 70.959 Ha, dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan untuk tegal/kebun seluas 23.958 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingat Kabupaten Majalengka termasuk dalam kawasan TNGC seluas 14.641 Ha. Luas lahan sawah pada tahun 2022 seluas 49.465 Ha menunjukkan dominasi sektor kerja penduduk Kabupaten Majalengka masih pada sektor pertanian.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui potensi pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah meliputi aspek letak wilayah (administratif dan geostrategis), kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan maupun kondisi geografi lainnya.

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah



Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Berdasarkan Perda dimaksud kawasan budidaya Kabupaten Majalengka terdiri atas:

a. Kawasan peruntukkan hutan produksi : Kawasan peruntukkan hutan produksi terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 12.934 hektar. Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 10.779 Ha, Kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 2.135 Ha.
b. Kawasan peruntukkan pertanian : Kawasan peruntukkan pertanian seluas 43.946 Ha terdiri atas:
    1) Kawasan Peruntukkan Pertanian Tanaman Pangan;
    2) Kawasan Peruntukkan Hortikultura;
    3) Kawasan Peruntukkan Perkebunan; dan
    4) Kawasan Peruntukkan Peternakan.
c. Kawasan peruntukkan perikanan seluas 1.717 hektar.
d. Kawasan peruntukkan pertambangan seluas kurang lebih 1.724 hektar.
e. Kawasan peruntukkan industri seluas kurang lebih 1.324 hektar.
f. Kawasan peruntukkan pariwisata.
    Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri atas:
    1) Pariwisata budaya;
    2) Pariwisata alam; dan
    3) Pariwisata buatan.
g. Kawasan peruntukkan permukiman seluas kurang lebih 13.455 hektar terdiri atas:
    1) Permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.480 hektar; dan
    2) Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.975 hektar.
h. Kawasan peruntukkan lainnya terdiri atas:
    1) Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa;
    2) Kawasan peruntukkan BIJB dan Kertajati Aerocity, meliputi: pengembangan BIJB seluas kurang lebih 1.800 hektar; dan pengembangan kawasan Kertajati Aerocity seluas kurang lebih 3.200 hektar; dan

3) Kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan.

Sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaaan di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Perkotaan:
   1) *Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)*, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Ruang wilayah yang termasuk dalam PKW Kadipaten adalah Kecamatan Kadipaten dan Kecamatan Dawuan.
   2) *Pusat* Kegiatan Lokal (PKL), adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan. PKL diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PKL adalah Perkotaan Majalengka, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing dan Talaga.
   3) *Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)* adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PPK adalah Perkotaan Kasokandel, Leuwimunding, Palasah, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Sindangwangi, Sukahaji, Lemahsugih, Bantarujeg, Maja, Argapura dan Banjaran.
b. Pusat Kegiatan Perdesaan:

   Pusat Kegiatan Perdesaan meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang terdiri dari PPL Sindang, PPL Cingambul, dan PPL Malausma.

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaaan beserta fungsinya di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Majalengka

No.	Pusat Kegiatan / Kecamatan	Fungsi Pelayanan
A.	**Pusat Kegiatan Perkotaan**	
1.	**Pusat Kegiatan Wilayah**	
	a. PKW Kadipaten (Kec. Kadipaten dan Dawuan)	Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, serta pendukung kegiatan industri.
2.	**Pusat Kegiatan Lokal**	
	a. Perkotaan Majalengka (Kec. Majalengka, Cigasong, Panyingkiran)	Sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.

Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Secara umum dilihat dari kondisi geografis, wilayah Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan terjal dengan ketinggian 400-500 m di atas permukaan laut dan berhawa relatif panas.

Berdasarkan posisi tersebut di atas, maka hampir seluruh Kabupaten Majalengka mempunyai potensi bencana yang mungkin dapat terjadi setiap saat dan sangat sukar diperkirakan kapan dan dimana persisnya bencana tersebut akan terjadi. Kabupaten Majelengka termasuk daerah rawan terjadinya bencana seperti halnya daerah lain di Indonesia, karena di wilayah ini selain kondisi geologisnya menunjang terjadinya sejumlah bencana, juga banyak terdapat perbukitan dan aliran sungai yang cukup besar.

Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang masuk ke dalam kawasan Sesar Baribis. Sesar Baribis adalah Sesar aktif yang membentang dari timur hingga barat Pulau Jawa. Sesar Baribis merupakan sesar terpanjang di Pulau Jawa. Sesar ini juga melintasi sisi barat Subang dan Purwakarta, Karawang, Cibatu (Bekasi), Jakarta hingga Tangerang dan Rangkasbitung.

Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka yang kondisi geologisnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan sangat berpotensi terjadinya bencana longsor dan pergeseran tanah di daerah ini, sesuai hasil pemetaan Badan Vulkanologi dan Mitigasi Jawa Barat.

Sedangkan wilayah utara yang merupakan dataran rendah sangat berpotensi terjadinya bencana banjir, dan abrasi sungai, hal ini sebagai konsekwensi adanya beberapa aliran sungai yang cukup besar serta banyaknya sungai–sungai kecil yang bermuara di sungai–sungai besar. Curah hujan yang cukup tinggi menjadi penyebab utama timbulnya bencana abrasi dan banjir.

Selain hal tersebut di atas Kabupaten Majalengka mendapat julukan Kota Angin karena sepanjang tahun hembusan angin yang cukup kencang sering terjadi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya puting beliung yang melanda Kabupaten Majalengka dan sering menimbulkan kerugian harta benda masyarakat.

Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari tetapi yang dapat kita lakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta benda maupun lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Mengamati fenomena–fenomena di atas, Kabupaten Majalengka yang relatif tidak aman dari bencana, harus tetap waspada agar dampak negatifnya berupa korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisir.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Data Lokasi Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka

No.	Kecamatan	Potensi Bencana				
		Longsor	Tektonik	Vulkanik	Banjir	Cuaca Ekstrim
1.	Argapura	14 desa	14 desa	13 desa	14 desa	14 desa
2.	Banjaran	13 desa	13 desa	2 desa	13 desa	13 desa
3.	Bantarujeg	13 desa	13 desa	-	13 desa	13 desa
4.	Cigasong	10 desa	7 desa	4 desa	10 desa	10 desa
5.	Cikijing	15 desa	13 desa	1 desa	15 desa	15 desa
6.	Cingambul	13 desa	8 desa	-	13 desa	13 desa
7.	Dawuan	11 desa	-	-	11 desa	11 desa
8.	Jatitujuh	15 desa	-	-	15 desa	15 desa
9.	Jatiwangi	16 desa	7 desa	6 desa	16 desa	16 desa
10.	Kadipaten	7 desa	3 desa	-	7 desa	7 desa
11.	Kasokandel	10 desa	4 desa	-	10 desa	10 desa
12.	Kertajati	14 desa	-	-	14 desa	14 desa
13.	Lemahsugih	19 desa	19 desa	-	19 desa	19 desa
14.	Leuwimunding	14 desa	6 desa	7 desa	14 desa	14 desa
15.	Ligung	19 desa	-	-	19 desa	19 desa
16.	Maja	18 desa	19 desa	14 desa	18 desa	18 desa
17.	Majalengka	14 desa	8 desa	1 desa	14 desa	14 desa
18.	Malausma	11 desa	11 desa	-	11 desa	11 desa
19.	Palasah	13 desa	5 desa	7 desa	13 desa	13 desa
20.	Panyingkiran	9 desa	6 desa	-	9 desa	9 desa
21.	Rajagaluh	13 desa	10 desa	10 desa	13 desa	13 desa
22.	Sindang	7 desa	7 desa	5 desa	7 desa	7 desa
23.	Sindangwangi	10 desa	10 desa	7 desa	10 desa	10 desa
24.	Sukahaji	13 desa	13 desa	9 desa	13 desa	13 desa
25.	Sumberjaya	15 desa	-	4 desa	15 desa	15 desa
26.	Talaga	17 desa	14 desa	2 desa	17 desa	17 desa
Desa		**343 desa**	**210 desa**	**92 desa**	**343 desa**	**343 desa**
Kecamatan		**26 kec**	**21 kec**	**15 kec**	**26 kec**	**26 kec**

Sumber: BPBD Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

2.1.1.4 Demografi

Sumberdaya manusia atau aspek kependudukan di Kabupaten Majalengka mencakup data jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk dan sebarannya, kecenderungan konsentrasi penduduk, struktur penduduk menurut mata pencaharian serta tingkat angkatan kerja dan orientasi pergerakan penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 mencapai 1.328.894 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,38%. Sempat terjadi lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2019 dikarenakan migrasi dari daerah-daerah sekitar Kabupaten

Majalengka sebagai dampak dari pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan pembangunan industri di Kabupaten Majalengka. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk, LPP, dan Kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.278.753	1.307.995	1.315.272	1.323.854	1.328.894
	Laki-laki (Jiwa)	645.435	659.543	662.772	665.612	668.505
	Perempuan (Jiwa)	633.318	648.452	652.500	658.242	660.389
2.	*Sex Ratio*	101,91	101,71	101,57	101,12	101,23
3.	LPP (%)	0,75	2,29	0,56	0,65	0,38
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	1.062	1.086	1.092	1.099	1.104

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Majalengka Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Lemahsugih	33,074	32,061	65,135	103,16
2.	Bantarujeg	24,071	23,969	48,040	100,43
3.	Cikijing	35,043	34,224	69,267	102,39
4.	Talaga	24,933	24,316	49,249	102,54
5.	Argapura	18,619	18,002	36,621	103,43
6.	Maja	26,736	26,490	53,226	100,93
7.	Majalengka	36,881	37,244	74,125	99,03
8.	Sukahaji	24,191	24,107	48,298	100,35
9.	Rajagaluh	23,916	23,622	47,538	101,24
10.	Leuwimunding	32,886	32,058	64,944	102,58
11.	Jatiwangi	46,067	45,477	91,544	101,30
12.	Dawuan	23,940	23,904	47,844	100,15
13.	Kadipaten	23,704	23,289	46,993	101,78
14.	Kertajati	24,217	24,243	48,460	99,89
15.	Jatitujuh	27,705	27,967	55,672	99,06
16.	Ligung	33,326	33,491	66,817	99,51
17.	Sumberjaya	32,741	32,376	65,117	101,13

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
18.	Panyingkiran	16,477	16,359	32,836	100,72
19.	Palasah	27,047	26,846	53,893	100,75
20.	Cigasong	19,155	18,779	37,934	102,00
21.	Sindangwangi	17,682	17,249	34,931	102,51
22.	Banjaran	12,853	12,921	25,774	99,47
23.	Cingambul	22,145	21,647	43,792	102,30
24.	Kasokandel	26,943	26,714	53,657	100,86
25.	Sindang	8,555	8,605	17,160	99,42
26.	Malausma	25,598	24,429	50,027	104,79
Kabupaten Majalengka		**668,505**	**660,389**	**1,328,894**	**101,23**

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Karateristik Penduduk berdasarkan Pendidikan, salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf, artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus didukung oleh sarana pendidikan yang memadai, berikut jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2018-2022.

Tabel 2.10
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas
Kabupaten Majalengka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tidak/Belum Punya Ijazah SD	12,61	26,19	26,92	18,30	26,83
2.	SD	50,66	41,97	41,14	8,50	38,64
3.	SLTP	18,80	15,91	16,36	39,12	16,84
4.	SLTA	14,09	12,41	12,18	16,69	13,86
5.	D I/ D3	1,16	0,97	0,93	14,57	0,95
6.	S1	2,54	2,41	2,35	2,68	2,74
7.	S2	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13
8.	S3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

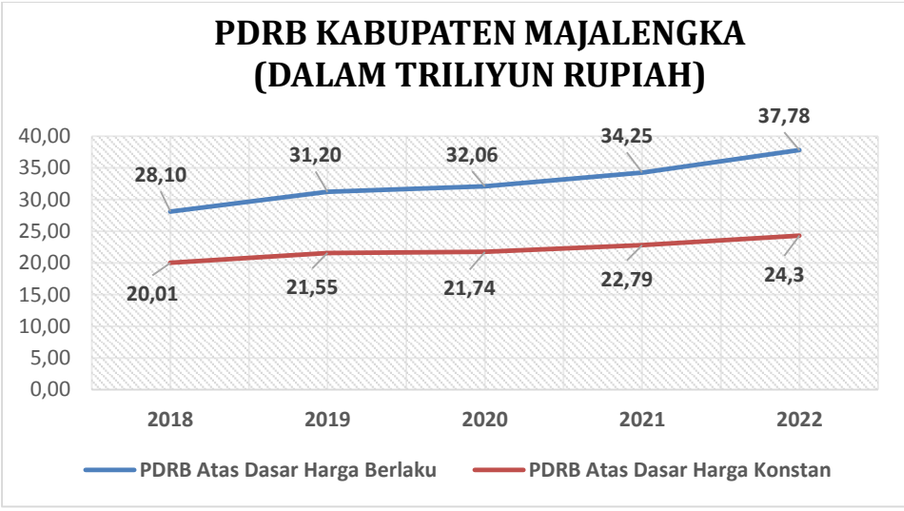
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 20,01 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 24,3 triliun pada tahun 2022, dengan laju PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022 sebesar 6,63%.

Gambar 2.6
Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Peningkatan PDRB tersebut menunjukkan peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Majalengka disebabkan mulai melandainya kondisi pandemi. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari inflasi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sebelumnya menjadi sector yang paling banyak menyumbang jumlah total seluruh PDRB di Kabupaten Majalengka, pada tahun 2021 dan 2022 ini posisinya tergeser oleh sektor Industri Pengolahan.

Terdapat 4 sektor yang dominan dalam menyumbang nilai PDRB yaitu sektor Industri Pengolahan (25,15%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (21,23%), Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,72%), dan Konstruksi (11,72%).

Tabel 2.11
Nilai Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka (Juta Rupiah)

No.	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	4.080.044,6	6.629.837,7	4.119.332,4	7.044.841,4	4.116.819,1	7.205.171,9	4.152.808,92	7.239.252,07	4.388.830,50	8.020.416,60
2.	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	398.156,7	432.557,6	382.994,6	434.037,9	380.757,07	434094,2	380.937,13	477.363,60	380.664,20	513.037,21
3.	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	3.550.305,1	4.922.245,7	4.443.685,5	6.329.820,7	4.851.513,3	7.052.656,3	5.447.301,53	8.167.474,92	6.173.712,69	9.501.191,67
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	16.437,4	23.633,3	17.385,5	24.992,8	19.757,5	28.222,7	22.581,65	32.274,59	25.168,13	36.215,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	11.081,8	16.650,6	11.798,0	17.734,9	13.917,8	21.030,7	16.953,77	27.742,87	19.498,46	32.238,47
6.	Konstruksi/*Construction*	2.739.963,6	3.687.514,2	2.850.002,2	3.952.981,5	2.699.491,4	3.764.137,6	2.842.509,74	4.170.900,57	2.858.901,81	4.428.337,87
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	3.459.193,8	4.467.860,4	3.621.896,8	4.776.642,3	3.403.003,3	4.601.445,9	3.504.158,05	4.821.564,99	3.642.339,37	5.183.571,93
8.	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	760.899,2	1.102.792,1	822.488,2	1.204.613,8	771.718,6	1.161.084,9	767.098,58	1.187.180,90	842.092,70	1.364.746,67
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	664.636,6	871.002,9	704.748,5	949.373,2	653.263,3	925.088,1	644.936,81	943.267,22	707.643,05	1.080.190,50

No.	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
10.	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	829.901,2	818.257,4	897.047,9	876.895,1	1.183.794,3	1.164.249,8	1.267.351,34	1.226.678,17	1.336.248,51	1.277.962,12
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	576.695,7	780.933,5	603.051,3	844.738,7	611.875,3	862.382,9	631.871,12	917.180,24	636.315,93	997.561,15
12.	Real Estat/*Real Estate Activities*	268.035,7	319.644,5	291.965,3	351.190,4	294.050,6	354.982,4	318.805,26	385.824,82	338.550,15	422.482,11
13.	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	71.421,9	88.432,1	76.313,0	105.358,0	68.549,4	98.104,0	70.674,97	104.460,91	77.468,16	119.159,34
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	631.114,6	1.008.538,8	648.241,3	1.066.499,1	622.869,9	1.041.440,4	612.568,81	1.048.206,49	605.996,90	1.034.076,73
15.	Jasa Pendidikan/*Education*	1.146.933,6	1.907.856,8	1.204.867,6	2.084.961,2	1.220.914,2	2.172.685,6	1.238.966,83	2.247.016,22	1.303.364,05	2.340.003,60
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	215.907,5	287.781,3	229.384,6	312.269,9	235.109,3	327.764,7	250.703,88	356.176,06	263.313,21	375.555,31
17.	Jasa lainnya/*Other Services Activities*	586.149,9	732.817,4	625.046,7	825.247,1	589.200,4	840.665,5	618.525,86	893.053,18	700.666,20	1.052.089,62
PDRB		**19.935.540,9**	**28.098.356,4**	**21.358.916,5**	**31.202.197,9**	**21.736.604,9**	**32.055.207,9**	**22.788.754,26**	**34.245.617,82**	**24.300.774,06**	**37.778.836,04**

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Selama kurun waktu 2018-2020, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Industri Pengolahan, dan sektor Konstruksi menjadi empat sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Majalengka, namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi perubahan,

dimana dominasi konstribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tergeser dengan meningkatnya konstribusi sektor Industri Pengolahan, ini menunjukkan adanya kecenderungan peralihan kegiatan perekonomian daerah dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Majalengka

No.	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	20,39	23,60	19,12	22,58	18,94	22,48	18,22	21,14	18,06	21,23
2.	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	1,99	1,54	1,78	1,39	1,75	1,35	1,67	1,39	1,57	1,36
3.	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	17,75	17,52	20,62	20,29	22,32	22,00	23,90	23,85	25,41	25,15
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
6.	Konstruksi/ *Construction*	13,70	13,12	13,22	12,67	12,42	11,74	12,47	12,18	11,76	11,72
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	17,29	15,90	16,81	15,31	15,66	14,35	15,38	14,08	14,99	13,72
8.	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	3,80	3,92	3,82	3,86	3,55	3,62	3,37	3,47	3,47	3,61
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	3,32	3,10	3,27	3,04	3,01	2,89	2,83	2,75	2,91	2,86
10.	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	4,15	2,91	4,16	2,81	5,45	3,63	5,56	3,58	5,50	3,38
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	2,88	2,78	2,80	2,71	2,81	2,69	2,77	2,68	2,62	2,64

No.	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
12.	Real Estat/*Real Estate Activities*	1,34	1,14	1,35	1,13	1,35	1,11	1,40	1,13	1,39	1,12
13.	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	0,36	0,31	0,35	0,34	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	3,15	3,59	3,01	3,42	2,87	3,25	2,69	3,06	2,49	2,74
15.	Jasa Pendidikan/*Education*	5,73	6,79	5,59	6,68	5,62	6,78	5,44	6,56	5,36	6,19
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	1,08	1,02	1,06	1,00	1,08	1,02	1,10	1,04	1,08	0,99
17.	Jasa lainnya/*Other Services Activities*	2,93	2,61	2,90	2,64	2,71	2,62	2,71	2,61	2,88	2,78
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

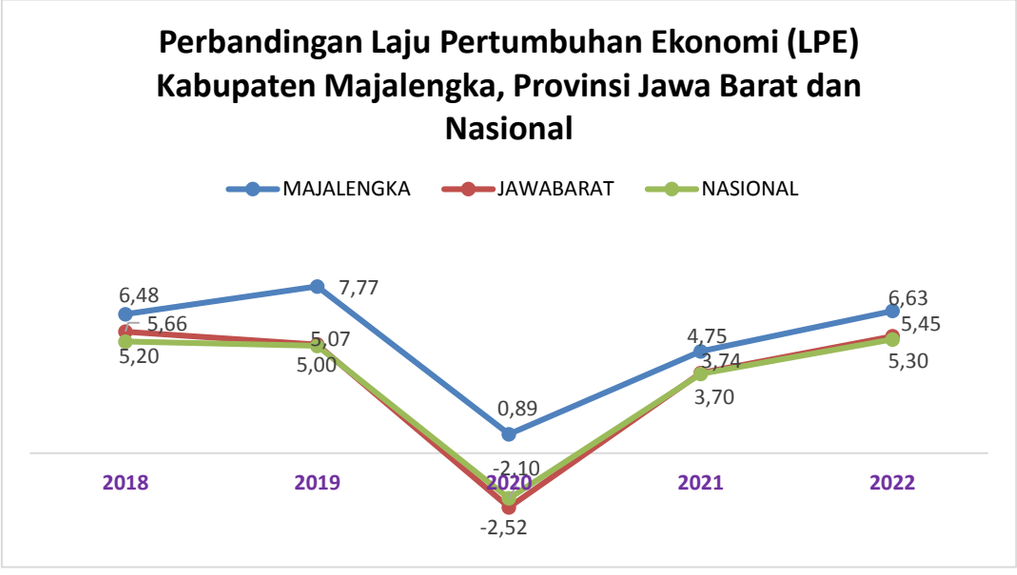
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan melandainya Pandemi Covid-19 terjadi peningkatan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian. Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 6,63% dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 4,75%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2022 merupakan LPE tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dimana urutan LPE kedua adalah Kabupaten Karawang (6,31%) dan urutan ketiga adalah Kota Cimahi (5,92%), sementara untuk LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, yang mampu tumbuh sebesar 15,01%, disusul kemudian oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (tumbuh 13,34%), lapangan usaha Jasa Lainnya (tumbuh 13,28%), serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (tumbuh 11,45%), sementara lapangan usaha Transportasi dan

Pergudangan, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan lapangan usaha Jasa Perusahaan juga memiliki peran dominan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,78 persen, 9,72 persen dan 9,61 persen. Perkembangan Laju pertumbuhan Ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut:

Gambar 2.7
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

c. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selama ini nilai inflasi daerah Kabupaten Majalengka tidak termasuk yang dihitung oleh BPS Kabupaten Majalengka. Di Provinsi Jawa Barat, hanya 7 (tujuh) kota yang dihitung nilai inflasi daerahnya yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya, sehingga gambaran Inflasi Majalengka lebih mengacu kepada nilai inflasi Kota Cirebon.

Pada tahun 2022, BPS Kabupaten telah melaksanakan survey Standar Biaya Hidup (SBH) di Kabupaten Majalengka dan pada tahun 2023 direncanakan akan melaksanakan survey Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Majalengka. Kedua survey tersebut merupakan dasar perhitungan dalam penentuan nilai inflasi daerah. Sehingga setelah pelaksanaan kedua survey tersebut, direncanakan pada tahun 2024 BPS Kabupaten Majalengka baru akan menghitung dan mengeluarkan nilai inflasi daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024. Berikut data-data capaian inflasi daerah di wilayah Kota Cirebon :

Tabel 2.13

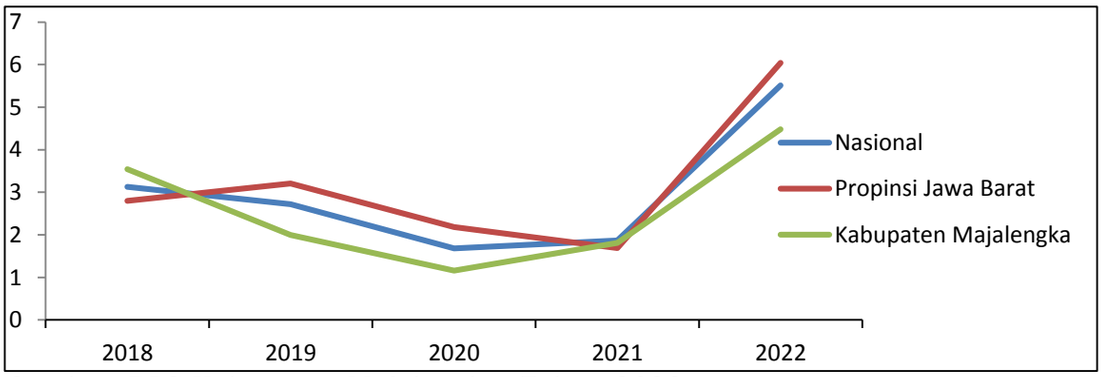
Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022

No.	Wilayah Inflasi	Inflasi Tahunan (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	3.13	2.72	1.68	1.87	5.51
2	Jawa Barat	2.8	3.21	2.18	1.69	6.04
3	Kota Cirebon	3.54	2	1.16	1.81	4.48

Sumber: BPS Kota Cirebon, Tahun 2018-2023.

Gambar 2.8

Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 nasional, Jawa Barat dan Kota Cirebon memiliki nilai inflasi sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah pusat sebesar 3±1 persen. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan kenaikan melebihi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat untuk segera mengendalikan inflasi.

d. PDRB Per Kapita

Dengan asumsi bahwa, pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data selengkapnya mengenai PDRB per Kapita dapat dilihat pada tabel 2.14 sebagai berikut:

Tabel 2.14
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
Dan Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	PDRB Per Kapita ADH Konstan 2010(Rp)	PDRB Per Kapita ADH Berlaku(Rp)
1.	2018	16.682.130	23.428.964
2.	2019	17.883.519	25.812.255
3.	2020	16.650.329	24.725.655
4.	2021	17.278.000	25.964.008
5.	2022	18.197.000	28.289.000

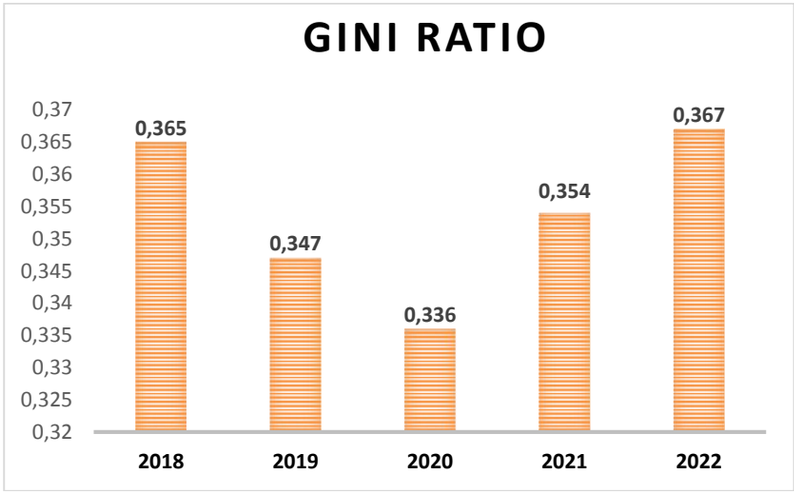
Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Dari tabel 2.14, rata-rata pendapatan per kapita penduduk di Majalengka atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu tahun 2018-2019 selalu mengalami peningkatan, namun sempat menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 24.725.655 dikarenakan Pandemi Covid-19, kemudian pada tahun 2021 naik kembali menjadi Rp 25.964.008 dan pada tahun 2022 naik signifikan menjadi Rp 2.859.640.

e. Gini Ratio

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Data Gini ratio di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.9 sebagai berikut.

Gambar 2.9
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Perbandingan angka Gini Rasio antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 2.15
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka,
Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Wilayah	Gini Ratio				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	0,365	0,347	0,336	0,354	0,367
Jawa Barat	0,407	0,402	0,403	0,412	0,417
Nasional	0,384	0,380	0,381	0,381	0,381

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio < 0,3 : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- 0,3 ≤ Gini Ratio ≤ 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- Gini Ratio > 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

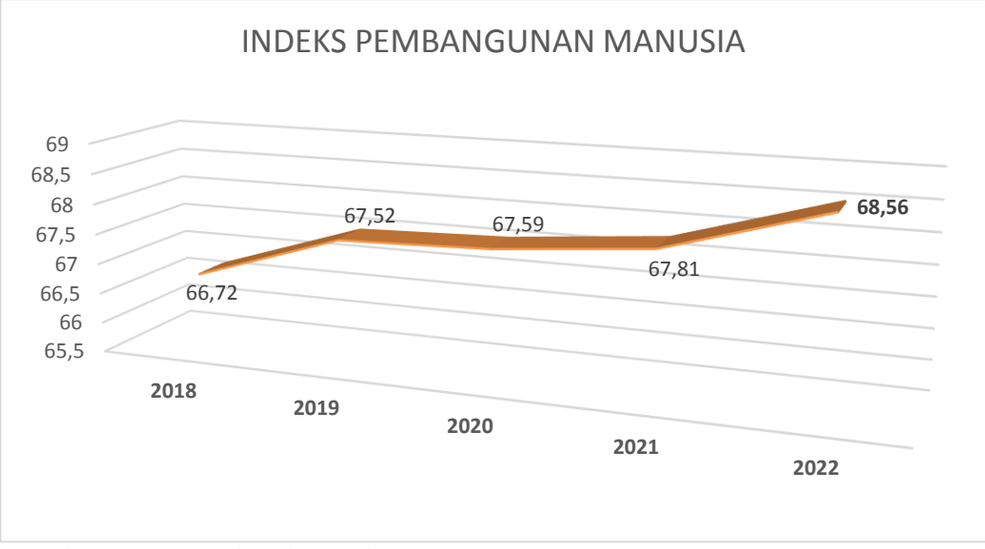
Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2022 menunjukan menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 masih tergolong sedang (0,367). Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa barat (0,417) dan Nasional (0,381) walaupun masih dalam kategori sedang.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” : IPM ≥ 80.
2. Kelompok “tinggi” : 70 ≤ IPM < 80.
3. Kelompok “sedang” : 60 ≤ IPM < 70.
4. Kelompok “rendah” : IPM < 60.

Gambar 2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Majalengka, Tahun 2023.

Perbandingan angka Indeks Pembangunan Manusia antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.16
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Wilayah	IPM				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	66,72	67,52	67,59	67,81	68,56
Jawa Barat	71,30	72,03	72,09	72,45	73,12
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Nilai Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka terus meningkat setiap tahunnya, Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat walaupun hanya 1,106%

dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Barat (73,12 poin) dan Nasional (72,91 poin) yang sudah masuk Kategori tinggi, nilai capaian IPM Kabupaten Majalengka masih dalam kategori sedang sehingga diperlukan peningkatan program kegiatan yang tepat untuk mendongkrak nilai capaian IPM di Kabupaten Majalengka.

g. Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan

Konsep definisi dari Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Sebagai contoh interpretasi, Pengeluaran per kapita Majalengka pada tahun 2022 sebesar Rp.9.950.000, artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Majalengka selama setahun adalah Rp. 9.950.000. Nilai ini masih jauh dibawah jika dibandingkan dengan nilai Pengeluaran perkapita Provinsi Jawa Barat maupun Nasional yang nilainya sudah mencapai lebih dari sepuluh juta rupiah.

Perbandingan nilai Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini:

Tabel 2.17
Perbandingan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Wilayah	Pengeluaran Per Kapita (000 Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	9.416	9.822	9.521	9,591	9.950
Jawa Barat	10.790	11.152	10.850	10.934	11.277
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

h. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.18
Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	129.290	121.060	138.200	151.100	147.120
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Selama kurun waktu 2018-2022, program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka cukup berhasil untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dari angka 10,79% pada tahun 2018 menurun menjadi 10,06% pada tahun 2019. Hanya saja dikarenakan dampak Pandemi Covid 19, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka tahun 2020 naik menjadi 11,43 dan pada tahun 2021 naik lagi menjadi 12,33%, namun pada tahun 2022 turun menjadi 11,94%. Angka ini masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Barat (8,06%) dan Nasional (9,57%).

Tabel 2.19
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Wilayah	Angka Kemiskinan (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94
Jawa Barat	7,25	6,82	7,88	8,40	8,06
Nasional	9,66	9,22	9,78	9,71	9,57

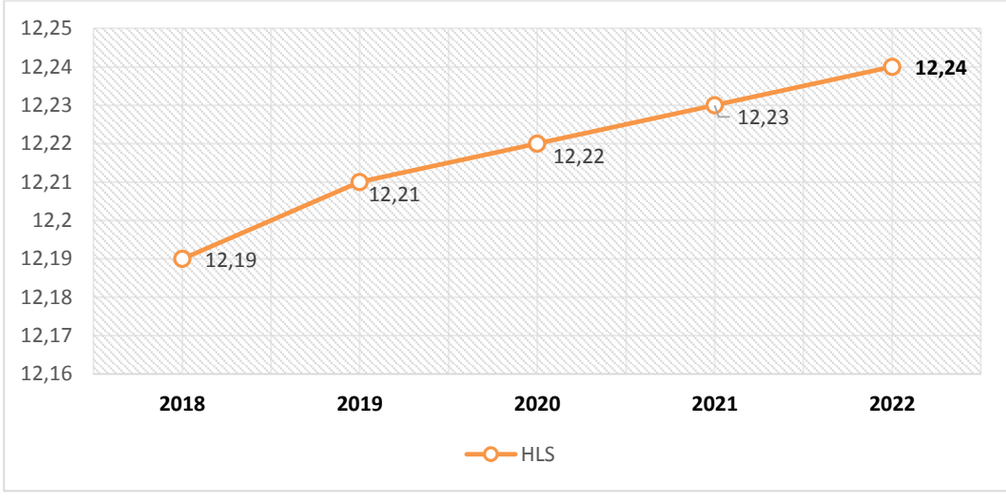
Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

a. Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*), didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan EYS Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut.

Gambar 2.11
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Selama periode tahun 2018-2022, angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka selalu meningkat, yaitu 12,19 tahun pada tahun 2018, meningkat menjadi 12,24 tahun pada tahun 2022. Angka ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Majalengka memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,24 tahun, atau setara dengan SMA kelas 3. Angka ini meningkat sebesar 0,01 tahun dibandingkan pada tahun 2021.

Perbandingan angka Angka Harapan Sekolah antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut ini:

Tabel 2.20
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

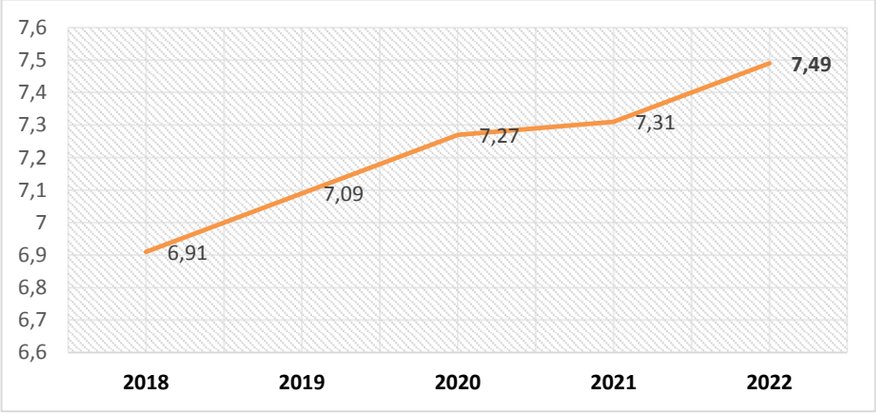
Wilayah	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	12,19	12,21	12,22	12,23	12,24
Jawa Barat	12,45	12,48	12,50	12,61	12,62
Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Angka HLS Kabupaten Majalengka Kondisi tahun 2022 tidak terpaut jauh dengan angka HLS Jawa Barat (12,62 Tahun) serta terpaut sebesar 0,86 tahun dengan angka HLS Nasional (13,10 Tahun).

Rata-rata Lama Sekolah *(Means Years of Schooling)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan MYS Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.12 berikut:

Gambar 2.12
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Perkembangan MYS atau Rata-rata Lama Sekolah tahun 2018-2022 menunjukkan grafik yang menanjak yaitu dari 6,91 tahun pada tahun 2018 menjadi 7,49 tahun pada 2022. Angka ini bisa didefinisikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Majalengka secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,49 tahun atau hampir setara dengan SMP kelas 1.

Perbandingan angka Angka Rata Lama Sekolah antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut ini:

Tabel 2.21
Perbandingan Angka Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Wilayah	Angka Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	6,91	7,09	7,27	7,31	7,49
Jawa Barat	8,15	8,37	8,55	8,61	8,78
Nasional	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

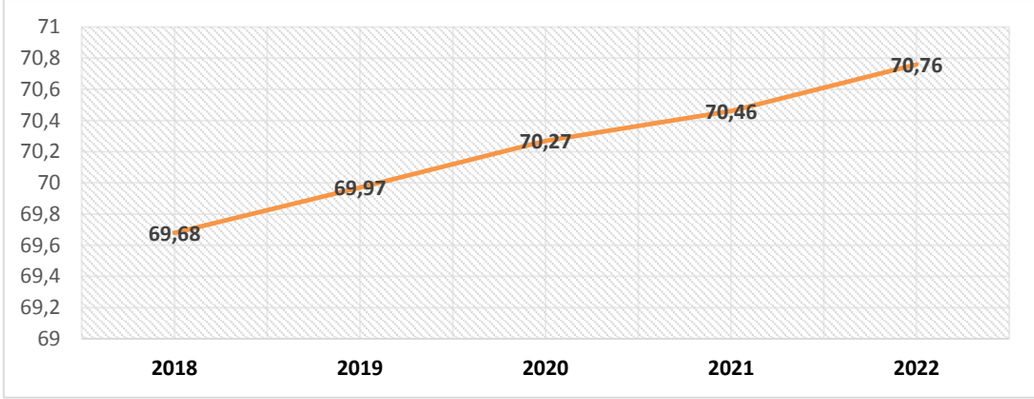
Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Walaupun terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir angka Rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka masih berada terpaut jauh dibawah RLS Jawa Barat (8,78 tahun) dan Nasional (8,69 Tahun).

b. Kesehatan

Tujuan utama pembangunan manusia dalam aspek kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia, sehingga dapat hidup sehat dan berumur panjang. Pengukuran taraf kesehatan tersebut adalah dengan menghitung angka harapan hidup saat lahir (e_0). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang akan ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu banyaknya anak lahir hidup dan banyaknya anak masih hidup. Perkembangan AHH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut:

Gambar 2.13
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Pada rentang tahun 2018-2022 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Majalengka terus meningkat dari 69,68 tahun pada tahun 2018 menjadi 70,76 tahun pada tahun 2022. Angka ini bisa diartikan bahwa bayi yang baru lahir di Majalengka memiliki peluang untuk hidup hingga 70,76 tahun. Sedangkan menurut WHO, kondisi ideal AHH adalah sebesar 85 tahun, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak implementasinya masih perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan bidang kesehatan.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

1. rendah = di bawah 10%
2. sedang = 10-19%
3. tinggi = 20-29%
4. sangat tinggi = 30%

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, data terakhir tahun 2022 sebesar 0,19%, artinya menurut standar WHO jika lebih kecil dari 10% dapat dikatakan rendah. Perkembangan persentase gizi buruk dapat dilihat pada tabel 2.22 sebagai berikut:

Tabel 2.22
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Persentase Balita Gizi Buruk (%)
1.	2018	0,04
2.	2019	0,25
3.	2020	0,15
4.	2021	0,13
5.	2022	0,19

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

c. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bekerja terhadap seluruh angkatan kerja. Perkembangan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Majalengka pada kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.23 sebagai berikut.

Tabel 2.23
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)
1.	2018	95,05
2.	2019	95,63
3.	2020	94,16
4.	2021	94,29
5.	2022	95,84

Sumber: BPS Majalengka, Tahun 2023.

Dari data diatas terlihat bahwa rasio penduduk yang bekerja selama periode 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka yang bekerja mencapai 95,84% dari jumlah seluruh angkatan kerja.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari aktivitas kesenian dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Indikator

perkembangan seni budaya selama kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut ini:

Tabel 2.24
Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Majalengka

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah grup kesenian	494	610	405	683	683
2.	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-

Sumber: Disparbud Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara dan didalamnya mengandung satu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus dilakukan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan, mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

1. Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
2. Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat1 adalah 0-6 tahun. Data perkembangan PAUD di Kabupaten Majalengka disajikan pada tabel 2.25 sebagai berikut:

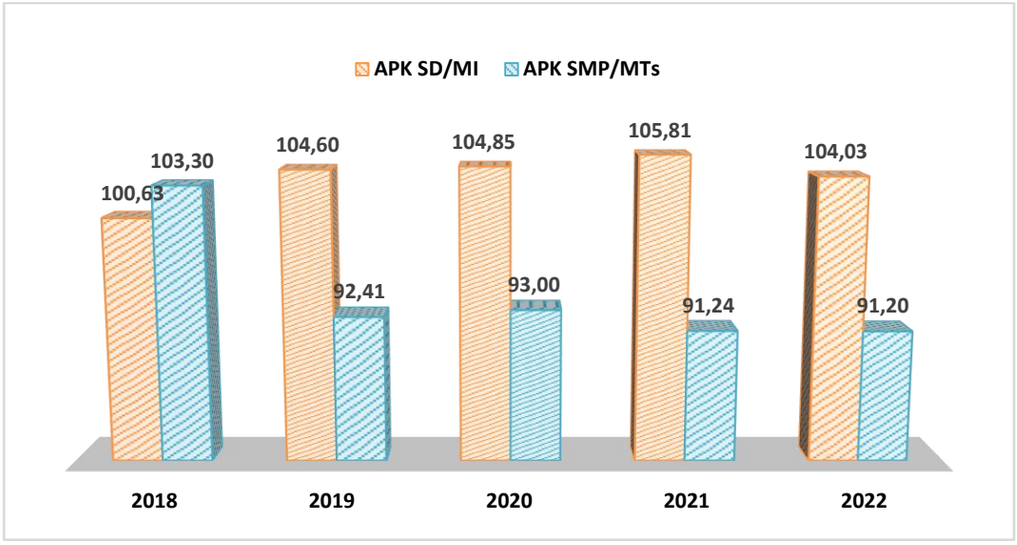
Tabel 2.25
Penyelenggaraan PAUD
di Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Siswa (Jiwa)	22.732	35.996	40.843	25.681	40.064
2.	Jumlah anak usia 4-6 tahun (Jiwa)	60.099	59.245	62.153	42.470	42.332
3.	APK	37,82	60,76	65,71	95,05	94,64

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikut-sertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Angka APK SD/MI Kabupaten Majalengka tahun 2022 (104,03) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 (105,81), dan APK SMP/MTs tahun 2022 (91,20) juga mengalami penurunan dibanding tahun 2021 (91,24). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.14.

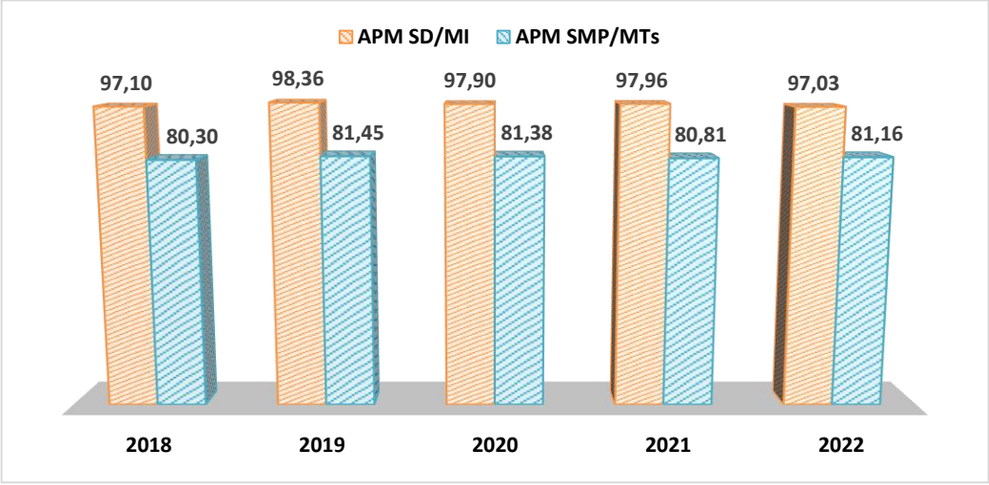
Gambar 2.14
Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Majalengka



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai jumlah siswa yang berusia pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan mayarakat dalam menempuh pendidikan. Status APM SD/MI pada tahun 2022 (97,03) menurun dibanding tahun 2021 (97,96), dan APM SMP/MTs pada tahun 2022 (81,16) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (80,81). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.15.

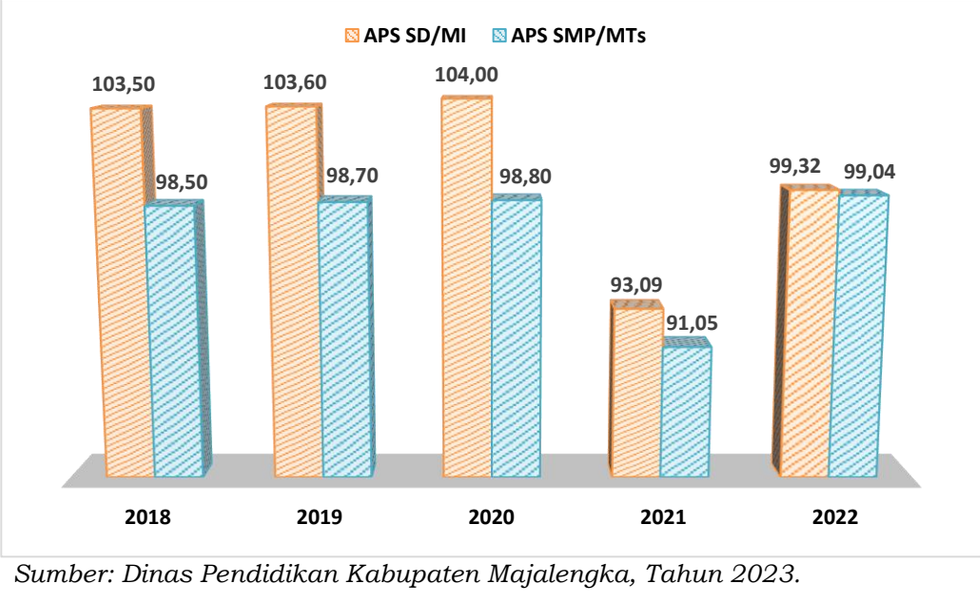
Gambar 2.15
Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Majalengka



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk antara usia muda dengan ukuran pertumbuhan jumlah murid yang ditampung pada setiap jenjang sekolah. Peningkatan jumlah usia sekolah harus diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah dan peningkatan akses masuk sekolah. Adapun perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.16 berikut ini:

Gambar 2.16
Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Majalengka



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Sekolah, salah satu indikator mutu penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengukur capaian Angka Kelulusan para siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Standar maksimal bagi indikator ini adalah 100% siswa lulus. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Majalengka, angka kelulusan pada siswa SD/MI dan SMP/MTs tahun 2022 telah mencapai angka 100%.

Indikator lain dalam mutu penyelenggaraan pendidikan yaitu Angka Melanjutkan siswa SD/MI ke SMP/MTs turun pada tahun 2022 yaitu sebesar 83,50% dibandingkan tahun 2021 sebesar 87,20%, sebaliknya Angka Melanjutkan siswa SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada

tahun 2022 turun yaitu sebesar 84,90% dibandingkan tahun 2021 sebesar 91,10%. Dalam hal kualitas para pengajar, kualitas tenaga pengajar di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 ada penurunan yang diindikasikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV yaitu sebanyak 88,40% dibandingkan tahun 2021 sebesar 99,43%. Data Perkembangan Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru, dapat dilihat pada tabel 2.26 di bawah.

Tabel 2.26
Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	AL SD/MI	99,8	100	100	100	100
2.	AL SMP/MTS	96,8	100	100	100	100
3.	AM SD/MI KE SMP/MTS	99,4	100,00	99,10	87,20	84,97
4.	AM SMP/MTS KE SMA/MA/SMK	90,50	90,80	91,01	91,10	83,58
5.	GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/DIV	90,00	91,49	99,32	99,43	88,40

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Ketersediaan Sekolah, Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Datanya dapat terlihat pada tabel 2.27. sebagai berikut:

Tabel 2.27
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
A	**SD/MI**					
1.	Jumlah gedung sekolah (Unit)	667	668	668	671	674
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (Jiwa)	119.512	121.267	128.534	130.561	131.507
3.	Rasio	1 : 179	1 : 181	1:192	1:194	1:195

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
B	**SMP/MTs**					
1.	Jumlah gedung sekolah (Unit)	104	112	112	121	124
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (Jiwa)	59.980	60.454	63.460	63.866	56.208
3.	Rasio	1 : 576	1 : 539	1:566	1:527	1:453

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Rasio Guru Terhadap Murid, adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.28
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Majalengka

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
A	**SD/MI**					
1.	Jumlah Guru (Jiwa)	6.148	6.120	6.039	5.886	5.766
2.	Jumlah Murid (Jiwa)	122.146	111.538	111.704	112.122	113.337
3.	Rasio	1 : 20	1 : 18	1 : 19	1:19	1:20
B	**SMP/MTs**					
1.	Jumlah Guru (Jiwa)	2.296	2.301	2.315	2.346	2.247
2.	Jumlah Murid (Jiwa)	38.215	38.326	39.516	39.898	39.724
3.	Rasio	1:17	1 : 17	1 : 17	1:17	1:18

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan melalui 3 jenis pelayanan seperti tabel 2.29 dibawah ini.

Tabel 2.29
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target SPM	Capaian SPM
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100%	94,58 %
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100%	95 ,03%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	103,19%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	94,64%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

b. Kesehatan

Angka Kematian Bayi, adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Tabel 2.30
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Angka Kematian Bayi (Permil)
1.	2018	4,01
2.	2019	3,76
3.	2020	3,62
4.	2021	2,29
5.	2022	4,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Angka Kematian Ibu, Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut:

Tabel 2.31
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Angka Kematian Ibu (Permil)
1.	2018	77,32
2.	2019	73,20
3.	2020	66,77
4.	2021	81,07
5.	2022	2,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yaitu suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera.

3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada posyandu.

Karena posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu posyandu melayani 100 balita. Data rasio posyandu dapat dilihat pada tabel 2.32 sebagai berikut:

Tabel 2.32
Perkembangan Rasio Posyandu
di Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Jumlah Posyandu(Unit)	Jumlah Balita (Jiwa)	Rasio Posyandu Per 1000 Balita (Permil)
1.	2018	1.461	94.484	15,46
2.	2019	1.485	92.969	15,97
3.	2020	1.489	91.473	16,27
4.	2021	1.422	6.571	70,32
5.	2022	1.497	98.850	12,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Rasio dan Cakupan Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu, Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksud rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan.

Tabel 2.33

Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dan Poliklinik
Kabupaten Majalengka Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah			
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poliklinik
1.	Lemahsugih	-	2	5	1
2.	Bantarujeg	-	1	3	1
3.	Malausma	-	1	3	-
4.	Cikijing	-	1	2	4
5.	Cingambul	-	1	5	-
6.	Talaga	-	1	3	4
7.	Banjaran	-	1	3	1
8.	Argapura	-	1	3	1

No.	Kecamatan	Jumlah			
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poliklinik
9.	Maja	-	1	5	-
10.	Majalengka	1	2	2	17
11.	Cigasong	-	1	2	5
12.	Sukahaji	-	2	1	1
13.	Rajagaluh	-	1	4	-
14.	Sindangwangi	-	1	3	-
15.	Sindang	-	1	0	-
16.	Leuwimunding	-	1	2	1
17.	Palasah	-	1	2	1
18.	Jatiwangi	-	2	3	8
19.	Dawuan	1	1	1	1
20.	Kasokandel	-	1	1	2
21.	Panyingkiran	-	1	1	1
22.	Kadipaten	-	1	2	4
23.	Kertajati	-	2	8	4
24.	Jatitujuh	-	2	2	4
25.	Ligung	-	1	5	2
26.	Sumberjaya	-	1	3	4
Jumlah		**2**	**32**	**74**	**67**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka dapat diukur berdasarkan indikator kinerja aspek pelayanan umum diantaranya berupa rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per satuan penduduk. Data tersebut dalam kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.34 berikut ini.

Tabel 2.34
Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

No.	Aspek Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	0,11	0,12	0,12	0,12	0,14
2.	Cakupan puskesmas (%)	123,08	123,08	123,08	123,08	79,41
3.	Cakupan puskesmas pembantu (%)	18,66	21,28	21,28	21,28	8,96
4.	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,31	0,38	0,38	0,38	0,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

Rasio Dokter, Sementara itu, untuk jumlah tenaga dokter di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 rasionya sebesar 21,61 terhadap 100.000 penduduk. Pemenuhan tenaga medik untuk dokter umum dan dokter gigi di pelayanan primer sangat berpengaruh pula terhadap pemenuhan SDM kesehatan yang dipersyaratkan oleh BPJS, sehingga berdampak pada besarnya kapitasi yang diterima oleh setiap puskesmas. Sedangkan kebutuhan tenaga medik di RSUD Cideres dan RSUD Majalengka lebih terfokus pada pemenuhan dokter spesialis dibeberapa spesifikasi.

Tabel 2.35
Rasio Dokter terhadap 1.000 Penduduk
Kabupaten Majalengka

No.	Aspek Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio dokter terhadap 1.000 penduduk	0,16	0,21	0,16	0,28	21,61
2.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0,39	0,42	0,30	0,28	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Komplikasi Kebidanan yang ditangani, perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi salah satunya berusaha memperluas pelayanan cakupan komplikasi kebidanan yang harus ditangani. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Kaitannya dengan tingkat pelayanan kesehatan ibu hamil perlu diantisipasi berbagai komplikasi kebidanan yang harus dapat ditangani sehingga berpengaruh pada tingkat keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan data yang diperoleh, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani digambarkan pada tabel 2.36 sebagai berikut:

Tabel 2.36
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
di Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)
1.	2018	118,32
2.	2019	120,24
3.	2020	181,72
4.	2021	103,04
5.	2022	113,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Data menunjukkan bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani selalu mengalami peningkatan dengan kondisi terakhir pada tahun 2022 sebesar 113,27%.

Pertolongan Persalinan, guna meningkatkan IPM, khususnya yang terkait erat dengan indeks kesehatan diantaranya perlu perhatian terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaiannya sebagaimana pada tabel 2.37 berikut:

Tabel 2.37
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)
1.	2018	101,19
2.	2019	103,14
3.	2020	105,22
4.	2021	106,8
5.	2022	100,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Sebagaimana terlihat pada data diatas bahwa pada tahun 2022 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Majalengka terealisasi sebesar 100,69%.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi

berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan**,** Penyebab stunting menurut Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024 disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut secara tidak langsung mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Majalengka berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan pengembangan Kementrian Kesehatan.sebagaimana tertuang pada tabel 2.38 berikut:

Tabel 2.38
Data Prevalensi Stunting
Kabupaten Majalengka 2018 – 2022

No.	Tahun	Prevalensi Stunting (%)
1.	2018	36,62
2.	2019	28,53
3.	2020	n/a
4.	2021	23,00
5.	2022	24,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Cakupan penemuan penyakit TBC BTA dan HIV/AIDs di Kabupaten Majalengka, Pemangku kepentingan tingkat Nasional telah menetapkan strategi dan rencana aksi untuk mencapai Indonesia bebas AID, Tuberkolusis dan Malaria pada tahun 2030. Perkembangan penanganan penyakit menular tersebut di Kabupaten Majalengka telah dilaksnakan sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan data sebagaimana tersaji dalam tabel 2.39 di bawah ini.

Tabel 2.39
Cakupan Penemuan Penyakit TBC dan AIDs
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (%)	40,92	73,5	58,60	52,10	93,50
2.	Orang dengan AIDs	62	93	86	112	157

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana umum merupakan salah satu kebutuhan pendukung pembangunan daerah yang pemenuhannya akan sangat berdampak pada kinerja pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun pemerintahan.

Kondisi Jalan, berdasarkan data terbaru panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka tahun 2022 adalah 654,40 Km, data selengkapnya bisa dilihat pada tabel 2.40 berikut ini.

Tabel 2.40
Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam) (%)	87,99	53,82	63,17	75,79	71,23
	- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam) (Km)	629,69	494,45	580,35	696,28	654,40
	- Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	918,72	918,73	918,73	918,73	918,73
2.	Panjang Jalan dilalui roda 4 (Km)	918,72	918,73	918,73	918,73	918,73

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan Permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (Km)	918,72	918,73	918,73	918,73	918,73

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Kondisi Jaringan Irigasi, kondisi bangunan air di Kabupaten Majalengka terdiri dari Bendung, Bangunan Air, Saluran, Bangunan Pelengkap dan Bangunan Fasilitas. Kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.41 di bawah ini.

Tabel 2.41
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Irigasi Kabupaten kondisi baik (%)	76,30	76,30	76,77	77,32	75,51

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Penataan Ruang, untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang, antara lain adalah ketaatan terhadap RTRW serta rasio bangunan ber IMB. Realisasi kinerja pembangunan di bidang penataan ruang dapat dilihat pada tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42
Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	83,67	83,67	90	90	54,02
2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	6,26	6,52	6,70	6,81	6,89

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Urusan Pekerjaan Umum melalui 2 jenis pelayanan seperti tabel 2.43 dibawah ini.

Tabel 2.43
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	80,89%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	69,65%

Sumber: LKPJ Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi Perumahan, kondisi rumah tinggal dan rumah tangga di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.44 dibawah. Pada Tahun 2022 jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 324.240 Kepala Keluarga dengan persentase sebesar 69,76%. Sedangkan rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 376.106 Kepala Keluarga.

Tabel 2.44
Kondisi Perumahan Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Rumah tinggal bersanitasi (%)	65,14	68,47	68,49	69,62	69,76
2.	Rumah tangga bersanitasi (KK)	298.452	313.730	314.205	323.565	324.240
3.	Rumah tangga pengguna air bersih (KK)	339.851	367.774	368.626	374.699	376.106
4.	Persentase Penduduk berakses airminum (%)	74,17	80,27	80,45	80,62	80,92
5.	Cakupan pelayanan air bersih yang bersumber dari mata air(KK)	831	430	378	425	1.900

Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

Rumah Layak Huni, Tahun 2022 jumlah rumah layak huni sebanyak 373.386 unit dengan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk sebesar 95,63%. Lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut ini.

Tabel 2.45
Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rumah Layak Huni (unit)	364.991	345.972	347.196	349.784	373.386
2.	Rasio Rumah Layak Huni (%)	94,98	94,63	94,93	95,63	96,24
3.	Rasio permukiman layak huni (%)	99,39	99,60	99,05	99,05	99,85
4.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,070	0,050	0,050	0,050	0,147

Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat melalui 5 jenis pelayanan seperti tabel 2.46 dibawah ini.

Tabel 2.46
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	47	47
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
	Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten			
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	47	47
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	47	47

Sumber: LKPJ Kabupaten Majalegka Tahun 2021.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan capaian pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut:

Tabel 2.47
Indikator Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,20	2,10	2,19	2,12	1,93
2.	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	26,82	26,22	26,22	25,91	19,61
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	6,10	6,10	3,86	7,97	7,97
4.	Penegakan PERDA	96,92%	95,04%	95,59%	95,02%	91,5%
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	3.430	3.430	3.430	3.430	2.620

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
8.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67
9.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	54,62	31,78	51,19	55,88	45,45

Sumber: Satpol PP & Damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas melalui 2 jenis pelayanan seperti tabel 2.48 dibawah ini.

Tabel 2.48
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Trantibumlinmas Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: Satpol PP & Damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

f. Sosial

Pada Tahun 2022, Kabupaten Majalengka memiliki sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 111 unit. Secara lengkap data penanganan masalah sosial di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.49 berikut ini.

Tabel 2.49
Data Penanganan Masalah Sosial
Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	135	111	36	107	111
2.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	135,11	91,67	83,70	121,90	38,07

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial melalui 5 jenis pelayanan seperti tabel 2.50 dibawah ini:

Tabel 2.50
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Sosial Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	5.026 orang	1.267 orang
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	200.883 orang	84.338 orang
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	35.022 orang	6.129 orang
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	18 orang	7 orang
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	8.368 orang	8.368 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 66,21%. Ini berarti dari 100 penduduk Majalengka usia 15 tahun ke atas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu.

Tingkat Pengangguran Terbuka, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

1. Pengangguran Terselubung *(Disguised Unemployment)* adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur *(Under Unemployment)* adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini

merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

3. Pengangguran Terbuka *(Open Unemployment)* adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

   Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 sebesar 4,16% menurun sebesar 1,55% dari tahun 2021sebesar 5,71%.

Data situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Majalengka secara lengkap bisa dilihat pada tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51
Data Situasi Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*)	%	65,76	67,97	69,66	67,63	66,21
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka *)	%	4,95	4,37	5,84	5,71	4,16
3.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja per tahun	Kasus	9	2	10	2	15
4.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	39,06	70,90	49,41	20,59	16,89
5.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Balai Latihan Kerja	Unit	2	2	2	16	15
7.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	Buah	126	63	55	55	30
8.	Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri	Orang	124	2.909	655	415	2.129
9.	Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing	Perusahaan	12	18	20	20	17
10.	Jumlah Pekerja Warga Negara Asing	Orang	112	112	157	161	185

Sumber: Dinas K2UKM dan BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Perbandingan angka Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.52 berikut ini:

Tabel 2.52
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	4,95	4,37	5,48	5,71	4,16
Jawa Barat	8,17	7,99	7,69	9,82	8,31
Nasional	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Secara umum perkembangan TPT pada lima tahun terakhir di Kabupaten Majalengka cukup bagus, ini ditandai dengan angka TPT yang selalu berada di bawah angka Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan perempuan sebagai pejabat terpilih baik dalam ranah pelayanan publik, departemen, komisi-komisi nasional dan peradilan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2021 sebesar 53,54%, angka ini merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai dampak positif meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender, diharapkan keberpihakan terhadap hasil-hasil peraturan yang responsif gender pun semakin meningkat.

Rasio KDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada Tahun 2021 dari 471.201 rumah tangga terdapat 3 kasus kekerasan rumah tangga.

Selain KDRT, hal lain yang diperhatikan adalah penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, unsur medis, penyadaran masyarakat, kerjasama dengan pihak lain (Kepolisian, LSM, Ormas). Sedangkan proses penanganan terhadap kasus tindak kekerasan perempuan secara garis besar meliputi penerimaan laporan atau pengaduan dari korban, pembuatan berita acara kronologis kejadian, upaya konseling dilakukan dengan memberikan pembinaan antara pihak yang bertikai sebagai alternatif pemecahan masalah. Pada tahun 2021 terdapat 20 laporan/pengaduan tindakan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka dan laporan/pengaduan tersebut telah ditangani sebanyak 100%.

c. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak asasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun. Dalam hal ini petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu. Capaian ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.53 berikut:

Tabel 2.53
Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka

No.	Data	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
A.	**Ketersediaan dan Cadangan Pangan**						
1.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita						
	- Ketersediaan Energi	Kkal/ Kapita/Hari	2.651,43	2.627,22	2.540,04	2.735,80	2.650,98
	- Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	90,06	83,83	74,85	85,95	82,69
	- Skor PPH Ketersediaan	%	87,00	86,90	93,80	94,00	88,60
B.	**Distribusi dan Akses Pangan**						
1.	ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	100	100	100	100	100
2.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100	100	100	100	100
C.	**Penganekaragaman dan Keamanan Pangan**						
1.	Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	100	100	100	100	100
2.	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Ton	20	20	74	53,6	43
3.	Ketersediaan Pangan (LPM)	Unit	128	130	141	145	172

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Saat ini otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan

hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Saat ini menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penegakan hukum lingkungan, diantaranya yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kegiatan atau usaha di Kabupaten Majalengka telah membuat dokumen lingkungan sesuai dengan yang diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya belum semua usaha atau kegiatan memiliki dokumen lingkungan.

Sampai saat ini di Kabupaten Majalengka belum ada usaha atau kegiatan yang mendapat sanksi berat karena melanggar hukum lingkungan. Pembinaan dan sosialisasi peraturan terus dilaksanakan agar pelaku kegiatan atau usaha dapat melaksanakan kegiatan atau usahanya tapi tetap menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya, sehingga ekonomi hijau dapat terlaksana. Terkait pengolahan sampah mengantisipasi berkembangnya Kawasan Rebana maka akan direncanakan akan dilakukan rehabilitasi TPA Heuleut di Kecamatan Kadipaten yang pembiayaannya direncanakan dari Pemerintah sumber dana Pinjaman Luar Negeri. Kabupaten Majalengka telah mempersiapkan lahan yang sudah bersertifikat, Rencana Induk dan Kajian UKL/UPL. Capaian pembangunan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 2.54 berikut:

Tabel 2.54
Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

No.	Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase penanganan sampah (%)	32,89	33,46	35,15	34,3	34,3
2.	Persentase cakupan area pelayanan Persampahan (%)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
3.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (poin)	50	50	50	50	47,14
4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (poin)	71,94	84,49	87,65	87,31	88,71
5.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50,96	50,97	50,97	50,97	50,97
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,63	61,82	67,87	62,76	64,81
7.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (Titik)	352	352	352	352	352
6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL-UKL/SPPL	34,67	24,21	27,50	89,47	95,50
7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	80,49	80,49	82,21	83,31	95,74

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

e. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan dalam kependudukan dan pencacatan sipil seiring dengan waktu mengalami kemajuan baik dalam hal manajemen dan pelaksanaan secara teknis. Dalam urusan kependudukan dan cacatan sipil sudah sangat memasyarakat dengan istilah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia. Dalam KTP terdapat Nomor Induk

Kependudukan (NIK), nomor tersebut sifatnya unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang. Kemudian dokumen kependudukan lainnya berupa Akte Lahir dan Kartu Keluarga yang kedudukannya sama pentingnya dengan KTP, jadi seluruh warga masyarakat sudah seharusnya mengindahkan dokumen-dokumen tersebut.

Tabel 2.55
Capaian Pembangunan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%)	100	100	100	70,6	100
2.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	90	98,70	98,00	99,1	99,86
3.	Ratio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	71,50	73,40	98,00	99,13	73,97
4.	Penerapan KTP Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)	62,90	78,64	95,80	97,00	99,20
6.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (%)	3	74,74	100	100	100
7.	Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka tahun 2022 menunjukkan bahwa Posyandu aktif di Kabupaten Majalengka adalah 1.500 posyandu, angka tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat sehingga salah satu kebutuhan masyarakat mendapat pelayanan dari pemerintah dapat ditangani dengan baik. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kapasitas motor penggerak (para kader) pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang

dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pemberdayan masyarakat. Pola hubungan antara aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara hakiki.

Indikator mengenai pencapaian urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 2.56 berikut:

Tabel 2.56
Perkembangan Posyandu dan Kelompok PKK
Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Posyandu Aktif (unit)	1.461	1.485	1.489	1.491	1.500
	Jumlah Seluruh Posyandu (unit)	1.461	1.485	1.489	1.491	1.500
	Persentase Posyandu aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah PKK Aktif (kelompok)	330	330	330	330	370
	Jumlah Seluruh PKK (kelompok)	330	330	330	330	370
	Persentase PKK aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah Desa yang Meningkat Status Perkembangannya	109	52	164	188	55

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.57
Perkembangan Desa Mandiri
Kabupaten Majalengka

No.	Status Desa	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Desa Mandiri	2	2	23	63	96
2.	Desa Maju	30	58	126	180	202
3.	Desa Berkembang	246	254	181	87	32
4.	Desa Tertinggal	52	16	0	0	0
5.	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka mencatat rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Majalengka sebesar 2,17 pada tahun 2022, angka itu sudah tergolong baik dikarenakan masyarakat kini mulai paham bahwa program KB itu bukan semata untuk membatasi jumlah anak, tapi mengatur jarak kelahiran bayi.

Rasio Akseptor KB, program KB memiliki dampak positif dalam membantu penurunan angka kematian ibu, epidemi HIV/AIDS, meningkatkan mutu gender, dan mempromosikan pendayagunaan kaum muda. Jika tiap keluarga mempunyai anak dua atau tiga orang, berarti program KB sudah berhasil. Rasio akseptor KB pada Tahun 2022 sebesar 80,02%.

Tabel 2.58
Indikator Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka

No.	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,14	1,13	2,32	2,32	2,17
2.	Rasio akseptor KB (%)	78,37	79,94	79,77	79,99	80,02

Sumber: Dinas P3AKB Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

h. Perhubungan

Saat ini Kabupaten Majalengka memiliki 7 (tujuh) terminal bis, yaitu di Kecamatan Cikijing, Cigasong, Rajagaluh, Kadipaten, Maja, Talaga dan Bantarujeg. Dengan berdirinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati akan memerlukan pembangunan terminal terpadu untuk menjamin aksesibilitas angkutan umum dari kota-kota di sekitarnya ke Bandara. Untuk mewujudkan itu perlu disusun kajian terpadu dengan tetap mengacu kepada master plan kebandaraan, RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 dan RDTR.

Indikator lainnya mengenai urusan perhubungan/kondisi perhubungan di kabupaten majalengka akan dibahas pada tabel 2.59 di bawah ini sebagai capaian pembangunan urusan perhubungan.

Tabel 2.59
Kondisi Perhubungan
Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio izin trayek	poin	1:19	1:19	1:7	1:4	1:17
2.	Jumlah uji kir angkutan orang dan barang	unit	14.615	14.772	13.141	11.709	9.516
3.	Jumlah uji kir angkutan orang	unit	3.021	2.293	1.708	1.382	1.237
4.	Pemasangan Rambu-rambu	persen	38,34	40,57	41,48	45,40	45,59
5.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	juta orang	10,01	8,49	4,75	2,16	1,51

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Terkait dengan durasi waktu atau lamanya proses pengujian kendaraan tersebut, dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki dan dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, maka lamanya waktu yang diperlukan dalam pengujian dimaksud adalah 15 menit, dimulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan pengujian dan penyampaian hasil uji kendaraan.

Tabel 2.60
Jumlah Kendaraan Yang diuji
di Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan yang diuji (Unit)
1.	2018	14.615
2.	2019	14.772
3.	2020	13.141
4.	2021	11.713
5.	2022	10.753

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Berdasarkan data tahun 2022 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 1:6,66. Sedangkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum mengalami kenaikan sebanyak 2.161.147 jiwa dari 1.445.400 jiwa pada tahun 2021 menjadi 3.606.547 jiwa pada tahun 2022. Sedangkan Jumlah orang/barang melalui terminal pertahun pada tahun 2022 tercatat sebanyak 757.375 jiwa.

Tabel 2.61
Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka

No.	Indikator Perhubungan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 6,63	1 : 6,63	1:6.65	1:7.00	1:6,66
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (jiwa)	10.496.181	9.167.040	2.619.360	1.445.400	3.606.547
3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun (Jiwa)	2.599.446	2.291.760	654.840	307.800	757.375

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

i. Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun 2022, seluas 100% wilayah di Kabupaten Majalengka telah tercakup layanan telekomunikasi, selain itu Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai website telah mencapai 100%.

Indikator selengkapnya atas capaian urusan komunikasi dan informasi secara lengkap disajikan pada tabel 2.62 dibawah.

Tabel 2.62
Indikator Capaian Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai website (%)	100	100	100	100	100
2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	20	23	59	17	23
3.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	59.3	65.28	74.75	98.54	94.46

Sumber: Diskominfo Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.63
Jumlah Tower Telekomunikasi
di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Provider	Jumlah (Unit)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Telkomsel	63	62	62	17	1
2.	TBG	55	66	78	83	93
3.	Protelindo	42	48	57	59	59
4.	XL	17	17	5	2	2
5.	Indosat	12	12	8	8	8
6.	SIP	3	5	3	3	11
7.	Mitratel (Telkom Akuisisi ke Mitratel)	5	30	48	93	112
8.	Java Indoku	-	-	-	-	-
9.	Reka Cipta	-	-	-	-	-
10.	WMI, dll	41	-	-	-	5
11.	STP	12	10	13	13	10
12.	Indosiar	1	1	1	1	1
13.	Centratama	-	2	9	9	9
14.	IBS	8	8	12	13	5
15.	Metro TV	-	1	1	1	2
16.	Lasmana Swasti Prashida	-	1	1	5	1
17.	Hutchison 3 Indonesia	-	-	2	2	5
Total		**259**	**263**	**300**	**309**	**324**

Sumber: Diskominfo Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Majalengka telah di bentuk melalui Keputusan Bupati Majalengka Nomor 048/Kep.162-Kominfo/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka PPID berperan dalam:

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
2. Mengembangkan Sistem Layanan Informasi;
3. Meningkatkan Sinergitas dengan Sumber Informasi.

Pada Tahun 2020 telah terbentuk PPID Pembantu di semua Perangkat Daerah dan Kecamatan dalam kendali Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagai Ketua PPID Kabupaten.

j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah koperasi pada tahun 2022 sebanyak 565 unit dengan rincian dapat dilihat pada tabel 2.64 berikut ini.

Tabel 2.64
Jumlah Koperasi Yang Masih Aktif
Di Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	KUD	26	26	26	26	26
2.	Non KUD	453	460	469	536	539
3.	Jumlah Koperasi	479	486	495	562	565
4.	Jumlah Koperasi Aktif	164	118	185	250	253

Sumber: Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Data tahun 2022 menunjukan bahwa dari 565 unit koperasi ternyata yang masih aktif hanya 253 unit sehingga diperlukan upaya untuk mengaktifkan kembali koperasi yang sudah terbentuk.

Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 tercatat berjumlah 28.730 unit.

Tabel 2.65
Jumlah UMKM
Di Kabupaten Majalengka

No.	Kategori	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Unit	29.518	31.370	28.729	29.075	74.432

Sumber: Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

k. Penanaman Modal

Selama periode 2018-2022, nilai investasi di Kabupaten Majalengka meningkat cukup signifikan, yaitu dari Rp. 1,289 triliyun pada tahun 2018, menjadi Rp 15,597 trilyun pada tahun 2022. Peningkatan pesat nilai investasi ini disebabkan karena banyaknya perusahaan-perusahan baru yang bermunculan baik perusahaan skala kecil, menengah maupun perusahaan besar yang berinvestasi di Majalengka. Perkembangan jumlah nilai investasi serta jumlah dan kategori perusahaan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.66 di bawah ini.

Tabel 2.66
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Majalengka

No.	Kategori Perusahaan	Tahun (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perusahaan Mikro &Kecil	142.767,00	54.131,00	82.988.100	221.794,02	1.353.416,387
2.	Perusahaan Menengah	89.838,573	12.867.778	58.632.185	645.987,50	437.937,037
3.	Perusahaan Besar	1.056.017,82	2.026.479,36	2.254.559,76	4.223.801,46	13.805.755,956
Jumlah		**1.288.623,38**	**2.093.478,14**	**2.396.180,04**	**5.091.582,98**	**15.597.109,38**

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

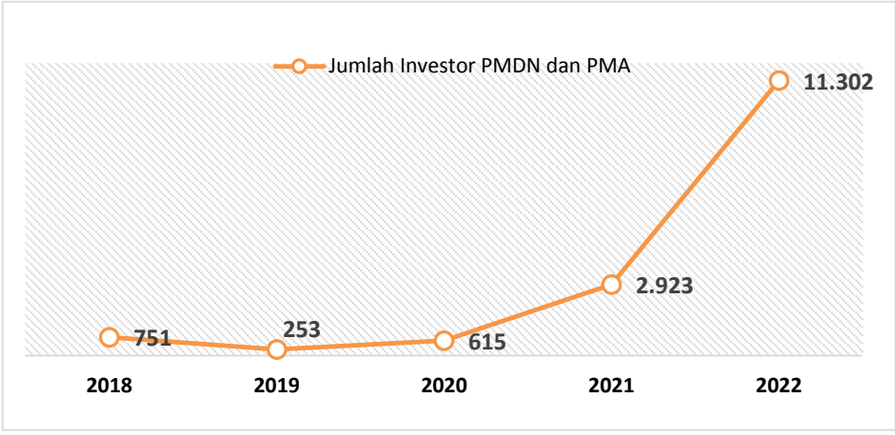
Tabel 2.67
Data Kategori Perusahaan
Di Kabupaten Majalengka

No.	Kategori Perusahaan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perusahaan Mikro dan Kecil	696	253	544	2.488	10.464
2.	Perusahaan Menengah	46	8	28	402	323
3.	Perusahaan Besar	9	18	42	33	515
Jumlah		**751**	**253**	**615**	**2.923**	**11.302**

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Perkembangan jumlah investor PMDN dan PMA pada kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 2.17 berikut ini.

Gambar 2.17
Perkembangan Jumlah Investor PMDN dan PMA
Kabupaten Majalengka



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

l. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan.

Demikian halnya dengan olah raga, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olah raga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Tabel 2.68
Jumlah Prasarana Olahraga
di Kabupaten Majalengka

No.	Jumlah Prasarana Olahraga	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Lapangan Bola Voli	1.002	1.418	1.418	1.418	1.418
2.	Lapangan Bola Basket	92	92	92	92	92
3.	Lapangan Tenis	25	22	22	22	22
4.	Lapangan Futsal	65	65	65	65	65
5.	Stadion Sepak Bola	1	1	1	1	1
6.	Stadion Atletik	-	-	-	-	-
7.	Lapangan Bulu Tangkis	251	931	931	931	931
8.	Gedung Olahraga	34	26	26	26	26
9.	Kolam Renang	23	24	24	24	24
10.	Sasana Tinju/Beladiri	1	1	1	1	1
11.	Velodrome	-	-	-	-	-
12.	Arena Bowling	-	-	-	-	-
13.	Rumah Billiard	5	5	5	5	5
14.	Lapangan Olahraga Terbuka	305	305	305	305	305

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.69
Perkembangan Indikator Olahraga dan Kepemudaan
Kabupaten Majalengka

No.	Capaian Pembangunan	Satuan	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	60	60	63	63
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	6	3	4	5
3.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	26	33	18	36
4.	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	87	128	70	139
5.	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	97	125	97	70
6.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	42	2	9	26
7.	Jumlah prestasi olahraga	Kali	42	2	9	84

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

m. Statistik

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah statistik. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik adalah ketersediaan buku "Kabupaten Dalam Angka" dan "PDRB Kabupaten" yang selama ini telah berhasil terpenuhi. Hanya saja untuk tahun 2021, dikarenakan adanya refocusing anggaran, buku "PDRB Kabupaten" tidak tersedia.

Tabel 2.70
Ketersediaan Dokumen Statistik
Kabupaten Majalengka

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada (Belum Terintegrasi)	ada (Belum Terintegrasi)	ada (Belum Terintegrasi)	Ada (Belum Terintegrasi)	Ada (Belum Terintegrasi)

Sumber: Diskominfo & BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

n. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu: (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Selama 2018-2022, setiap tahunnya dilaksanakan Festival Seni dan Budaya yang diharapkan dapat melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia. Selain itu, dilaksanakan pula pelestarian benda dan situs budaya sebagaimana pada tabel 2.71.

Tabel 2.71
Kegiatan Bidang Kebudayaan
Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	3	2	15	12
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	125	125	125	125	240
3.	Jumlah Total Benda, Situs & Kawasan yang dimiliki daerah	3	3	3	105	105
4.	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	-	-	-	3	3
5.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Kendala yang masih dihadapi Kabupaten Majalengka dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya adalah belum ditunjang dengan adanya sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif.

o. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Tabel 2.72
Data Perpustakaan
Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah perpustakaan (Unit)	1.497	1.497	1.171	1.753	1753
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	9.705	10.571	2.540	2.887	24.254

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Buku)	40.331	40.331	39.861	41.831	33.843
4.	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki sertifikat (Orang)	1	3	5	6	5
5.	Jumlah seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai (Orang)	4	4	5	6	5

Sumber: Dinas Arsip & Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

p. Kearsipan

Kinerja pengelolaan arsip daerah dapat diukur dari capaian realisasi atas target yang telah ditetapkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.73 sebagaimana berikut.

Tabel 2.73
Data Kinerja Kearsipan
Kabupaten Majalengka

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pembinaan Tata Kearsipan ke OPD dan Kecamatan (%)	20,75	32,14	16,55	56,00	63,00
2.	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Kegiatan)	3	3	3	2	2
3.	Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku (%)	20,75	32,14	24,07	25,06	26,79

Sumber: Dinas Arsip & Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Pariwisata Kabupaten Majalengka mengalami kemajuan seiring telah dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, dan untuk menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten Majalengka telah dilalui oleh Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan rencananya akan terhubung dengan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang –

Dawuan (Cisumdawu) yang sudah mulai dibangun pada tahun 2012. Untuk itu dilakukan terobosan pengembangan objek-objek wisata baru sebagai stimulator dan inspirasi geliat kompetitif objek-objek wisata lama yang bervariatif.

Berbagai promosi dan penataan objek wisata yang ada di Kabupaten Majalengka telah dilakukan selama periode 2018-2022, hasilnya sudah mulai terlihat yaitu dengan meningkatnya kunjungan wisata. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata di Majalengka bertambah sangat signifikan dibandingkan lima tahun terakhir. Akan tetapi jumlah kunjungan wisata pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan Pandemi Covid 19, yang berimbas pada berkurangnya PAD sektor wisata di tahun yang sama, namun pada tahun 2021 mulai naik lagi dibandingkan tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.74 berikut:

Tabel 2.74
Indikator Capaian Kepariwisataan
Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kunjungan wisata	529.574	701.335	375.000	472.906	818.543
2.	PAD Sektor Wisata (Juta Rupiah)	150,00	152,72	64,2	59,8	65,3
3.	Jumlah Hotel	15	17	18	24	27
4.	Jumlah Kamar	401	505	512	641	649
5.	Jumlah Rumah Makan/Restoran	151	135	-	156	156

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

b. Pertanian

Luas Kabupaten Majalengka adalah 120.424 Ha, terdiri atas lahan sawah pada tahun 2022 sebesar 49.465 Ha dan lahan bukan sawah 70.959 Ha. Untuk luas bukan sawah didominasi oleh lahan tegal/kebun sebesar 23.958 Ha.

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditas unggulan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Majalengka terdiri atas:

a) **Padi**

Luas tanam Padi pada tahun 2021 sebesar 103.102 hektar **naik** menjadi 118.480 hektar pada tahun 2022, luas panen padi pada tahun 2021 sebesar 104.849 hektar **naik** menjadi 116.040 hektar pada tahun 2022. Naiknya Luas panen padi berimbas kepada hasil produksi dimana pada tahun 2021 sebesar 681.664 ton **naik** menjadi 773.775 ton pada tahun 2022. Sentra padi tersebar di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Kasokandel, dan Lemahsugih

b) **Jagung**

Luas tanam jagung pada tahun 2021 sebesar 15.907 hektar **naik** menjadi 15.967 hektar pada tahun 2022, luas panen pada tahun 2021 sebesar 15.548,34 hektar **naik** menjadi 17.819 hektar pada tahun 2022. Naiknya luas panen jagung berimbas kepada hasil produksi dimana pada tahun 2021 sebesar 118.795 ton **naik** menjadi 138.074 ton pada tahun 2022. Sentra tanaman jagung tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Majalengka, dan Malausma.

c) **Kedelai**

Luas tanam kedelai pada tahun 2021 sebesar 598 hektar **naik** menjadi 1.771 hektar pada tahun 2022, luas panen pada tahun 2021 sebesar 417,23 hektar **naik** signifikan menjadi 2.552 hektar pada tahun 2022. Naiknya luas panen kedelai berimbas kepada hasil produksi dimana pada tahun 2021 sebesar 668 ton **naik** menjadi 4.440 ton pada tahun 2022. Sentra kedelai tersebar di Kecamatan Jatiwangi, Kasokandel, Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Palasah, Ligung, Kertajati dan Sukahaji.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas pangan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.75
Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Padi	120.528	97.977	123.724	103.102	118.480
2.	Jagung	15.967	18.120	19.477	15.907	15.967
3.	Kedelai	1.771	3.036	1.492	598	1.771

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.76
Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Padi	117.858	111.724	110.199	104.849	116.040
2.	Jagung	17.819	18.911	19.533,52	15.548,34	17.819
3.	Kedelai	2.552	1.284	2.922,68	417,23	2.552

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.77
Produksi Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Padi	781.285	722.411	724.834	681.664	773.775
2.	Jagung	138.074	146.130	150.647	118.795	138.074
3.	Kedelai	4.440	2.152	4.977	668	4.440

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura, Komoditas unggulan tanaman hortikultura khususnya sayuran terdiri atas:

a) **Bawang Merah**

Luas tanam pada tahun 2021 seluas 3.067 hektar **turun** menjadi 2.614 hektar pada tahun 2022, luas panen pada tahun 2021 seluas 2.873 Hektar **turun** menjadi 2.658 hektar pada tahun 2022, produksi pada tahun 2021 sebesar 34.068,38 ton **naik** menjadi sebesar 34.504 ton pada tahun 2022. Sentra bawang merah tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Ligung, Kertajati, Jatitujuh dan Majalengka.

b) **Cabai Besar**

Luas tanam pada tahun 2021 seluas 665,6 hektar **turun** menjadi 185 hektar pada tahun 2022, luas panen seluas 513 hektar pada tahun 2021 **turun** menjadi 234 hektar pada tahun 2022, sedangkan produksi pada tahun 2021 sebesar 9.848,22 ton **turun** menjadi sebesar 3.036 ton pada tahun 2022. Sentra cabai tersebar di Kecamatan Kertajati, Ligung, Lemahsugih, Bantarujeg dan Banjaran.

c) **Kentang**

Pada tahun 2021 luas tanam 317 hektar **turun** menjadi 266 hektar pada tahun 2022, dengan luas panen tahun 2021 sebesar 329 hektar **turun** menjadi 227 hektar pada tahun 2022, dengan produksi pada tahun 2021 sebesar 5.645,4 ton **turun** menjadi 4.079 ton pada tahun 2022. Sentra kentang di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Lemahsugih dan Cikijing.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas tanaman holtikultura tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.78
Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bawang Merah	2.747	2.953	2.540	3.067	2.614
2.	Cabai Besar	739	579	587	665,6	185
3.	Kentang	258	261	380	317	266

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.79
Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bawang Merah	2.676	2.943	2.742	2.873	2.658
2.	Cabai Besar	724	780	669	513	234
3.	Kentang	230	237	393	329	227

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.80
Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bawang Merah	31.981	37.973	35.166,80	34.068,30	34.504
2.	Cabai Besar	13.053	12.467	7.282,60	9.848,22	3.036
3.	Kentang	3.601	4.193	7.255,90	5.645,40	4.079

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

2. Komoditas Unggulan Buah-buahan

Komoditas unggulan buah-buahan terdiri atas :

a) **Mangga**

Luas tanam Mangga pada tahun 2021 seluas 11.098,20 hektar, **naik** pada tahun 2022 menjadi 11.131,6 hektar, luas panen pada tahun 2021 seluas 4.911,22 hektar, **turun** menjadi

4.166,97 hektar pada tahun 2022 dan produksi pada tahun 2021 sebesar 65.283,43 ton **turun** menjadi 44.754,69 ton pada tahun 2022. Sentra mangga berada di Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Ligung dan Kertajati.

b) **Durian**

Luas tanam Durian pada tahun 2021 seluas 2.369,56 hektar **turun** pada tahun 2022 menjadi 2.203,84 hektar, luas panen pada tahun 2021 seluas 640,66 hektar **naik** menjadi 952,83 hektar pada tahun 2022, dan produksi pada tahun 2021 sebesar 5.940,7 ton **naik** menjadi 11.263,46 ton pada tahun 2022. Sentra durian di Kecamatan Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding dan Sindang.

c) **Jambu Biji**

Pada tahun 2021 luas tanam 651,05 hektar **naik** menjadi 655,53 hektar pada tahun 2022, luas panen pada tahun 2021 seluas 251,00 hektar **turun** menjadi 245,37 hektar pada tahun 2022, dan produksi pada tahun 2021 sebesar 3.180,3 ton **naik** menjadi 3.618,46 ton pada tahun 2022.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas tanaman buah-buahan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.81
Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-buahan
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mangga	11.131,60	11.081,20	11.092,09	11.098,2	11.131,6
2.	Durian	2.203,84	2.267,55	2.294,74	2.369,56	2.203,84
3.	Jambu Biji	655,53	651,65	651,47	651,05	655,53

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.82
Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mangga	4.166,97	307,31	4.673,11	4.911,22	4.166,97
2.	Durian	952,83	623,97	551,43	640,66	952,83
3.	Jambu Biji	245,37	287,18	240,73	251,00	245,37

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.83
Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mangga	44.754,69	54.887,24	52.210,60	65.283,43	44.754,69
2.	Durian	11.263,47	7.369,29	8.889,90	5.940,70	11.263,46
3.	Jambu Biji	3.618,46	2.943,63	2.803,60	3.180,30	3.618,46

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Cakupan Bina Kelompok Petani, Kabupaten Majalengka sebagai kabupaten agribisnis sangat dipengaruhi oleh keberadaan bahan baku dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penentu daya saing produk agribisnis. Dari kedua komponen tersebut sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan atau keberhasilan pemerintah yang potensinya sebagian besar didapat dari pertanian, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahunnya selalu mengalokasikan kegiatan yang berbasis pada informatika seperti pada tabel 2.84 di berikut ini.

Tabel 2.84
Cakupan Bina Kelompok Petani
Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Cakupan Bina Kelompok Petani (kelompok)
1.	2018	2.297
2.	2019	2.286
3.	2020	2.200
4.	2021	2.852
5.	2022	2.363

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

c. Perdagangan

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat, fasilitas perdagangan di Kabupaten Majalengka mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, antara lain bisa dilihat dengan semakin banyaknya pasar/toko swalayan milik masyarakat yang berdiri. Fasilitas perdagangan lainnya yaitu pasar Pemda sebanyak 5 unit yang kondisi fisiknya semakin membaik, dan pasar desa tercatat 39 unit pada tahun 2022.

Tabel 2.85
Jumlah dan Jenis Pasar di Majalengka

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pasar Pemda	4	4	4	5	5
2.	Pasar Sindangkasih Cigasong					
	- Kios	430	430	430	430	580
	- Ruko / Toko	35	35	35	35	37
	- Los / Auning	31/130	31/130	31/130	31/130	80
	- Emprakan	140	140	140	140	106
3.	Pasar Prapatan					
	- Kios	158	158	158	158	468
	- Ruko / Toko	-	-	-	-	243
	- Los / Auning	310	310	310	310	786
	- Emprakan	292	292	292	292	285
4.	Pasar Talaga					
	- Kios	210	210	210	210	234

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	- Ruko / Toko	28	28	28	28	28
	- Los / Auning	200	200	200	200	342
	- Emprakan	174	175	175	175	166
5.	Pasar Kadipaten					
	- Kios	171	171	171	171	206
	- Ruko / Toko	50	50	50	50	53
	- Los / Auning	701	701	701	701	1.080
	- Emprakan	164	164	164	164	89
6.	Jumlah Pasar Desa	39	39	39	38	39
7.	Jumlah Pasar Modern	N/A	110	110	165	188

Sumber: Dinas Perdagin Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

d. Perindustrian

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan dan mencapai 25,15% dari seluruh sektor PDRB pada tahun 2022. Ini menandakan berbagai jenis industri di Majalengka mulai tumbuh dan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya jenis-jenis industri yang ada di Kabupaten Majalengka disajikan dalam tabel 2.86 berikut:

Tabel 2.86
Jenis Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Majalengka
Tahun 2018-2022

NO.	JENIS INDUSTRI	JUMLAH IKM				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Makanan	672	724	769	804	882
2	Industri Minuman	3	5	5	7	8
3	Industri Pengolahan Tembakau	17	16	16	16	15
4	Industri Tekstil	43	40	40	59	62
5	Industri Pakaian Jadi	185	193	193	204	208
6	Industri Kulit, Batrang Kulit dan Alas Kaki	8	8	8	7	7
7	Industri Kayu, Barang Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture)	135	135	135	151	151
8	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	2	2	2	2	2
9	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	-	-	-	2
10	Industri Produk dari Batu Bara dan Penggilingan Minyak Bumi	-	-	-	-	0
11	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	6	6	6	5	5
12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1	1	1	1	1
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2	4	4	6	6
14	Industri Barang Galian Bukan Logam	523	521	521	514	527
15	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	0

NO.	JENIS INDUSTRI	JUMLAH IKM				
		2018	2019	2020	2021	2022
16	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	59	60	60	67	67
17	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-	-	-	-	0
18	Industri Peralatan Listrik	-	-	-	-	0
19	Industri Pesin dan Perlengkapan ytdl	71	-	-	1	1
20	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan semi Trailer	20	-	-	-	1
21	Industri alat Angkutan Lainnya	672	-	-	-	0
22	Industri Furniture	3	71	71	85	87
23	Industri Pengolahan Lainnya	17	17	17	23	30
24	Industri dan pemasangan Mesin dan Peralatan	43	-	-	-	0
	JUMLAH	**1.747**	**1.803**	**1.848**	**1.952**	**2.062**

Sumber: Dinas Perdagin Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

e. Perikanan

Komoditas unggulan perikanan tahun 2022, diantaranya adalah ikan mas, ikan nila, gurame, dan lele. Produksi ikan mas pada tahun 2021 sebesar 1.303,34 ton **turun** menjadi 1.261,60 ton pada tahun 2022. Sentra produksi ikan mas berada di Kecamatan Cikijing, Talaga, Argapura dan Rajagaluh. Produksi ikan nila pada tahun 2021 sebesar 4.094,04 ton **naik** menjadi 4.052,00 ton pada tahun 2022 dengan sentra produksi ikan nila berada di Kecamatan Bantarujeg, Cikijing, Cingambul, Talaga, Argapura, Maja, Cigasong, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi dan Leuwimunding. Produksi ikan gurame pada tahun 2021 sebesar 918,85 ton **naik** menjadi 925,80 ton pada tahun 2022, dengan sentra produksi Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding dan Palasah. Produksi ikan lele pada tahun 2021 sebesar 1.529,30 ton **naik** menjadi 1.718,80 ton pada tahun 2022, dengan sentra produksi Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Jatitujuh dan Ligung.

Tabel 2.87
Produksi Ikan
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ikan Mas	1.242,79	1.314,83	1.338,39	1.303,34	1.261,60
2.	Ikan Nila	3.868,15	3.898,98	3.939,94	4.049,04	4.052,00
3.	Ikan Nilem	203,20	217,91	238,47	234,92	265,58

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.	Ikan Tambak	81,49	91,49	106,94	108,09	115,30
5.	Ikan Mujaer	17,58	17,58	17,58	24,61	-
6.	Ikan Lele	1.427,38	1.458,38	1.486,00	1.529,30	1.718,80
7.	Ikan Sepat Siem	114,32	94,32	108,55	109,61	113,20
8.	Ikan Bawal	31,49	33,49	47,53	49,06	51,20
9.	Ikan Tawes	129,25	125,25	143,59	146,65	157,10
10.	Udang Galah	45,28	47,13	-	-	-
11.	Belut	21,67	31,67	56,39	57,75	-
12.	Patin	n/a	n/a	n/a	n/a	58,80
13.	Ikan Gurame	853,44	873,44	893,65	918,85	925,80
14.	Ikan Gabus	34,76	34,76	38,48	46,31	47,50
15.	Ikan Beunteur	57,61	57,61	58,70	74,54	97,90
16.	Ikan Lalawak	48,65	48,65	49,04	54,93	61,50
17.	Ikan Paray	47,11	47,35	48,56	58,76	80,20
18.	Ikan Seren	22,92	22,92	23,54	29,22	-
19.	Ikan Tagih	59,59	59,59	60,79	48,90	63,50
20.	Ikan Deleg	25,52	25,52	26,09	31,31	-
21.	Ikan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.88
Indikator Capaian Urusan Perikanan
Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	25,10	25,46	25,46	26,2	21,69
2.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemerintah daerah	45	-	83	0	0
3.	Jumlah seluruh kelompok nelayan	822	822	826	660	660
4.	Produksi perikanan (ton)	8.332,27	8.500,94	8.682,23	8.875,19	9.069

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Ikan merupakan sumber protein hewani dan juga memiliki kandungan gizi yang tinggi diantaranya mengandung mineral, vitamin dan lemak tak jenuh. Protein dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengonsumsi ikan untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi. Dalam kurun lima tahun terakhir, rata-rata konsumsi ikan per kapita per tahun di Majalengka mengalami tren kenaikan walaupun pada tahun 2018 sempat mengalami sedikit penurunan.

f. Peternakan

Komoditas unggulan peternakan diantaranya adalah ternak ayam ras pedaging, domba dan sapi potong. Pada tahun 2022 populasi ayam ras pedaging sebanyak 18.747.742 ekor dengan produksi daging sebesar 24.578,40 ton **meningkat** dari tahun 2021 sebesar 23.985,73 ton, populasi domba pada tahun 2022 sebanyak 1.713.410 ekor dengan produksi daging mencapai 2.584,83 ton **meningkat** dari tahun 2021 yang mencapai 1.865,68 ton dan populasi sapi potong pada tahun 2022 sebanyak 9.212 ekor dengan produksi daging mencapai 2.393,55 ton **meningkat** dari tahun 2021 yang mencapai 2.373,23 ton. Sentra produksi ayam ras pedaging tersebar di Kecamatan Talaga, Lemahsugih, Banjaran, Sindangwangi. Sentra produksi domba tersebar di Kecamatan Jatitujuh, Dawuan, Kertajati. Sentra produksi sapi potong tersebar di Kecamatan Kertajati, Lemahsugih, Majalengka.

Tabel 2.89
Populasi Peternakan
Kabupaten Majalengka

No.	Jenis	Tahun (Ekor)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ayam Ras Pedaging	17.398.920	17.406.000	17.842.680	18.295.752	18.747.742
2.	Domba	1.138.261	1.291.098	1.425.428	1.609.282	1.713.410
3.	Sapi Potong	14.519	14.834	15.073	15.477	9.212

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.90
Produksi Peternakan
Kabupaten Majalengka

No.	Jenis	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ayam Ras Pedaging	24.358,49	22.819,27	23.391,75	23.985,73	24.578,40
2.	Domba	1.535,08	1.584,29	1.745,09	1.865,68	2.584,83
3.	Sapi Potong	2.161,40	2.227,69	2.272,63	2.373,23	2.393,55

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

g. Perkebunan

Komoditas unggulan perkebunan diantaranya adalah Teh, Tembakau, Kopi, Cengkeh, dan tebu, sebagai berikut :

a) **Teh**

Luas tanam komoditas teh pada tahun 2021 adalah sebesar 1.800 hektar, **menurun** menjadi 661,2 hektar pada tahun 2022. Sedangkan produksi teh pada tahun 2022 sebesar 585,94 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Malausma dan Rajagaluh.

b) **Tembakau**

Luas tanam komoditas tembakau pada tahun 2021 sebesar 1.954,02 hektar **menurun** menjadi 1.231,47 hektar pada tahun 2022 dengan produksi sebesar 7.914,15 ton, dengan sentra di Kecamatan Bantarujeg, Lemahsugih dan Majalengka.

c) **Kopi**

Luas tanam komoditas kopi pada tahun 2021 sebesar 186,39 hektar **meningkat** menjadi 1.115,64 hektar pada tahun 2022 dengan produksi sebesar 1.207,12 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih dan Argapura.

d) **Cengkeh**

Luas tanam komoditas cengkeh pada tahun 2021 sebesar 1.982,10 hektar **meningkat** menjadi 2.086,97 hektar pada tahun 2022, dengan produksi olahan pada tahun 2022 berupa bunga basah sebesar 2.513,86 ton dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Argapura Bantarujeg dan Maja.

e) **Tebu**

Luas tanam komoditas tebu pada tahun 2022 sebesar 3.285,81 hektar, dengan produksi berupa tebu sebesar 173.190 ton, dengan sentra di Kecamatan Kertajati, Ligung, Leuwimunding dan Jatitujuh.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas unggulan perkebunan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel 2.91 berikut ini:

Tabel 2.91
Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teh	672,31	672,31	661,2	1.800	661,2
2.	Tembakau	847,15	847,20	1.461,3	1.954,02	1.231,47
3.	Kopi	1.031,94	1.071,79	1.080,6	186,39	1.115,64
4.	Cengkeh	2.086,97	2.086,97	2.087,0	1.982,10	2.086,97
5.	Tebu	391,80	391,80	3.012,9	549,19	3.285,81

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.92
Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Majalengka

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teh	1.306,3	420	458,2	479,82	585,94
2.	Tembakau					
	- Daun	4.195,95	4.512,19	8.535,9	8.576,9	7.914,15
	- Rajangan	839,19	902,40	813,7	858,13	-
3.	Kopi	932,98	1.151,63	1.317,9	249,62	1.207,12
4.	Cengkeh					
	- Bunga basah	2.349,30	2.996,94	3.048,2	565,72	2.513,86
	- Minyak cengkeh	-	-	-	-	-
5.	Tebu	2.088,46	2.892,30	25.115,8	537,71	173.190,00

Sumber: DKP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

2.1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mempunyai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Majalengka dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2008.

Sedangkan untuk dokumen perencanaan jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mempunyai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2019 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2022.

Selanjutnya setiap tahun disusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD dalam hal ini merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2022.

b. Keuangan

Selain adanya kebijakan perencanaan pembangunan yang berubah, urusan penunjang keuangan pun mengalami perubahan, diantaranya terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebabkan penyesuaian dalam penyusunan APBD. Capaian pembangunan urusan penunjang keuangan dapat dilihat dari indikator-indikator pada tabel 2.93 dibawah ini:

Tabel 2.93
Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Keuangan
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	5,32	3,16	3,59	2,40	2,49
3.	Persentase belanja pendidikan terhadap APBD (%)	32,64	26,37	29,07	31,95	30,47
4.	Persentase belanja kesehatan terhadap APDB (%)	15,15	13,72	18,15	20,83	29,92
5.	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD	45,15	44,66	45,97	41,88	40,00
6.	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	54,85	55,34	54,03	58,12	60,00
7.	Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa terhadap APBD (%)	0,52	0,52	0,37	0,45	0,53

Sumber: BKAD Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian pembangunan urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diantaranya dilihat dari jumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka, Pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 34,44% sedangkan untuk jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 6.571 orang.

Tabel 2.94
Indikator Pembangunan Urusan penunjang Kepegawaian dan
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	69,00	69,00	70,77	52,05	34,44

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	1,14	1,27	0,79	1,57	7,04
3.	Jumlah Total ASN (orang)	11.621	10.844	10.172	9.616	11.773
4.	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	29	33	32	33	34
5.	Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	187	193	183	195	191
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu (orang)	7.512	7.561	7.273	6.903	6.571

Sumber: BKPSDM Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

d. Pengawasan

Capaian pembangunan urusan penunjang Pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat diantaranya dilihat dari persentase temuan yang ditindaklanjuti. Berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Majalengka, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 sebesar 60,33 persen.

Tabel 2.95
Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan
Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase tindak lanjut temuan (%)	78	60	60,33	83,05	55,56
2.	Jumlah temuan BPK	19	22	16	22	10
3.	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP (level)	1,87	1,87	2	2	2
4.	Laporan Hasil Penilaian Kapasitas APIP (level)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Sumber: Inspektorat Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

e. Sekretariat DPRD

Capaian pembangunan urusan penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat dari indikator-indikator pada tabel 2.96 berikut:

Tabel 2.96
Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Fasilitasi Rapat Rapat DPRD yang terlaksana Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100
2.	Fasilitasi kunjungan kerja yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Perda yang disahkan	Perda	6	14	7	13	8
4.	Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan	Keputusan	16	19	10	17	9

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

f. Sekretariat Daerah

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada tahun 2022 Kabupaten Majalengka meraih Predikat SAKIP B dengan nilai 67,1. Dengan hasil ini Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus meningkatkan predikat SAKIP sebagai salah satu indikator pemerintahan yang transparan, baik dan efisien serta akuntabel.

Indikator capaian pembangunan urusan penunjang pada Sekretariat Daerah dapat dilihat juga pada jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha yang terbagi dalam kategori yaitu peraturan daerah terkait perizinan, peraturan daerah terkait lalu lintas barang dan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan. Untuk mempercepat proses perizinan dalam rangka mendukung iklim usaha yang baik, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah mengeluarkan

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Majalengka.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tabel 2.97
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	N/A	51,79	53,88	56,84	58,46
		Predikat	N/A	CC	CC	CC	CC
2	Nilai SAKIP	Poin	60,83	67,00	67,18	67,08	67,1
		Predikat	B	B	B	B	B
3	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	B	B	B
4	Predikat Penyelenggaraan	Predikat	Sangat Tinggi	NIHIL	NIHIL	Tinggi	Tinggi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Pemerintahan Daerah (LPPD)						
5	Pemenuhan SPM sesuai Ketentuan	Persen	N/A	26,17	43,67	62,23	87,00
6	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	N/A	N/A	19,00	54,52	64,30
7	Level Maturitas UKPBJ	level	N/A	N/A	3/9	6/9	8/9

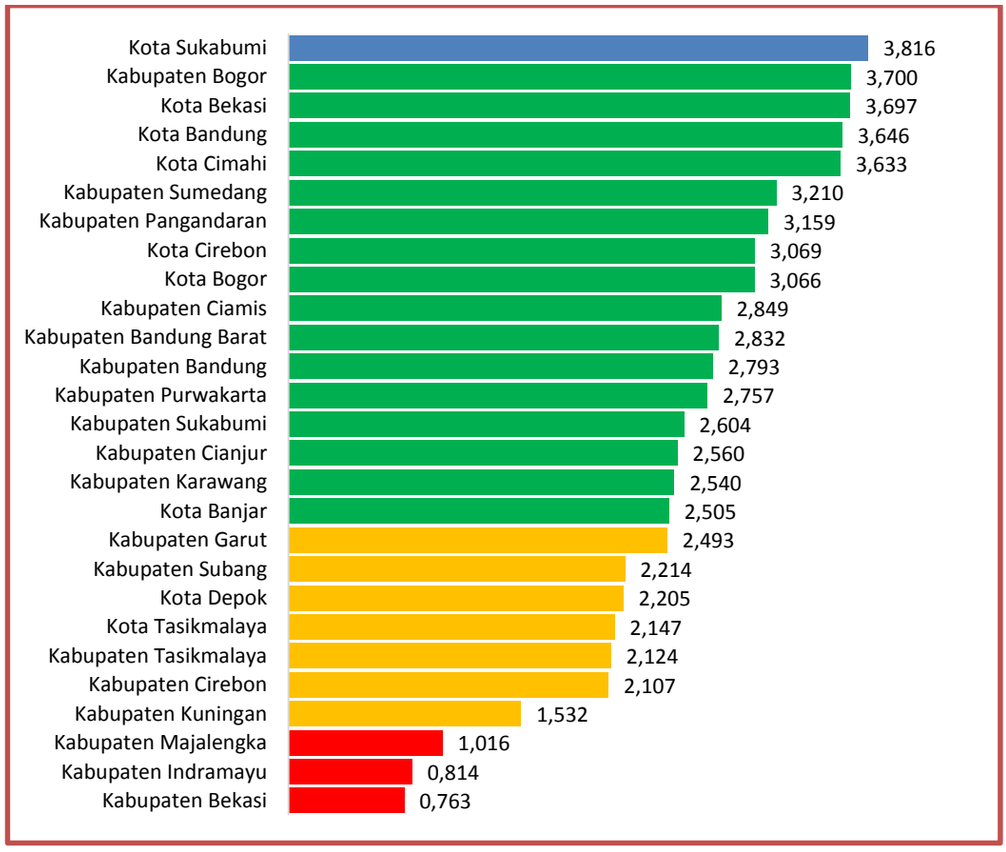
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Suatu daerah untuk bisa ikut dalam pembangunan secara global harus mampu berdaya saing yang berbasis inovasi sebagai upaya pembangunan yang efektif dan efisien serta produktivitas yang tinggi yang menjadi kunci persaingan daerah sebagai wujud kesejahteraan. Dengan pengukuran daya saing (competitiveness) sebagai salah satu parameter dalam konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, maka suatu daerah yang memiliki daya saing tinggi akan berdampak pada masyarakat yang berkesejahteraan tinggi pula. Di kancah persaingan global yang semakin ketat, dan belum meratanya pembangunan daerah maka pemerintah kabupaten/kota sebagai ujung tombak pembangunan dituntut untuk selalu berinovasi dalam pembangunan khususnya Kabupaten Majalengka harus dapat bersaing dengan daerah-daerah lain disekitarnya (CIAYUMAJAKUNING) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya

Gambar 2.18
Indek Daya Saing Daerah Kabupaten Kota Di Jawa Barat
Tahun 2021



Sumber: BRIN, 2021 (diolah)

Terdapat 4 aspek dan 12 pilar yang dijadikan tolok ukur dalam pengukuran Indeks Daya Saing di Kabupaten Majalengka yaitu :

1. Ekosistem Inovasi : Pilar Dinamika Bisnis, Pilar Kapasitas Inovasi, Pilar Kesiapan teknologi
2. Penguat (Enabling Environment) : Pilar Kelembagaan, Pilar Infrastruktur, Pilar Perekonomian daerah
3. Sumber Daya Manusia (Human Capital) : Pilar Kesehatan, Pilar Pendidikan dan Ketrampilan
4. Pasar (Market) : Pilar Efisiensi Pasar Produk, Pilar Ketenagakerjaan, Pilar Akses Keuangan, Pilar Ukuran Pasar

Dari 4 Aspek tersebut, Kabupaten Majalengka terdapat pada posisi nilai rendah dengan poin Indeks Daya Saing Tahun 2021 sebesar 1,016. Jika dilihat berdasarkan pilar, yang paling berkontribusi terhadap kemampuan daya saing Kabupaten Majalengka adalah Kesiapan Teknologi yang berada pada aspek ekosistem inovasi.

Berdasarkan analisis dari 4 aspek pengukuran indeks daya saing daerah Tahun 2021, untuk mengungkit indeks daya saing di diperlukan program yang bersifat lintas sektoral dan kolaboratif antar berbagai *stakeholder*. Program yang bersifat lintas sektoral dan kolaboratif yaitu program pengembangan teknologi dan inovasi yang melibatkan kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi dan atau lembaga litbang, industri/dunia usaha.

Adapun beberapa hal yang diperlukan dalam peningkatan daya saing di Kabupaten Majalengka adalah Kerjasama dan Kolaborasi secara maksimal dengan cara sebagai berikut:

1. Kerjasama dan Kolaborasi riset dan pengembangan melalui program Fasilitasi Hilirisasi Riset yaitu dengan mengkolaborasikan riset dan pengembangan perguruan tinggi di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya untuk dihilirkan melalui Bapppeda Kabupaten Majalengka dengan kerjasama Tim Inkubasi Bisnis dan Teknologi yang berada disekitar Kabupaten Majalengka sampai dengan tahapan komersialisasi.
2. Kerjasama dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penguatan Sentra Industri Berbasis Teknologi melalui program penguatan transformasi digital untuk menciptakan wirausaha baru berbasis teknologi. Kolaborasi saat ini yang akan dijalankan yaitu pelaksanaan program yang mendorong dalam IDSD Kabupaten Majalengka.
3. Kerjasama dan Kolaborasi Pengembangan SDM melalui program triple *skilling* (*skilling, upskilling, dan reskilling*). Saat ini telah dilaksanakan melalui diklat 3 in 1 (dilatih, didampingi, dan disalurkan).

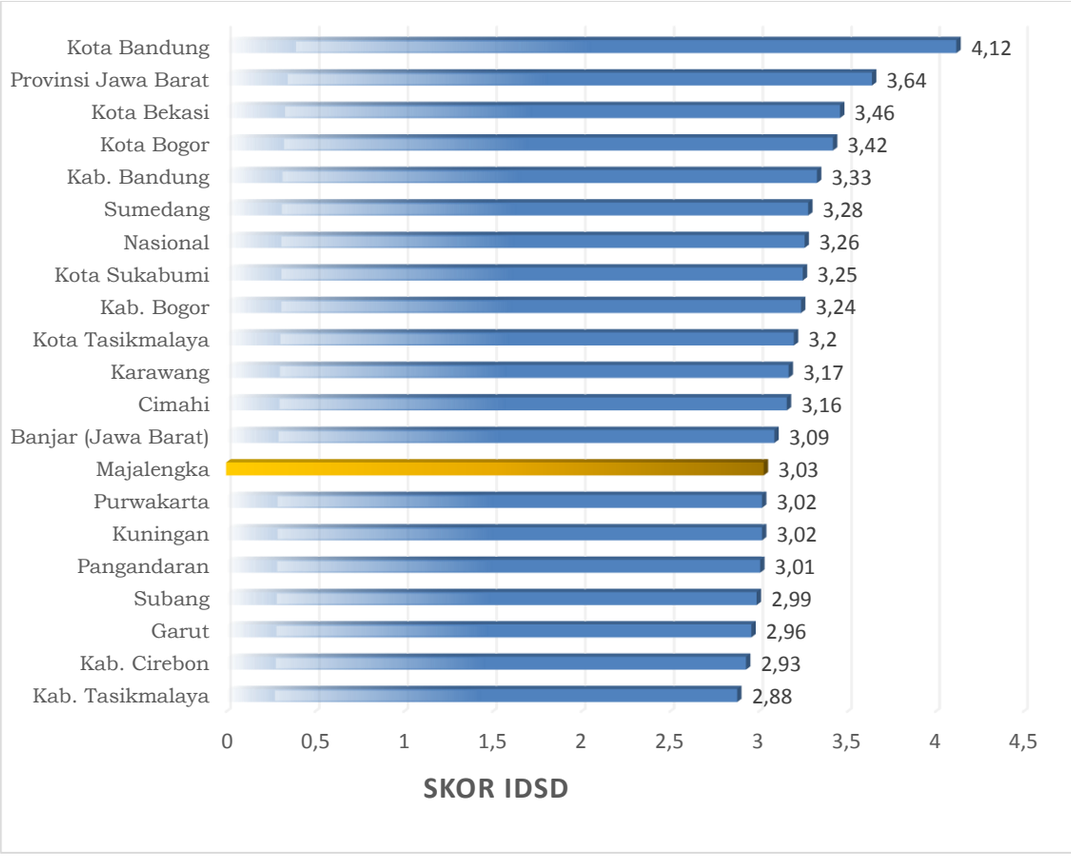
Adapun strategi/prioritas pembangunan yang dapat ditindaklanjuti pada perencanaan pembangunan untuk mengungkit peningkatan daya saing Kabupaten Majalengka adalah :

1. Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Pembangunan Kertajati Aerocity dan Segitiga Rebana
5. Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk

6. Konsistensi Penataan Ruang dan RDTR
7. Alih Fungsi Lahan Produktif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup
8. Kemandirian Desa

Gambar 2.19

Skor IDSD 2022 Provinsi Jawa Barat



Pada Hasil Pengukuran IDSD Tahun 2022, Skor IDSD Kabupaten Majalengka yaitu sebesar 3,03. Dibandingkan dengan skor IDSD pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,06 terdapat peningkatan sebesar 1,97 poin. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan Indeks daya saing di Kabupaten Majalengka. Peluang untuk peningkatan Indeks daya saing dapat dilakukan upaya-upaya dari peningkatan terhadap sektor-sektor pengungkit berdasarkan sektor basis. Sektor basis/spesialisasi mengacu kepada sektor ekonomi disuatu wilayah, dimana suatu wilayah dikatakan memiliki spesialisasi jika wilayah tersebut mengembangkan suatu sektor ekonomi sehingga pertumbuhan maupun andil sektor tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah lainnya, spesialisasi juga tercipta akibat potensi sumber daya alam yang besar maupun peranan permintaan pasar yang besar

terhadap output-output lokal. Sektor basis kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Sektor Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan.
2. Sektor Non Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri.

Tabel 2.98
Hasil Perhitungan Sektor Basis Wilayah Kabupaten/Kota CIAYUMAJAKUNING

Lapangan Usaha/Industry		Kabupaten				Kota Cirebon
		Indramayu	Cirebon	Kuningan	Majalengka	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,09	1,90	2,95	2,67	0,04
B	Pertambangan dan Penggalian	7,04	0,77	0,82	1,07	-
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	1,04	0,48	0,06	0,50	0,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,46	0,25	0,24	1,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,08	1,09	1,11	0,74	3,25
F	Konstruksi	0,66	1,42	1,06	1,55	1,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,70	1,00	1,06	1,08	2,08
H	Transportasi dan Pergudangan	0,56	1,65	2,90	0,78	2,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,63	1,29	0,69	1,17	1,85
J	Informasi dan Komunikasi	0,22	0,75	1,22	0,95	1,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,48	1,53	2,04	1,12	4,27
L	Real Estat	0,42	1,92	2,49	1,02	0,78
M,N	Jasa Perusahaan	0,61	2,17	1,09	0,79	1,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,06	1,41	1,75	1,58	1,73
P	Jasa Pendidikan	0,75	2,02	3,67	1,91	1,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	2,86	2,16	1,32	3,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,21	1,86	1,73	1,29	1,12

Kabupaten Majalengka merupakan wilayah yang mempunyai sektor basis sejumlah 11 sektor yaitu Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**,** Jasa Pendidikan,Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya.

Pada tahun 2018-2021 Kabupaten Majalengka terdapat 7 sektor antara lain : sektor Industri Pengolahan/Manufacturing; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi dan Jasa Perusahaan yang tidak menjadi sector basis. Maka sector-sektor tersebut perlu untuk dikembangkan lagi agar sektor ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya saja tapi juga dapat memenuhi wilayah lain agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih meningkat diwilayah ini.

2.1.4.1 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya *(availability)* dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kegiatan perkonomian akan berjalan dengan baik jika didukung dengan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Infrastruktur di Kabupaten Majalengka, masih menjadi kendala bagi kegiatan perekonomian daerah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Perekonomian perdesaan terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa.

a. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 digolongkan dalam 3 kelompok yakni; Jalan Nasional (39,5 km), Jalan Provinsi (125,83 km), dan Jalan Kabupaten (918,726 km) dengan kondisi jalan kabupaten dibagi menjadi empat kategori yaitu jalan kondisi baik (654 km), kondisi sedang (158 km), kondisi rusak ringan (88 km) dan jalan dengan kondisi rusak berat (19 km).

b. Perhubungan

Saat ini di Kabupaten Majalengka telah dibangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang akan menjadi sarana transportasi udara untuk mengakses wilayah Majalengka, Jawa Barat dan sekitarnya menuju wilayah seluruh nasional dan internasional. Dalam menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten Majalengka telah dilalui oleh Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan pada tahun 2022 ini sudah terhubung dengan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu).

Beberapa capaian indikator pembangunan perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.61.

c. Irigasi

Irigasi merupakan infrastruktur lain yang mendukung perekonomian, terutama sektor pertanian, karena akan menunjang ketersediaan pengairan di Kabupaten Majalengka. Persentase irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 mencapai 77,32%.

d. Penataan Ruang Daerah

Indikator penataan ruang di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.100 dibawah ini.

Tabel 2.99
Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka

No.	Indikator Penataan Ruang	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	83,67	83,67	90,00	90,00	54,02
2.	Luas wilayah produktif	%	60	60,5	60	23,30	67,72
3.	Luas wilayah industri	%	1,4	1,45	1,37	0,72	1,09
4.	Penyediaan kawasan industri	Ha	70	108	-	-	394,68
5.	Luas wilayah kebanjiran	Ha	300	300	600	-	72,809

No.	Indikator Penataan Ruang	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
6.	Luas wilayah kekeringan	Ha	-	-	-	-	120,424
7.	Luas wilayah perkotaan	%	41	42	41	6,33	31,64

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

e. Fasilitas Keuangan

Kabupaten Majalengka memiliki lembaga penunjang perekonomian berupa fasilitas perbankan yang terdiri atas bank umum yaitu Bank BJB, Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Panin, Bank Danamon, Bank BCA, Bank BTPN, Bank OCBC NISP dan BPR. Perkembangan jumlah lembaga perbankan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.101 berikut.

Tabel 2.100
Perkembangan Jumlah Bank
di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Bank	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	BJB	Unit	11	11	11	11	11
2.	BRI	Unit	36	37	39	40	40
3.	BNI	Unit	3	3	3	3	3
4.	MANDIRI	Unit	6	6	6	6	6
5.	PANIN	Unit	4	4	4	4	4
6.	DANAMON	Unit	5	5	5	5	5
7.	BCA	Unit	1	1	1	1	1
8.	OCBC NISP	Unit	2	2	2	2	2
9.	BTPN	Unit	5	5	5	5	5
10.	SAUDARA	Unit	1	1	1	1	1
11.	BPR	Unit	17	17	18	18	18
12.	BTN	Unit	8	8	8	8	8
13.	BRI Syariah	Unit	1	1	1	1	-
14.	BTPN Syariah	Unit	1	1	1	1	-
15.	Bank Syariah Indonesia	Unit	-	-	-	-	1
Jumlah		Unit	**101**	**102**	**105**	**106**	**105**

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

f. Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah

makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Majalengka pada Tahun 2022 tercatat 160 restoran yang tersebar di berbagai kecamatan dengan lokasi terbanyak berada di Kecamatan Majalengka sebanyak 65 restoran dan kadipaten sebanyak 19 restoran.

g. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Majalengka pada tahun 2022 di wilayah Kabupaten Majalengka terdapat 27 buah hotel/penginapan dengan total kamar sebanyak 694 kamar.

h. Air bersih

Penggunaan air bersih di Kabupaten Majalengka saat ini berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Majalengka menunjukan bahwa jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2022 sebesar 376.106 rumah tangga. Data selengkapnya mengenai jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih di Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam tabel 2.102 berikut:

Tabel 2.101
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
1.	2018	339.851
2.	2019	367.774
3.	2020	368.626
4.	2021	374.699
5.	2022	376.106

Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah merupakan salah satu daya saing bagi daerah tersebut untuk dapat meningkatkan investasi yang masuk ke daerah tersebut. Iklim investasi diukur antara lain dengan tindak kriminalitas, kemudahan perijinan, perkembangan pembangunan.

a. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demo

Indikator Jumlah Kriminalitas ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.102
Jumlah Kriminalitas Yang Tertangani

NO.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Jumlah Kasus**					
	- Kasus Narkoba	33	41	38	2	2
	- Kasus Pembunuhan	1	1	0	0	1
	- Kasus Seksual	16	15	16	25	5
	- Kasus Penganiayaan	10	12	10	21	4
	- Kasus Pencurian	111	119	81	39	66
	- Kasus Penipuan	50	44	34	13	7
	- Kasus Pemalsuan Uang	2	0	1	0	0
2.	**Jumlah Kasus Tertangani**					
	- Kasus Narkoba	33	41	38	2	2

NO.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
	- Kasus Pembunuhan	1	1	0	0	1
	- Kasus Seksual	16	15	16	25	5
	- Kasus Penganiayaan	10	12	10	21	4
	- Kasus Pencurian	111	119	81	39	66
	- Kasus Penipuan	50	44	34	13	7
	- Kasus Pemalsuan Uang	2	0	1	0	0

Sumber: Satpol PP & Damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 2.103
Jumlah Demonstrasi
Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Jumlah Demonstrasi
1.	2018	5
2.	2019	8
3.	2020	11
4.	2021	9
5.	2022	9

Sumber: Satpol PP & Damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

b. Lama Proses Perizinan

Dalam rangka meningkatkan investasi Pemerintah Kabupaten Majalengka membuat kebijakan menyederhanakan pelayanan perizinan terpadu untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, murah dan terjangkau. Rata-rata proses perijinan di Kabupaten Majalengka hanya membutuhkan waktu 1- 3 hari.

c. Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah pajak dan retribusi daerah pada tahun 2022, yaitu pajak sebanyak 9 jenis dan retribusi sebanyak 20 jenis.

Tabel 2.104
DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2022

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hasil Pajak Daerah	144.491.759.894,00	123.654.331.397,00	119.119.943.663,00	143.392.442.998,00	156.740.101.171,00
2.	Hasil Retribusi Daerah	18.506.497.178,00	18.875.051.518,00	17.631.278.296,00	15.513.665.009,00	19.931.473.893,00
	a. Retribusi Jasa Umum	9.536.768.300,00	9.830.312.500,00	8.668.903.504,00	8.236.383.802,00	8.317.693.000,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	5.258.338.528,00	4.433.297.458,00	3.881.511.163,00	3.554.396.058,00	4.803.448.558,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	3.711.390.350,00	4.611.441.560,00	5.080.863.629,00	3.722.885.149,00	6.810.332.335,00
	d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	1.770.465.558,00
	e. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-	28.175.000,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.229.014.024,00	7.825.254.542,00	6.551.818.643,00	5.944.980.467,00	7.409.795.269,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	279.746.858.792,60	289.488.627.137,55	347.530.431.591,06	301.937.407.131,11	338.375.049.253,61
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**449.974.129.888,60**	**439.843.264.594,55**	**490.833.472.193,06**	**466.788.495.605,11**	**522.456.419.586,61**

Sumber: Bapenda Kabupaten Majalengka, Tahun 2023

d. Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Berbagai regulasi yang dibuat Pemerintah Daerah menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung kemudahan usaha di daerah sehingga kegiatan investasi di daerah tersebut bisa menjadi lancar.

Tabel 2.105
Tabel Regulasi yang Mendukung Iklim Usaha
Di Kabupaten Majalengka

NO	TAHUN	PERDA/PERBUP/KEPBUP
1	2018	Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung
2	2018	Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
3	2018	Peraturan Bupati Majalengka Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka
4	2020	Peraturan Bupati Majalengka Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
5	2020	Keputusan Bupati Majalengka Nomor 503/Kep.70-DPMPTSP/2020 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
6	2021	Keputusan Bupati Majalengka Nomor 649/Kep.137-DPMPTSP/2021 Tentang Standar Harga Dasar Bangunan Sebagai Dasar Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka
7	2021	Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.195-BKAD/2021 Tentang Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majalengka Sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka
8	2022	Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
9	2022	Keputusan Bupati Majalengka Nomor PU.03.00.00.00/Kep.170-DPUTR/2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

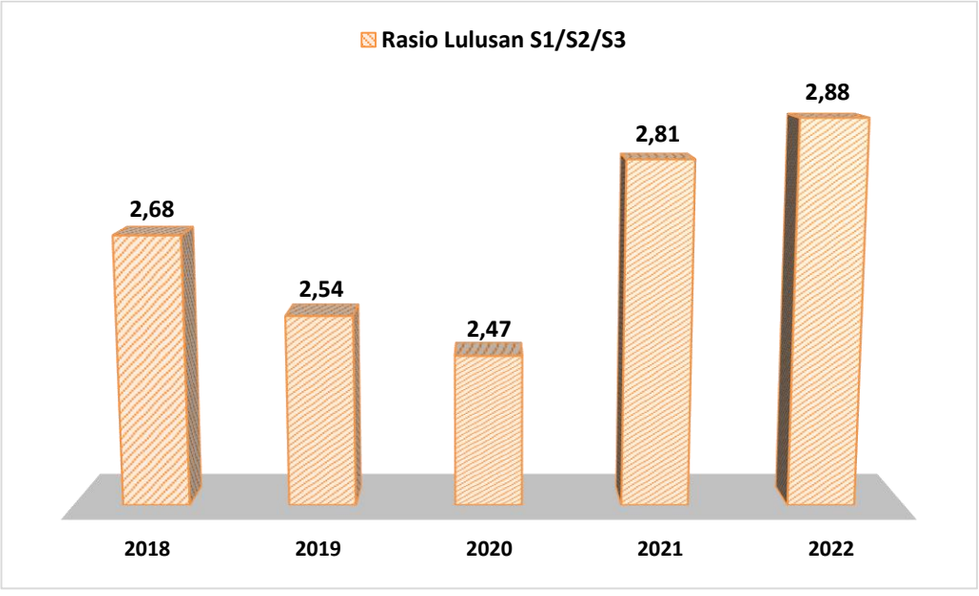
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu daerah, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kualitas SDM adalah dengan mengukur tingkat pendidikan masyarakat. Selama periode 2018-2022, hanya sebagian kecil yang berpendidikan Diploma dan Sarjana, walaupun demikian tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Majalengka terus meningkat. Tercatat pada tahun 2022 persentase lulusan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Majalengka sebesar 2,88% dari total jumlah penduduk dan terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2.20
Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Majalengka



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

b. Rasio Ketergantungan

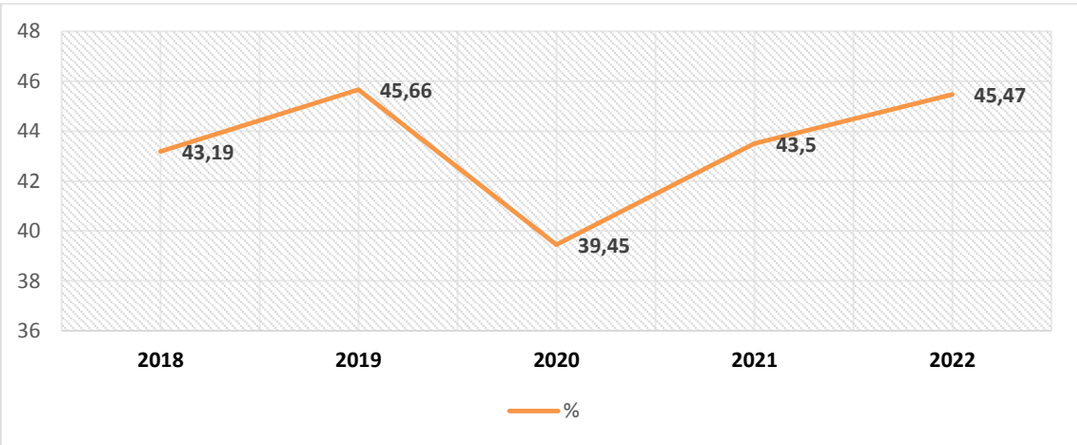
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif

terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan dapat dilihat pada Gambar 2.21 sebagai berikut:

Gambar 2.21
Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan
Kabupaten Majalengka



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Pada tahun 2022, angka ketergantungan di Kabupaten Majalengka sebesar 45,47%, ini berarti bahwa di Majalengka dari 100 orang penduduk yang produktif menanggung beban 45 orang penduduk non-produktif.

2.1.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, artinya selain ditujukan untuk memenuhi prioritas daerah dari visi dan misi kepala daerah, pembangunan daerah juga harus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.
Tingkat capaian indikator pembangunan Kabupaten merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Tabel 2.106
Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					REALISASI				KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,92	66,72	67,19	67,34	67,85	68,33	68,85	67,52	67,59	67,81	68,56	68,85
	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,39	69,68	69,73	70,08	70,22	70,40	70,60	69,97	70,27	70,46	70,76	70,60
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,18	12,19	12,21	12,22	12,81	12,97	13,17	12,21	12,22	12,23	12,24	13,17
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,91	7,00	7,11	7,19	7,27	7,39	7,09	7,27	7,31	7,49	7,39
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	8.833	9.416	9.421	9.120	9.280	9.410	9.475	9.822	9.521	9.591	9.950	9.475
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,02	4,95	4,89	5,90	5,50	5,13	4,48	4,37	5,84	5,71	4,16	4,48
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,60	10,79	10,48	11,89	11,2	10,8	10,37	10,06	11,43	12,33	11,94	10,37
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,81	6,23	6,035	0,25	3,10	4,50	5,17	7,71	0,89	4,75	6,63	5,17
5.	PDRB per kapita	Ribu Rupiah	14.789	15.740	16.500	17.850	18.262	18.989	19.877	17.883	17.953	17.277	18.197	19.877
6.	Indeks Gini	Poin	0,351	0,350	0,335	0,340	0,339	0,337	0,330	0,335	0,336	0,354	0,367	0,330

Sumber: Tim Penyusun Evaluasi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

2.1.5.1 Capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Makro dalam RPJMD Kabupaten Majalengka menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator Makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, dan Indeks Gini.

Tabel 2.107
Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		2019			2020			2021			2022			2023	KONDISI AKHIR
			2017	2018	TARGET	CAPAIAN	(%)	TARGET	CAPAIAN	(%)	TARGET	CAPAIAN	(%)	TARGET	CAPAIAN	(%)	TARGET	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,92	66,72	67,19	67,52	100,49	67,34	67,59	100,37	67,85	67,81	99,94	68,33	68,56	100,34	68,85	68,85
	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,39	69,68	69,73	69,97	100,34	70,08	70,27	100,27	70,22	70,46	100,34	70,40	70,76	100,51	70,60	70,60
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,18	12,19	12,21	12,21	100,00	12,22	12,22	100,00	12,81	12,23	95,47	12,97	12,24	94,37	13,17	13,17
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,91	7,00	7,09	101,29	7,11	7,27	102,25	7,19	7,31	101,67	7,27	7,49	103,03	7,39	7,39
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	8.833	9.416	9.421	9.822	104,26	9.120	9.521	104,40	9.280	9.591	103,35	9.410	9.950	105,74	9.475	9.475
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,02	4,95	4,89	4,37	89,37	5,90	5,84	98,98	5,50	5,71	103,82	5,13	4,16	81,09	4,48	4,48
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,60	10,79	10,48	10,06	95,99	11,89	11,43	96,13	11,2	12,33	110,09	10,80	11,94	110,56	10,37	10,37
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,81	6,23	6,035	7,71	127,75	0,25	0,86	344,00	3,10	4,75	153,23	4,50	6,63	147,33	5,17	5,17
5	PDRB per kapita	Ribu Rupiah	14.789	15.740	16.500	17.883	108,38	17.850	17.953	100,58	18.262	17.277	94,61	18.989	18.197	95,83	19.877	19.877
6	Indeks Gini	Poin	0,351	0,350	0,335	0,335	100,00	0,340	0,336	98,82	0,339	0,354	104,42	0,337	0,367	108,90	0,330	0,330

Sumber: BPS Kabupaten Majelengka Tahun 2023, diolah kembali oleh Tim Penyusun Evaluasi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Tabel 2.108
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		KONDISI TAHUN 2019			PERUBAHAN RPJMD 2020			PERUBAHAN RPJMD 2021			PERUBAHAN RPJMD 2022			TARGET PERUBAHAN RPJMD 2023	KONDISI AKHIR
			2017	2018	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%		
1	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	Persen	N/A	N/A	5,00	5,00	100,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	100,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00
2	Indeks Gini	Poin	0,351	0,35	0,335	0,331	98,81	0,340	0,336	98,82	0,339	0,354	95,58	0,337	N/A	N/A	0,330	0,330
3	Angka Kemiskinan	Persen	12.6	10,79	10,48	10,06	104,17	11,89	11,43	104,02	11,20	12,33	90,84	10,80	11,94	89,44	10,37	10,37
4	Angka Stunting	Persen	N/A	N/A	2,70	5,27	51,23	5,00	5,29	94,52	4,50	3,52	127,84	4,00	3,84	104,00	3,50	3,50
5	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	Persen	N/A	20,00	10,00	20,00	200,00	10,00	10,00	100,00	10,00	10,42	104,20	10,00	8,00	120,00	10,00	10,00
6	Nlai SAKIP	Nilai	CC	B	B	B	100,00	BB	B	95,97	BB	B	95,83	BB	B	95,71	BB	BB
7	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	N/A	N/A	WTP	WTP
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	B	B	B	B	100,00	B	B	100,00	B	B	100,00	B	B	100,00	B	B
9	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	88,25	88,25	88,50	56,00	63,28	59	58,8	99,66	60	57,48	95,80	60,5	57,14	94,45	61	61
10	Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	Persen	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Indeks Pengetahuan	Poin	56,83	56,89	58,03	57,55	99,17	57,9	58,84	101,62	58,2	58,34	100,24	58,8	58,97	100,29	59,44	59,44
12	Indeks Kesehatan	Poin	75,98	76,43	76,53	76,88	100,46	76,75	77,34	100,77	77,04	77,63	100,77	77,26	78,09	101,07	77,54	77,54
13	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak	Persen	80,22	80,37	80,52	68,47	85,03	80,67	69,02	85,56	69,38	69,62	100,35	69,75	69,76	100,01	70,12	70,12
14	Nilai Tukar Petani	Persen	N/A	99,67	100,49	100,80	100,31	101,00	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen	N/A	N/A	1,0	0,96	96,00	1,0	-0,05	-5,00	1,0	0,87	87,00	1,0	N/A	N/A	1,0	1,0
15	Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	200.000	589.843	619.335	701.335	113,24	500.000	375.000	75,00	525.000	472.906	90,08	850.000	818.543	96	1.000.000	1.000.000

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		KONDISI TAHUN 2019			PERUBAHAN RPJMD 2020			PERUBAHAN RPJMD 2021			PERUBAHAN RPJMD 2022			TARGET PERUBAHAN RPJMD 2023	KONDISI AKHIR
			2017	2018	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%		
16	Jumlah industri baru	Unit	0	0	40	56	140,00	40	45	112,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laju petumbuhan sektor industri	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	11,88	237,6	5,00	N/A	N/A	5,00	5,00
17	Jumlah desa tematik	Desa	0	0	26	33	126,92	26	6	23,08	17	12	70,59	18	18	100,00	18	59
18	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Desa	N/A	109	36	52	144,44	51	51	100,00	52	134	257,69	41	55	134,15	25	221

Sumber: Tim Penyusun Evaluasi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

2.1.5.2 Capaian Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Majalengka tidak hanya diindikasikan oleh IKU pemerintah daerah, namun juga sangat ditentukan oleh pencapaian IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah merupakan indikator keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah.

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data atau informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintah dan urusan penunjang. Data atau informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi yang menggambarkan capaian kinerja pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2018-2023 berdasarkan tingkat capaiannya. Dari 41 (empat puluh satu) penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) Kabupaten Majalengka tahun 2021, yang memiliki capaian melampaui sebanyak 16 indikator atau 39 persen, tercapai sebanyak 10 indikator atau 24 persen, belum tercapai 13 indikator atau 32 persen, tidak tersedia data sebanyak 2 indikator atau 5 persen.

Tabel 2.109
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelengaraan Urusan Pemerintah Tingkat Hasil/*Outcome* Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
PENDIDIKAN											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DISDIK
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DISDIK
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISDIK
4	APM PAUD	Persen	99.2	92.63	93.38	**ST**	99.4	92.48	93.04	**ST**	DISDIK
5	APM SD/MI	Persen	97.1	90.52	93.22	**ST**	97.3	90.02	92.52	**ST**	DISDIK
6	APM SMP/MTs	Persen	98.1	87.7	89.40	**T**	98.35	90.12	91.63	**ST**	DISDIK
7	APK Non Formal	Persen	86.1	52.92	61.46	**R**	86.4	81.05	93.81	**ST**	DISDIK
8	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Persen	15	20	133.33	**ST**	16.18	15.2	93.94	**ST**	DISDIK
KESEHATAN											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DINKES
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DINKES

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DINKES
4	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah penduduk	Persen	0.001	0.0006	60.00	**R**	0.001	0.0006	60.00	**R**	DINKES
5	Persentase RS Rujukan yang terakreditasi	Persen	1	0.8	80.00	**T**	1	0.8	80.00	**T**	DINKES
6	Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil	Persen	90	90	100.00	**ST**	90	90	100.00	**ST**	DINKES
7	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayana persalinan	Persen	90	90	100.00	**ST**	90	90	100.00	**ST**	DINKES
8	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DINKES
9	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DINKES
10	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	93	93.11	**ST**	100	90	90.00	**T**	DINKES
11	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	50	60	119.12	**ST**	50	50	100.00	**ST**	DINKES
12	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	60	82	136.08	**ST**	60	60	100.00	**ST**	DINKES
13	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar	Persen	25	66	264.56	**ST**	25	25	100.00	**ST**	DINKES

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
14	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	60	89	148.13	**ST**	60	60	100.00	**ST**	DINKES
15	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	50	100	199.58	**ST**	50	50	100.00	**ST**	DINKES
16	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	50	82	164.30	**ST**	50	50	100.00	**ST**	DINKES
17	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	90	69	76.36	**T**	90	60.89	67.66	**S**	DINKES
18	Terjaminnya Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Puskesmas	Persen	85	75	88.41	**T**	85	85	100.00	**ST**	DINKES
19	Persentase alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar	Persen	42	45	108.21	**ST**	42	42	100.00	**ST**	DINKES
20	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	Persen	85	74	87.09	**T**	85	81.19	95.52	**ST**	DINKES
21	Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN	Keluarga	192,402	143922	74.80	**S**	192,402	90,092	46.82	**ST**	DINKES
22	Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	Pegawai	81	100	123.46	**ST**	85	65	76.47	**ST**	DINKES
23	Terpenuhinya Indikator Presentase Instalasi Farnasi yang Melakukan	Persen	0.7	0.9	131.43	**ST**	0.7	0.7	100.00	**ST**	DINKES

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
	Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar										
24	Terlaksanannya pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Toko Obat, Apotek, Industri Perbekalan kesehatan Rumah Tangga, Toko Alat kesehatan dan Optikal	Persen	0.1	0.1	100.00	**ST**	0.1	0.1	100.00	**ST**	DINKES
25	Jumlah UKBM yang Menyelenggarakan Kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh UKBM dikali 100Persen	persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DINKES
RSUD MAJALENGKA											
1	Persentasi ketercapaian Standar Pelayanan Minimal	persen	75	73,21	97.61	**ST**	80	79	98.75	**ST**	RSUD MAJALENGKA
2	Hasil penilaian Akreditasi		Pari purna	Pari purna	100.00	**ST**	Pari purna	Pari purna	100.00	**ST**	RSUD MAJALENGKA
3	Presentasi nilai Indek Kepuasan Masyarakat	persen	81	76,67	94.65	**ST**	85	81	95.29	**ST**	RSUD MAJALENGKA
4	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	85	76,22	89.67	**T**	90	81	90.00	**T**	RSUD MAJALENGKA
RSUD CIDERES											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	77	100.00	**ST**	77.5	82.02	105.83	**ST**	RSUD CIDERES
2	Standar Pelayanan Minimal	persen	73	73	100.00	**ST**	82	82	100.00	**ST**	
3	Akreditasi Rumas Sakit	Nilai	Paripurna	Pari purna	100.00	**ST**	Paripurna	Pari purna	100.00	**ST**	

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
4	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	80	81,37	101.71	**ST**	82.2	82.12	99.90	**ST**	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DPUTR
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DPUTR
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DPUTR
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	73.2	74,22	101.39	**ST**	75.1	75.51	100.55	**ST**	DPUTR
5	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah angga di seluruh kabupaten/kota	Persen	80	80	100.00	**ST**	80.41	80.98	100.71	**ST**	DPKPP
6	Persentase jumlah rumah tangga yangmemperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	68.52	68.52	100.00	**ST**	68.58	69.65	101.56	**ST**	DPKPP
7	persentase drainase pemukiman dalam kondisi baik /tidak tersumbat (Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	Persen	30	30	100.00	**ST**	30.1	30.11	100.03	**ST**	DPKPP

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
	drainase di Kewenangan kab/Kota)										
8	Persentase infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Persen	79.13	79.13	100.00	**ST**	82.24	80.36	97.71	**ST**	DPKPP
9	Persentase kawasanpermukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	79.13	79.13	100.00	**ST**	17.93	27.84	155.27	**ST**	DPKPP
10	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang ditangani	Unit	18	10	55.56	**R**	15	4	26.67	**SR**	DPUTR
11	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang ditangani	Unit	11	16	145.45	**ST**	4	8	200.00	**ST**	DPUTR
12	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	65	75,79	116.60	**ST**	66.15	72.87	110.16	**ST**	DPUTR
13	Jumlah Tenaga Kontruksi yang tersertifikasi	Orang	50	50	100.00	**ST**	100	117	117.00	**ST**	DPUTR
14	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang yang ditetapkan dan disosialisasikan	Dokumen	2	8	400.00	**ST**	1	0	-	**SR**	DPUTR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DPKPP
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DPKPP
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DPKPP
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	unit rumah	25	0	0.00	**SR**	25	53	212.00	**ST**	DPKPP

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampakrelokasi program pemerintah kabupaten/kota	unit rumah	25	0	0.00	**SR**	25	0	-	**SR**	DPKPP
6	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	persen	60	34.4	57.33	**R**	80	85	106.25	**ST**	DPKPP
7	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak	Persen	58.92	69.62	118.16	**ST**	69.19	175	252.93	**ST**	DPKPP
8	Persentase kawasanpermukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	17.93	17.56	97.94	**ST**	27.84	27.84	100.00	**ST**	DPKPP
9	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	6	6	100.00	**ST**	3	2	66.67	**S**	DPKPP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
1	jumlah lokasi untuk pembangunan fasilitas umum	Lokasi	10	6	60.00	**R**	5	2	40.00	**SR**	DPKPP
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	SATPOL PP DAMKAR
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	SATPOL PP DAMKAR
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	75	75.00	**S**	SATPOL PP DAMKAR

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	97.92	97.92	**ST**	SATPOL PP DAMKAR
5	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	80.95	80.95	**T**	SATPOL PP DAMKAR
6	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	CC	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	BPBD
7	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	BPBD
8	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	43	43.00	**SR**	BPBD
9	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	36,250	32,636	90.03	**T**	866	1,323,854	152,870	**ST**	BPBD
10	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	Jiwa	36,250	32,636	90.03	**T**	866	1,323,854	152,870	**ST**	BPBD
11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	11,000	35,544	323.13	**ST**	2,000	3,328	166.40	**ST**	BPBD
12	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	SATPOL PP DAMKAR
13	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	24	20	83.33	**T**	22	15	68.18	**S**	SATPOL PP DAMKAR
SOSIAL											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DINSOS

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DINSOS
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DINSOS
4	Persentase KUBE yang Mandiri	persen	20	20	100.00	**ST**	20	20	100.00	**ST**	DINSOS
5	Persentase (Persen) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	5	5	100.00	**ST**	6	6	100.00	**ST**	DINSOS
6	Jumlah Lansia yang mendapatkan “Rantang Kanyaah”	Orang	830	830	100.00	**ST**	1,000	1,660	166.00	**ST**	DINSOS
7	Persentase Orang miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Pesentase	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DINSOS
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelahtanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DINSOS
9	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DINSOS

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR											
TENAGA KERJA											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DK2UKM
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DK2UKM
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DK2UKM
4	Capaian kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	-	-	-	**SR**	5	3	60.00	**R**	DK2UKM
5	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Orang	90	90	100.00	**ST**	40	135	337.50	**ST**	DK2UKM
6	Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri	Orang	250	20	8.00	**SR**	120	135	112.50	**ST**	DK2UKM
7	Tingkat Tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	20	21	105.00	**ST**	20	20	100.00	**ST**	DK2UKM
8	Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Persen	75	75	100.00	**ST**	75	75	100.00	**ST**	DK2UKM
PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	B+	80.00	**T**	BB	BB	100.00	**ST**	DP3AKB
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DP3AKB

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DP3AKB
4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0.09	0.14	152.44	**ST**	0.1	0.22	220.00	**ST**	DP3AKB
5	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	20	23,37	116.85	**ST**	20	23.08	115.40	**ST**	DP3AKB
6	Persentase anggota perempuan pada organisasi kemasyarakatan	persen	1.45	1,48	102.07	**ST**	1.45	1.45	100.00	**ST**	DP3AKB
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Persen	0.00018	0.00013	72.22	**S**	0.00015	0.00015	100.00	**ST**	DP3AKB
8	Persentase Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri	Persen	0.5	0,52	104.00	**ST**	0.7	0.1	14.29	**SR**	DP3AKB
9	Capaian Data Gender dan Anak	Persen	35	40,07	114.49	**ST**	40	40	100.00	**ST**	DP3AKB
10	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nilai (Minimal)	550	627	114.00	**ST**	600	413.65	68.94	**S**	DP3AKB
11	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0.0038	0.0038	100.00	**ST**	0.0041	0.0041	100.00	**ST**	DP3AKB
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
1	TFR (Total Fertility Rate)	Point	2.27	2,32	102.20	**ST**	2.26	2.26	100.00	**ST**	DP3AKB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	79.96	79,99	100.04	**ST**	79.97	79.97	100.00	**ST**	DP3AKB
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	31.13	5,37	17.25	**SR**	31.11	4.82	15.49	**SR**	DP3AKB

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
PANGAN											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DKP3
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DKP3
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DKP3
4	Capaian Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DKP3
5	Peningkatan skor PPH	Persen	0.5	0,6	120.00	**ST**	0.5	0.6	120.00	**ST**	DKP3
6	Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DKP3
7	Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)	Desa	4	4	100.00	**ST**	4	4	100.00	**ST**	DKP3
8	Capaian Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DKP3
LINGKUNGAN HIDUP											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DLH
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	A	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DLH
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DLH
4	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	3	3	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DLH

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	58.16	65.32	112.31	**ST**	59.36	64.81	109.18	**ST**	DLH
6	Indeks Tutupan Lahan	Poin	50.98	50.97	99.98	**ST**	50.99	50.97	99.96	**ST**	DLH
7	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	31.67	31.67	**ST**	DLH
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DLH
9	Capaian Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	100	0	0.00	**SR**	100	100	100.00	**SR**	DLH
10	jumlah masyarakat dan lembaga yang memperoleh Penghargaan	Buah	9	3	33.33	**SR**	9	2	22.22	**SR**	DLH
11	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DLH
12	Persentase penanganan sampah yang tertangani	Persen	98	66.72	68.08	**S**	99	67.61	68.29	**S**	DLH
13	Persentase Pengembangan dan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka	Persen	12.37	1.9	15.36	**SR**	45.91	5.04	10.98	**SR**	DLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DISDUKCAPIL
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DISDUKCAPIL

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISDUKCAPIL
4	Persentase Kepemilikan KTP	Persen	85	100	117.15	**ST**	90	100	111.11	**ST**	DISDUKCAPIL
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	15	38	250.73	**ST**	20	65	325.00	**ST**	DISDUKCAPIL
6	Persentase Pemutakhiran kartu Keluarga	Persen	75	76	100.88	**ST**	85	90	105.88	**ST**	DISDUKCAPIL
7	Persentasi Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian	Persen	94	99	105.80	**ST**	95	99	104.21	**ST**	DISDUKCAPIL
8	Prosentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISDUKCAPIL
9	Persentase Tempat Perekam Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISDUKCAPIL
10	Persentase OPD yang telah memanfaatkan datakependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	23	55.56	241.57	**ST**	24.07	25	103.86	**ST**	DISDUKCAPIL
11	Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISDUKCAPIL
PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	72.50	**S**	DPMD
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	BB	81.21	**T**	DPMD

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DPMD
4	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	5.4	7	129.63	**ST**	7.88	52.38	664.72	**ST**	DPMD
5	Jumlah Pelaksana Mou yang dilaksanakan dengan pihak ke tiga	MoU	8	15	187.50	**ST**	8	8	100.00	**ST**	DPMD
6	Persentase desa yang menyusun adminstrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DPMD
7	Persentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DPMD
PERHUBUNGAN											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	B	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DISHUB
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DISHUB
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISHUB
4	Persentase Capaian Desa Yang Terlayani Angkutan Umum	persen	60	60	100.00	**ST**	75	75	100.00	**ST**	DISHUB
5	Persentase Pemasangan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	persen	46	45	98.70	**ST**	50	45.59	91.18	**ST**	DISHUB
6	Persentasi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor	persen	90	93	102.96	**ST**	90	78	86.67	**T**	DISHUB

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	B	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DISKOMINFO
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DISKOMINFO
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISKOMINFO
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	60	60	100.00	**ST**	80	80	100.00	**ST**	DISKOMINFO
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	60	60	100.00	**ST**	80	80	100.00	**ST**	DISKOMINFO
6	Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik	Lokasi	6	5	83.33	**T**	6	3	50.00	**SR**	DISKOMINFO
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	80	80	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISKOMINFO
PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
1	Tingkat Keamanan Informasi yang diselenggarakan secara elektronik	Persen	50	35	70.00	**S**	75	75	100.00	**ST**	DISKOMINFO

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											
1	Tingkat koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	10	1.3	13.00	**SR**	16.22	21	129.47	**ST**	DK2UKM
2	Tingkat koperasi sehat	Persen	45	45	100.00	**ST**	10	21	210.00	**ST**	DK2UKM
3	Jumlah Pengurus Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Orang	50	50	100.00	**ST**	125	70	56.00	**R**	DK2UKM
4	Tingkat Koperasi yang berkualitas	Persen	10	10	100.00	**ST**	20	21	105.00	**ST**	DK2UKM
5	Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin	Persen	3	3	100.00	**ST**	3	3	100.00	**ST**	DK2UKM
6	Tingkat Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DK2UKM
TRANSMIGRASI											
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi	persen	0	0	0.00	**SR**	1	-	-	**SR**	DK2UKM
PENANAMAN MODAL											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	B	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DPMTSP
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DPMTSP
3	Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	82.61	82.61	**T**	DPMTSP
4	Peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DPMTSP
5	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi	Sarana/Prasarana	5	5	100.00	**ST**	5	5	100.00	**ST**	DPMTSP
6	Tingkat Perizinan Yang diterbitkan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	98.42	98.42	**ST**	DPMTSP

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
7	Perusahaan PMA dan PMDN yang patuh terhadap Kewajiban	Persen	100	85	85.00	**ST**	100	90	90.00	**T**	DPMTSP
8	Data Perizinan dan Investasi di Kabupaten	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DPMTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DISPORA
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DISPORA
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISPORA
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda	Persen	2	2	100.00	**ST**	2	2	100.00	**ST**	DISPORA
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	44	17,89	40.66	**SR**	48	48	100.00	**ST**	DISPORA
6	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	40	40	100.00	**ST**	43	46	106.98	**ST**	DISPORA
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persen	70	50	71.43	**S**	80	80	100.00	**ST**	DISPORA
8	Peningkatan Infrastruktur keolahragaan	Persen	0.5	1,13	226.00	**ST**	0.8	0.8	100.00	**ST**	DISPORA
9	Tingkat Partisipasi Kepramukaan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISPORA
STATISTIK											
1	Persentase OrganisasPerangkat	Persen	80	80	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISKOMINFO

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
	Daerah (OPD)yang menggunakandata statistik dalammenyusun perencanaanpembangunan daerah										
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	80	80	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISKOMINFO
KEBUDAYAAN											
1	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Event	35	35	100.00	**ST**	35	20	57.14	**R**	DISPARBUD
2	jumlah seni Tradisional yang direvitalisasi	Seni Tradisional	1	5	500.00	**ST**	1	1	100.00	**ST**	DISPARBUD
3	jumlah sejarah desa/kelurahan yang dikelola	Jumlah	1	1	100.00	**ST**	1	1	100.00	**ST**	DISPARBUD
4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	1	1	100.00	**ST**	5	5	100.00	**ST**	DISPARBUD
5	jumlah Museum yang direvitalisasi	Museum	1	1	100.00	**ST**	1	1	100.00	**ST**	DISPARBUD
PERPUSTAKAAN											
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	47	55.79	118.70	**ST**	49	52	106.12	**ST**	ARPUSDA
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	POIN	1.79	4.61	257.54	**ST**	1.8	2.5	138.89	**ST**	ARPUSDA
KEARSIPAN											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	ARPUSDA
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	ARPUSDA

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	ARPUSDA
4	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	persen	45	38	84.44	**T**	50	51	102.00	**ST**	ARPUSDA
5	Rasio pengelola arsip	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	ARPUSDA
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen	45	43	95.56	**ST**	50	50	100.00	**ST**	ARPUSDA
URUSAN PILIHAN											
KELAUTAN DAN PERIKANAN											
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Ton	10	10	100.00	**ST**	10	10.86	108.60	**ST**	DKP3
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten	Persen	10	10.2	102.00	**ST**	10	10.65	106.50	**ST**	DKP3
3	Jumlah omzet pemasaran produk perikanan	Persen	5	5	100.00	**ST**	5	5.72	114.40	**ST**	DKP3
4	Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	Jumlah	30	30	100.00	**ST**	30	50	166.67	**ST**	DKP3
PARIWISATA											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	B	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DISPARBUD
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DISPARBUD

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISPARBUD
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	1.1	1.1	100.00	**ST**	1.1	1.1	100.00	**ST**	DISPARBUD
5	Persentase Desa Wisata Berkembang	persen	15	14	93.33	**ST**	24	15.5	64.58	**R**	DISPARBUD
6	Jumlah usaha parwisata yang distandarisasi	persen	10	10	100.00	**ST**	30	30	100.00	**ST**	DISPARBUD
7	Persentase Jumlah daya tarik yang dipromosikan	persen	10	6	60.00	**R**	10	10	100.00	**ST**	DISPARBUD
8	Persentase Peningkatan Pelaku ekonomi Kreatif	persen	20	20	100.00	**ST**	20	20	100.00	**ST**	DISPARBUD
9	Jumlah Desa Tematik Kreatif	Desa	12	12	100.00	**ST**	6	5	83.33	**T**	DISPARBUD
10	sertifikasi pelaku ekonomi kreatif	persen	5	0	0.00	**SR**	5	5	100.00	**ST**	DISPARBUD
PERTANIAN											
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	80	82	102.50	**ST**	80	80	100.00	**ST**	DKP3
2	Persentase ketersedian prasarana Pertanian	Persen	60	63	105.00	**ST**	60	60	100.00	**ST**	DKP3
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	30	30	100.00	**ST**	30	30	100.00	**ST**	DKP3
4	Luas Lahan Pertanian yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	Hektar	5,000	5,000	100.00	**ST**	5,000	5000	100.00	**ST**	DKP3
5	Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DKP3

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
PERDAGANGAN											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Persen	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	DISPERDAGIN
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	DISPERDAGIN
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISPERDAGIN
4	Infrastruktur Perdagangan yang dibangun	unit	1	0	0.00	**SR**	1	1	100.00	**ST**	DISPERDAGIN
5	Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Refresentatif	Unit	3	5	166.67	**ST**	3	1	33.33	**SR**	DISPERDAGIN
6	Tingkat kinerja realisasi pupuk	Persen	N/A	43.56	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	DISPERDAGIN
7	Pengendalian Pemenuhan Kebutuhan Barang Pokok Penting Bagi Masyarakat	Kali	96	96	100.00	**ST**	96	96	1.00	**ST**	DISPERDAGIN
8	Meningkatnya nilai ekspor	Persen	10	11.24	112.40	**ST**	10	-28.93	- 289.30	**SR**	DISPERDAGIN
9	Tingkat alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yangberlaku	Persen	20	51	255.00	**ST**	20	46.2	231.00	**ST**	DISPERDAGIN
10	Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali	12	12	100.00	**ST**	12	7	58.33	**R**	DISPERDAGIN
PERINDUSTRIAN											
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	IKM	40	104	260.00	**ST**	40	110	275.00	**ST**	DISPERDAGIN

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	3	300.00	**ST**	1	1	100.00	**ST**	DISPERDAGIN
URUSAN PENUNJANG											
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	BAPPEDALITBANG
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	BAPPEDALITBANG
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	97	97.00	**ST**	BAPPEDALITBANG
4	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Persen	96	99	103.13	**ST**	98	95	96.94	**ST**	BAPPEDALITBANG
5	Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD	Persen	96	99	103.13	**ST**	98	95	96.94	**ST**	BAPPEDALITBANG
6	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD	Persen	96	99	103.13	**ST**	98	95	96.94	**ST**	BAPPEDALITBANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan	persen	100	100	100.00	**ST**	100	98	98.00	**ST**	BAPPEDALITBANG

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
2	Persentase Inovasi Daerah yang diimplmentasikan	persen	80	95	118.75	**ST**	85	66	77.65	**T**	BAPPEDALITBANG
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	BKPSDM
2	Capaian SKM Perangkat Daerah (B)	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	BB	100.00	**ST**	BKPSDM
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran (C)	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	BKPSDM
4	Rasio pegawai Fungsional	Persen	68	71.57	105.25	**ST**	70	74.21	106.01	**ST**	BKPSDM
5	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	BKPSDM
6	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Persen)	Rasio	6	7.11	118.50	**ST**	6.51	11.21	172.20	**ST**	BKPSDM
7	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	58	52.05	89.74	**T**	59	34	57.63	**R**	BKPSDM
8	Persentase pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	50	88.29	176.58	**ST**	60	97	161.67	**ST**	BKPSDM
KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	BKAD
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	BKAD
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	98.76	98.76	**ST**	100	100	100.00	**ST**	BKAD

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
4	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	BKAD
5	Aset yang diamankan secara fisik dan Legal	Persen	100	76	75.97	**T**	100	60	60.00	**R**	BKAD
6	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	BAPENDA
7	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	BAPENDA
8	Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100	97.89	97.89	**ST**	100	51.78	51.78	**R**	BAPENDA
9	Capaian realisasi Penerimaan PAD	persen	100	87.63	87.63	**T**	100	87.95	87.95	**T**	BAPENDA
FUNGSI LAINNYA											
SETDA											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	SETDA
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	SETDA
3	Capaian IKM Kabupaten	Indek	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	SETDA
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	SETDA
5	Capaian Lakip Kabupaten	Nilai	BB	B	100.00	**ST**	BB	B	95.71	**T**	SETDA
6	Persentase jumlah Rumah Ibadah yang aktif	Persen	35	35	100.00	**ST**	40	40	100.00	**ST**	SETDA
7	Persentase sarana prasarana ibadah yang terfasilitasi	Persen	50	50	100.00	**ST**	55	100	181.82	**ST**	SETDA
8	Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi	Persen	74	74	100.00	**ST**	77	100	129.87	**ST**	SETDA

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
9	Persentase tokoh agama yang terfasilitasi	Persen	56	56	100.00	**ST**	62	100	161.29	**ST**	SETDA
10	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Tinggi	Tinggi	100.00	**ST**	Tinggi	Tinggi	100.00	**ST**	SETDA
11	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Regulasi dan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	SETDA
12	Tingkat Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	SETDA
13	Persentase Kegiatan Pembangunan yang Berhasil dilaksanakan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	SETDA
14	Persentase Jumlah Paket yang berhasil Dilelangkan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	SETDA
15	Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD	Persen	5	5	100.00	**ST**	5	3.5	70.00	**S**	SETDA
INSPEKTORAT											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	INSPEKTORAT
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	INSPEKTORAT
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	INSPEKTORAT
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persen	80	80	100.00	**ST**	90	90	100.00	**ST**	INSPEKTORAT
5	Tingkat Maturitis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2	66.67	**S**	3	2	66.67	**S**	INSPEKTORAT

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2	66.67	**S**	3	2	66.67	**S**	INSPEKTORAT
SEKRETARIAT DPRD											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	Setwan
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	Setwan
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	92	91.60	**ST**	100	92	92.00	**ST**	Setwan
4	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	persen	100	85	85.25	**T**	100	87.26	87.26	**T**	Setwan
5	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengganggaran dan pengawasan	Persen	100	85	85.00	**T**	100	86	86.00	**T**	Setwan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	KESBANGPOL
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	KESBANGPOL
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	KESBANGPOL
4	Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	5	5	100.00	**ST**	5	5	100.00	**ST**	KESBANGPOL

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
5	Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	KESBANGPOL
6	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	KESBANGPOL
7	Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	KESBANGPOL
8	Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	KESBANGPOL
KECAMATAN											
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100.00	**ST**	BB	BB	100.00	**ST**	KECAMATAN
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100.00	**ST**	B	B	100.00	**ST**	KECAMATAN
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	KECAMATAN
4	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	KECAMATAN
5	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	KECAMATAN
6	Persentase penanganan gangguan ketentraman	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	KECAMATAN

NO.	INDIKATOR KINERJA (*outcome*)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								PERANGKAT DAERAH
			2021				2022				
			TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI	
	dan ketertiban umum skala kecamatan										
7	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100.00	**ST**	100	100	100.00	**ST**	KECAMATAN
8	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	100.00	**ST**	10	10	100.00	**ST**	KECAMATAN

Sumber: Tim Penyusunan Evaluasi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

ST : Sangat Tinggi

T : Tinggi

S : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Pada bab mengenai gambaran keuangan daerah ini, akan diuraikan secara rinci kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa tiga tahun mendatang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Diperlukan analisa untuk mengetahui pertumbuhan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada periode selanjutnya. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Kemampuan keuangan APBD sangat dipengaruhi oleh APBN, dimana APBN ditentukan oleh perhitungan asumsi makro APBN yang dipengaruhi oleh:

1) Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM);

2) Laju pertumbuhan perekonomian nasional yang berimbas kepada perekonomian daerah;
3) Terjadinya laju inflasi sebagai akibat terjadinya krisis di negara Eropa dan Amerika yang mengakibatkan naiknya harga-harga impor; dan
4) Melemahnya nilai tukar rupiah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu tersebut dilakukan dari pos pendapatan daerah serta belanja daerah dan baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka, dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dianalisa dengan menghitung dari tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya diantaranya dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dapat disajikan berikut ini :

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Secara umum komponen pendapatan terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak /

Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Majalengka selama tahun 2019 tercatat mencapai Rp. 2.964.529.492.654,55, sedangkan realisasi pendapatan Tahun 2018 mencapai Rp. 2.817.970.771.089,60. Hal ini terjadi peningkatan PAD pada Tahun 2019. Komponen pendapatan daerah tersebut terdiri dari:

1) *Pendapatan Asli Daerah*, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2) *Dana Perimbangan*, yaitu dari dana alokasi khusus.
3) *Lain-lain Pendapatan Daerah*, terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, bantuan keuangan dari provinsi.

Bila dilihat dari penerimaan daerah, maka Bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka selama Tahun Anggaran 2018-2022 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Sedangkan bagian terbesar pendapatan masih berada pada bagian pendapatan dari bagian dana perimbangan pada tahun 2020 yang mencapai Rp. 2.609.883.566.369,00,- Sumber terbesar komponen ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen kedua terbesar adalah Lain-lain pendapatan yang sah, dengan sumber terbesar berasal dari pos dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sedangkan terakhir adalah komponen PAD, dengan sumber terbesar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan daerah yang disajikan setiap tahunnya menginformasikan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018–2022. Realisasi pendapatan pada periode 2018-2022 terjadi kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,44 persen, sebagaimana disajikan pada tabel 3.1.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan bersumber dari Dana Transfer, dengan peningkatan yang cukup signifikan sebesar 2,21 persen.

Tabel 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022

NO.	U R A I A N	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	RATA-RATA (%)
I.	**PENDAPATAN**						
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**						
A.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	144.491.759.894,00	123.654.331.397,00	119.119.943.663,00	143.392.442.998,00	156.740.101.171,00	1,20
B.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	18.506.497.178,00	18.875.051.518,00	17.631.278.296,00	15.513.665.009,00	19.931.473.893,00	0,85
C.	Pend.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.229.014.024,00	7.825.254.542,00	6.551.818.643,00	5.944.980.467,00	7.409.795.269,00	- 0,56
D.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	279.746.858.792,60	289.488.627.137,55	347.577.723.505,06	301.937.407.131,11	338.375.049.253,61	3,93
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**449.974.129.888,60**	**439.843.264.594,55**	**490.880.764.107,06**	**466.788.495.605,11**	**522.456.419.586,61**	**3,40**
II.	**PENDAPATAN TRANSFER**						
1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA**						
A.	Bagi Hasil (Pajak ;N-Pajak/SDA) - LRA	77.319.204.617,00	71.657.874.834,00	95.224.680.505,00	126.859.688.460,00	124.558.462.548,00	9,98
B.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.170.272.587.360,00	1.167.367.009.900,00	1.127.919.598.000,00	1.112.158.811.000,00	1.101.637.280.584,00	- 1,53
C.	Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik;N-Fisik) - LRA	420.418.332.786,00	433.231.749.184,00	420.882.702.036,00	457.671.418.488,00	530.214.922.116,00	5,44
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**1.668.010.124.763,00**	**1.672.256.633.918,00**	**1.644.026.980.541,00**	**1.696.689.917.948,00**	**1.756.410.665.248,00**	**1,26**
2.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA**						
A.	Dana Otonomi Khusus - LRA	0,00	0,00	0,00	53.540.146.000,00	19.160.198.000,00	- 19,86
B.	Dana Penyesuaian - LRA	312.485.897.000,00	414.881.243.000,00	476.635.459.000,00	391.668.514.000,00	389.573.880.000,00	3,85
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**312.485.897.000,00**	**414.881.243.000,00**	**476.635.459.000,00**	**445.208.660.000,00**	**408.734.078.000,00**	**5,41**

NO.	U R A I A N	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	RATA-RATA (%)
3.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA**						
A.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	143.368.557.287,00	151.238.495.571,00	148.142.636.893,00	150.518.504.868,00	176.100.247.504,00	4,80
B.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bankeu) - LRA	120.104.782.151,00	153.238.495.571,00	341.078.489.935,00	159.266.770.148,00	128.804.395.932,00	15,28
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	**263.473.339.438,00**	**304.476.991.142,00**	**489.221.126.828,00**	**309.785.275.016,00**	**304.904.643.436,00**	**2,07**
	Total Pendapatan Transfer	**2.243.969.361.201,00**	**2.391.614.868.060,00**	**2.609.883.566.369,00**	**2.451.683.852.964,00**	**2.470.049.386.684,00**	**2,21**
III.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA**						
A.	Pendapatan Hibah - LRA	124.027.280.000,00	133.071.360.000,00	138.745.014.300,00	152.011.604.591,00	12.683.067.852,00	269,73
B.	Dana Darurat - LRA	0,00	0,00	0,00	-	-	-
C.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	**124.027.280.000,00**	**133.071.360.000,00**	**138.745.014.300,00**	**152.011.604.591,00**	**12.683.067.852,00**	**269,73**
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.817.970.771.089,60**	**2.964.529.492.654,55**	**3.239.509.344.776,06**	**3.070.483.953.160,11**	**3.005.188.874.122,61**	**1,44**

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakuki sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Tolok ukur meningkatnya kegiatan pembangunan suatu daerah dapat diamati dari realisasi pengeluaran/belanja pemerintah daerah, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-progam Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

Realisasi Belanja dapat menjadi pengukuran kinerja suatu daerah, yaitu semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Pada periode Tahun 2018-2022, belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata–rata kenaikan sebesar 1,55 persen. Belanja operasional mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,82 persen. Komponen Belanja transfer rata–rata pertumbuhannya sebesar 3,89 persen. Komponen belanja modal terjadi penurunan yaitu rata-rata sebesar 15,48 persen. Penurunan tersebut terjadi pada Tahun 2020 sampai dengan 2021, yaitu terjadi penurunan sebesar Rp 201.718.689.937,00.

Jenis pengeluaran terbesar berasal dari Belanja Operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan. Rencana anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, bahwa kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp. 611.902.668.837,11, nilai tersebut termasuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018–2022

U R A I A N	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	1.278.366.233.422,00	1.254.285.715.876,00	1.202.589.347.980,00	1.195.391.829.485,00	1.199.383.502.524,00
Belanja Barang dan Jasa	371.066.139.487,00	567.090.560.168,95	601.470.484.617,00	710.160.988.874,00	776.033.932.607,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	17.912.483.000,00	28.854.900.000,00	30.840.000.000,00	45.940.749.429,00	47.392.283.830,00
Belanja Bantuan Sosial	-	3.115.000.000,00	36.500.000.000,00	6.287.800.000,00	13.688.600.000,00
Jumlah Belanja Operasi	**1.667.344.855.909,00**	**1.853.346.176.044,95**	**1.871.399.832.597,00**	**1.957.781.367.788,00**	**2.036.498.318.961,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	6.725.015.782,00	13.031.650.596,00	4.526.627.200,00	3.160.673.641,00	4.308.386.920,00
Belanja Peralatan dan Mesin	96.292.839.349,00	157.538.063.903,00	198.690.351.913,00	100.872.539.495,00	75.534.381.670,00
Belanja Gedung dan Bangunan	115.510.214.410,00	140.011.073.003,00	165.516.946.908,00	207.768.693.910,00	80.357.568.073,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	418.073.533.108,00	279.263.583.063,00	384.755.890.755,00	258.339.704.166,00	249.929.058.518,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	45.003.094.181,00	53.819.327.290,00	38.953.967.986,00	20.583.483.613,00	9.834.378.832,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-	-
Jumlah Belanja Modal	**681.604.696.830,00**	**643.663.697.855,00**	**792.443.784.762,00**	**590.725.094.825,00**	**419.963.774.013,00**
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	23.297.126.717,00	29.168.231.234,00	9.374.622.131,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	**0,00**	**23.297.126.717,00**	**29.168.231.234,00**	**9.374.622.131,00**

U R A I A N	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
JUMLAH BELANJA	**2.348.949.552.739,00**	**2.497.009.873.899,95**	**2.687.140.744.076,00**	**2.577.674.693.847,00**	**2.465.836.715.105,00**
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	13.371.277.500,00	11.868.502.000,00	14.101.448.000,00	15.827.425.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	**0,00**	**13.371.277.500,00**	**11.868.502.000,00**	**14.101.448.000,00**	**15.827.425.000,00**
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	442.082.036.096,00	501.763.591.000,00	525.152.321.800,00	514.123.393.432,00	508.128.850.229,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	885.897.900,00	897.173.755,00	1.008.406.500,00	0,00	0,00
Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	**442.967.933.996,00**	**502.660.764.755,00**	**526.160.728.300,00**	**514.123.393.432,00**	**508.128.850.229,00**
JUMLAH TRANSFER	**442.967.933.996,00**	**516.032.042.255,00**	**538.029.230.300,00**	**528.224.841.432,00**	**523.956.275.229,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**2.791.917.486.735,00**	**3.013.041.916.154,95**	**3.225.169.974.376,00**	**3.105.899.535.279,00**	**2.989.792.990.334,00**

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

C. Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2023 meliputi:

1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah).

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 adalah:

1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD.
2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman mana kala terjadi surplus anggaran.

Di bawah ini disajikan Data Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022 sebagaimana Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019–2021

URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA	164.057.259.588,55	159.040.827.837,15	104.578.310.809,75	115.916.681.211,26	74.502.501.490,37
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	19.299.465.800,00	-	1.450.000,00	35.315.682,00
Penerimaan Kembali Piutang	5.648.183,00	4.997.500,00	3.000.000,00	0	0
Jumlah Penerimaan	**164.062.907.771,55**	**178.345.291.137,15**	**104.581.310.809,75**	**115.918.131.211,26**	**74.537.817.172,37**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	-	-	-	10.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	9.157.285.100,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	13.899.998.915,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank	-	19.299.465.800,00	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran	**31.000.000.000,00**	**28.456.750.900,00**	**3.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**23.899.998.915,00**
PEMBIAYAAN NETO	**133.062.907.771,55**	**149.888.540.237,15**	**101.581.310.809,75**	**109.918.131.211,26**	**50.637.818.257,37**

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

).

D. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah data yang menyajikan posisi keuangan Kabupaten Majalengka yang meliputi asset, kewajiban, dan equitas dana pada suatu saat tertentu. Aset memberikan informasi tentang sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satu moneter. Asset terdiri dari dari asset lancar, investasi jangka Panjang, asset teap, dana cadangan, dan asset lainnya. Gambaran neraca daerah Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu Tahun 2018–2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Neraca Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2019	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022
ASET					
ASET LANCAR					
Kas	**159.116.192.126,15**	**104.579.507.156,75**	**115.847.804.108,26**	**70.323.303.469,37**	**56.554.493.591,98**
Kas di Kas Daerah	142.662.964.787,00	84.207.124.474,00	82.254.355.261,00	46.307.679.497,00	32.062.361.029,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	18.000.000,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	176.645,00	1.912.950,00	-	-	56.138.983,00
Kas di BLUD	10.430.324.445,60	9.452.075.533,20	30.003.087.677,26	22.320.995.442,37	24.342.057.071,98
Kas di JKN	5.190.592.773,55	6.977.591.451,55	2.764.231.519,00	1.337.337.817,00	538.679,00
Kas di BOS	409.786.591,00	777.364.043,00	624.219.131,00	339.290.713,00	45.095.991,00
Kas di Rekening Penampungan PBB	420.309.264,00	6.153.605,00	-	-	664.892,00
Kas Lainnya	2.037.620,00	3.157.285.100,00	201.910.520,00	-	47.636.946,00
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Piutang	**136.383.255.324,42**	**147.417.483.766,02**	**143.661.710.551,22**	**201.582.662.740,22**	**166.002.052.278,14**
Piutang Bagi Hasil	6.926.372.471,00	9.553.095.462,00	17.480.689.477,00	127.462.348.186,78	141.710.565.455,78
Piutang Retribusi	392.683.400,00	392.683.400,00	392.683.400,00	695.257.400,00	392.683.400,00
Piutang Pajak Daerah	70.511.133.258,78	91.717.667.953,78	112.136.118.871,78	8.843.289.423,00	-
Piutang Lainnya	58.553.066.194,64	45.754.036.950,24	13.652.218.802,44	64.581.767.730,44	23.898.803.422,36
Penyisihan Piutang	**-27.503.299.788,56**	**-43.508.914.423,36**	**-62.905.146.045,27**	**-86.049.601.814,57**	**-107.732.608.688,12**
Penyisihan Piutang Retribusi	-294.512.550,00	-392.683.400,00	-392.683.400,00	-76.096.653.743,53	-95.822.760.957,28
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-19.783.721.656,63	-35.318.794.539,68	-54.077.865.531,53	-392.683.400,00	-392.683.400,00
Penyisihan Piutang Lainnya	-7.425.065.581,93	-7.797.436.483,68	-8.434.597.113,74	-9.560.264.671,04	-11.517.164.330,84
Bagian Lancar Pinjaman	**73.636.250,00**	**54.507.321,50**	**47.582.500,13**	**31.297.976,00**	**13.486.667,00**
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	73.636.250,00	54.507.321,50	47.582.500,13	31.297.976,00	13.486.667,00

URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2019	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022
Persediaan	**24.416.109.019,94**	**22.835.281.138,74**	**32.897.805.806,07**	**43.371.102.965,19**	**42.783.324.139,51**
Persediaan	24.416.109.019,94	22.835.281.138,74	32.897.805.806,07	43.371.102.965,19	42.783.324.139,51
Biaya Dibayar Dimuka	**46.408.941,67**	**61.363.825,00**	**139.113.391,67**	**139.572.758,33**	**130.973.858,33**
Biaya Dibayar Dimuka	46.408.941,67	61.363.825,00	139.113.391,67	139.572.758,33	130.973.858,33
Jumlah Aset Lancar	**292.532.301.873,63**	**231.439.228.784,65**	**229.688.870.312,08**	**229.398.338.094,54**	**157.751.721.846,84**
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**4.514.253.424,00**	**4.509.255.924,00**	**4.506.255.924,00**	**4.510.140.924,00**	**4.510.140.924,00**
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-
Investasi dalam obligasi	-	-	-	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
Dana Bergulir	3.169.293.424,00	3.164.295.924,00	3.161.295.924,00	3.165.180.924,00	3.165.180.924,00
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**-3.169.293.424,00**	**-3.164.295.924,00**	**-3.161.295.924,00**	**-3.165.180.924,00**	**-3.165.180.924,00**
Penyisihan Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi dalam obligasi	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
Penyisihan Dana Bergulir	-3.169.293.424,00	-3.164.295.924,00	-3.161.295.924,00	-3.165.180.924,00	-3.165.180.924,00
Penyisihan Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Non Permanen	**1.344.960.000,00**	**1.344.960.000,00**	**1.344.960.000,00**	**1.344.960.000,00**	**1.344.960.000,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen	**57.527.037.024,69**	**62.648.548.017,74**	**65.363.538.194,32**	**74.561.618.777,43**	**88.461.617.692,43**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	57.527.037.024,69	62.648.548.017,74	65.363.538.194,32	74.561.618.777,43	88.461.617.692,43
Investasi Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-

URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2019	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022
Penyisihan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen	**57.527.037.024,69**	**62.648.548.017,74**	**65.363.538.194,32**	**74.561.618.777,43**	**88.461.617.692,43**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**58.871.997.024,69**	**63.993.508.017,74**	**66.708.498.194,32**	**75.906.578.777,43**	**89.806.577.692,43**
ASET TETAP					
Tanah	755.530.615.865,08	775.434.425.361,08	787.662.435.081,08	810.646.405.332,08	814.564.465.852,08
Peralatan dan Mesin	660.302.951.244,55	806.690.014.191,76	991.303.714.642,53	1.103.138.977.237,22	1.179.472.582.781,22
Gedung dan Bangunan	1.314.452.835.842,43	1.434.807.755.043,14	1.514.849.445.004,59	1.762.481.098.724,16	1.842.838.666.797,16
Jalan Irigasi dan Jaringan	2.584.610.328.557,35	2.646.610.318.756,04	2.945.382.746.022,13	3.155.861.774.104,39	3.405.790.832.622,39
Aset Tetap Lainnya	112.316.925.821,20	136.010.426.346,40	148.882.379.026,40	159.394.685.519,40	169.184.114.351,40
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.305.761.224,00	17.235.531.550,00	91.270.634.933,00	6.295.998.779,00	6.295.998.779,00
Akumulasi Penyusutan	-1.275.706.388.053,33	-1.458.383.052.924,37	-1.718.724.321.744,79	-1.997.587.527.611,71	0
Jumlah Aset Tetap	**4.153.813.030.501,28**	**4.358.405.418.324,05**	**4.760.627.032.964,94**	**5.000.231.412.084,55**	**7.418.146.661.183,26**
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.072.877.103,00	154.197.245.623,00	169.479.238.654,00
Jumlah Dana Cadangan	**150.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**	**150.072.877.103,00**	**154.197.245.623,00**	**169.479.238.654,00**
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	-	12.653.571,50	3.369.642,88	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	17.432.955.400,00	17.672.012.650,00	18.329.935.050,00	18.533.716.800,00	18.533.716.800,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-14.388.498.575,00	-14.939.198.950,00	-15.512.672.425,00	-16.015.409.462,50	-16.015.409.462,50
Aset Lain-lain	127.318.867.003,69	130.253.393.528,68	131.105.418.885,68	136.738.407.648,46	136.738.407.648,46
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	-50.554.806.031,56	-54.705.775.898,10	-52.959.971.815,54	-59.109.732.617,50	-59.109.732.617,50
Jumlah Aset Lainnya	**79.808.517.797,13**	**78.293.084.902,08**	**80.966.079.338,02**	**80.146.982.368,46**	**80.146.982.368,46**

URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2019	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022
JUMLAH ASET	**4.735.025.847.196,73**	**4.882.131.240.028,52**	**5.288.063.357.912,35**	**5.539.880.556.947,98**	**7.915.331.181.744,99**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	122.122.355.699,40	63.468.931.480,89	56.402.450.287,00	85.084.279.607,00	49.068.413.817,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	293.806.667,00	931.354.167,00	2.578.786.883,33	782.747.583,33	963.866.166,66
Utang Belanja	-	-	-	10.798.469.393,00	3.348.403.855,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	760.127.263,00	908.272.651,00	835.153.550,00	985.472.437,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**123.176.289.629,40**	**65.308.558.298,89**	**59.816.390.720,33**	**97.650.969.020,33**	**53.380.683.838,66**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	**123.176.289.629,40**	**65.308.558.298,89**	**59.816.390.720,33**	**97.650.969.020,33**	**53.380.683.838,66**
EKUITAS					
Ekuitas	4.611.849.557.567,33	4.816.822.681.729,63	5.228.246.967.192,02	5.442.229.587.927,65	5.864.362.970.294,62
Jumlah Ekuitas	**4.611.849.557.567,33**	**4.816.822.681.729,63**	**5.228.246.967.192,02**	**5.442.229.587.927,65**	**5.864.362.970.294,62**
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	**4.735.025.847.196,73**	**4.882.131.240.028,52**	**5.288.063.357.912,35**	**5.539.880.556.947,98**	**5.917.743.654.133,28**

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Hal-hal yang perlu diuraikan lebih lanjut antara lain perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas. Adapun perkembangan neraca daerah dapat digambarkan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Neraca Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022

URAIAN	RATA PETUMBUHAN (%)
ASET	
ASET LANCAR	
Kas	-113,24
Kas di Kas Daerah	-160,53
Kas di Bendahara Pengeluaran	100,00
Kas di Bendahara Penerimaan	90,77
Kas di BLUD	25,81
Kas di JKN	-62.274,13
Kas di BOS	-224,32
Kas di Rekening Penampungan PBB	-6.730,29
Kas Lainnya	-1.363,77
Investasi Jangka Pendek	0,00
Piutang	28,25
Piutang Bagi Hasil	161,65
Piutang Retribusi	24,26
Piutang Pajak Daerah	-1.126,71
Piutang Lainnya	-226,81
Penyisihan Piutang	99,55
Penyisihan Piutang Retribusi	129,63
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-13.592,69
Penyisihan Piutang Lainnya	28,35
Bagian Lancar Pinjaman	-134,69
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-134,69
Persediaan	47,47
Persediaan	47,47
Biaya Dibayar Dimuka	78,95
Biaya Dibayar Dimuka	78,95
Jumlah Aset Lancar	-38,64
	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-0,09
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00
Investasi dalam obligasi	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00

URAIAN	RATA PETUMBUHAN (%)
Dana Bergulir	-0,13
Deposito Jangka Panjang	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-0,13
Penyisihan Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00
Penyisihan Investasi dalam obligasi	0,00
Penyisihan Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00
Penyisihan Dana Bergulir	-0,13
Penyisihan Deposito Jangka Panjang	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen	0,00
	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	28,59
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	28,59
Investasi Pemerintah Lainnya	0,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00
Penyisihan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
Penyisihan Investasi Pemerintah Lainnya	0,00
Jumlah Investasi Permanen	28,59
	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	28,06
	0,00
ASET TETAP	0,00
Tanah	7,07
Peralatan dan Mesin	48,53
Gedung dan Bangunan	28,81
Jalan Irigasi dan Jaringan	20,99
Aset Tetap Lainnya	34,11
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-1.181,92
Akumulasi Penyusutan	41,63
Jumlah Aset Tetap	26,08
	0,00
DANA CADANGAN	0,00
Dana Cadangan	4,98
Jumlah Dana Cadangan	4,98
	0,00
ASET LAINNYA	0,00
Tagihan Jangka Panjang	-175,52
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tidak Berwujud	6,04
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	10,52
Aset Lain-lain	7,02
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	14,70
Jumlah Aset Lainnya	0,34
	0,00
JUMLAH ASET	22,74

URAIAN	RATA PETUMBUHAN (%)
	0,00
KEWAJIBAN	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga	-89,58
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
Utang Bunga	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	-92,42
Utang Belanja	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	22,81
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-79,78
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
Utang Dalam Negeri	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	-79,78
	0,00
EKUITAS	0,00
Ekuitas	17,86
Jumlah Ekuitas	17,86
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	16,83

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

.

3.1.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Majalengka periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian, serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3) Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4) Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8) Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9) Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan penerimaan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3) Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk dana perimbangan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai kewenangannya.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1) Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
    a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
    b. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
    c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
    d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan antara lain *drive thru*, layanan SMS, Gebyar Pamer, Gebyar Jamu, Gebyar PDaja, Tulus Baper, Laman Asih, Jonita Pamer, Perjaka, Ditabok Tapingbok, dan SIPP, Aplikasi Administrasi Pos PBB. Selain itu dilakukan kerjasama dengan beberapa toko ritel dalam rangka kemudahan pelayanan pembayaran.
    e. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

f. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya yaitu mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik. Melakukan merger antara BUMD PD. Apotik Silih Asih dengan Perumda SMU menjadi PT. SMU.
g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2) Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui :
   a. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3) Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
   a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
   b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
   c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

B. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :

1) Dialokasikan untuk membiayai belanja operasional wajib dan mengikat. Komponen belanja operasional wajib dan mengikat meliputi : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet; Belanja Premi Asuransi;Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
2) Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

a. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

3) Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan kabupaten, meliputi 29 (dua puluh sembilan) jenis pelayanan dasar yaitu : pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, PAUD, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni pada korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana daerah, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs).*

4) Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

5) Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

6) Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber

daya insani.

7) Penggunaan dana fungsi infrastruktur 15 persen dari APBD dalam fungsi peningkatan infrastruktur
8) Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
9) Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial semua yang terdampak pandemi COVID-19.

C. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pengeluaran diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut :

1) Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
2) Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah;
3) Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian; dan

D. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja Kabupaten Majalengka pada periode 2018-2022 dengan menyajikan analisis proporsi realisasi terhadap anggaran diuraikan pada subbab ini.

1) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Rata–rata persentase realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2018–2022 sebesar 94,80 persen, dengan rata-rata realisasi terhadap anggaran Belanja operasi sebesar 93,62 persen dan Belanja modal sebesar 95,82 persen. Belanja Tidak Terduga sebesar 56,87 serta Belanja Transfer sebesar 98,90 persen. Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, secara rinci disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Majalengka Tahun 2018–2022

U R A I A N	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA															
BELANJA OPERASI															
Belanja Pegawai	1.361.189.190.250,55	1.278.366.233.422,00	93,92	1.303.825.599.533,99	1.254.285.715.876,00	96,20	1.305.348.335.210,57	1.202.589.347.980,00	92,13	1.226.278.057.265,00	1.195.391.829.485,00	97,48	1.260.998.205.453,00	1.199.383.502.524,00	95,11
Belanja Barang dan Jasa	429.481.520.800,02	371.066.139.487,00	86,40	656.201.949.991,44	567.090.560.168,95	86,42	653.745.554.255,43	601.470.484.617,00	92,00	788.268.786.077,00	710.160.988.874,00	90,09	827.422.077.991,00	776.033.932.607,00	93,79
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	18.226.950.000,00	17.912.483.000,00	98,27	29.288.700.000,00	28.854.900.000,00	98,52	36.434.900.000,00	30.840.000.000,00	84,64	46.883.076.500,00	45.940.749.429,00	97,99	47.948.155.650,00	47.392.253.630,00	98,84
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	0,00	0,00	3.515.000.000,00	3.115.000.000,00	88,62	36.900.000.000,00	36.500.000.000,00	98,92	6.305.000.000,00	6.287.800.000,00	99,73	13.746.200.000,00	13.688.600.000,00	99,58
Jumlah Belanja Operasi	**1.667.344.855.909,00**	**1.667.344.855.909,00**	**100,00**	**1.992.831.249.525,43**	**1.853.346.176.044,95**	**93,00**	**2.032.428.789.466,00**	**1.871.399.832.597,00**	**92,08**	**2.067.734.919.842,00**	**1.957.781.367.788,00**	**94,68**	**2.150.114.639.094,00**	**2.036.498.288.761,00**	**94,72**
BELANJA MODAL															
Belanja Tanah	16.975.948.125,00	6.725.015.782,00	39,61	40.605.468.403,17	13.031.650.596,00	32,09	4.532.999.200,00	4.526.627.200,00	99,86	3.392.005.100,00	3.160.673.641,00	93,18	6.645.003.000,00	4.308.386.920,00	64,84
Belanja Peralatan dan Mesin	103.373.887.088,93	96.292.839.349,00	93,15	166.477.376.176,38	157.538.063.903,00	94,63	205.770.690.838,00	198.690.351.913,00	96,56	105.174.053.005,00	100.872.539.495,00	95,91	85.005.110.193,00	75.534.381.670,00	88,86
Belanja Gedung dan Bangunan	122.131.318.514,03	115.510.214.410,00	94,58	150.806.702.568,00	140.011.073.003,00	92,84	179.539.455.175,92	165.516.946.908,00	92,19	212.386.185.002,00	207.768.693.910,00	97,83	81.538.503.859,00	80.357.568.073,00	98,55
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	425.112.018.591,74	418.073.533.108,00	98,34	283.028.711.424,34	279.263.583.063,00	98,67	387.697.459.707,89	384.755.890.755,00	99,24	260.831.984.917,00	258.339.704.166,00	99,04	253.073.252.705,00	249.929.058.518,00	98,76
Belanja Aset Tetap Lainnya	54.660.960.800,74	45.003.094.181,00	82,33	57.364.075.731,00	53.819.327.290,00	93,82	39.839.342.464,00	38.953.967.986,00	97,78	21.677.779.100,00	20.583.483.613,00	94,95	9.976.221.397,00	9.834.378.832,00	98,58
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
Jumlah Belanja Modal	**722.254.133.119,68**	**681.604.696.830,00**	**94,37**	**698.282.334.302,89**	**643.663.697.855,00**	**92,18**	**817.379.947.385,81**	**792.443.784.762,00**	**96,95**	**603.462.007.124,00**	**590.725.094.825,00**	**97,89**	**436.238.091.154,00**	**419.963.774.013,00**	**96,27**
BELANJA TAK TERDUGA															
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	-	2.000.000.000,00	0,00	0,00	27.448.872.100,00	23.297.126.717,00	84,87	41.164.260.149,00	29.168.231.234,00	70,86	13.068.500.000,00	9.374.622.131,00	71,73
Jumlah Belanja Tak Terduga	**2.000.000.000,00**	**-**	-	**2.000.000.000,00**	**0,00**	0,00	**27.448.872.100,00**	**23.297.126.717,00**	**84,87**	**41.164.260.149,00**	**29.168.231.234,00**	**70,86**	**13.068.500.000,00**	**9.374.622.131,00**	**71,73**
JUMLAH BELANJA	**2.533.551.794.170,25**	**2.348.949.552.739,00**	**92,71**	**2.693.113.583.828,32**	**2.497.009.873.899,95**	**92,72**	**2.877.257.608.951,81**	**2.687.140.744.076,00**	**93,39**	**2.712.361.187.115,00**	**2.577.674.693.847,00**	**95,03**	**2.599.421.230.248,00**	**2.465.836.684.905,00**	**94,86**
TRANSFER															
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN															
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	15.459.647.724,30	0,00	0,00	16.684.924.778,30	13.371.277.500,00	80,14	18.781.450.295,77	11.868.502.000,00	63,19	19.829.136.989,00	14.101.448.000,00	71,11	21.766.833.369,00	15.827.425.000,00	72,71
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	**15.459.647.724,30**	**0,00**	**0,00**	**16.684.924.778,30**	**13.371.277.500,00**	**80,14**	**18.781.450.295,77**	**11.868.502.000,00**	**63,19**	**19.829.136.989,00**	**14.101.448.000,00**	**71,11**	**21.766.833.369,00**	**15.827.425.000,00**	**72,71**

U R A I A N	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN															
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	442.082.036.100,00	442.082.036.096,00	100,00	502.149.216.390,00	501.763.591.000,00	99,92	525.197.321.800,00	525.152.321.800,00	99,99	514.168.393.432,00	514.123.393.432,00	99,99	509.031.181.460,00	508.128.850.229,00	99,82
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	885.898.196,00	885.897.900,00	100,00	969.041.999,60	897.173.755,00	92,58	1.099.176.000,00	1.008.406.500,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	**442.967.934.296,00**	**442.967.933.996,00**	**100,00**	**503.118.258.389,60**	**502.660.764.755,00**	**99,91**	**526.296.497.800,00**	**526.160.728.300,00**	**99,97**	**514.168.393.432,00**	**514.123.393.432,00**	**99,99**	**509.031.181.460,00**	**508.128.850.229,00**	**99,82**
JUMLAH TRANSFER	**458.427.582.020,30**	**442.967.933.996,00**	**96,63**	**519.803.183.167,90**	**516.032.042.255,00**	**99,27**	**545.077.948.095,77**	**538.029.230.300,00**	**98,71**	**533.997.530.421,00**	**528.224.841.432,00**	**98,92**	**530.798.014.829,00**	**523.956.275.229,00**	**98,71**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**2.991.979.376.190,55**	**2.791.917.486.735,00**	**93,31**	**3.212.916.766.996,22**	**3.013.041.916.154,95**	**93,78**	**3.422.335.557.047,58**	**3.225.169.974.376,00**	**94,24**	**3.246.358.717.536,00**	**3.105.899.535.279,00**	**95,67**	**3.130.219.245.077,00**	**2.989.792.960.134,00**	**95,51**

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

.

2) Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Realisasi alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Kabupaten Majalengka selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada table berikut :

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2022

No.	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1	2018	1.278.366.233.422,00	2.822.917.486.735,00	45,29
2	2019	1.254.285.715.876,00	2.851.374.237.635,00	43,99
3	2020	1.202.589.347.980,00	3.228.169.974.376,00	37,25
4	2021	1.195.391.829.485,00	3.111.899.535.279,00	38,41
5	2022	1.199.383.502.524,00	3.013.692.989.249,00	39,80

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

.

E. Proporsi Pembiayaan Daerah

Proporsi pembiayaan daerah disajikan guna memperkirakan defisit, serta untuk menghitung penutup defisit. Penutup defisit antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode tahun 2018 sampai dengan periode tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.8.

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Majalengka mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka cukup kuat untuk membiayai Belanja. Selama kurun waktu Tahun 2018 sampai Tahun 2022, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tertinggi pada Tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 159.116.192.126,15.

Tabel 3.8
Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2018–2022

No.	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-
2	Belanja Daerah	2,791,917,486,735.00	3,013,041,916,154.95	3,225,169,974,376.00	3,105,899,535,279.00	2,989,792,990,334.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31,000,000,000.00	28,456,750,900.00	3,000,000,000.00	6,000,000,000.00	23,899,998,915.00
A.	Defisit Riil	26,053,284,354.60	(48,466,318,180.40)	14,339,370,400.06	(35,415,582,118.89)	15,395,883,788.61
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	164,057,259,588.55	159,040,827,837.15	104,578,310,809.75	115,916,681,211.26	74,502,501,490.37
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-
3	Koreksi	-	-	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	164,062,907,771.55	178,345,291,137.15	104,581,310,809.75	115,918,131,211.26	74,537,817,172.37
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		190,110,543,943.15	110,574,509,656.75	118,917,681,209.81	80,501,099,092.37	89,898,385,278.98

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

.

Selama kurun waktu Tahun 2018 sampai Tahun 2022, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tertinggi pada Tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 190.110.543.943,15.

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut:

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Defisit Riil					
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	-3316	-206	922	-279	-876
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-25	-	0	-0,4
5.	Penerimaan Kembali Piutang	-0,11	0	0	-	-
6.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-3216	-132	1.022	-179	-776

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

3.1.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Majalengka dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Majalengka yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang.

Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2018-2023 ini sangatlah penting untuk dikaji. Hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2018-2023 akan menjadi dasar dalam pendanaan program dan kegiatan pada periode pemerintahan yang akan datang yaitu periode 2024-2026.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dana dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum

terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pada akhir Tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan Pemerintah Pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk perencanaan Tahun 2021 di dalam penyusunan APBD-nya sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir Tahun 2019, ada peristiwa yang tidak diduga sebelumnya yaitu merebaknya kasus berjangkitnya pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat, hal ini berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan

memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Majalengka pada Triwulan I dan II Tahun 2020 dan akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan di RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan Kabupaten Majalengka. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2020 diasumsikan ——— mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020. Begitu juga dengan Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

Kapasitas total keuangan daerah disajikan dengan melakukan analisis kerangka pendanaan, kapasitas keuangan tersebut dialokasikan untuk mendanai program-program pembangunan jangka

menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan mulai tahun 2024 sampai dengan 2026.

A. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kebijakan keuangan daerah dalam hal potensi daerah dan penerimaan di Kabupaten Majalengka sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor; (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. *Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah* adalah:
    1) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan perundang-undangan dan potensi daerah;
    2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi yang didukung dengan akselerasi melalui inovasi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka;
    3) Penegakan aturan dalam Pengelolaan PAD;
    4) Reformasi birokrasi pengelola PAD.
2. *Strategi untuk meningkatkan dana perimbangan* adalah:
    1) Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
    2) Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
    3) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan dana perimbangan;
    4) Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
3. *Strategi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah* adalah :
    1) Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak;

2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi pendapatan daerah adalah :

Pendapatan Asli Daerah:

1) Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan PAD;
3) Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan PAD;
4) Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak;
5) Pemberian *reward* bagi wajib pajak berprestasi;
6) Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar OPD/unit kerja dalam pengelolaan PAD;
7) Peningkatan upaya penertiban atas pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh masyarakat;
8) Optimalisasi denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan/atau retribusi;
9) Penataan kelembagaan OPD pengelola PAD;
10) Peningkatan kompetensi personal OPD pengelola PAD melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pengelolaan PAD;
11) Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000;
12) Penyusunan data base potensi PAD;
13) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
14) Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
15) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, antara lain melalui

peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;

Target dan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sampai Tahun 2026 sesuai periode RPD dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel 3.10
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024–2026

No.	Uraian	Realisasi	Target	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023		2024	2025	2026	
4	**PENDAPATAN**	**3.023.844.308.716**	**3.017.151.768.595**	**11,81**	**3.045.494.182.059**	**3.096.428.252.606**	**3.155.907.553.455**	**1,80**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**522.456.419.586**	**582.764.657.817**	**11,54**	**578.868.041.361**	**596.206.818.540**	**620.612.498.860**	**3,54**
4.1.01	Pajak Daerah	156.740.101.171	192.515.320.500	22,82	198.780.604.442	208.028.510.211	223.436.078.595	6,03
4.1.02	Retribusi Daerah	19.931.473.893	18.049.318.726	-9,44	14.172.724.840	14.438.224.840	14.732.915.564	1,96
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.409.795.269	9.303.000.000	25,55	110.000.000	121.000.000,00	133.100.000	10,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	338.375.049.253	362.897.018.591	7,25	365.804.712.079	373.619.083.489	382.310.404.701	2,23
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.501.387.889.130**	**2.434.387.110.778**	**11,86**	**2.466.626.140.698**	**2.500.221.434.066**	**2.535.296.054.595**	**1,38**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.805.667.598.266	1.766.549.975.405	-2,17	1.781.912.766.501	1.797.275.557.597	1.812.638.348.693	0,86
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.786.507.400.266	1.766.549.975.405	-1,12	1.781.912.766.501	1.797.275.557.597	1.812.638.348.693	0,86
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	138.329.456.663	86.179.132.405	-37,70	87.040.923.729	87.902.715.053	88.764.506.377	0,99
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.112.419.642.000	1.151.354.329.000	3,50	1.160.565.163.632	1.169.775.998.264	1.178.986.832.896	0,79
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	535.758.301.603	529.016.514.000	-1,26	534.306.679.140	539.596.844.280	544.887.009.420	0,99
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	19.160.198.000	-	-100,00	-	-	-	-
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	389.573.880.000	319.732.709.000	-17,93	319.732.709.000	319.732.709.000	319.732.709.000	0,00
4.2.02.01	Dana Penyesuaian/ Dana Desa	389.573.880.000	319.732.709.000	-17,93	319.732.709.000	319.732.709.000	319.732.709.000	0,00
4.2.03	Transfer Antar Daerah	306.146.410.864	348.104.426.373	132,51	364.980.665.197	383.213.167.469	402.913.996.902	0,62
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil	176.842.008.314	180.664.494.373	2,16	182.471.139.317	184.277.784.260	186.084.429.204	0,99
4.2.03.02	Bantuan Keuangan	129.304.402.550	167.439.932.000	310,77	182.509.525.880	198.935.383.209	216.829.567.698	9,00

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026..

Tabel 3.11

Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024–2026

URAIAN	REALISASI 2022	APBD 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	1.199.383.502.524	1.341.729.630.276	1.341.729.630.276	1.373.629.664.776	1.378.629.664.776
Belanja Barang dan Jasa	776.033.932.607	787.740.152.423	802.707.215.319	804.031.249.419	824.132.030.654
Belanja Bunga	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	47.392.283.830	51.652.553.709	51.652.553.709	51.652.553.000	51.652.553.000
Belanja Bantuan Sosial	13.688.600.000	9.162.000.000	9.162.000.000	9.162.000.000	9.162.000.000
Jumlah Belanja Operasi	**2.036.498.318.961**	**2.190.284.336.408**	**2.205.251.399.304**	**2.238.475.467.195**	**2.263.576.248.430**
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	4.308.386.920	7.685.651.288	7.685.651.288	8.185.651.997	10.185.651.997
Belanja Peralatan dan Mesin	75.534.381.670	121.383.149.111	123.689.428.944	126.039.528.094	129.190.516.296
Belanja Gedung dan Bangunan	80.357.568.073	57.961.453.826	59.062.721.449	60.184.913.156	72.221.895.787
Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan	249.929.058.518	162.086.198.065	165.165.835.828	168.303.986.709	185.134.385.380
Belanja Aset Tetap Lainnya	983.437.883.200	11.688.938.638	11.688.938.638	12.188.938.638	12.188.938.638
Belanja Aset Lainnya	-	383.610.006	383.610.006	383.610.006	383.610.006
Jumlah Belanja Modal	**419.963.774.013**	**361.189.000.934**	**367.676.186.153**	**375.286.628.600**	**409.304.998.105**
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	9.374.622.131	11.820.000.000	11.820.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Jumlah Belanja Tak Terduga	**9.374.622.131**	**11.820.000.000**	**11.820.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**
JUMLAH BELANJA	**2.465.836.715.105**	**2.563.293.337.342**	**2.584.747.585.457**	**2.638.762.095.795**	**2.697.881.246.535**

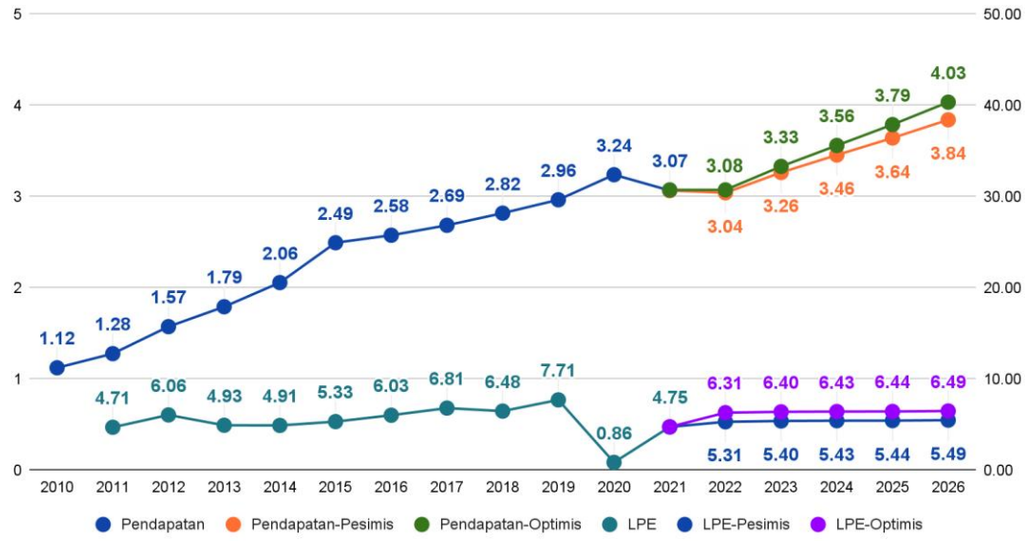
URAIAN	REALISASI 2022	APBD 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	15.827.425.000	21.750.543.409	21.750.543.409	21.750.543.409	21.750.543.409
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-				
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	**15.827.425.000**	**21.750.543.409**	**21.750.543.409**	**21.750.543.409**	**21.750.543.409**
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	508.128.850.229	442.526.055.140	442.526.055.140	442.526.055.140	442.526.055.140
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	**508.128.850.229**	**442.526.055.140**	**442.526.055.140**	**442.526.055.140**	**442.526.055.140**
JUMLAH TRANSFER	**523.956.275.229**	**464.276.598.549**	**464.276.598.549**	**464.276.598.549**	**464.276.598.549**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**2.989.792.990.334**	**3.027.569.935.891**	**3.049.024.184.006**	**3.103.038.694.344**	**3.162.157.845.084**

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Proyeksi pendapatan dan belanja merupakan suatu upaya untuk menyepakati target yang akan dicapai bersama oleh berbagai pihak. Dalam penentuan proyeksi tentunya harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. Sehingga, dalam simulasi pada grafik 12 digambarkan bahwa ketika LPE tumbuh sebesar 5,31 persen maka potensi pendapatan yang dapat diperoleh Kabupaten Majalengka sebesar 3.04 Triliun hingga 3.07 Triliun.

Gambar 1.

Grafik Proyeksi Pendapatan terhadap LPE



Bila dilihat dari strukturnya, dana transfer merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan pendapatan daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Majalengka agar bisa menggali lebih dalam potensi-potensi dari pendapatan pajak daerah sehingga Kabupaten Majalengka tidak selalu bergantung pada atau dana transfer.

B. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Selain pendapatan dan belanja daerah yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, pada bagian ini dibahas mengenai pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan

pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran cicilan utang dalam rangka pinjaman daerah dan provinsi. Kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pinjaman daerah.
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dan lain-lain (untuk konteks obligasi daerah).
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan

proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan fluktuatif antar tahun. Sebagai tahun dasar perencanaan perubahan RPJMD, SiLPA tahun 2020 memiliki angka tertinggi dibandingkan 3 (tiga) tahun setelahnya. SiLPA pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 kembali mengalami penurunan, dengan demikian pada Tahun 2023 dengan target menurun/meningkat. Selanjutnya pada Tahun 2024-2026 diproyeksikan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 25,26 persen.

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

URAIAN	REALISASI 2022	RATA-RATA	APBD 2023	PROYEKSI		
				2024	2025	2026
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
Penggunaan SiLPA	74.502.501.490	-25,26	23.769.253.615	17.765.226.513	13.277.794.843	9.923.872.108
Pencairan Dana Cadangan	0	0	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	35.315.682	25,00	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Piutang	0	-19,90	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	**74.537.817.172**	**-27,07**	**23.769.253.615**	**17.765.226.513**	**13.277.794.843**	**9.923.872.108**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0		-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	0	10.000.000.000	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.899.998.915	-2,33	2.500.000.000	2.441.696.407	2.384.752.537	2.329.136.681
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank	0	25	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	0	0	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0	0	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran	**23.899.998.915**	**-183,15**	**12.500.000.000**	**2.441.696.407**	**2.384.752.538**	**2.329.136.682**
PEMBIAYAAN NETO	**50.637.818.257**	**-36,45**	**11.269.253.615**	**15.323.530.106**	**10.893.042.305**	**7.594.735.427**

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

.

C. Perhitungan Kerangka Pendanaan

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2022. Selanjutnya untuk tahun 2024 sampai tahun 2026 diproyeksikan rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 2.5% persen.

Tabel 3.13
Realisasi SiLPA Tahun 2022 dan 2023
serta Proyeksi Tahun 2024 - 2026

Tahun	SiLPA (Rp)
2022	74.502.501.490
2023	23.769.253.615
2024	17.765.226.513
2025	13.277.794.843
2026	9.923.872.108

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

.

2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dan 2023 memiliki nilai yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana telah disajikan pada halaman sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pengertian belanja wajib dan belanja mengikat yang berbeda pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Rincian proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.14
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiyaan yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Majalengka Tahun 2022-2026

No	Uraian	Realisasi		Target				Proyeksi			
		2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
A	**Belanja Mengikat**	**472.008.750.235**	15,61	**474.298.866.111**	**15,72**	**481.307.521.100**	15,80	**485.323.321.100**	15,67	**490.411.588.000**	15,54
1	Belanja Pegawai	472.008.750.235	15,61	474.298.866.111	**15,72**	481.307.521.100	15,80	485.323.321.100	15,67	490.411.588.000	15,54
2	Belanja Bunga	-		-		-	-	-	-	-	
B	**Belanja Wajib**	**1.698.547.919.368**	56,17	**1.661.479.876.270**	**55,07**	**1.633.033.418.383**	53,62	**1.684.326.559.800**	54,40	**1.701.520.779.950**	53,92
1	Pendidikan	912.526.985.916	30,18	955.078.656.340	**31,65**	940.178.656.400	30,87	960.208.657.700	31,01	965.198.116.400	30,58
2	Kesehatan	370.126.000.000	12,24	341.126.000.000	**11,31**	341.127.550.000	11,20	342.127.120.000	11,05	343.327.440.000	10,88
3	Infrastruktur	394.071.558.947	13,03	344.071.558.947	**11,40**	330.571.551.200	10,85	360.571.121.200	11,64	371.591.551.200	11,77
4	Peningkatan Kapasitas SDM	10.141.701.230	0,34	8.541.701.230	**0,28**	8.603.701.230	0,28	8.728.701.100	0,28	8.731.701.500	0,28
5	Penguatan APIP	11.681.673.275	2,47	12.661.959.753	**0,42**	12.551.959.553	0,41	12.690.959.800	0,41	12.671.970.850	0,40
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**12.500.000.000**	0,41	**12.500.000.000**	**0,41**	**2.500.000.000**	0,08	**2.500.000.000**	0,08	**2.500.000.000**	0,08
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			-	-	-	-	-	-		-
2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	**0,08**	2.500.000.000	**0,08**	2.500.000.000	**0,08**	2.500.000.000	**0,08**	2.500.000.000	**0,08**
3	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	0,33	10.000.000.000	**0,33**		-		-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah			-	-	-	-		-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.			-	-	-			-	-	-
	Total Belanja Wajib Mengikat	**2.183.056.669.603**	**72,2**	**2.148.278.742.381**	**71,2**	**2.116.840.939.483**	**69,5**	**2.172.149.880.900**	**70,2**	**2.194.432.367.950**	**69,5**

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

.

3. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan sebagai penerimaan, serta pengeluaran yang terdiri atas Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk periode RPD Tahun 2024-2026 Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.15
Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024–2026

No.	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN**	**3.045.494.182.059**	**3.096.428.252.606**	**3.155.907.553.455**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**578.868.041.361**	**596.206.818.540**	**620.612.498.860**
4.1.01	Pajak Daerah	198.780.604.442	208.028.510.211	223.436.078.595
4.1.02	Retribusi Daerah	14.172.724.840	14.438.224.840	14.732.915.564
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	110.000.000	121.000.000,00	133.100.000
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	365.804.712.079	373.619.083.489	382.310.404.701
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.466.626.140.698**	**2.500.221.434.066**	**2.535.296.054.595**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.781.912.766.501	1.797.275.557.597	1.812.638.348.693
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.781.912.766.501	1.797.275.557.597	1.812.638.348.693
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	87.040.923.729	87.902.715.053	88.764.506.377
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.160.565.163.632	1.169.775.998.264	1.178.986.832.896
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	534.306.679.140	539.596.844.280	544.887.009.420
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	319.732.709.000	319.732.709.000	319.732.709.000
4.2.02.01	Dana Penyesuaian	319.732.709.000	319.732.709.000	319.732.709.000
4.2.03	Transfer Antar Daerah	364.980.665.197	383.213.167.469	402.913.996.902
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil	182.471.139.317	184.277.784.260	186.084.429.204
4.2.03.02	Bantuan Keuangan	182.509.525.880	198.935.383.209	216.829.567.698

No.	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	-	-	-
4.3.01	Hibah	-	-	-
4.3.02	Dana darurat	-	-	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**17.765.226.513**	**13.277.794.843**	**9.923.872.108**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.765.226.513	13.277.794.843	9.923.872.108
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
6.1.08	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	**3.063.259.408.572**	**3.109.706.047.449**	**3.165.831.425.563**
5	**BELANJA**	**3.049.024.184.006**	**3.103.038.694.344**	**3.162.157.845.084**
5.01	**Belanja Operasi**	**2.205.251.399.304**	**2.238.475.467.195**	**2.263.576.248.430**
5.01.01	Belanja pegawai	1.341.729.630.276	1.373.629.664.776	1.378.629.664.776
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	787.740.152.423	804.031.249.419	824.132.030.654
5.01.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.01.05	Belanja Hibah	51.652.553.709	51.652.553.000	51.652.553.000

No.	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.162.000.000	9.162.000.000	9.162.000.000
5.02	**Belanja Modal**	**367.676.186.153**	**375.286.628.600**	**409.304.998.105**
5.02.01	Belanja Modal	367.676.186.153	375.286.628.600	409.304.998.105
5.03	**Belanja Tidak Terduga**	**11.820.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**
5.03.01	Belanja tidak terduga	11.820.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
5.04	**Belanja Transfer**	**464.276.598.549**	**464.276.598.549**	**464.276.598.549**
5.04.01	Transfer Bagi Hasil Pajak	21.750.534.409	21.750.534.409	21.750.534.409
5.04.02	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemeritah Daerah Lainnya	-	-	-
5.04.03	Transer Bantuan Keuangan Ke Desa	442.526.055.140	442.526.055.140	442.526.055.140
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.441.696.407**	**2.384.752.537**	**2.329.136.681**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.441.696.407	2.384.752.537	2.329.136.681
6.2.03	Pemberian Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
	TOTAL PENGELUARAN	**3.051.465.880.413**	**3.105.423.446.881**	**3.164.486.981.765**

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan kebijakan sebagai upaya dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian sasaran RPD. Rencana penggunaan kapasitas keuangan akan dialokasikan berdasarkan prioritas, yaitu:

a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
b. **Prioritas II,** dialokasikan membiayai program perangkat daerah diluar Prioritas I.

Lebih rinci mengenai alokasi masing-masing prioritas disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.16
Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024–2026

Uraian	Proyeksi		
	2024	2025	2026
Kapasitas riil keuangan daerah:	**3.063.259.408.572**	**3.109.706.047.449**	**3.165.831.425.563**
Prioritas I	2.116.840.939.483	2.172.149.880.900	2.194.432.367.950
Prioritas II	946.418.469.089	937.556.166.549	971.399.057.613

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Majalengka berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Majalengka sebagaimana disajikan pada Bab 2, dapat dikelompokan berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu *aspek kesejahtraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah* sebagai berikut:

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Menurut BPS, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Pandemi COVID-19 yang mulai menginfeksi pada Maret 2020 memberikan pesan penting, yakni terdapat kelompok masyarakat yang

rentan miskin akibat guncangan ekonomi. Hal ini tercermin dari jumlah dan Persentase penduduk miskin yang meningkat signifikan dibanding kondisi sebelum pandemi. Kondisi demikian menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka mengalami kemunduran lima tahun ke belakang (jumlah penduduk miskin pada 2021 selisih sedikit dibanding jumlah penduduk miskin di tahun 2017).

Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama di Kabupaten Majalengka, terlebih setelah pandemi COVID-19. Data BPS menunjukkan bahwa sebelum COVID-19 yakni tahun 2019, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka mencapai 10,06%. Setelah pandemi, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 12,33% pada tahun 2021. Namun dengan berbagai upaya pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya, maka tingkat kemiskinan dapat turun menjadi 11,94% pada tahun 2022.

Walaupun terjadi penurunan namun masalah kemiskinan masih berada diatas rata-rata angka kemiskinan Jawa Barat sebesar (8,40 persen) dan Nasional (9,71 persen). Angka kemiskinan Kabupaten Majalengka dibandingkan dengan Kabupaten lainnya pada September 2021 berada pada posisi ke-16 Persentase kemiskinan terendah. Upaya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran masih sangat diperlukan untuk menekan dan menurunkan angka kemiskinan.

Permasalahan lain terkait dengan kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin ekstrem yang mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan semakin besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk program perlindungan sosial (bantuan langsung tunai, bantuan sembako, dll) yang tentu saja membebani APBD Kabupaten Majalengka. Kondisi kemiskinan ekstrem dapat dilihat dari semakin melebarnya ketimpangan pendapatan diantara kelompok penduduk miskin yang diukur melalui indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Data beberapa tahun terakhir menunjukkan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka cenderung membaik yakni 0,36 di tahun 2022 yang berarti menurun dari tahun 2021 sebesar 0,77 poin serta perbandingan angka kemiskinan Kabupaten dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada tebel di bawah ini.

Tabel 4.1
Data Penduduk Miskin & Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	129.290	121.060	138.200	151.100	147.120
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94
3.	Indeks Keparahan	Poin	0,51	0,28	0,25	0,77	0,36

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Tabel 4.2
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022

No.	Wilayah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Majalengka	%	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94
2.	Provinsi Jawa Barat	%	7,25	6,82	7,88	8,40	8,06
3.	NAsional	%	9,66	9,22	9,78	9,71	9,54

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

2. Masih Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (*Means Years of Schooling*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Perbandingan angka Angka Rata Lama Sekolah antara Kabupaten, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Perbandingan Angka Rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022

No.	Wilayah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Majalengka	Tahun	6,91	7,09	7,27	7,31	7,49
2.	Provinsi Jawa Barat	Tahun	8,15	8,37	8,55	8,61	8,78
3.	NAsional	Tahun	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2023.

Perkembangan MYS atau Rata-rata Lama Sekolah tahun 2018-2022 menunjukkan menanjak yaitu dari 6,91 tahun pada tahun 2018 menjadi 7,49 tahun pada 2022. Angka ini bisa didefinisikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,49 tahun atau hampir setara dengan SMP kelas 1.

Walaupun terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir angka Rata Lama Sekolah Kabupaten pada tahun 2022 masih berada terpaut jauh di bawah RLS Jawa Barat (8,78 tahun) dan Nasional (8,69 tahun).

3. Masih Tingginya Kasus Anemia pada Remaja Puteri

Anemia pada remaja putri merupakan salah satu faktor penyebab stunting, dimana para remaja putri tersebut akan menikah, hamil dan melahirkan anak. Resiko stunting tersebut terjadi dari pra-konsepsi ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. Menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan, ditambah lagi ketika ibu hidup dilingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Remaja putri di Indonesia usia 15-19 tahun, kondisinya berisiko Kurang Energi Kronik (KEK) sebesar 46,6% tahun 2013. Ketika hamil, ada 24,2% Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 tahun dengan risiko KEK dan anemia sebesar 37,1%.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

1. Belum Terintegrasinya Aplikasi Pemerintah Daerah

Saat ini pemerintah daerah termasuk Kabupaten Majalengka mengembangkan pelayanan publik melalui Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK/ICT) yang disebut dengan *e-government*. Tetapi ada permasalahan dalam penyelenggarannya diantaranya:

a. Implementasinya masih bersifat sendiri-sendiri;
b. Implementasi melalui situs web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia; serta
c. Implementasi *e-government* hanya sekadar membuat situs web pemda saja (*web presence*).

Sehingga kehadiran berbagai aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah statistik. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik adalah ketersediaan buku "Kabupaten Dalam Angka" dan "PDRB Kabupaten" yang selama ini telah berhasil terpenuhi.

Permasalahan dalam penyediaan Data Statistik Sektoral sebagian data tingkat validitasnya masih perlu ditingkatkan, serta ada beberapa data yang harus dipenuhi dengan cara survey yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu pemanfaatan Data Statistik Sektoral belum maksimal menjadi inputan dalam proses perencanaan atau dalam pengambilan kebijakan.

4.1.3. Aspek Daya Saing

1. Belum Optimalnya Penujang Investasi Daerah

Selama periode 2018-2022, nilai investasi di Kabupaten meningkat cukup signifikan, yaitu dari Rp. 1.288.62 Miliar pada tahun 2018, menjadi Rp. 15.597,10 Miliar pada tahun 2022. Peningkatan pesat nilai investasi ini disebabkan karena banyaknya perusahaan-perusahan

baru yang bermunculan baik perusahaan skala kecil, menengah maupun perusahaan besar yang berinvestasi di Kabupaten Majalengka. Perkembangan jumlah nilai investasi serta jumlah dan kategori perusahaan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Majalengka

No.	Kategori Perusahaan	Tahun (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perusahaan Mikro & Kecil	142.767,00	54.131,00	82.988.100	221.794,02	1.353.416,387
2.	Perusahaan Menengah	89.838,573	12.867.778	58.632.185	645.987,50	437.937,037
3.	Perusahaan Besar	1.056.017,82	2.026.479,36	2.254.559,76	4.223.801,46	13.805.755,956
Jumlah		**1.288.623,38**	**2.093.478,14**	**2.396.180,04**	**5.091.582,98**	**15.597.109,38**

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Tabel 4. 5

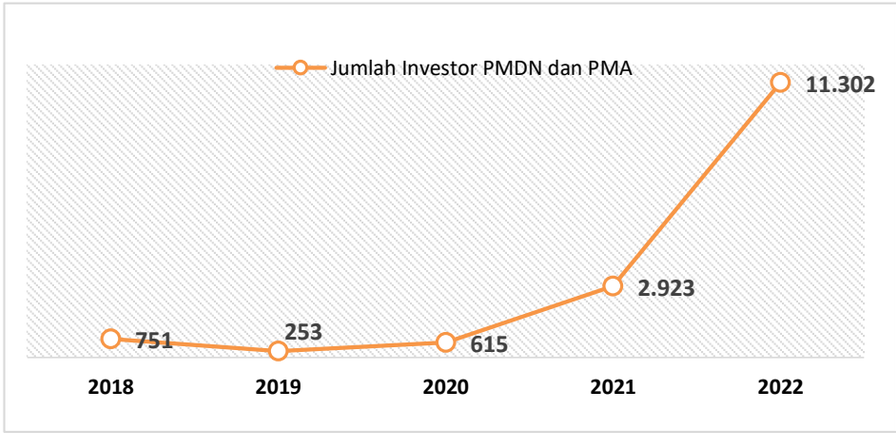
Data Kategori Perusahaan
Di Kabupaten Majalengka

No.	Kategori Perusahaan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perusahaan Mikro dan Kecil	696	253	544	2.488	10.464
2.	Perusahaan Menengah	46	8	28	402	323
3.	Perusahaan Besar	9	18	42	33	515
Jumlah		**751**	**253**	**615**	**2.923**	**11.302**

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Gambar 4.1

Perkembangan Jumlah Investor PMDN dan PMA
Kabupaten Majalengka



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

Meskipun terjadi peningkatan baik secara jumlah investor dan nilai investasi, namun investasi di Kabupaten dirasa belum optimal dan diharapkan meningkat secara eksponensial mengingat telah dibukanya Jalan Tol Cisumdawu dan beroperasinya Bandara Intersional Jawa Barat Kertajati.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Promosi Pariwisata

Pariwisata Kabupaten mengalami kemajuan seiring telah dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, dan untuk menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten telah dilalui oleh Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan rencananya akan terhubung denganJalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang sudah mulai dibangun pada tahun 2012. Untuk itu dilakukan terobosan pengembangan objek-objek wisata baru sebagai stimulator dan inspirasi geliat kompetitif objek-objek wisata lama yang bervariatif. Berbagai promosi dan penataan objek wisata yang ada di Kabupaten Majalengka telah dilakukan selama periode 2018-2022, hasilnya sudah mulai terlihat yaitu dengan meningkatnya kunjungan wisata. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata di bertambah sangat signifikan dibandingkan lima tahun terakhir. Akan tetapi jumlah kunjungan wisata pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan Pandemi Covid 19, yang berimbas pada berkurangnya PAD sektor wisata di tahun yang sama, namun pada tahun 2022 mulai naik lagi dibandingkan tahun 2021. Meskipun mengalami kenaikan jumlah wisatawan, namun belum bisa *bounce back* seperti sebelum Covid 19. Perlu adanya optimalisasi aksesibilitas Jalan Tol Cisumdawu dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati untuk menuju objek wisata di Kabupaten Majalengka. Belum optimalnya sektor pariwisata di Kabupaten Majalengka disebabkan karena belum tersalurkannya secara efektif promosi wisata dan kurang terawatnya sarana dan prasarana obyek wisata.

Indikator dan Capaian Kepariwisataan Kabupaten Majalengka selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6

Indikator Capaian Kepariwisataan
Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kunjungan wisata	529.574	701.335	375.000	472.906	818.543
2.	PAD Sektor Wisata (Juta Rupiah)	150,00	152,72	64,2	59,8	65,3
3.	Jumlah Hotel	15	17	18	24	27
4.	Jumlah Kamar	401	505	512	641	649
5.	Jumlah Rumah Makan/Restoran	151	135	-	156	156

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2023.

3. Rendahnya Daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro Menghadapi Persaingan Global

Koperasi dan usaha mikro merupakan jantung perekonomian masyarakat saat ini. Dengan adanya gempuran produk - produk luar yang masuk ke pasar domestik masyarakat membuat perekonomian masyarakat sulit bersaing. Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan koperasi dan UMKM menambah berat beban perekonomian masyarakat ditambah masih kurangnya sarana dan infrakstruktur daerah terkait informasi peluang dan potensi usaha serta digitalisasi ekonomi

4. Masih Rendahnya Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Desa.

Rendahnya Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Desa disebabkan oleh Masih rendahnya kelompok binaan pada setiap desa, program/kegiatan masih belum tepat sasaran dan belum ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan desa, belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya dan masih terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi karena fasilitas pasar desa kondisinya kurang memadai.

5. PDRB Sektor Pertanian yang Semakin Menurun

Saat ini pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian, namun sayangnya nilainya terus menurun disebakan oleh :

a. Pengurangan luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi lahan;

b. Menurunnya produktivitas pertanian per hektar akibat rusaknya struktur tanah (Degradasi Lahan) karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan; dan
c. Potensi kerusakan saluran irigasi tersier sebagai dampak alih fungsi lahan.

4.1.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam sub bab evaluasi capaian RKPD Tahun 2022 dan gambaran umum kondisi daerah. Berikut permasalahan pembangunan yang disusun menurut bidang urusan.

4.1.4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Secara umum permasalahan bidang pendidikan mencakup 2 (dua) hal penting dan mendasar yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini.
2. Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, berdasarkan hasil Program PISA 2018 yang diselenggarakan oleh OECD bahwa Indonesia berada pada posisi ke 74 dari 79 Negara dan hasil dari raport pendidikan tahun 2021 Kabupaten Majalengka masih berada dalam spektrun warna merah yang menggambarkan kemampuan litersi dan numerasi masih dibawah rata-rata.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber

daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan karena belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal.
5. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocasional dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur belum terselenggara secara optimal di jenjang pendidikan pendidikan dasar dan kesetaraan.
6. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan Pendidikan.
7. Penguatan pendidikan karakter masih rendah yang merupakan bagian esensial dalam proses pendidikan. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Minim inovasi dan kreativitas di bidang pendidikan. Inovasi diterapkan dalam rangka memecahkan permasalahan dengan efektif dan efisien. Era digitalisasi, guru dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan suasana proses belajar mengajar yang kondusif dan menyenangkan.
9. Masih terdapat masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan karena letak geografis tempat tinggal yang terpencil.

2. Bidang Kesehatan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang kesehatan yang masih ditemui di Kabupaten Majalengka meliputi:

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
2. Masih rendahnya derajat kesehatan manusia.
3. Belum meratanya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
4. Masih rendahnya pemahaman dan impelementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyatakat.
5. Masih tingginya prevalensi jumlah kasus gizi buruk, stunting dan ibu hamil anemia.
6. Belum meratanya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
7. Masih tingginya penemuan kasus HIV/AIDS dan Tuberkulosis.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih ditemui di Kabupaten Majalengka meliputi:

1. Belum optimalnya layanan infrastruktur sumber daya air, capaian Irigasi Kabupaten kondisi baik tahun 2022 sebesar 75,51%
2. Belum optimalnya layanan, akses, dan kualitas infrastruktur jalan, capaian jalan dalam kondisi mantap tahun 2022 sebesar 87,8%.
3. Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungannya, capaian Rasio bangunan ber- IMB tahun 2022 sebesar 6,89%.
4. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang, capaian kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2022 sebesar 54,02%.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan penyelenggaraan urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi:

a. Bidang Perumahan Rakyat
    1. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung.
    2. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
    3. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran

pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huti, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Bidang Kawasan Permukiman
   1. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak.
   2. Belum optimalnya dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar.
   3. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesbilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

1. Masih tingginya kriminalitas dan jumlah demo yang terjadi di masyarakat.
2. Masih perlunya peningkatan kualitas dann profesional SDM aparat yang bertugas yang menjaga tantrib.
3. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada.
4. Masih belum adanya perda yang konfrehensif yang memberikan kewenangan kepada satpol pp dan damkar dalam upaya penegakan perda dan atau perkada.
5. Masih rendahnya cakupan layanan penanganan bencana kebakaran dan Kurangnya kesadaran masyrakat dalam mencegah bahaya kebakaran.

6. Bidang Sosial

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial meliputi:

1. Data Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum terintegrasi.

2. Belum optimal dan terpadunya penanganan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin.
3. Belum optimalnya pelayanan dan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kesejahteraan Sosial belum memadai

4.1.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja meliputi:

1. Mutu Tenaga Kerja yang Relatif Rendah

   Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah maka biaya produksi menjadi tinggi sehingga mengakibatkan hasil produksi sulit bersaing. Selain itu, mutu tenaga kerja berpengaruh pula pada tinggi rendahnya upah tenaga kerja, upah yang masih relatif rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di sekitar Kabupaten Majalengka. Dari data BPS tahun 2023, Jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan SD sejumlah 327.528 dari total yang bekerja sejumlah 617.320. Dari total jumlah angkatan kerja sejumlah 644.128, didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan SD sejumlah 335.733.
2. Belum terpetakannya ketenagakerjaan;

   Pemetaan ketenagakerjaan adalah pengelompokkan tenaga kerja yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memilki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat. Proses pemetaan tenaga kerja meliputi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penggunaan data.
3. Masih rendahnya pemantauan dan perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

4. Dampak resesi dunia yang diakibatkan oleh perasng Rusia dan Ukraina menyebabkan beberapaa perusahaan kehilangan Order dari negara-negara dikawasan eropa dan Amerika, sehingga perusahaan mengurangi produksi yang ditindaklanjuti dengan pengurangan karyawan akibat dari pengurahan karyawan menyebabkan terjadinya penambahan pengangguran, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kerawanan social.
5. Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata
   Di samping sumber daya manusia yang relatif masih rendah, sektor ketenagakerjaan dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja berada di bagian Utara Kabupaten Majalengka. Sementara, di beberapa daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Akibatnya, di beberapa wilayah banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal.
6. Masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Majalengka.
7. Ketidak sesuaian antara perusahaan dan tenaga kerja dalam mendapatkan pekerja dan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Link and Match merupakan konsep keterkaitan dan kesepadanan antara skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan kerja yang dibutuhkan. Link and Match masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan dalam mengurangi pengangguran di Majalengka.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 poin;

2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta jumlah kasus KDRT;
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam upaya evaluasi implementasi pemenuhan hak anak (Kabupaten Layak Anak).

3. Bidang Pangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pangan meliputi:

1. Meningkatnya jumlah (laju pertumbuhan) penduduk, sehingga kebutuhan akan ketersediaan bahan pangan semakin tinggi;
2. Masih rendahnya cadangan pangan Pemerintah dan cadangan pangan Masyarakat;
3. Masih tingginya ketergantungan terhadap beras sementara diversifikasi (penganekaragaman) pangan belum optimal;
4. Beberapa komoditas pangan tertentu produksi dan produktivitasnya masih rendah sehingga tingkat ketergantungan terhadap pasokan (supply) daerah lain cukup tinggi;
5. Kesadaran produsen dan konsumen terhadap keamanan dan kewaspadaan pangan masih rendah.

4. Bidang Pertanahan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanahan meliputi:

1. Perihal penentuan ganti kerugian memang kerap menjadi isu yang sangat krusial dalam menentukan ‘disetujui atau tidaknya’ suatu pembebasan lahan oleh pemilik sebelumnya;
2. Permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses pengadaan tanah adalah sengketa pertanahan disamping sengketa hukum lainnya;
3. Belum diserahkannya PSU perumahan dari pengembang/develover kepada pemerintah daerah.

5. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup meliputi:

1. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Kenaikan suhu global;
3. Penurunan kualitas lingkungan hidup;
4. Pengelolaan limbah B3 masih sangat rendah bahan tidak terkelola;
5. Meningkatnya timbulan sampah.

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan perlu ditingkatkan keakuratan dan validasi datanya;
2. Cakupan OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama masih rendah;
3. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum maksimal.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan desa mandiri, capaian tahun 2022 sebesar 29,09% dari 330 desa di Kabupaten Majalengka;
2. Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur dan lembaga desa dalam tata kelola pemerintahan desa;
3. Belum optimalnya pengelolaan kawasan pedesaan agar dapat berkembang melalui kerjasama antar desa dan kawasan perdesaan di Kabupaten Majalengka;
4. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat;

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

1. Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR) dan angka Unmet Need;
2. Masih rendahnya angka Modern Prevalensi Contaceptif Rate (MPCR) dan tingkat penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
3. Masih banyaknya perkawinan usia dini.

9. Bidang Perhubungan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan meliputi:

1. Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum yang disebabkan masih kurangnya sarana dan fasilitas jaringan jalan dan perlengkapan jalan dalam pemenuhan standar kelaikan jalan;
2. Masih kurangnya jumlah terminal angkutan penumpang dan barang serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan terminal yang belum sesuai standar;
3. Kurang optimalnya kinerja pelayanan PJU dalam pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat pedesaaan/perkotaan;
4. Pelaksanaan pelayananan uji kir untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan belum maksimal dikarenakan kurang maksimalnya kinerja dan jumlah unit peralatan uji kendaraan bermotor yang dimiliki;
5. Masih kurangnya sumber daya manusia awak angkutan umum, pelajar pelopor dan masyarakat yang memahami tentang penyelenggaraan angkutan umum dan keselamatan pengguna jalan;
6. Masih kurangnya pengawasan dan pengendalian keselamatan pengguna jalan;
7. Masih rendahnya tingkat pelayanan perparkiran di wilayah kabupaten Majalengka.

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Masih tingginya kesenjangan digital antar wilayah di Kabupaten Majalengka;
2. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) antar wilayah;
3. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan berbasis elektronik;
4. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik;
5. Belum maksimalnya dukungan regulasi terkait pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Majalengka;

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah meliputi:

1. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi melalui pembentukan kemitraan koperasi dengan berbagai pihak terkait;
2. Belum optimalnya sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat untuk bergabung dan membentuk koperasi;
3. Belum optimalnya standardisasi dan sertifikasi bagi pengelola koperasi;
4. Belum optimalnya apresiasi dan upaya penilaian kesehatan koperasi;
5. Banyaknya koperasi tidak aktif yaitu sejumlah 312 dari total koperasi sejumlah 565;
6. Belum optimalnya langkah pengawasan koperasi dalam rangka menjaga keberlangsungan dan ketahanan koperasi;
7. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait legalitas usaha;
8. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pengembangan usaha dengan memanfaatkan teknologi digital;
9. Masih banyak terdapat produk-produk yang konvensional, harus diupayakan adanya Inovasi Produk.

12. Bidang Penanaman Modal

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal meliputi:

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan transparan;
2. Kurangnya kepastian hukum dalam pengembangan investasi;
3. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana investasi dan pelayanan perizinan;
4. Masih kurangnya dukungan sarana promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan dan pengembangan investasi;
5. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat pemohon terhadap penguasaan *Information and Technology* (IT);
6. Masih terkendalanya jangkauan jaringan untuk mengakses layanan sistem online (OSS) dan;
7. Masih adanya pelaku usaha yang belum menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga;
2. Olahraga belum mencapai prestasi yang optimal;
3. Kuantitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia belum memadai;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka pemuda masih tinggi;
5. Sarana dan prasarana operasional belum memenuhi kebutuhan;
6. Penyelenggaraan koordinasi keolahragaan dan kepemudaan belum sinergis.

14. Bidang Statistik

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik meliputi:

1. Literasi Data *Driven Government* (Budaya pengambilan kebijakan berdasarkan data) masih rendah;
2. Regulasi teknis dan standar kerja belum tersusun;
3. Ketersediaan data masih rendah;
4. Integrasi data belum terbangun;
5. Belum tersedianya *Command Center* sebagai sarana pengambil kebijakan berbasis data dan informasi;
6. Simpul jaringan geopasial belum terbentuk;

7. Literasi kebutuhan terhadap informasi geopasial masih rendah;
8. Regulasi teknis dan standar kerja belum tersusun;
9. Ketersediaan informasi geopasial masih sangat terbatas;
10. Tidak terdapat sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan simpul jatingan geopasial.

15. Bidang Persandian

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian meliputi:

1. Pemerintah daerah belum sepenuhnya penerapan keamanan informasi publik;
2. Belum optimalnya pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada dokumen kedinasan;
3. Regulasi teknis dan standar kerja belum tersusun.

16. Bidang Kebudayaan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kebudayaan meliputi:

1. Belum optimalnya Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Majalengka yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan;
2. Kurang terpromosikannya budaya lokal;
3. Belum adanya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif;
4. Kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan;
5. Kurangnya pelestarian kesenian tradisional khas daerah;
6. Belum adanya penetapan cagar budaya;
7. Kurangnya pembinaan seni budaya lokal.

17. Bidang Perpustakaan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan meliputi:

1. Budaya gemar membaca masyarakat cukup baik;
2. Peningkatan literasi masyarakat Kabupaten Majalengka masih cukup.

18. Bidang Kearsipan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kearsipan meliputi:

1. Keberadaan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban nasional untuk simpul pemersatu bangsa khasanahnya masih rendah;
2. Ketersediaan arsip dinamis belum efektif Pengelolaan arsip dinamis belum tertib.

4.1.4.3. Urusan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Jumlah pelaku di bidang usaha perikanan (produksi/budidaya dan pengolahan) cenderung mengalami penurunan;
2. Jumlah sarana dan prasarana perikanan cenderung mengalami penurunan sehingga produksi dan produktivitas belum optimal;
3. Tingkat konsumsi ikan masyarakat masih rendah;
4. Sumber Daya Manusia bidang perikanan (penyuluh) masih terbatas sehingga menjadi kendala dalam transfer teknologi perikanan;
5. Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan perairan alam.

2. Bidang Pariwisata

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pariwisata meliputi:

1. Belum optimalnya pendataan kunjungan wisatawan;
2. Keterlibatan masyarakat dalam tata kelola objek wisata belum maksimal, saat ini hanya sejumlah 38 objek wisata yang dikelola oleh masyarakat;
3. Sarana dan fasilitas destinasi pariwisata belum tersedia antara lain lahan parkir, kebersihan dan akses jalan menuju lokasi wisata;
4. Kesadaran pelaku usaha pariwisata dalam penerapan Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang belum maksimal;
5. Kemitraan antara pengelola usaha pariwisata yang belum optimal;

6. Belum optimalnya pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, usaha pariwisata dan masyarakat;
7. Belum Optimalnya ekosistem pengembangan ekonomi Kreatif;
8. Belum optimalnya pengembangan industri kreatif di Kabupaten Majalengka.

3. Bidang Pertanian

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pertanian meliputi:

1. Menurunnya kualitas dan kuantitas produksi dan produktivitas tanaman pangan dan peternakan;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan budidaya ke sector lain (perumahan dan permukiman, industry, jasa);
3. Belum ditetapkannya lahan LP2B dan LSD melalui Peraturann Daerah;
4. Belum optimalnya regenerasi petani dan peternak;
5. Meningkatnya persaingan komoditas pangan dari luar daerah/negeri;
6. Belum sepenuhnya menerapkan GAP dari keseluruhan aspek budidaya seingga menurunkan aspek daya saing;
7. Belum optimalnya revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan usaha pertanian;
8. Tingkat konsumsi pangan (daging, telur, dan susu) masih belum optimal.

4. Bidang Perdagangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan meliputi:

1. Masih rendahnya kontribusi PDRB Sektor Perdagangan tahun 2022 sebesar 13,72% dibawah dibawah sektor industri pengolahan dan sektor pertanian;
2. Belum optimalnya Laju Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2022 sebesar 3,94%;
3. Masih fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;

4. Promosi produk industri lokal (asal Kabupaten Majalengka) masih dirasa kurang;
5. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
6. Daya saing produk lokal yang masih lemah;
7. Lemahnya rantai nilai yang utuh dan terintegrasi (belum terbentuknya sistem logistik yang terpadu).

5. Bidang Perindustrian

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian meliputi:

1. Masih rendahnya kontribusi industri kecil dan mikro pada pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan;
2. Masih rendahnya daya saing produk industry kecil menengah;
3. Belum memiliki Rencana Pengembangan Industri Kabupaten;
4. Belum memmilikinya infrastruktur pendukung Kawasan industri yang terintegrasi;
5. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi;
6. Produk industri unggulan yang belum terstandarisasi dan tersertifikasi.

4.1.4.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah sebagai salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Belum optimalnya nilai LPPD;
2. Belum optimalnya kualitas kerjasama antar daerah;
3. Belum optimalnya pencapaian SPM daerah;
4. Belum optimalnya pengawasan internal dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
5. Belum optimalnya data pendukung pembentukan Paten;
6. Belum optimalnya pengelolaan kesejahteraan rakyat;
7. Belum optimalnya penanganan produk hukum daerah;

8. Belum optimalnya koordinasi pencapaian pertumbuhan ekonomi;
9. Belum optimalnya pelaku pengadaan barang dan jasa dalam memahami prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai dengan informasi serta peraturan yang berlaku;
10. Belum optimalnya penataan kualitas kelembagaan daerah;
11. Belum optimalnya nilai kepuasan masyarakat;
12. Belum optimalnya nilai akuntabilitas Kinerja Kabupaten.

4.1.4.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

Permasalahan penyelenggaraan perencanaan masih ditemui dalam pembangunan di Kabupaten Majalengka. Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi, meliputi:

1. Cascading kinerja RPJMD Perubahan pada Renstra perangkat daerah kurang optimal;
2. Indikator perencanaan kinerja perangkat daerah belum seluruhnya memiliki kriteria “SMART”;
3. Instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah belum dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengukuran capaian;
4. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana tas perencanaan pembangunan;
5. Rekomendasi perbaikan kinerja berkala tidak optimal;
6. Capaian kinerja renstra perangkat daerah tidak optimal.

2. Keuangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan meliputi:

1. Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan dari SKPD;
2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan dan Pelaporan Kemendagri belum bisa mengakomodir kebutuhan daerah;
3. Banyaknya aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal dan formal yang sah;
4. Pencatatan BMD masih belum menggunakan sistem terintegrasi;

5. Belum optimalnya kebijakan dan regulasi mengenai pengelolaan pajak daerah;
6. Penggunaan sistem informasi dan teknologi oleh wajib pajak masih rendah;
7. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan pajak daerah;
8. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak;
9. Belum adanya peta potensi pendapatan.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:

1. Kompetensi pegawai masih perlu ditingkatkan.
   Kompetensi pegawai menjadi hal yang krusial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi diharapkan mampu memiliki unjuk kerja yang optimal, memiliki kecakapan yang memadai, inovatif, memiliki keunggulan di bidangnya dan mampu berdaya saing di kancah persaingan global. Diklat teknis fungsional saat ini sudah dibuka lebar, baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat maupun pengiriman dan pelatihan secara mandiri.
2. Pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan.
   Pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi pendukung dalam melaksakan tugas dan fungsi suatu lembaga. Perlu kecukupan dalam hal kuantitas dan kualitas. Pada masa mendatang perlu dipersiapkan pemenuhan dan alih generasi atas pegawai maupun pejabat yang akan memasuki masa pensiun agar tidak terjadi keguncangan dalam estafet ketugasan.
3. Terdapat wacana penghapusan honorer.
   Wacana penghapusan honorer yang akan diganti dengan PPPK akan menimbulkan permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur pada jabatan-jabatan teknis tertentu yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme PPPK saat ini.
4. Integritas ASN masih rendah.

Integritas Pegawai Negeri Sipil antara lain meliputi kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kepatuhan terhadap kode etik Pegawai Negeri Sipil.

5. Kualitas pelayanan publik masih rendah.
   Dewasa ini ditengarai masih rendahnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat dan instansi-instansi dalam lingkup di bawahnya untuk berbenah diri dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan, meliputi:

1. Aspek Sumber Daya Manusia : keterbatasan personil baik peneliti, analis baik dari sisi kualitas maupun kuantitas merupakan salah satu kendala keberlangsungan eksistensi kelitbangan;
2. Aspek Pembiayaan : kegiatan litbang dan kajian masih dianggap *high cost*, proses kegiatan melalui tahapan metodelogi harus didukung oleh dana yang realitis sementara anggaran kelitbang masih tersebar tidak terpusat;
3. Aspek Program : belum semua kelitbangan mengakomodir aspirasi masyarakat dan belum memliki daya implemntasi, program kelitbangan belum disusun secara sinergi.

4.1.4.6. Unsur Pengawasan

Permasalahan penyelenggaraan unsur pemerintahan daerah bidang pengawasan meliputi:

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI;
2. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih belum optimal;
3. Masih belum optimalnya sistem pengendalian internal (SPI/wasnal) pada PD dan perlunya peningkatan pelayanan pengawasan masyarakat (wasmas);

4. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya bidang pengawasan sehingga beban kinerja Inspektorat yang semakin banyak dan pengendalian mutu pengawasan belum optimal;
5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Internasional

A. Hasil Pertemuan G20 Indonesia Tahun 2022

KTT G20 Bali berlangsung pada 15—16 November 2022 di kawasan Nusa Dua, Bali. Para pemimpin dari negara anggota G20, sejumlah lembaga internasional, dan negara-negara undangan berkumpul untuk membahas sejumlah isu krusial di tingkat global. Pertemuan itu pun berakhir dengan tercapainya *G20 Bali Leader's Declaration*, yakni kesepakatan para pemimpin G20 terkait berbagai aspek, mulai dari ekonomi, geopolitik, ketersediaan pangan, dan lain-lain. Leaders' Declaration itu berisi 52 paragraf, yang merupakan rangkuman dari 24 dokumen komunike, rekomendasi, serta masukan hasil pembahasan kelompok kerja dan pertemuan tingkat menteri. Secara keseluruhan, terdapat 437 pertemuan di berbagai tingkat sebelum tercapainya kesepakatan saat KTT G20.

Di dalam G20 *Bali Leaders' Declaration* atau Deklarasi Bali 2022, tercantum 52 paragraf sebagai hasil KTT G20 Bali. Poin-poin itu membahas permasalahan mengenai:

1. Ketegangan geopolitik global
2. Isu krisis pangan
3. Perubahan iklim
4. Kesehatan global
5. Transformasi digital

Beberapa hasil penting dari kegiatan KTT G20 yang diantaranya secara langsung memberikan manfaat langsung kepada negara Indonesia:

1. Dana Pandemi *(Pandemic Fund)*

Dana ini dibentuk oleh menteri keuangan dan menteri kesehatan negara-negara G20 di bawah presidensi/kepemimpinan Indonesia tahun ini. Presiden Jokowi menyampaikan Dana Pandemi menjadi upaya dunia memperkuat arsitektur kesehatan global terutama melalui mekanisme pembiayaan yang kuat dan dapat diandalkan, sehingga dunia dapat lebih baik mencegah dan menanggulangi pandemi di masa mendatang. Dana Pandemi yang telah terkumpul sekitar Rp21,7 triliun berasal dari kontribusi 15 negara dan tiga lembaga filantropi. Jumlah itu kemungkinan terus bertambah mengingat Australia, Prancis, dan Arab Saudi juga menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi pada Dana Pandemi

2. Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform
   G20 juga telah membentuk Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Indonesia. Hal ini guna mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang adil dan berkelanjutan. Adapun dukungan pembiayaan untuk ETM dari Climate Investment Funds dan dukungan kerja sama lembaga internasional.
3. Bali Konpendium
   Negara-negara G20 pun meluncurkan Bali Kompendium. Kesepakatan ini disusun dengan kerja sama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Kompendium ini nantinya akan digunakan sebagai panduan berinvestasi oleh negara-negara G20.
4. Global Blended Finance
   Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Global Blended Finance (GBF) Alliance atau Aliansi Keuangan Campuran Global disela pelaksanaan rangkaian KTT G20 di Nusa Dua, Bali. GBF diluncurkan untuk bisa membangun kapasitas pembiayaan campuran yang lebih baik di seluruh wilayah, baik antar negara, sektor swasta, dan filantropi.
5. Transaksi Digital Bank Sentral ASEAN

Bank Indonesia (BI) menandatangani kerja sama dengan 4 bank sentral ASEAN, yakni Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Kelima bank sentral tersebut sepakat mendorong kemudahan transaksi digital di kawasan. Kerja sama ini tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan. Implementasi kerja sama ini bakal mendukung dan memfasilitasi perdagangan, investasi, pendalaman pasar keuangan, remitansi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lintas batas lainnya, serta mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan kawasan yang lebih inklusif.

6. Investasi AS ke Indonesia Rp38,82 T

   Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan besaran investasi di Indonesia, termasuk perjanjian US$2,5 miliar atau setara Rp38,82 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS) antara Exxon Mobil dengan Pertamina. Investasi yang dilakukan AS berbentuk kesepakatan antara ExxonMobil dengan Pertamina. Kerja sama akan menilai lebih lanjut pengembangan pusat penangkapan dan penyerapan karbon regional di Indonesia. Tidak hanya itu, AS dan Indonesia juga sepakat untuk meluncurkan program Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai US$698 juta untuk membantu mendukung pengembangan infrastruktur transportasi sadar iklim di lima provinsi RI serta tujuan pengembangan lainnya. Rincian dana dalam kerja sama program MCC tersebut adalah US$649 juta disumbang oleh AS dan US$49 juta sisanya dikucurkan oleh Pemerintah Indonesia.

7. Investasi CNGR Advanced Material China

   Kementerian Investasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan CNGR Advanced Material Co Ltd. produsen ternary precursor asal China, untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama ini memiliki nilai investasi US$5 miliar. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Investasi Ikmal Lukman dan Chairman CNGR Advanced Material Co Ltd Deng Weiming dan disaksikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dalam MoU, Kementerian Investasi akan bertanggung jawab untuk membantu CNGR Advanced Material memperoleh semua penerbitan izin proyek, termasuk insentif investasi dari pemerintah.

8. Investasi Jepang dan Inggris di MRT Jakarta
   Jepang dan Inggris berminat untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dan Pemerintah Inggris di Nusa Dua, Bali, MoU yang ditandatangani, yakni pertama, Memorandum of Cooperation (MoC) antara RI dengan Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Kedua, Letter of Intent (LoI) antara RI dengan Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.
9. Investasi Turki di Produksi Bus Listrik
   Indonesia dan Turki menjalin kesepakatan bilateral terkait produksi bus listrik di dalam negeri dan pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Untuk bus listrik, kerja sama dilakukan oleh pabrikan bus listrik Karsan dari Turki dengan PT. Schahmindo Perkasa (Credo Group). Sedangkan, proyek jalan tol Trans Sumatra dilakukan antara PT Hutama Karya dengan kontraktor Turki, ERG Insaat. Penandatanganan antar dunia usaha tersebut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu.

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam isu-isu strategis internasional adalah berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru

yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind"*. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.2. Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Nasional

A. Telaahan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **"Terwujudnya Indonesia** Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan **Gotong Royong"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi Prioritas Nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.

Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:
   a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
   b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
   c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
   d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:
   a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
   b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaaan;
   c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;

d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:
   a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
   b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
   c) Pemenuhan Layanan Dasar;
   d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
   e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:
   a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
   b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
   c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
   d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
   e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
   f) Belum Optimalnya Peran Keluarga;
   g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:
   a) Infrastruktur Pelayanan Dasar;
   b) Infrastruktur Ekonomi;
   c) Infrastruktur Perkotaan;
   d) Energi dan Ketenagalistrikan;
   e) Transformasi Digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim:
   a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

c) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik:
   a) Konsolidasi Demokrasi;
   b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
   c) Penegakan Hukum Nasional;
   d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
   e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

B. Proyek Strategis Nasional

Dalam melaksanakan agenda pembangunan, Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek prioritas strategis (*major project*). Proyek Strategis Nasional (PSN) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangLrnan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak Proyek Strategis Nasional bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu telah terbit Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan, Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek prioritas strategis (*major project*). Adapun *major project* yang belokasi di Provinsi Jawa Barat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No	Nama Proyek Prioritas	Manfaat	Lokasi	Indikasi Pendanaan	Pelaksana
1	Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	1. Peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi 2. Peningkatan kapasitas STP sebagai simpul triple-helix dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial	2 Provinsi (Jawa Barat: ITB, UI, IPB; dan DIY: UGM)	Rp 0,8 Triliun (APBN)	Kementerian Ristek/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri (ITB, IPB, UI dan UGM), Kementerian Perindustrian,
2	Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis	1. Pengembangan sistem pemantauan kualitas air yang terintegrasi 566 telemetri. 2. Peningkatan kualitas air menjadi kelas II. 3. Penurunan erosi di wilayah DAS Kritis dengan penghijauan lahan kritis sebesar 150.000 Ha. 4. Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI		Rp 30,9 Triliun (APBN)	KemenPUPR dan Pemerintah Daerah
3	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta –	Berkurangnya waktu tempuh: - Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam		Rp 63,6 Triliun - APBN: 21,6	a.l Kemenhub, KemenPUPR, BPPT Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung,	Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan		Rp 118,8 Triliun (APBN, APBD, Badan Usaha)	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

Sumber: RPJMN 2020-2024

C. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya bagi kesehatan masyarakat namun juga bagi perekonomian baik

secara mikro/rumah tangga maupun secara makro regional dan nasional. Hal ini juga memberikan pukulan yang sangat berat bagi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Majalengka. Semua sektor ekonomi mulai dari Industri Pengolahan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pertanian, sampai sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdampak. Masyarakat banyak kehilangan kehilangan pekerjaannya, kehilangan sumber pendapatannya juga banyak yang mengalami penurunan usaha bahkan sampai kehilangan usahanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemulihan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif agar para pelaku usaha dapat menciptakan bangkitan ekonomi baru maupun mengembangkan usahanya dan memunculkan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Selain itu upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dilakukan melalui optimalisasi Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta Sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada. Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia, kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, daya saing dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 di Kabupaten Majalengka difokuskan kepada :

1. Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan secara berkesinambungan;
2. Peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikasi dan peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan;
3. Peningkatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
4. Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi pelayanan publik;

5. Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui Pendampingan Desa/Kelurahan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
6. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan;
7. Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja;
8. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk eksploitasi/diskriminasi, penelantaran, dan tindak kekerasan;

4.2.3 Telaahan RTRW Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 menjadi salah satu dokumen yang harus dipedomani dalam penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Mempedomani RTRW bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana tata ruang. Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dariWilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
2. Tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;
3. Terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
4. Terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
5. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang. Strategi Penataan Ruang meliputi:
    1). Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melaluiketerkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan

Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:

a). Menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;

b). Meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan

c). Meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.

2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:

a). Meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;

b). Mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;

c). Meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;

d). Meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;

e). Menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan

f). Pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.

3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi, meliputi:

a). Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya-Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKNPKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;

b). Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integerasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;

c). Mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;

d). Mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;

e). Mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;

f). Mengembangkan system telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;

g). Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;

h). Mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;

i). Mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;

j). Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan

k). Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.

4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:

a). Meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi);

b). Membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghin dari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;

c). Meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;

d). Mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;

e). Mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

f). Meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;

g). Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;

h). Mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;

i). Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;

j). Meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;

k). Mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan

l). Mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:

a). Mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;

b). Mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;

c). Melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;

d). Merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;

e). Memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;

f). Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatanekonomi Wilayah; dan

g). Pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.

6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, meliputi:
   a). Merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
   b). Mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
   c). Pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
   d). Mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
   e). Mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial

ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

a). Meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;

b). Menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;

c). Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan

d). Mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek- Cikampek Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.

8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan, meliputi:

a). Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga;

b). Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan

c). Strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.4 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu: (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing SDM; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Kelima isu strategis di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing SDM Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan menengah yang belum mencapai seratus persen. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antar daerah, pemerataan jumlah sekolah bahwa masih terdapat 19 (sembilan belas) kecamatan yang tidak terdapat sekolah (SMA/SMK) Negeri dari total kecamatan di Provinsi Jawa Barat. Selain hal tersebut di atas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan

dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah

2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial

   Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59. Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada periode Tahun 2015-2019 penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 serta keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri, menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat.

3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45 persen, sedangkan daya tampung

lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya. Namun di sisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsipprinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tamping lingkungan tidak diutamakan. Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan
   Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak buruk terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi. Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Provinsi Jawa Barat telah dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil, dan belum optimalnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku

UKM dalam memasarkan produknya, sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Terjadinya penurunan realisasi PMA yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika social mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi

5. Reformasi Birokrasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

4.2.5. Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar

Dalam pengembangan pembangunan di Kota Tasikmalaya tentunya tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari kabupaten/kota sekitar, terutama dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung Kota Tasikmalaya.

4.2.5.1. Kabupaten Tasikmalaya

Visi, misi dan isu strategis dari RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

Visi : “Mewujudkan Tasikmalaya Berkharisma, Unggul dan Inovatif”

Adapun misi adalah sebagi berikut:

1. Membentuk karakter warga masyarakat yang unggul, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, transparan dan akuntabel dilandasi kerjasama ulama, umara dan cerdik cendekia;
3. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan berdaya saing dengan berbasiskan agribisnis;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berbasiskan aspek lingkungan yang berkelanjutan.

Isu Strategis RPJMD perubahan Kabupaten Tasikmalaya:

1. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas;
2. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah
4. Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19
5. Recovery Ekonomi dampak Pandemi Covid-19
6. Pengembangan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas
7. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi dibidang pertanian dan kepariwisataan
8. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional dan global
9. Penanggulangan Kemiskinan
10. Penanganan pengangguran
11. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB
12. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

4.2.5.2. Kabupaten Ciamis

Visi misi dan isu strategis dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Visi: “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”, dengan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah;
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal;
4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Adapun isu strategis pembangunan daerahnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan daya beli masyarakat;
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan;
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur;
6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam;
8. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
9. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Peningkatan pengembangan kawasan pertumbuhan;
11. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.

4.2.5.3 Kabupaten Sumedang

Pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 penetapan isu-isu strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dirumuskan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; merupakan

tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;, memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah; dan kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola. Hasil perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2024 sampai dengan 2026 meliputi:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
    a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
    b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan gerakan hidup sehat.
    c. Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular serta penerapan zero new stunting.
    d. Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pembangunan pemuda dan ketahanan keluarga.
    e. Peningkatan kompetensi angkatan kerja yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
    f. Peningkatan efektivitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Pertumbuhan ekonomi
    a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
    b. Peningkatan ketahanan pangan daerah.
    c. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
    d. Optimalisasi pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata.
    e. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri kecil dan menengah.
    f. Percepatan penggunaan teknologi informasi pada setiap sektor ekonomi.
    g. Peningkatan nilai inverstasi daerah.
    h. Penerapan ekonomi sirkular.

3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan
    a. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah.
    b. Mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim.
    c. Peningkatan dan pemertaan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak)
    d. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.
    e. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
    f. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
    g. Penataan ruang yang mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta penanggulangan kawasan rawan bencana.
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
    a. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.
    b. Penguatan penegakan regulasi daerah.
    c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.
    d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
    e. Peningkatan dan pemertaan kualitas pelayanan publik.
    f. Peningkatan profesionalisme ASN.
    g. Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah

4.2.6 Isu Strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun 2018-2023, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Pembangunan Manusia

Kemiskinan menjadi isu global yang menjadi Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Memasuki tahun 2021, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,33 persen dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 11,94 persen.

Kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Kemiskinan di Kabupaten Majalengka terutama disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Daya beli berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha.

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka yang mencapai 1,3 juta jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Majalengka mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan dasar yang belum mencapai seratus persen. Selain itu masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan,

terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan masih tingginya prevalensi stunting. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemic COVID-19.

2. Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19, Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mengalami penurunan drastis meskipun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,75%.

Hal yang sama terjadi pada realisasi investasi, terjadi penurunan nilai investasi yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara serta wilayah di Indonesia yang berdampak pada dinamika ekonomi sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan menimbulkan keraguan pasar dalam berinvestasi. Namun di tahun 2021 hingga 2022 nilai realisasi investasi kembali berangsur mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan

rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten, kedepannya diyakini akan ditunjang juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai start point pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten ditandai dengan predikat Kabupaten sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan pentahelix yakni akademisi (Academician), bisnis (Business), komunitas (Community), pemerintah (Government), dan media atau disingkat ABCGM.

Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya lips service. Diharapkan pula baik pada proses dan outcome dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara direct dan indirect akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai polar baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten di masa yang akan datang.

Saat ini subsektor unggulan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka sesuai amanat dalam RPJMD 2018-2023 terdiri dari subsektor pertunjukan, subsektor kuliner dan subsektor kriya

Meskipun pembangunan infrastruktur di Kabuapaten Majalengka pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan dan transportasi yang menghubungkan antarwilayah diKabupaten Majalengka sehingga dapat menekan kesenjangan antar wilayah merupakan perwujudan dari konektifitas antar wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas jalan yang berasal dari APBD Kabupaten Majalengka maupun dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan jalan maupun prasarana perhubungan lainnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang diharapkan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah.

Konektivitas yang rendah menyebabkan daya saing Kabupaten Majalengka menjadi rendah pula karena konsentrasi pengembangan hanya terjadi pada wilayah tertentu saja. Hasil pertanian maupun perdagangan kurang optimal karena ada hambatan dalam distribusi keseluruh wilayah Kabupaten Majalengka. Hambatan lain yang disebabkan kurang optimalnya konektifitas antar wilayah adalah pertumbuhan investasi yang kurang merata.

3. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belum Maksimal

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih perlu ditingkatkan antaralain profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak

dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka, kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah Daerah baik untuk sektor perijinan maupun non perizinan dan profesionalisme aparaturnya belum berjalan efektif dan optimal namun Kabupaten Majalengka secara konsisten terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Majalengka tahun 2022 dengan **kategori "CC",** capaian ini menunjukkan PR besar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Majalengka harus menyelesaikan permasalahan terkait kapasitas aparatur dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Masalah tersebut terefleksikan dari capaian komponen ASN profesional dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagaimana Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.8
Komponen Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022

No.	Komponen Reformasi Birokrasi	Satuan	2020	2021	2022
	Indeks Reformasi Birokrasi	**Poin**	**53,88**	**56,84**	**58,46**
		Predikat	**CC**	**CC**	**CC**
A.	Komponen Pengungkit				
1	Pemenuhun	Poin	7,95	9,76	10,35
2	Hasil Antara Area Perubahan	Poin	5,05	5,41	6,25
3	Reform	Poin	9,53	11,08	11,72
	Total Komponen Pengungkit		**22,53**	**26,25**	**28,32**
B.	Komponen Hasil				
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Poin	7,69	7,70	7,7
2	Kualitas Pelayanan Publik	Poin	8,38	8,55	9,32
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Poin	8,65	7,67	8,17
4	Kinerja Organisasi	Poin	6,63	6,66	4,95
	Total Komponen Hasil		**31,35**	**30,59**	**30,14**

Sumber: Kementerian PANRB. 2022.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten majalengka tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, demikian pula dengan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Dalam mengisi kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah yang menjadi pedoman untuk pembangunan tahunan sampai dengan terpilih dan dilantiknya kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Mengingat tidak adanya Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan, maka dokumen RPD Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi sebagai fokus pembangunan daerah, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 tahun kedepan. Selanjutnya, tujuan dijabarkan kedalam sasaran pembangunan yang fokus. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026 dirumuskan dengan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Majalengka, isu strategis aktual, evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, dan kebijakan nasional, dan regulasi ytang berlaku. Selain itu, rumusan tujuan dan sasaran RPD juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah

secara umum yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Tabel 5.1 menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan Kabuapten Majalengka tahun 2024 sampai dengan 2026. Sementara pada Tabel 5.2 menyajikan keterkaitan tujuan dan/atau sasaran RPD dengan sasaran pokok RPJPD tahap ke-5.

Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1.	**Meningkatnya Pembangunan Manusia**	**Indeks Gini**	**Poin**	0,354	0,367	0,330	0,329	0,328	0,328	0,328
		IPM	**Poin**	67,81	68,56	68,84	68,90	69,00	69,20	69,20
1.1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,33	11,94	10,37	10,37	10,09	9,63	9,63
1.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	RLS (rata-rata lama sekolah)	Tahun	7,31	7,49	7,52	7,61	7,71	7,82	7,82
1.3.	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,46	70,76	70,60	71,35	71,65	72,00	72,00
		Prevalensi Stunting	Persen	23,00	24,30	21,00	17,36	14,61	11,86	11,86
2.	**Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**4,75**	**6,63**	**6,69**	**6,72**	**6.28**	**6,34**	**6,34**
		Inflasi	**Persen**	**1,81**	**4,86**	**3,97**	**3,97**	**3,97**	**3,97**	**3,97**
2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	64,75	65,18	67,28	68,49	68,49
2.2.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,32	64,81	66,29	67,08	68,26	69,45	69,45
2.3.	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	22,79	24,30	25,85	27,58	29,31	31,17	31,17
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,71	4,16	4,48	4,44	4,40	4,37	4,37
2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	Kategori	N/A	N/A	N/A	C	C	B	B

NO.	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
3.	**Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah**	**Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	Kategori	N/A	N/A	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	CC	CC	B	B	B
3.2.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 5.2
Keterkaitan RPJPD Kabupaten Majalengka dengan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

RPJPD Tahap V (2023-2025)				RPD Tahun 2024-2026		
Sasaran Pokok		**Indikator**	**Target Kondisi Akhir s/d 2025**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target Kondisi Akhir s/d 2026**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
a.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,26	1.3. Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,00
					Prevalensi Stunting (Persen)	11,86
		Rata-rata Lama Sekolah (Persen)	9,29	1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (Persen)	7,82
		Paritas Daya Beli (Rupiah)	Rp.661.140	2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,34
b.	Terwujudnya perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Trilyun Rupiah)	13,80	2.3. Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Trilyun Rupiah	31,17
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	9,78-10,08 %	2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,34
c.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan.	Kondisi Irigasi Teknis dalam Kondisi Baik (Persen)	49,25	2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan.	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah (Persen).	68,49
		Rumah Tangga yang menggunakan sumber air minum (Persen)	96,01	2.2. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	69,45

RPJPD Tahap V (2023-2025)				RPD Tahun 2024-2026		
Sasaran Pokok		**Indikator**	**Target Kondisi Akhir s/d 2025**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target Kondisi Akhir s/d 2026**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
d.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Profesionalisme Aparatur	N/A	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Poin)	Sangat Tinggi
		Kualitas Birokrasi Pemerintahan	N/A	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	B
e.	Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Proporsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya	40,76 % dan 59,24%	2.2. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	69,45

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD, 2023.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran RPD dicapai dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, isu strategis dan arah kebijakan RPJPD pada tahap ke-5. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran RPD. Strategi dijabarkan dalam arah kebijakan yang menjadi rujukan untuk penentuan program prioritas dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Apabila mengacu pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, terdapat beberapa hal yang ditekankan dalam penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang, sebagaimana tersaji pada Tabel 6.1 berikut

Tabel 6.1.
Kerangka Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025

Misi RPJPD	Bidang Pembangunan	Penekanan pada Strategi & Arah Kebijakan
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).	Pendidikan, kesehatan, keagamaan, Kependudukan, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Sosial dan IPTEK.	Perlu adanya penekanan pada daya saing dan kemampuan/*skill* SDM masyarakat Kabupaten Majalengka dalam berbagai aspek. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur Kabupaten Majalengka saat ini menuntut adaptasi masyarakat lokal sehingga mampu terserap di sektor industri dan berdaya secara sosial-ekonomi.

Misi RPJPD	Bidang Pembangunan	Penekanan pada Strategi & Arah Kebijakan
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.	Pertanian, Pangan, Industri, UMKM, Penanaman Modal, Perdagangan, dan Pariwisata.	Dibutuhkan penekanan pada peningkatan kontribusi sektoral yang menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Majalengka di masa mendatang, seperti industri olahan dan jasa.
3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan.	Transportasi, irigasi, Air Minum, Energi dan Telekomunikasi, Perumahan Rakyat, Persampahan, dan Tata Ruang.	Perlu adanya penekanan pada aspek inklusifitas dan keberlanjutan sosial-ekonomi-lingkungan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Aparatur Pemerintah, Hukum, dan Politik	Perlu adanya penekanan pada peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Perlu ditekankan bentuk peran aktif yang dapat dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Keterkaitan sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPD Tahun 2024-2026 disajikan secara sistematis pada tabel di bawah.

Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Majalengka
Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	**Meningkatnya Pembangunan Manusia**		
1.1.	Menurunnya Penduduk miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat miskin berbasis data P3KE
		Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin	Penguatan Ekonomi Keluarga Miskin Berbasis Data P3KE
		Menangani Kantong-Kantong Kemiskinan	Pemenuhan Infrastruktur dan Mendekatkan Akses Keluarga Miskin
1.2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Penurunan angka putus sekolah
1.3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan dan Kualitas SDM Kesehatan
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Aktivitas Olahraga	Peningkatan Aktivitas Olahraga
		Meningkatkan Intervensi Gizi Sensitif	Peningkatan Status Gizi Masyarakat

NO.	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan Intervensi Gizi Spesifik	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Lingkungan
2.	**Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**		
2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan	Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengawasan angkutan barang di Jalan	Peningkatkan jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbangun serta pengawasan angkutan barang di Jalan
		Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan jalan kabupaten	Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten dan bangunan pelengkapnya
		Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi serta pengelolaan sumber daya air lainnya di Wilayah Kabupaten Majalengka
		Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya	Melaksanakan penataan bangunan gedung dan lingkungannya
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) serta melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan
2.2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Mengurangi pencemaran air	Pelaksanakan Pengendalian Pencemaran air
		Mengurangi pencemaran Udara	Pelaksanakan Pengendalian Pencemaran udara
		Meningkatkan tutupan lahan	Pemeliharaan Tutupan Lahan
		Persentase penanganan, Pengurangan sampah	Pelaksanakan penanganan, pengurangan sampah
2.3.	Meningkatnya produktivitas daerah	Meningkatkan Daya saing sumber daya Lokal	Peningkatan Jumlah IKM
			Peningkatan Kualitas Produk Lokal
			Penguatan Ekosistem Digital
		Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
			Peningkatan Volume dan Nilai Ekspor
			Penguatan Pasar Digital (*E-Commerce*)
		Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Penguatan Regulasi LP2B dan LSD
			Peningkatan Kualitas SDM Pertanian

NO.	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Litbang Pertanian (Benih / Bibit Unggul)
		Meningkatkan Kualitas Destinasi Layak Kunjung	Peningkatan pengelolaan , promosi destinasi dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
			Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
		Meningkatkan Pembangunan Perdesaan Melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Masyrakat Desa	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			Peningkatan pembangunan desa melalui pengembangan kerjasama Desa
			Peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, lembaga desa dan aparatur desa
			Peningkatan Keberdayaan masyarakat desa
		Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Penguatan Daya Dukung Peningkatan Skill Tenaga Kerja
		Meningkatkan Iklim Investasi	Penguatan sarana prasarana pelayanan
			Penguatan Promosi Investasi
			Penyediaan Peta Potensi Investasi
		Menumbuhkan minat sektor pertanian	Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian
		Meningkatkan keterampilan tambahan pada angkatan kerja	Peningkatan Minat Pelatihan Keterampilan Angkatan Kerja
2.4.	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan Layanan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran
		Meningkatkan Penegakan Perda/Perkada serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perwujudan Budaya Tertib dan Sadar Aturan Dalam Masyarakat
		Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Koordinasi Kondusifitas dan Stabilitas Daerah
		Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana	Peningkatan penanggulangan bencana
3.	**Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah**		
3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta	Meningkatkan reformasi birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pelayanan publik yang prima	Melaksanakan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit
		Meningkatkan ketersediaan regulasi daerah, kapasitas dan kapabelitas SDM penyelenggaraan statistik sektoral serta fasilitas dan asesibilitas media data berbasis teknologi informasi	Peningkatan pengelolaan statistik sektoral daerah
		Meningkatkan pemerataan akses, kualitas pelayanan, keamanan dan keterbukaan informasi publik	Peningkatan pemerataan akses, kualitas pelayanan, keamanan dan keterbukaan informasi publik
		Meningkatkan tatakelola standar kemanan, sarana pendukung dan sumberdaya manusia pengelola informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penyusunan dan penetapan regulasi keamanan informasi daerah
			Peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknik dan pelatihan sumberdaya manusia
			Meningkatkan audit dan supervisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Meningkatkan ketersedian fasilitas sarana keamanan informasi
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Masyarakat di Kecamatan	Peningkatan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan
			Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembinaan, pengawasan, koordinasi dan pembangunan Desa/Kelurahan
			Peningkatan kapasitas melalui pendampingan terhadap aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa/kelurahan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan Level PK APIP
		Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Diseminasi inovasi
		Meningkatkan ekosistem inovasi pelayanan publik	*One Agency One Innovation*
3.2	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Meningkatkan pendapatan daerah	Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta koordinasi dana transfer

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD, 2023.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPD yang dijabarkan dalam RKPD pada setiap tahun yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang.

Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 6.3.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan
(Tema Pembangunan)

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan (Arah Kebijakan Pembangunan)		
Tahun 2024	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pemantapan Pembangunan Infrstruktur Berwawasan Lingkungan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kabupaten harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini untuk membangun sinergitas dan kolaborasi perencanaan pembangunan sehingga terbangun keselarasan pelaksanaan pembangunan antara Kabupaten Majalengka dengan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPD Tahun 2024-2026. Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah:

1. Matra keruangan dari pembangunan daerah;

2. Adanya Rencana Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati;
3. Dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
4. Alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
5. Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
6. Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan yang lebih rinci;
7. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Dasar pemberian izin lokasi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur, dan pola ruang. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Majalengka yaitu mewujudkan Kabupaten majalengka sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka dicapai melalui sasaran:

1. Terwujudnya ruang untuk kawasan agropolitan dan minapolitan;
2. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis guna mendukung dibangunnnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), aerocity, kawasan industry, pariwisata, komersial, jasa, permukiman dan lain-lain;
3. Perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana;
4. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mengakomodir prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang; dan
5. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 39,19% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.

Kebijakan penataan ruang disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

1. Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
3. Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dijabarkan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih nyata yang selanjutnya disebut strategi yang dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 3 (tiga) tahun;
2. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
3. Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 3 (tiga) tahun dalam RTRW Kabupaten;
4. Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
5. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis, yang secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

6.2.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 terdiri atas:

1. **Pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan industri, pertanian, pariwisata, dan logistik**. Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; dan
2) Mengembangkan pusat industri, pertanian, pariwisata, dan logistik.

2. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan.

Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan;
2) Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan;
3) Mengembangkan sistem transportasi massal;
4) Meningkatkan fungsi terminal angkutan umum; dan
5) Meningkatkan integrasi sistem antar moda transportasi.

3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
2) Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
3) Mengembangkan prasarana energi/listrik;
4) Mengembangkan prasarana sumber daya air;
5) Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
6) Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
7) Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

6.2.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 terdiri atas kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung dan kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan budidaya.

1. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung

1) Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung

Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

a. Menetapkan kawasan yang berfungsi lindung;
b. Mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun;
c. Meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung.

2) Pelestarian kawasan cagar budaya

Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

a. Menetapkan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya; dan
b. Memelihara kelestarian kawasan cagar budaya.

3) Penyediaan Kawasan yang berfungsi RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kabupaten dan Wilayah Perkotaan

Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

a. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
b. Menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
c. Mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan
d. Mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

a. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Budi Daya

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi kebijakan: **pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup**, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Pemantapan sistem agribisnis untuk meningkatkan komoditi pertanian unggulan;
2) Pengembangan kegiatan perikanan;
3) Pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;

4) Pengembangan kegiatan industri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;
5) Pengembangan kegiatan logistik; dan
6) Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

6.2.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi kebijakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Majalengka dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

A. Strategis pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan PKW Kadipaten;
2. Pengembangan Kawasan Potensial Cepat Tumbuh, meliputi: Sekitar Jalan Tembus Majalengka–Lemahsugih meliputi Majalengka, Maja, Bantarujeg Dan Leumahsugih; Dan Sekitar Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka Meliputi Kecamatan Panyingkiran, Cigasong, Majalengka;
3. Pengembangan Kawasan Sekitar BIJB;
4. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Leumahsugih;
5. Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Sindangwangi (KAWITWANGI);
6. Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Sindang, Argapura, Rajagaluh (WISAGAPURA);
7. Pengembangan Kawasan Terakota Jatiwangi; dan
8. Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Perkotaan Majalengka.

B. Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

1. Pemantapan fungsi lindung Kawasan Sekitar Taman Nasional (TN) Gunung Ciremai;
2. Pengembangan Kawasan GIAHS NIAHS.

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Majalengka, dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1) PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), merupakan pusat kegiatan jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya.

   PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kinerja PKW sebagai pusat-pusat pertumbuhan di setiap kawasan andalan perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian, keberadaan kawasan andalan belum cukup efektif dalam pengembangan kawasan, sehingga upaya untuk mendorong sinergitas antara pengembangan PKW perlu ditingkatkan. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan kawasan andalan terkait.

   Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:

   - Perhubungan : Pelabuhan udara, dan atau pelabuhan laut dan atau terminal tipe B
   - Ekonomi : Pasar induk regional
   - Kesehatan : Rumah sakit umum tipe B
   - Pendidikan : Perguruan tinggi

2) Ruang yang termasuk dalam PKW ini tidak terpaku ke dalam batas administrasi saja, akan tetapi mencakup sekitar simpul jalur utama antara koridor Bandung-Cirebon dan koridor Utara-Selatan,

sehingga ruang kecamatan yang termasuk kedalam PKW Kadipaten, selain Kecamatan Kadipaten, adalah Kecamatan Dawuan.

3) PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL.

   Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 ditetapkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari pusat kegiatan lokal perkotaan dan pusat kegiatan lokal perdesaan. Namun demikian, dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen No. 16/PRT/M/2009 tidak dikenal nomenklatur PKL perkotaan dan PKL perdesaan, sehingga walaupun dalam arahan RTRW Provinsi Jawa Barat untuk Kecamatan Majalengka ditetapkan sebagai PKL perkotaan, maka dalam Revisi RTRW Kabupaten Majalengka ini, Majalengka kembali menjadi PKL tanpa nomenklatur “perkotaan”. Dalam rangka mengembangkan wilayah ibu kota Kabupaten Majalengka serta untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang, maka perlu adanya perluasan wilayah perkotaan yang mencakup Kecamatan Majalengka, Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Talaga.

4) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. adapun kriteria penetapan PPK yaitu semua kawasan kecamatan selain PKL dan PKW merupakan PPK yaitu kecamatan Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Kasokandel, Panyingkiran, Cigasong, Sukahaji, Banjaran, Leuwimunding, Rajagaluh, Sindangwangi, Argapura, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma, Cingambul, Cikijing, dan Kecamatan Sindang.

5) PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa dengan kriteria sebagai berikut:

- Merupakan desa potensial/Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
- Melayani satu atau lebih desa;
- Tidak termasuk kepada kawasan perkotaan.

Untuk lebih jelasnya, rencana pengembangan pusat kegiatan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.4
Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan
di Kabupaten Majalengka

PKW	PKL	PPK	PPL
1. PKW Kadipaten (Perkotaan Kadipaten & Dawuan)	1. PKL Majalengka 2. PKL Kertajati 3. PKL Talaga 4. PKL Rajagaluh 5. PKL Jatiwangi	1. PPK Jatitujuh 2. PPK Kasokandel 3. PPK Ligung 4. PPK Sumberjaya 5. PPK Leuwimunding 6. PPK Palasah 7. PPK Argapura 8. PPK Sukahaji 9. PPK Sindangwangi 10. PPK Bantarujeg 11. PPK Lemahsugih 12. PPK Banjaran 13. PPK Maja 14. PPK Cigasong 15. PPK Panyingkiran 16. PPK Cikijing 17. PPK Sindang 18. PPK Cingambul 19. PPK Malausma	1. PPL Pilangsari 2. PPL Kedungsari 3. PPL Gandawesi 4. PPL Cidenok 5. PPL Najasuka 6. PPL Sukaraja Wetan 7. PPL Panjiwetan 8. PPL Cijurey 9. PPL Tajur 10. PPL Karayunan 11. PPL Jayi 12. PPL Ciomas 13. PPL Pasirmulya 14. PPL Parakan 15. PPL Teja 16. PPL Padaherang 17. PPL Mekerwangi 18. PPL Sindangmulya 19. PPL Silihwangi 20. PPL Cipeundeuy 21. PPL Mekar wangi 22. PPL Sinargalih 23. PPL girimukti 24. PPL cimuncang 25. PPL Wangkelang 26. PPL sedaraja 27. PPL Cisoka 28. PPL Bayureja

Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Tabel 6.5
Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Kabupaten Majalengka

STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kadipaten (Kawasan Perkotaan Kadipaten & Dawuan)	Sebagai *simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, dan pendukung kegiatan industry*
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Majalengka	Fungsi utama sebagai *pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.*
	2. Kertajati	*Sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan "aerocity", dan pertanian.*
	3. Talaga	Sebagai *pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional.*
	4. Rajagaluh	*Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan.*
	5. Jatiwangi	*Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan, dan pertanian.*
Pusat Pelaynaan Kawasan (PPK)	1. Cigasong	*sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.*
	2. Panyingkiran	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum serta pendukung kawasan komersial, perumahan, pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan.
	3. Cikijing	Sebagai *pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, komersial, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan perkotaan, terminal regional, perikanan, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.*
	4. Jatitujuh	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, jasa, industri dan pendukung komersial, pertanian/peternakan dan perikanan.
	5. Kasokandel	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan, pertanian dan perikanan.
	6. Ligung	Sebagai kawasan pertahanan keamanan (Lanud S. Sukani), pengembangan industri dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.
	7. Sumberjaya	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.
	8. Leuwimunding	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.
	9. Palasah	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.
	10. Argapura	*sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.*
	11. Sukahaji	*sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.*

STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
	12. Sindangwangi	*sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.*
	13. Bantarujeg	Sebagai *pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata dan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa*
	14. Lemahsugih	Sebagai *pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.*
	15. Banjaran	Sebagai *pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.*
	16. Maja	*Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata, dan pengembangan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.*
	17. Sindang	*sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.*
	18. Cingambul	Sebagai *pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala antar-desa.*
	19. Malausma	Sebagai *pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perbatasan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.*
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Jatitujuh (Pilangsari) 2. Ligung (Kedungsari, Gandawesi) 3. Sumberjaya (Cidenok) 4. Palasah (Najasuka) 5. Jatiwangi (Sukaraja Wetan) 6. Kasokandel (Panjiwetan) 7. Panyingkiran (Cijurey) 8. Cigasong (Tajur, Karayunan) 9. Sukahaji (Jayi, Ciomas) 10. Banjaran (Parimulya) 11. Leuwimunding (Parakan) 12. Rajagaluh (Teja) 13. Sindangwangi (Padaherang) 14. Argapura (Mekarwangi) 15. Maja (Sindangmulya) 16. Bantarujeg (Siliwangi, Cepeundey) 17. Lemahsugih (Mekarwangi, Sinargalih) 18. Malausma (Girimukti, Cimuncang) 19. Cingambul (Wangkelang, Sedareja) 20. Cikijing (Cisoka) 21. Sindang (Banyureja)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan, pengembangan “home industri” yang melayani kegiatan skala antar desa.

Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Catatan: Di setiap kecamatan diupayakan ada pusat-pusat komersial, pusat komersial ini didasarkan kepada kebutuhan standar pelayanan minimal.

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka perumusan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka didasarkan atas pertimbangan potensi pengembangan, batasan dan daya dukung lingkungan, serta kebijakan rencana tata ruang yang lebih tinggi dan kebijakan pembangunan lainnya, yang meliputi:

1. KAWASAN LINDUNG

1) SK Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Lindung;
2) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK 87/IV-SET/2015 tentang Zonasi TN Gunung Ciremai;
3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Kawasan Lindung;
4) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017);
5) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
6) Peta Kawasan Rawan Bencana (PVMBG Tahun 2016);
7) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan.

2. KAWASAN BUDIDAYA

1) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017);
2) Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
3) Potensi Pengembangan (Pertanian, Wisata, Pertambangan, Industri, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dll);
4) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan;
5) Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Majalengka Tahun 2018;
6) Masterplan BIJB dan Kertajati Aerocity.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, maka arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.6
Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

NO.	POLA RUANG	LUAS (HA)	%
A.	**KAWASAN LINDUNG**	**20.559,49**	**15,30**
1.	**Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**	**8.140,51**	**6,06**
	Hutan Lindung	5.358,40	3,99
	Resapan Air	2.782,11	2,07
2.	**Kawasan Perlindungan Setempat**	**4.468,29**	**3,33**
	Sempadan Sungai	4.444,09	3,31
	Sekitar Danau atau Waduk	24,20	0,02
3.	**Kawasan Konservasi**	**6.037,01**	**4,49**
	Taman Nasional Gunung Ceremai	6.037,01	4,49
4.	**Kawasan Lindung Geologi**	**1.913,68**	1,42
	Sempadan Mata Air	1.913,68	1,42
5.	**Kawasan Rawan Bencana**	**44.301,26**	**32,98**
	Rawan Bencana Gempa Bumi	25.004,96	18,61
	Rawan Bencana Gerakan Tanah	6.667,04	4,96
	Rawan Bencana Gunung Api I	2.974,33	2,21
	Rawan Bencana Gunung Api II	2.951,72	2,20
	Rawan Bencana Gunung Api III	177,70	0,13
	Rawan Bencana Banjir	6.525,51	4,86
B.	**KAWASAN BUDIDAYA**	**113.781,33**	**84,70**
1.	**Kawasan Hutan Produksi**	**15.581,86**	**11,60**
	Hutan Produksi Tetap	14.142,51	10,53
	Hutan Produksi Terbatas	1.439,35	1,07
2.	**Kawasan Hutan Rakyat**	**6.513,48**	**4,85**
3.	**Kawasan Pertanian**	**38.589,59**	**28,73**
	Pertanian Tanaman Pangan	30.239,55	22,51
	Pertanian Holtikultura	7.518,15	5,60
	Perikanan	831,83	0,62
4.	**Kawasan Pertambangan dan Energi**	**880,10**	**0,66**
	Pertambangan Mineral	880,10	0,66
5.	**Kawasan Industri**	**3.077,71**	**2,29**
	Kawasan Industri	1.723,78	1,35
	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)	8,24	0,01
	Industri	1.063,11	0,94
6.	**Kawasan Permukiman**	**40.303,86**	**30,00**
	Kawasan Permukiman Perkotaan	14.704,62	10,43
	Kawasan Permukiman Perdesaan	23.667,17	19,57
7.	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**	**56,97**	**0,56**
8.	**Kawasan Aerocity**	**3.480,00**	**2,29**
9.	**Kawasan Bandara BIJB**	**1.800,00**	**1,34**
10.	**Kawasan Aerotropolis**	**5.693,52**	**4,68**
11.	**Jalan**	**325,27**	**0,24**
TOTAL		**134.650,71**	**100,00**

Sumber: Draft Revisi RTRW Kabapaten Majalengka tahun 2011-2031.

Dari tabel di atas, bahwa arahan rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 20.559,49 Ha atau sekitar 15,30% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka. Sedangkan luas arahan rencana pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 113.781,33 Ha atau sekitar 84,70% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Majalengka, maka kebijakan dan strategi pembangunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 diarahkan untuk:

1. Pembangunan wilayah berorientasi pada kebijakan pengembangan wilayah, mengakomodasi sektor unggulan, dan menciptakan konektivitas wilayah. Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kelestarian fungsi lindung dan konservasi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat Majalengka terutama pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas air bersih, kawasan hutan dan lahan pertanian pangan, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana.
2. Pembangunan sektoral selaras dengan pembangunan wilayah, memastikan sinkronisasi dengan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang tercantum dalam RTRW dan RPD, mewujudkan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Pembangunan sektoral mewujudkan efektivitas pengelolaan pembangunan, efektivitas fungsi pusat-pusat kegiatan (sarana dan prasarana minimal pelayanan publik), serta menerapkan kaidah konservasi, dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan.
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2029, yang berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* pembangunan di Majalengka.

.

Keselarasan Penataan Ruang pada RPD dengan RPJMN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi pembangunan nasional. Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024), pembangunan diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, sebagaimana diuraikan di dalam RPJMN 2020-2024, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor

pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa Barat Khususnya Kabupaten Majalengka dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan beberapa lokasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, maka dilakukan keselarasan antara proyek prioritas RPJMN di Jawa Barat dengan rencana program perangkat daerah dalam RPD Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kebijakan kewilayahan yang diarahkan untuk Kabuapaten Majalengka pada RPJMN didukung dengan program perangkat daerah pada RPD tahun 2024 sampai dengan 2026 sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Terdapat beberapa proyek prioritas di RPJMN pada tabel di bawah yang tidak didukung dengan program di RPD sebab bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, namun kewenangan K/L.

Tabel 6.7

Keselarasan Program Perangkat Daerah dalam RPD dengan Program Prioritas dalam RPJMN

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat	RPD Kabupaten Majalengka
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	Program
1	KP 2 : Pengembangan Sektor Unggulan				
	Pengembangan komoditas unggulan Tebu				
	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Provinsi Jawa Barat, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Subang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2	KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigras				

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat	RPD Kabupaten Majalengka
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	**Lokasi**	**Program**	**Program**	**Program**
	Pembangunan Desa Terpadu	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, DPP Baru Bandung Halimun Ciletuh	1.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.Bina Pemerintahan Desa		
	Desa Digital (P3PD)	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Penetapan Batas Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang,	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat	RPD Kabupaten Majalengka
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	**Lokasi**	**Program**	**Program**	**Program**
		Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya			
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi,	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat	RPD Kabupaten Majalengka
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	**Lokasi**	**Program**	**Program**	**Program**
		Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Pendampingan pada 74.957 Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor,	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat	RPD Kabupaten Majalengka
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	**Lokasi**	**Program**	**Program**	**Program**
		Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya			
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon,	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat	RPD Kabupaten Majalengka
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	Program
		Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka			

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

6.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan isu strategis, pembangunan daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya :
   a. Pengelolaan data base dan pelayanan keluarga miskin;
   b. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
   c. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
   d. Pemberdayaan keluarga miskin;
   e. Beasiswa bagi mahasiswa dari rumah tangga miskin.
2. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia, diantaranya :
   a. Pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
   b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
3. Pembangunan insfratruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah;
   a. Peningkatan produksi tanaman pangan holtikultura dan perkebunan, ternak dan ikan;
   b. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Usaha Mikro;
   c. Pembinaan dan Pengembangan sarana distribusi perdagangan;
   d. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor Industri.
   e. Pemantapan Kualitas jalan;
   f. Pengembangan sarana dan prasarana air limbah;
   g. Pengembangan sarana dan Prasarana air minum;
   h. Peningkatan pengelolaan persampahan;
   i. Penataan kawasan permukiman kumuh;

4. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah:
   a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada;
   b. Percepatan implementasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi;
   c. Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);

Prioritas Pembangunan Daerah RPD 2024-2026 harus selaras dengan program prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Berikut tabel keselarasan antara progam prioritas RPD dengan program prioritas RPJMN seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.8
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah RPD Tahun 2024-2026

Prioritas Pembangunan Daerah RPD 2024-2026	Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024
Penanggulangan Kemiskinan	PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
	PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
	PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Pembangunan insfratruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar
	PN 6, Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim;
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PN 7,Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik

6.4 Program Prioritas

Program prioritas adalah program yang memberikan kontribusi secara langsung kepada pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Program Prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026

arahkan untuk mendukung Majalengka Maju Beraksi (Bekerja, Responsif Inovasi, Kolaborasi, dan Desentralisasi), program prioritas Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Tabel 6.9

Program Prioritas Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

SASARAN DAERAH		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.1.	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat miskin berbasis data P3KE	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
			Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin	Penguatan Ekonomi Keluarga Miskin Berbasis Data P3KE	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
					Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	DKP3
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3AKB
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AKB
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DK2UKM
			Menangani Kantong-Kantong Kemiskinan	Pemenuhan Infrastruktur dan Mendekatkan Akses Keluarga Miskin	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	DPKPP
1.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	RLS (rata-rata lama sekolah)	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Penurunan Angka Putus Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
1.3.	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan dan Kualitas SDM Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES,RSUD CIDERES & MAJALENGKA
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Aktivitas Olah Raga	Peningkatan Aktivitas Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DISPORA

SASARAN DAERAH		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Prevalensi Stunting	Meningkatkan Intervensi Gizi Sensitif	Peningkatan Status Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
			Peningkatan Intervensi Gizi Spesifik	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Lingkungan	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPKPP
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarkat	DKP3
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AKB
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan	tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah	Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengawasan angkutan barang di Jalan	Peningkatkan jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbangun serta pengawasan angkutan barang di Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
			Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan jalan kabupaten	Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten dan bangunan pelengkapnya	Program Penyelenggaraan Jalan	PUTR

SASARAN DAERAH		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi serta pengelolaan sumber daya air lainnya di Wilayah Kabupaten Majalengka	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya	Melaksanakan penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Program Penataan Bangunan Gedung	
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
			Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) serta melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
2.2.	meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengurangi pencemaran air	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran air	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Mengurangi pencemaran Udara	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Meningkatkan tutupan lahan	Pemeliharaan Tutupan Lahan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Persentase penanganan, Pengurangan sampah	Peningkatan pengelolaan persampahan	Melaksanakan penanganan, pengurangan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
2.3.	Meningkatnya produktivitas daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Meningkatkan Daya saing sumber daya Lokal	Peningkatan Jumlah IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DISPERDAGIN
				Peningkatan Kualitas Produk Lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DK2UKM
				Penguatan Ekosistem Digital	Program Pengembangan UMKM	

SASARAN DAERAH		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISPERDAGIN
				Peningkatan Volume dan Nilai Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	
				Penguatan Pasar Digital (*E-Commerce*)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				Pengendalian Harga dan Stok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				Pengendalian Ketersedian Pasokan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	DKP3
			Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Penguatan Regulasi LP2B dan LSD	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKP3
				Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	
				Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Litbang Pertanian (Benih / Bibit Unggul)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Meningkatkan Kualitas Destinasi Layak Kunjung	Peningkatan pengelolaan, promosi destinasi dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPARBUD
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
					Program Pemasaran Pariwisata	
				Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Program Fasilitasi Sarana dan Prasaran dan Pengelolaan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	
			Meningkatkan Pembangunan Perdesaan Melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Masyrakat Desa	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Penataan Desa	DPMD
				Peningkatan pembangunan desa melalui pengembangan kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
				Peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, lembaga desa dan aparatur desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	

SASARAN DAERAH		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				Peningkatan Keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
		Tingkat Pengangguran terbuka	Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Iklim Investasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DK2UKM
			Meningkatkan Iklim Investasi	penguatan sarana prasarana pelayanan	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Penguatan Promosi Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	
				Menumbuhkan minat sektor pertanian	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Menumbuhkan minat sektor pertanian	Meningkatkan keterampilan tambahan pada angkatan kerja	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKP3
			Meningkatkan keterampilan tambahan pada angkatan kerja	Peningkatan Minat Pelatihan Keterampilan Angkatan Kerja	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan Layanan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOLPPDAMKAR
			Meningkatkan Penegakan Perda/Perkada serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perwujudan Budaya Tertib dan Sadar Aturan Dalam Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Koordinasi Kondusifitas dan Stabilitas Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
			Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana	peningkatan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan reformasi birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SETDA
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
publik yang prima				Program Perekonomian dan Pembangunan	
		Melaksanakan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
				Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Meningkatkan ketersediaan regulasi daerah, kapasitas dan kapabelitas SDM penyelenggaraan statistik sektoral serta fasilitas dan asesibilitas media data berbasis teknologi informasi	Peningkatan pengelolaan statistik sektoral daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFO
		Meningkatkan pemerataan akses, kualitas pelayanan, keamanan dan keterbukaan informasi publik	Peningkatan pemerataan akses, kualitas pelayanan, keamanan dan keterbukaan informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
				Program Aplikasi Informatika	
		Meningkatkan tatakelola standar kemanan, sarana pendukung dan sumberdaya manusia pengelola informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penyusunan dan penetapan regulasi keamanan informasi daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
			Peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknik dan pelatihan sumberdaya manusia.		
			Meningkatkan audit dan supervisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
			Meningkatkan ketersedian fasilitas sarana keamanan informasi		
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Masyarakat di Kecamatan	Peningkatan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	KECAMATAN
			Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembinaan, pengawasan, koordinasi dan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

SASARAN DAERAH		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				pembangunan Desa/Kelurahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Peningkatan kapasitas melalui pendampingan terhadap aparatur pemerintahan dan kelembagaan desa/kelurahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
			Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan Level PK APIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
			Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Diseminasi inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDALITBANG
			Meningkatkan ekosistem inovasi pelayanan publik	One Agency One Innovation	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SETDA
3.2.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Kapasitas Fiskal Daerah	Meningkatkan pendapatan daerah	Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta koordinasi dana transfer	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA
					Program Pengelolaan barang milik daerah	BKAD
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pengelolaan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan prinsip peraturan tersebut menjadi alasan utama perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini berarti program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
2. Prioritas Perangkat Daerah, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
3. Prioritas Reguler, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Program-program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

Adapun kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka yang telah menerapkan prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada kurun waktu 2024 sampai dengan 2026, disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026
(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

No.	Uraian	Proyeksi (Rupiah)		
		2024	2025	2026
I.	**BELANJA DAERAH**	**3.049.024.184.006**	**3.103.038.694.344**	**3.162.157.845.084**
A.	**BELANJA OPERASI**	**2.205.251.399.304**	**2.238.475.467.195**	**2.263.576.248.430**
	a. Belanja Pegawai	1.341.729.630.276	1.373.629.664.776	1.378.629.664.776
	b. Belanja Barang dan Jasa	802.707.215.319	804.031.249.419	824.132.030.654
	c. Belanja Bunga	0	0	0
	d. Belanja Subsidi	0	0	0
	e. Belanja Hibah	51.652.553.709	51.652.553.000	51.652.553.000
	f. Belanja Bantuan Sosial	9.162.000.000	9.162.000.000	9.162.000.000
B.	**BELANJA MODAL**	**367.676.186.153**	**375.286.628.600**	**409.304.998.105**
C.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**11.820.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**
D.	**BELANJA TRANSFER**	**464.276.598.549**	**464.276.598.549**	**464.276.598.549**
	a. Belanja Bagi Hasil	21.750.543.409	21.750.543.409	21.750.543.409
	b. Belanja Bantuan Keuangan	442.526.055.140	442.526.055.140	442.526.055.140
	JUMLAH BELANJA	**3.049.024.184.006**	**3.103.038.694.344**	**3.162.157.845.084**

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
2. Penerapan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Penjabaran tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka.
4. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan pemulihan paska pandemi COVID-19.
5. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
6. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
7. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Program perangkat daerah Kabupaten Majalengka merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum.

Program Tahun 2024 dan 2026 merupakan program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang baru maka indikator kinerja juga mengalami penyesuaian dengan *outcome* dan *output* yang akan dihasilkan atau dicapai. Namun tetap mengutamakan penggunaan indikator kinerja program (dan kegiatan pada Perubahan Renstra PD) yang telah digunakan pada tahun 2020-2023. Kegiatan dan sub kegiatan dimuat dalam masing-masing Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai pendanaan indikatif Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
PENDIDIKAN																	
						437.314,84		506.177,17		506.177,17		521.362,49		537.003,36		1.564.543,02	DISDIK
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	161,48	BB	93,41	BB	108,41	BB	111,67	BB	115,02	BB	335,10	DISDIK
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	432.927,78	B	502.748,35	B	502.748,35	B	517.830,80	B	533.365,72	B	1.553.944,87	DISDIK
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	4.225,58	100	3.335,41	100	3.320,41	100	3.420,02	100	3.522,62	100	10.263,05	DISDIK
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					475.212,19		488.902,23		496.355,44		504.787,31		515.776,90		1.516.919,65	DISDIK
		APM PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD/Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan x 100%	Persen	95,26	22.935,79	99,45	25.268,76	95,73	24.625,07	95,75	25.172,52	95,78	25.749,81	95,78	75.547,39	DISDIK
		APM SD/MI	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar (MI)/Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan x100%	Persen	90,68	380.429,37	97,35	374.103,63	91,25	379.431,71	91,28	384.326,35	91,3	391.164,68	91,3	1.154.922,74	DISDIK
		APM SMP/MTs	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	Persen	88,00	61.073,60	98,55	76.058,02	88,15	77.714,88	88,25	80.534,48	88,28	83.908,19	88,28	242.157,55	DISDIK
		APK Non Formal	Jumlah warga negara usia 7 tahun ke atas yang belum menyelesaikanpendidikan dasar dan menengahyang sudah tamat atau sedangbelajar di pendidikan kesetaraan / jumlah warga negara usia 7 tahun ke atas yang belum menyelesaikanpendidikan dasar dan menengahpada provinsi yang bersangkutan x100%	Persen	105,41	10.773,43	86,55	13.471,82	86,6	14.583,78	86,68	14.753,96	86,73	14.954,23	86,73	44.291,97	DISDIK
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	(Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang tersedia) / (Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Persen	-	0,00	-	0,00	15	65,00	16,18	68,25	17	71,66	17	204,91	DISDIK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
			Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang seharusnya) x 100%														
KESEHATAN																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					105.351,94		123.316,11		123.316,11		127.015,59		130.826,05		381.157,75	DINKES
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	217,79	BB	101,00	BB	101,00	BB	104,03	BB	107,15	BB	312,18	
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	102.621,78	B	120.835,44	B	120.835,44	B	124.460,50	B	128.194,31	B	373.490,25	DINKES
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	2.512,37	100	2.379,67	100	2.379,67	100	2.451,06	100	2.524,59	100	7.355,32	DINKES
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	(Jumlah Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) x 100%	Persen	100	523.359,10	100	77.492,07	100	110.271,41	100	115.496,07	100	119.328,59	100	345.096,07	DINKES
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase standar kompetensi tenaga kesehatan	(Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/tahun) x 100%	Persen	100	265,41	100	124,00	100	127,72	100	131,55	100	383,27	100	642,54	DINKES
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	(Jumlah sediaan farmasi) x 100%	Persen	100	151,23	100	419,73	100	419,73	100	432,32	100	445,29	100	1.297,34	DINKES
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penguatan Gerakan Masyarakat Menuju Hidup Sehat	(Jumlah UKBM yang menyelenggarakan upaya kesehatan dibagi jumlah UKBM yang ada) x 100%	Persen	100	378,98	100	812,86	80	812,86	80	837,24	80	862,36	80	2.512,46	DINKES
RSUD MAJALENGKA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					148.611,03	81	149.899,67	82	150.829,78	84	155.354,68	85	160.015,32	85	466.199,78	RSUD MAJALENGKA
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks/ Persen	80	25.561,03	81	26.970,66	82	123.050,00	84	126.741,50	85	130.543,75	85	380.335,25	RSUD MAJALENGKA
		Standar Pelayanan Minimal	Persentase pencapaian SPM	Persen	75,5	123.050,00	80	122.929,01	81	27.779,78	82	28.613,18	84	29.471,57	100	85.864,53	RSUD MAJALENGKA
		Akreditasi Rumas Sakit	Hasil Penilaian akreditasi	Nilai	Pari purna		Pari purna		Pari purna		Pari purna		Pari purna		Pari purna		RSUD MAJALENGKA
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	73	7.800,00	75	12.165,01	78	0,00	79	0,00	80	0,00	80	-	RSUD MAJALENGKA
RSUD CIDERES																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					148.611,03	81	149.899,67	82	150.829,78	84	155.354,68	85	160.015,32	85	466.199,78	
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks/ Persen	80	25.561,03	81	26.970,66	82	123.050,00	84	126.741,50	85	130.543,75	85	380.335,25	RSUD CIDERES
		Standar Pelayanan Minimal	Persentase pencapaian SPM	persen	75,5	123.050,00	80	122.929,01	81	27.779,78	82	28.613,18	84	29.471,57	100	85.864,53	RSUD CIDERES
		Akreditasi Rumas Sakit	Hasil Penilaian akreditasi	Nilai	Pari purna		Pari purna		Pari purna		Pari purna		Pari purna		Pari purna		RSUD CIDERES
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	73	7.800,00	75	12.165,01	78	0,00	79	0,00	80	0,00	80	-	RSUD CIDERES
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.246,80		31.031,38		34.355,00		34.355,00		34.355,00		103.495,00	DPUTR
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	100,51	BB	166,83	BB	180,00	BB	180,00	BB	180,00	BB	540,00	DPUTR
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	26.128,92	B	28.109,48	B	30.000,00	B	30.000,00	B	30.000,00	B	90.000,00	DPUTR
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%	Persen	100	7.017,37	100	2.755,07	100	4.175,00	100	4.175,00	100	4.175,00	100	12.525,00	DPUTR
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Debit air termanfaatkan	Ltr/detik	Persen	86,6	120.476,00	87,5	101.200,00	85	130.431,00	86,5	147.705,00	87,4	166.611,00	87,4	444.747,00	DPUTR
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	Jumlah Sambungan Rumah yang terpenuhi	persen	80,41	8.213,00	80,5	47.315,00	8	20.098,00	8	21.762,00	9	23.777,00	25	65.637,00	DPKPP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk yang Terlayani Air Limbah	Jumlah Air Limbah yang terlayani	persen	68,58	3.842,00	68,66	3.140,00	5	1.000,00	5	1.000,00	5	1.000,00	15	3.000,00	DPKPP
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	Jumlah Drainase yang terlayani	persen	30,1	1.800,00	30,2	2.000,00	3	600,00	3	600,00	3	600,00	9	1.800,00	DPKPP
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan poros desa dalam kondisi baik		persen	85,49	1.500,00	85,49	1.800,00	25	5.000,00	27	5.400,00	29	5.800,00	81	16.200,00	DPKPP
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah gedung yang memiliki Sertifikat Laif Fungsi	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang dibangun slf	Unit	0	19.505,00	0	781,20	0,62	18.876,70	1,232	52.581,70	1,85	24.311,70	1,85	95.770,10	DPUTR
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang tertata dan berkelanjutan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dibangun dan direhabilitasi	Unit	4	11.360,80	4	23.834,00	6	5.970,90	7	13.696,40	3	18.300,40	16	37.967,70	DPUTR
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pelayanan jalan dalam kondisi mantap	persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang	Persen	87,8	160.019,00	88,3	259.242,00	89,5	169.000,00	90,5	169.000,00	91,5	169.000,00	91,5	507.000,00	DPUTR
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan teruji	Persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan teruji	Persen	N/A	505,00	N/A	309,64	2	370,00	2	440,00	2	505,00	6	1.315,00	DPUTR
		Persentase kelembagaan jasa konstruksi yang tertib admnistrasi	Persentase kelembagaan jasa konstruksi yang tertib admnistrasi	Persen	N/A	232,10	N/A	189,64	8	295,00	8	330,00	8	380,00	24	1.005,00	DPUTR
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	N/A	1.232,80	N/A	600,00	85,56	997,70	90,98	2.686,97	93,23	1.734,67	93,23	5.419,34	DPUTR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.514,80		7.486,58		8.480,84		9.154,32		9.895,15		23.072,00	DPKPP
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	17,80	BB	19,58	BB	21,54	BB	23,69	BB	26,06	BB	71,29	DPKPP
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	5.227,00	B	6.103,00	B	6.713,30	B	7.384,63	B	8.123,09	B	22.221,02	DPKPP
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%	Persen	100	2.270,00	100	1.364,00	100	1.746,00	100	1.746,00	100	1.746,00	100	5.238,00	DPKPP
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Kawasan Kumuh yang tertata		Presentase	70,77	25.000,00	70,77	25.000,00	33,3		33,3		33,3		33,3		
		Tersedianya dokumen rumah tidak layak huni	Jumlah dokumen rumah tidak layak huni	Dokumen					1	90,00	2	90,00	2	90,00	3	270,00	DPKPP
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Presentase Peningkatan Jaringan Jalan Lingkungan		Persen	146	3.500,00	20	3.500,00	85,65		85,75	600,00	85,80		85,80	600,00	DPKPP
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum	jumlah perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Lokasi	8	780,00	8	579,00	2	400,00	2	400,00	2	400,00	6	1.200,00	DPKPP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pelayanan Publik	Jumlah luas tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan	Lokasi	1	7.832,00	1	1.288,00	2	9.937,00	2	29.791,00	2	1.567,00	6	41.295,00	DPKPP
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					8,01		8,00		8,00		8,00		8,00		24,00	SATPOL PP DAMKAR
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		BB		BB		BB		BB		BB		SATPOL PP DAMKAR
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		B		B		B		B		B		SATPOL PP DAMKAR
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%	Persen	100		100		100		100		100		100		SATPOL PP DAMKAR
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7,42		9,10		9,10		9,35		9,66		28,10	SATPOL PP DAMKAR
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	(jumlah pengaduan yg ditangani/jumlah pengaduan pelanggaran yg masuk) x 100%	Persen	100		100		100		100		100		100		SATPOL PP DAMKAR

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
		Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	(Jumlah Perda/Perkada yg memuat sanksi yg ditegakkan/Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yg memuat sanksi) X 100 %	Persen	100		100		100		100		100		100		SATPOL PP DAMKAR
						3.784,23		4.187,28		5.022,66		5.144,22		5.269,43		15.436,31	BPBD
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	30,89	BB	80,00	BB	80,00	BB	80,00	BB	80,00	BB	240,00	BPBD
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	3.020,03	B	3.224,36	B	4.059,66	B	4.181,22	B	4.306,43	B	12.547,31	BPBD
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%	Persen	100	733,32	100	882,91	100	883,00	100	883,00	100	883,00	100	2.649,00	BPBD
4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase tanggap bencana	serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan	persen	N/A	0,00	N/A	0,00	100	9.860,00	100	12.281,00	100	14.744,00	100	36.885,00	BPBD
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	orang	866	35.333,33	1.772	35.333,33	100	25,00	100	25,00	100	25,00	300	75,00	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh	orang	866	35.333,33	1.772	35.333,33	40	10,00	40	10,00	40	10,00	120	30,00	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	2.000	35.333,34	2.000	35.333,34	11.000	35.333,00	2.000	35.333,00	2.000	2.200,00	15.000	72.866,00	BPBD
5	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	(pelayanan penyelamatandan evakuasi korban kebakaran/jumlah kejadian kebakaran di kab/kota) x 100%	persen	100	840,00	100	941,00	100	941,00	100	941,00	100	941,00	100	3.662,00	SATPOL PP DAMKAR
SOSIAL																	
						4.061,80		5.515,15		5.515,15		5.680,60		5.851,02		17.046,77	DINSOS
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	49,70	BB	80,00	BB	80,00	BB	82,40	BB	84,87	BB	247,27	DINSOS
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	3.371,70	B	4.268,19	B	4.268,19	B	4.396,23	B	4.528,12	B	13.192,54	DINSOS
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	persen	100	640,40	100	1.166,96	100	1.166,96	100	1.201,97	100	1.238,03	100	3.606,96	DINSOS
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	(Jumlah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota) x 100%	persen	100	360,54	100	1.183,60	100	1.183,60	100	1.219,10	100	1.255,68	100	3.658,38	DINSOS
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	(Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial) x 100%	Persen	100	2.910,14	100	1.676,34	100	1.676,34	100	1.726,65	100	1.778,45	100	5.181,44	DINSOS

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Perlindungan dan jaminan Sosial	(Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)) x 100%	persen	100	1.086,43	100	985,78	100	985,78	100	1.015,35	100	1.045,81	100	3.046,94	DINSOS
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelahtanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	(jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran/populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota) x 100%	Persen	100	1.188,98	100	1.066,36	100	1.066,36	100	1.098,35	100	1.131,30	100	3.296,01	DINSOS
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Pelihara/Jumlah Taman Pahlawan X 100%	Persen	100	62,90	100	129,09	100	129,09	100	132,96	100	136,95	100	399,00	DINSOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
TENAGA KERJA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									6.291,00		6.606,00		6,85		19.745,00	DK2UKM
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	35,20	BB	80,00	BB	52,50	BB	56,18	BB	60,11	BB	168,79	DK2UKM
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	5.409,72	B	5.049,86	B	5.393,49	B	5.556,00	B	5.723,43	B	16.672,92	DK2UKM
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%	Persen	100	610,00	100	1.151,99	100	834,91	100	983,36	100	1.052,19	100	2.870,46	DK2UKM
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kegiatan yang dilaksanaan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	(jumlah kegiatan keseluruhan yg dilaksanakan yg mengacu ke RTKD/jumlah keg keseluruhan yg dilaksanakan di kab/kota) x 100%	Persen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	111,13	0	111,13	DK2UKM
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Orang	N/A	495,30	N/A	11.074,00	10	40,00	10	42,80	10	45,80	30	128,60	DK2UKM
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	N/A	514,23	N/A	23,78	2.300	8.378,00	2.300	8.440,00	2.300	8.468,00	6.900	25.286,00	DK2UKM
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Memiliki dokumen Hubungan Industrial	Perusahaan yang memiliki dokumen hubungan industrial dibagi jumlah total perusaahaan dikali 100%	Persen	N/A	221,80	N/A	184,55	50	146,21	50	92,24	50	66,45	50	304,90	DK2UKM
PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.511,45		4.933,21		4.933,21		5.088,47		5.248,75		15.270,43	DP3AKB
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	72,50	BB	73,00	BB	73,00	BB	75,19	BB	77,44	BB	225,63	DP3AKB
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	3.553,74	B	4.334,47	B	4.334,47	B	4.464,50	B	4.598,44	B	13.397,41	DP3AKB
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	885,21	100	525,74	100	525,74	100	548,78	100	572,87	100	1.647,39	DP3AKB
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	(Jumlah ARG pada belanja langsung APBD/jumlah seluruh belanja langsung APBD) x 100%	Persen	20	325,00	21	300,00	22	501,61	22	546,76	23	595,97	23	1.644,34	DP3AKB
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	(jumlah perempuan yg mengalami kekerasan/jumlah penduduk perempuan) x 100%	Persen	100	100,00	100	75,00	100	75,00	100	77.25	100	79,56	100	154,56	DP3AKB
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan kepala keluarga miskin yang meningkat pendapatannya	(Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri/jumlah perempuan kepala keluarga miskin di kab/kota) x 100%	Persen	25	125,00	25	510,20	25	551,61	25	579,19	75	608,15	75	1.738,95	DP3AKB
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender	Data gender tersedia /data gender yang dibutuhkan x 100%	Persen	100	125,00	100	150,00	100	150,00	100	154,50	100	159,31	100	463,81	DP3AKB

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Nilai akhir yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai	Nilai (Minimal)	480	4.625,00	500,06	50,00	500,06	50,00	545,87	51,50	600,35	53,04	600,35	154,54	DP3AKB
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap Anak	(jumlah anak (penduduk usia <18 th) korban kekerasan yg ditangani instansi tk kab/kota yg didampingi/jumlah anak (penduduk usia < 18 th)) x 100%	Persen	100	125,00	100	75,00	100	75,00	100	78,75	100	82,68	100	236,43	DP3AKB
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Fertilitas total (TFR/Total Fertility Rate)	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	Anak	2,2	269,79	2,19	542,40	2,17	542,40	2,16	559,67	2,15	575,43	2,15	1.677,50	DP3AKB
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	(Jumlah Pasangan usia subur yang memakai kotrasepsi moderen)/(Jumlah Pasangan usia subur seluruhnya)x 100%	Persen	79,8	8.943,42	80	9.671,29	80,09	17.145,19	80,11	17.421,72	80,15	17.783,51	80,15	52.350,42	DP3AKB
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Menurunnya Median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan	Rata-rata UKP = Σu 1=1 Ui)/N	Usia/Tahun	19	6.053,17	19,5	6.717,00	20	6.717,00	20,5	6.918,51	21,1	7.126,06	21,1	20.761,57	DP3AKB
PANGAN																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	75	24.987,00	75	27.204,00	78	26.962,00	78	27.380,00	78	27.804,00	78	82.146,00	DKP3
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		100		100		100		100		100		
		Capain SKM Perangkat Daera		Predikat	B		B		B		B		B		B		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pemenuhan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan	Capaian pemenuhan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan	Persen	95	1.930,00	95	800,00	95	800,00	95	600,00	95	600,00	95	2.000,00	DKP3
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	Capaian ketersediaan pangan terhadap kebutuhan dan akses komoditas pangan strategis	Persen	100	633,76	100	185,00	100	185,00	100	187,87	100	190,78	100	563,65	DKP3
		Tingkat ketersediaan Laporan Ketersediaan Harga dan Pasokan		Persen	100		100		100		100		100		100		
		Persentase desa yang memanfaatkan lahan pekarangan		Persen	88,6		0,5		0,5		0,5		0,5		1,5		
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa rentan pangan yang mendapatkan penanganan kerawanan pangan	Capaian penanganan desa rentan pangan	Desa	20	0,00	4	57,55	4	58,00	4	58,39	4	59,30	12	175,69	DKP3
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Capaian Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	0,00	100	0,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	750,00	DKP3
LINGKUNGAN HIDUP																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.978,10		18.104,10		8.744,01		11.665,41		10.580,25		30.989,67	DLH
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	7,10	BB	7,10	BB	7,81	BB	8,59	BB	9,45	BB	25,85	DLH
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	7.579,00	B	7.942,00	B	8.736,20	B	9.609,82	B	10.570,80	B	28.916,82	DLH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	9.392,00	100	10.155,00	100	1719	100	2.047,00	100	2 192,67	100	#VALUE!	DLH
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	(Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang terpenuhi)/(Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Yang Seharunuya tersedia)x 100%	Persen	100	1.550,00	100	1.390,00	25	600,00	57,14	660,00	60	726,00	100	1.986,00	DLH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks Kualitas/ Pencemaran Air, Indeks Pencemaran udara	Poin	59,36	2.170,00	60,55	10.127,00	58,16	425,00	58,16	467,00	58,16	453,75	58,16	1.345,75	DLH
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	Poin	50,99	3.400,00	51	3.400,00	50,97	2.068,00	50,98	2.275,00	50,99	2.502,99	50,99	6.845,99	DLH
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemgendalian B3 dan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang dibina izin Penyimpanan Sementara Limbah B3/Jumlah Perusahaan di Kabupaten Majalengka	Persen	100	150,00	100	250,00	100	25	100	27,50	100	30,25	100	#VALUE!	DLH
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	(jumlah prenanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yg melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yg diterbitkan Pemerintah kab/kota) / (usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan)	Persen	100	100,00	100	150,00	100	50,00	100	55,00	100	60,50	300	165,50	DLH
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	(jumlah masyarakat yg mendapat pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup) / (jumlah penduduk di kab/kota) x 100%	Persen	0	0,00	100	100,00	100	75,00	100	82,50	100	90,75	100	248,25	DLH
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah masyarakat dan lembaga yang memperoleh Penghargaan	jumlah masyarakat dan lembaga yang memperoleh Penghargaan Lingkungan Hidup	Buah	3	100,00	3	110,00	1	50,00	1	55,00	1	60,50	3	165,50	DLH
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	(jumlah aduan Lingkungan Hidup yg sudah ditangani/jumlah aduan Lingkungan Hidup di kab/kota) x 100%	Persen	100	100,00	100	150,00	100	25,00	100	27,50	100	30,25	300	82,75	DLH
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	(jumlah masalah sampah yg sudah ditangani/jumlah masalah sampah di kab/kota) x 100%	Persen	99	13.361,00	99	15.587,00	99	150,00	99	165,00	99	181,50	99	#VALUE!	DLH
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka	(jumlah sarana persampahan/jumlah kebutuhan sarana persampahan) x 100%	Persen	57,41	43.045,00	100	21.402,00	7,12	14.662,00	8,41	16.573,00	9,69	19.948,00	9,69	51.183,00	DLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.289,00		8.519,00		8.699,00		8.895,20		9.109,06		26.703,26	DISDUKCAPIL
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	18,00	BB	21,00	BB	21,00	BB	21,00	BB	21,00	BB	63,00	DISDUKCAPIL
		Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Penunjang Pelayanan	Realisasi pemenuhan kebutuhan Sarana-Prasarana Penunjang Pelayanan terhadap yang ditargetkan x 100%	Persen	100	7.271,00	100	8.498,00	100	8.678,00	100	8.874,20	100	9.088,06	100	26.640,26	DISDUKCAPIL
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					925,00		972,00		972,00		972,00		972,00		2.916,00	DISDUKCAPIL
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	915,00	B	916,00	A	916,00	A	916,00	A	916,00	A	2.748,00	DISDUKCAPIL
		Cakupan Kepemilikan KTP-el	(jumlah penduduk wajib KTP yg memiliki KTP-el/jumlah penduduk wajib KTP) x 100%	Persen	97	5,00	98	51,00	99	51,00	100	51,00	100	51,00	100	153,00	DISDUKCAPIL
		Cakupan Pelayanan Pindah-Datang Penduduk	(Jumlah Pelayanan Pindah-Datang /jumlah Pemohon Pindah-Datang) x 100%	Persen	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	15,00	DISDUKCAPIL
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					9,00		34,00		34,00		34,00		34,00		102,00	DISDUKCAPIL
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	(jumlah anak usia 0-18 tahun yg sudah memiliki akta lahir / jumlah anak usia 0-18 tahun) x 100%	Persen	97	5,00	98	30,00	99	30,00	100	30,00	100	30,00	100	90,00	DISDUKCAPIL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
		Cakupan Pelayanan Perkawinan Penduduk	(jumlah Penerbitan Akta Perkawinan / jumlah perkawinan yang dilaporkan) x 100%	Persen	100	4,00	100	4,00	100	4,00	100	4,00	100	4,00	100	12,00	DISDUKCAPIL
						83,00		27,00		27,00		27,00		27,00		81,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana SIAK	(Jumlah Tempat Pelayanan yang berfungsi dengan baik / Jumlah seluruh Tempat Pelayanan) x 100%	Persen	100	23,00	100	11,00	100	11,00	100	11,00	100	11,00	100	33,00	DISDUKCAPIL
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	7	60,00	15	16,00	17	16,00	20	16,00	22	16,00	22	48,00	DISDUKCAPIL
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Lingkup Kabupaten	Jumlah Profil Kependudukan Lingkup Kabupaten yang disusun	Dokumen	1	12,00	1	18,00	1	18,00	1	18,00	1	18,00	1	54,00	DISDUKCAPIL
PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
						5.071,57		5.786,89		5.786,89		5.960,50		6.139,32		17.886,71	DPMD
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	98,13	BB	80,00	BB	80,00	BB	82,40	BB	84,87	BB	247,27	DPMD
		Capaian SKM Perangkat Daerah		Nilai	B	4.034,50	B	4.969,42	B	4.968,72	B	5.054,78	BB	5.271,31	BB	15.294,81	DPMD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	938,94	100	737,47	100	738,17	100	823,32	100	783,14	100	2.344,63	DPMD
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa Sesuai Peraturan	(Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa Sesuai Peraturan/Jumlah Desa di Kab Majalengka) x 100%	Persen	0	0,00	62,33	12.400,00	9,39	6.241,58	10,91	6.483,57	12,42	6.725,98	32,72	19.451,13	DPMD
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase RT/RW yang berperan aktif dalam pembangunan	(Jumlah RT/RW yang berperan aktif pada Desa yang memiliki Kerjasama/Jumlah RT/RW pada Desa yang memiliki Kerjasama) x 100%	Persen	45	9.865,79	47	3.249,99	50	3.400,00	55	3.662,00	60	3.876,74	60	10.938,74	DPMD
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun adminstrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	(jumlah desa yang menyusun adminstrasi pemerintahan desa sesuai peraturan/jumlah desa di Kab Majalengka) x 100%	Persen	65	4.313,33	70	5.096,21	75	4.996,21	80	5.835,44	85	5.698,43	85	16.530,08	DPMD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif/ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Kab Majalengka) x 100%	Persen	100	4.319,26	100	850,00	100	1.890,00	100	1.985,10	100	2.154,42	100	6.029,52	DPMD
PERHUBUNGAN																	
						13.072,95		14.804,81		15.775,31		16.180,97		16.598,81		48.555,09	
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B	16,22	B	52,50	B	17,00	BB	17,00	BB	17,00	BB	51,00	DISHUB
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	11.141,87	B	13.128,42	B	13.672,28	B	14.077,94	B	14.495,78	B	42.246,00	DISHUB
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%	Persen	100	1.914,85	100	1.623,89	100	2.086,03	100	2.086,03	100	2.086,03	100	6.258,09	DISHUB
						8.473,64		40.057,37		31.537,22		32.635,60		40.374,79		104.547,61	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun	Realisasi Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun terhadap yang ditargetkan x 100%	persen	50	5.962,65	52	37.657,89	54	26.585,07	55	28.493,95	56	30.719,39	56	85.798,41	DISHUB

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
		Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji	(jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor/jumlah kendaraan bermotor di kab/kota) x 100%	persen	90	2.510,99	90	2.399,48	90	4.952,15	90	4.141,65	90	9.655,40	90	18.749,20	DISHUB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.213,66		5.991,27		6.246,63		6.399,89		6.557,74		19.204,27	
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	31,48	BB	81,39	BB	55,50	BB	55,50	BB	55,50	BB	166,50	DISKOMINFO
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	4.251,16	B	4.959,76	B	5.116,55	B	5.269,81	B	5.462,66	B	15.849,01	DISKOMINFO
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%	Persen	100	931,03	100	950,12	100	1.074,58	100	1.074,58	100	1.039,58	100	3.188,75	DISKOMINFO
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah	6	516,83	6	306,82	10	750,00	10	852,65	10	898,34	10	2.500,99	DISKOMINFO
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi	jumlah layanan publik yang dibangun/dipelihara	Aplikasi	6	618,81	6	5.488,92	18	1.261,82	18	1.300,00	18	1.405,00	18	3.966,82	DISKOMINFO
PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Sertifikat Elektroknik (SE) yang terakomodir sesuai standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Jumlah Sertifikat Elektroknik (SE) yang dimiliki sesuai standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Dokumen	1	50,40	1	48,00	16	300,00	16	320,00	16	385,00	16	1.005,00	DISKOMINFO
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan	(jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundangan/jumlah koperasi aktif di kab/kota) x 100%	Persen	N/A	50,00	N/A	40,00	10	20,00	15	21,40	15	22,90	40	64,30	DK2UKM
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	(jumlah koperasi sehat/jumlah koperasi yang melaksanakan RAT di kab/kota) x 100%	Persen	N/A	10,00	N/A	50,00	3	50,53	3	40,00	4	42,80	10	133,33	DK2UKM
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	(jumlah koperasi aktif/jumlah total koperasi di kab/kota) x 100%	persen	N/A	42,50	N/A	40,00	5	20,00	5	21,40	6	22,90	16 00	64,30	DK2UKM
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentasi peningkatan Volume usaha Koperasi yang melaksanakan RAT	(jumlah koperasi yg meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/jumlah seluruh koperasi) x 100%	Persen	N/A	207,50	N/A	40,00	1	15,68	2	14,07	2	100,00	5	129,74	DK2UKM
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	jumlah UMKM mempunyai NIB	jumlah UMKM mempunyai NIB	Unit usaha	N/A	494,30	N/A	175,00	2000	15.416,00	2000	15.573,00	2000	15.765,00	6000	46.754,00	DK2UKM
		Presentase usaha ultra mikro miskin yang mandiri	Jumlah ultra mikro miskin yg mandiri / jumlah total ultra miskro miskin x 100 %	Persen	N/A		N/A		1		1		1		1		
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Rata-rata peningkatan omset usaha mikro	Persentase Rata-rata peningkatan omset usaha mikro	Persen	3	3.000,00	3	26,00	3	48,62	3	42,94	3	561,39	3	652,95	
PENANAMAN MODAL																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.344,85		5.701,92		5.701,92		5.909,11		6.060,37		17.671,40	DPMTSP
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	25,00	BB	30,00	BB	30,00	BB	32,00	BB	32,00	BB	94,00	DPMTSP
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	4.792,98	B	5.326,12	B	5.326,12	B	5.513,11	B	5.664,37	B	16.503,60	DPMTSP
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	526,87	100	345,80	100	345,80	100	364,00	100	364,00	100	1.073,80	DPMTSP
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Usaha Skala Menengah dan Besar	Jumlah Investor Usaha Skala Menengah dan Besar	Investor	738	96,65	0	0,00	0	0,00	753	100,00	758	107,00	758	207,00	DPMTSP
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi	event	1	139,60	0	0,00	0	0,00	2	100,00	2	107,00	2	207,00	DPMTSP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	Nilai IKM	Point	88,02	392,30	88,05	550,36	88,07	550,36	88,09	589,14	88,10	629,99	88,10	1.769,49	DPMTSP
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah PMA/PMDN yang tertib LKPM	Jumlah PMA/PMDN yang tertib LKPM	Pelaku Usaha	100	383,91	100	354,70	50	356,47	50	358,25	50	361,48	50	1.076,20	DPMTSP
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	100,00	100	107,00	100	207,00	DPMTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.755,86		5.209,21		5.209,21		5.365,49		5.526,46		16.101,15	DISPORA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	46,61	BB	74,07	BB	74,07	BB	76,29	BB	78,58	BB	228,93	DISPORA
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	3.756,16	B	4.391,98	B	4.391,98	B	4.523,74	B	4.659,46	B	13.575,18	DISPORA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	953,09	100	743,16	100	743,16	100	765,46	100	788,42	100	2.297,03	DISPORA
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					600,83		600,83		600,83		600,83		600,83		1.831,01	DISPORA
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda	(jumlah pemuda (16-30 th) yg berwirausaha)/(jumlah pemuda umur 16-30 di kab/kota) x 100%	Persen	2	19.892,20	3	105,00	3,5	105,00	4	110,25	4,5	115,76	4,5	331,01	DISPORA
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(jumlah pemuda (16-30 th) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemsyarakatan di kab/kota)/(jumlah pemuda umur 16-30 th di kab/kota) x 100%	Persen	21,81	10.665,00	52,00	500,00	21,81	500,00	23,17	500,00	24,87	500,00	24,87	1.500,00	DISPORA
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					5.332,50		17.815,15		9.277,40		9.651,27		10.043,83		28.972,50	DISPORA
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	(Jumlah masyarakat aktif berolahraga)/(jumlah penduduk kab majalengka) x 100%	Persen	31,73	3.894,70	31,95	12.739,40	33,47	3.086,25	34,99	3.150,56	36,51	3.218,09	36,51	9.454,90	DISPORA
		Tingkat Partisipasi pada Penyelenggaraan kejuaraan/Event	(Jumlah even olahraga yang diikuti)/(jumlah even olahraga yang diselenggarakan) x 100%	Persen	-	1.437,80	-	5.075,75	80	6.191,15	85	6.500,71	90	6.825,74	90	19.517,60	DISPORA
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Kepramukaan	(Jumlah anggota kepramukaan (7 – 25 tahun) yang berpartisipasi di tingkat kabupaten)/ (Jumlah anggota kepramukaan (7 – 25 tahun) x 100 %	Persen	-	250,00	-	3.350,00	47,05	350,00	48	350,00	48,5	350,00	48,5	1.050,00	DISPORA
STATISTIK																	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah OPD yang meningkat Nilai Indeks Pembanguan Statistik (IPS)	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral dengan Nilai Indeks Pembanguan Statistik (IPS) meningkat	Dokumen	4	105,17	4	24,00	500	249,00	555	251,00	600	251,00	1.655	1.050,00	DISKOMINFO
KEBUDAYAAN																	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan (OPK)	OPK	N/A	4.536,00	N/A	8.420,00	10	391,72	10	419,14	10	448,48	10	1.259,34	DISPARBUD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	jumlah seni Tradisional yang direvitalisasi	Jumlah seni tradisional	Seni Tradisional	0	0,00	0	0,00	1	150,00	1	161,00	1	171,73	3	482,73	DISPARBUD
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	jumlah sejarah desa/kelurahan yang dikelola	jumlah sejarah desa/kelurahan yang dikelola	Sejarah desa/kelurahan	1	100,00	1	25,00	1	15,00	1	16,05	1	17,17	3	48,22	DISPARBUD
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	1	175,00	3	5,00	1	50,00	1	53,50	1	57,25	3	160,75	DISPARBUD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	jumlah Museum yang direvitalisasi	Jumlah Museum yang direvitalisasi	Museum	1	25,00	1	5,00	1	50,00	1	53,50	1	57,25	3	160,75	DISPARBUD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
PERPUSTAKAAN																	
						99,52		32.532,46		799,87		811,86		824,04		2.435,77	ARPUSDA
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	52	37,12	51	493,03	47	384,59	49	390,36	51	396,22	51	1.171,17	ARPUSDA
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	2,5	62,40	1,81	32.039,44	1,79	415,27	I,80	421,50	1,81	427,83	1,81	1.264,60	ARPUSDA
KEARSIPAN																	
						5.281,11		5.612,00		5.612,00		5.962,25		6.336,39		4 278,00	ARPUSDA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	25,33	BB	60,54	BB	60,54	BB	61,45	BB	62,37	BB	184,36	ARPUSDA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	A	4.025,95	A	4.837,74	B	4.837,74	B	5.176,38	B	5.538,73	B	15.552,84	ARPUSDA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	1.229,83	100	713,72	100	713,72	100	724,43	100	735,29	100	2.173,44	ARPUSDA
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	T = (a + i + s + j)/4 50% T= tingkat ketersediaan arsipa = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsipi = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsips = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balikj = persentase jumlah arsipyang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN T = (a + i + s + j)/4 50% T= tingkat ketersediaan arsipa = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsipi = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsips = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balikj = persentase jumlah arsipyang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persen	51	116,27	45	138,41	45,00	138,41	50	140,49	52	142,60	52 ,00	421,50	ARPUSDA
						59,20		65,23		66,44		67,44		68,45		202,32	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rasio pengelola arsip	jumlah OPD yang mempunyai pengelola arsip/jumlah OPDx100%	Persen	100	26,81	100		100	29,81	100	30,26	100	30,71	100	90,78	ARPUSDA
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran 50% Daerah kabupaten/kota dengan NSPK	Persen	50	32,40	45		45,00	36,63	50	37,18	52	37,74	52,00	111,55	ARPUSDA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
			a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK														
URUSAN PILIHAN																	
KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Terpenuhinya produksi perikanan tangkap	Capaian target produksi perikanan tangk	Ton	756,14	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	30	-	DKP3
		Terfasilitasinya sarana dan prasarana nelayan		Kelompok	5		1		1		1		1		3		DKP3
		Terfasililitasinya penebaran benih ikan di perairan umum (Rawa, Situ, Sungai, Embung)		Lokasi	5		1		1		1		1		3		DKP3
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya kabupaten	Capaian target produksi perikanan budidaya	Persen	2	340,00	2	217,19	2	217,19	2	220,56	2	223,98	6	661,73	DKP3
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah omset pemasaran produk perikanan	Capaian pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil	Persen	1	0,00	1	90,00	1	90,00	1	91,40	1	92,81	3	274,21	DKP3
		Jumlah pelaku usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	Jumlah pelaku usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	Jumlah	5		5		5		5		5		15		DKP3
PARIWISATA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.083,52		5.671,65		6.447,92		6.684,31		6.930,78		20.063,01	DISPARBUD
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	56,38	BB	380,00	BB	95,60	BB	102,29	BB	109,45	BB	307,34	DISPARBUD
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	5.050,00	B	4.376,00	B	5.384,32	B	5.546,25	B	5.713,07	B	16.643,65	DISPARBUD
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	977,14	100	915,65	100	968,00	100	1.035,76	100	1.108,26	100	3.112,02	DISPARBUD
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi layak kunjung	Jumlah destinasi layak kunjung	destinasi	1	15.600,00	1	320,00	1	318,28	1	340,56	1	364,40	3	1.023,24	DISPARBUD
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungan	818,543	1.006,00	1000000	211,30	1.010.000	241,71	1.020.000	258,63	0.300.000	276,64	1.030.000	776,98	DISPARBUD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Peningkatan Pelaku ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif pada tahun n-jumlah pelaku ekonomi kreatif pada tahun n-1)/jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 x100%	Persen	20	12.070,00	20	10,00	30	31,83	30	34,06	30	36,44	30	102,32	DISPARBUD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase Sertifikasi Pelaku ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif pada tahun n yg mendapatkan sertifikasi/jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n x100%	persen	5	1.680,00	5	253,70	3	230,00	3	246,10	3	263,33	9	739,43	DISPARBUD
PERTANIAN																	
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Capaian penyediaan pemenuhan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	80	1.300,00	80	4.963,23	80	1.599,28	80	1.622,69	80	1.646,47	80	4.868,44	DKP3
		Persentase petani miskin yang mendapat bantuan		RTS	100		100		100		100		100		100		DKP3

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
		Peningkatan ketersediaan daging, telur dan susu per tahun		Persen	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		DKP3
		Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pertanian		Persen	80		80		80		80		80		80		DKP3
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertania	Capaian penyediaan pemenuhan dan pengembangan prasarana pertan	Persen	65	5.864,09	65	21.921,22	65	21.528,93	70	21.743,86	70	21.960,95	70	65.233,74	DKP3
		Luas lahan LP2B dan LSD		Peraturan	1		1		1		1		1		1		DKP3
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menula	Capaian penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	N/A	0,00	100	376,15	100	377,66	100	380,33	100	383,03	100	1.141,02	DKP3
		Penjaminan Keamanan pangan asal hewan		Ekor / Sampel	N/A	0,00	600		600		600		600		1.800		DKP3
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas lahan pertanian yang terfasilitasi penanggulangan bencana pertanian	Capaian penanganan gangguan organisme pengganggu tanaman dan bencana alam	Ha	0	0,00	610	50,00	6.100	50,00	6.100	50,77	6.100	51,56	18.300	152,33	DKP3
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat jumlah usaha pertanian	Capaian fasilitasi perizinan pertanian	Persen	N/A	0,00	N/A	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	6	-	DKP3
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian	Capaian peningkatan kualitas penyuluha	Persen	100	4.341,94	100	1.432,98	100	1.434,47	100	1.453,55	100	1.472,91	100	4.360,93	DKP3
PERDAGANGAN																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.930,11		7.290,43		7.290,43		7.518,40		7.753,67		24.542,00	DISPERDAGIN
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Persen	BB	35,65	BB	51,95	BB	51,95	BB	54,55	BB	57,27	BB	163,77	DISPERDAGIN
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	6.217,15	B	6.837,21	B	6.837,21	B	7.042,52	B	7.254,01	B	21.133,74	DISPERDAGIN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	677,31	100	401,27	100	401,27	100	421,33	100	442,39	100	1.264,99	DISPERDAGIN
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terfasilitasi	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang difasilitasi	persen	8,45	1.057,62	5,53	790,88	3,64	790,88	3,64	830,42	3,64	871,94	3,64	2.493,24	DISPERDAGIN
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedia pelayanan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase tingkat ketepatan waktu penyampaian data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara periodik	persen	100	0,00	100	157,76	100	207,75	100	218,14	100	229,05	100	654,94	DISPERDAGIN
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	Persentase kenaikan ekspor	Persen	-28,93	609,95	5	632,73	5	382,72	5	401,86	5	421,95	15	1.206,53	DISPERDAGIN
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat pengaduan konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen	Persen	N/A	153,00	N/A	326,36	10	326,36	10	342,68	10	359,81	30	1.028,85	DISPERDAGIN
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Produk yang dipromosikan	Persentase kenaikan jumlah produk yang dipromosikan	Persen	N/A	67,10	N/A	114,09	33	79,09	25	83,04	20	87,19	20	249,32	DISPERDAGIN
PERINDUSTRIAN																	
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan industri kecil dan menengah di kabupaten sesuai rencana	Jumlah Pertumbuhan Industri Pengolahan Kecil dan Menengah	IKM	104	824,54	110	154,09	40	154,09	40	161,79	40	169,88	120	485,76	DISPERDAGIN
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan fasilitasi perizinan usaha industri	Persentase usaha industri yang terfasilitasi perizinannya	Persen	N/A	0,00	N/A	0,00	100	35,00	100	36,75	100	38,58	100	110,33	DISPERDAGIN
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFROMASI INDUSTRI NASIONAL	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha industri Kecil dan Mengengah dalam melaporkan aktivitasnya	Persentase pelaporan aktivitas pelaku usaha industri Kecil dan Menengah pada SLINAS	Persen	N/A	40,39	N/A	105,00	56	105,00	57	110,25	60	115,76	60	331,01	DISPERDAGIN
URUSAN PENUNJANG																	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					7.969,45		8.646,54		9.078,87		9.078,87		9.078,87		27.236,61	BAPPEDA LITBANG
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	91,92	BB	104,00	BB	109,20	BB	109,20	BB	109,20	BB	327,60	BAPPEDA LITBANG
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	6.433,64	B	7.235,48	B	7.597,25	B	7.597,25	B	7.597,25	B	22.791,76	BAPPEDA LITBANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	97	1.443,89	100	1.307,06	100	1.372,42	100	1.372,42	100	1.372,42	100	4.117,25	BAPPEDA LITBANG
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.409,94		1.058,84		1.111,78		1.111,78		1.111,78		3.335,35	BAPPEDA LITBANG
		Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	(Jumlah Program Kegiatan di RKPD Tahun-n)/(Jumlah Program Kegiatan di RPJMD Pada Tahun-n)x 100%	Persen	99	1.409,94	0	0,00	96	0,00	98	0,00	99	0,00	99	-	BAPPEDA LITBANG
		Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD	(Jumlah Program Kegiatan Pada RENSTRA)/(Jumlah Program Kegiatan Pada RPJMD)x 100%	Persen	0	0,00	99	1.058,84	96	1.111,78	98	1.111,78	99	1.111,78	99,00	3.335,35	BAPPEDA LITBANG
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD	Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD	Persen	100	2.012,42	99	1.215,00	96	1.275,75	98	1.275,75	99	1.275,75	99	3.827,24	BAPPEDA LITBANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
						518,97		474,10		497,80		497,80		497,80		936,00	BAPPEDA LITBANG
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan	Presentasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	persen	92	246,05	100	268,70	70	282,13	75	282,13	80	282,13	80	846,39	BAPPEDA LITBANG
		Indeks Inovasi Daerah yang diraih	Indeks Inovasi Daerah IGA Kemendagri	predikat	76	272,92	95	205,40	Inovatif	215,67	Inovatif	215,67	Sangat Inovatif	215,67	Sangat Inovatif	647,01	BAPPEDA LITBANG
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
						37.285,87		16.971,38		16.971,38		17.480,52		18.004,93		52.456,83	BKPSDM
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	51,69	BB	80,00	BB	80,00	BB	82,40	BB	84,87	BB	247,27	BKPSDM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	35.390,71	B	15.727,33	B	15.727,33	B	16.199,15	B	16.685,12	B	48.611,60	BKPSDM
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	1.843,47	100	1.164,05	100	1.164,05	100	1.198,97	100	1.234,94	100	3.597,96	BKPSDM
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Dokumen Kepegawaian	(Dokumen Kepegawaian yang direalisasikan)/(Dokumen Kepegawaian yang harus dipenuhi) x 100%	Persen	100	2.540,62	100	3.619,66	100	3.619,66	100	3.800,64	100	3.990,68	100	11.410,98	BKPSDM
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Manajerial	(Terlaksananya Pengembangan Kompetensi teknis dan Manajerial)/(Pengembangan Kompetensi teknis dan Manajerial yang direncanakan) x 100 %	Persen	100	5.623,09	100	1.857,75	100	1.857,75	100	1.950,63	100	2.048,17	100	5.856,55	BKPSDM
KEUANGAN DAN ASET DAERAH																	
										26.696,00		27.537,00		28.405,00		82.640,00	BKAD
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	82,00	BB	80,00	BB	80,00	BB	84,00	BB	88,20	BB	252,20	BKAD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	23.366,74	B	24.781,42	B	24.781,42	B	25.526,60	B	26.294,07	B	76.602,09	BKAD
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	1.436,43	100	969,32	100	969,32	100	1.017,78	100	1.068,67	100	3.055,77	BKAD
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Kepatuhan Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	549.425,66	100	481.260,27	100	481.260,27	100	481.433,73	100	481.615,86	100	1.444.309,86	BKAD
		Capaian Dana Transfer	Persentase realisasi dana transfer terhadap target	Persen	100		100		100		100		100		100		BKAD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Aset yang diamankan secara fisik dan legal	Jumlah aset yang diamankan secara fisik per total aset kali 100%	Persen	100	2.951,10	100	2.292,00	100	2.292,00	100	2.406,60	100	2.526,93	100	7.225,53	BKAD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									11.795,00		12.085,36		12.384,44		36.264,00	BAPENDA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	72,00	BB	30,00	BB	30,00	BB	30,00	BB	30,00	BB	90,00	BAPENDA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	11.401,00	B	10.961,17	B	10.961,17	B	11.251,54	B	11.550,62	B	33.763,33	BAPENDA
		Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	persen	100	1.323,37	100	1.584,33	100	803,82	100	803,82	100	803,82	100	2.411,46	BAPENDA
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian Realisasi Penerimaan PAD	Jumlah realisasi PAD / Target PAD x 100%	persen	100	7.732,20	100	6.512,39	100	7.292,90	100	7.803,40	100	8.349,64	100	23.445,94	BAPENDA
FUNGSI LAINNYA																	
SEKRETARIAT DAERAH																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					48.904,14		47.426,65		47.426,66		48.849,46		50.314,94		146.591,06	SETDA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	265,38	BB	248,33	BB	248,33	BB	255,78	BB	263,45	BB	767,56	SETDA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah (B)	Nilai	B	21.160,59	B	25.318,23	B	25.318,23	B	26.077,78	B	26.860,10	B	78.256,11	SETDA
		Capaian IKM Kabupaten	Nilai IKM Kabupaten	Nilai	B	471,95	B	667,48	B	667,48	B	687,50	B	708,12	B	2.063,10	SETDA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	25.800,50	100	20.439,37	100	20.149,25	100	20.753,72	100	21.376,34	100	62.279,31	SETDA
		Capaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai Lakip Kabupaten Yang dikeluarkan Kemenpan RB	Nilai	BB	195,00	BB	53,25	BB	343,38	BB	353,69	BB	364,30	BB	1.061,37	SETDA
		Indeks Implementasi BERAKHLAK	Hasil survey terhadap Tingkat implementasi nilai BerAKHLAK , yang diamati dan dialami oleh para pegawai dalam perilaku kerja sehari hari	Nilai	N/A	1.010,72	N/A	699,99	63,5	699,99	64	720,99	64,5	742,63	64,5	2.163,61	SETDA
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					11.760,42		13.397,67		13.397,67		13.813,80		14.250,75		41.462,22	SETDA
		Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Capaian Predikat LPPD tahun berjalan	Predikat	Tinggi	1.128,59	Tinggi	952,64	Tinggi	952,64	Tinggi	1.000,27	Sangat Tinggi	1.050,29	Sangat Tinggi	3.003,20	SETDA
		Indeks Reformasi Hukum	Capaian Indeks Reformasi Hukum berdasarkan penilaian dari Kemenkumham pada Tahun berjalan	Predikat	N/A	741,82	N/A	910,80	BB	910,80	BB	956,34	BB	1.004,16	BB	2.871,30	SETDA
		Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Hasil Survey terhadap tingkat kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat berdasarkan Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan pada Instansi Pemerintah menurut LAN	Nilai	N/A	9.890,01	N/A	11.534,23	40	11.534,23	41	11.857,19	42	12.196,30	42	35.587,72	SETDA
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					5.020,31		4.504,55		4.024,54		4.169,92		4.322,02		12.516,48	SETDA
		Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Hasil Survey terhadap tingkat kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan pada Instansi Pemerintah menurut LAN	Nilai	N/A	3.622,66	N/A	2.935,17	40	2.455,16	41	2.522,08	42	2.591,79	42	7.569,03	SETDA
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun Berjalan	Persen	64,30	1.397,65	65,71	1.569,38	67,71	1.569,38	68,56	1.647,84	70	1.730,23	70	4.947,45	SETDA
INSPEKTORAT																	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase AKIP OPD yang dievaluasi dengan nilai BB	Meningkatnya Akuntabilitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan	Persen	100	1.681,48	100	1.303,17	100	1.303,17	100	1.323,00	100	1.343,36	100	3.969,53	INSPEKTORAT

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	Meningkatnya Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap pencegahan Korupsi	Skor	N/A	1.083,87	N/A	1.009,35	77	1.009,35	78,5	1.025,00	80	1.041,00	80	3.075,35	INSPEKTORAT
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran Program OPD	Meningkatnya SDM dan Sarana Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Inspektorat	Persen	100	9.581,50	100	10.081,77	100	10.081,77	100	10.238,04	100	10.397,00	100	30.716,81	INSPEKTORAT
SEKRETARIAT DPRD																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya Kebutuhan Urusan Dasar/Penunjang Perangkat Daerah	Area Perubahan Refomasi Birokrasi Reform Secara Maksimal	Persen	100	47.342,91	100	49.943,77	100	49.943,77	100	50.717,90	100	51.504,03	100	152.165,70	SEKRETARIAT DPRD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terfasilitasinya Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya dukungan dan fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi DPRD	Persen	100	15.561,85	100	21.121,89	100	21.121,89	100	21.449,28	100	21.781,75	100	64.352,92	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					3.909,00		4.195,00		4.195,00		4.260,00		4.326,00		12.781,00	KESBANGPOL
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB		BB		BB		BB		BB		BB		KESBANGPOL
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B		B		B		B		B		B		KESBANGPOL
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KESBANGPOL
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	122,00	100	1.114,00	100	1.114,00	100	1.131,00	100	2.262,00	100	4.507,00	KESBANGPOL
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Tngkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persen	100	2.260,00	100	2.536,00	100	2.536,00	100	2.575,00	100	2.615,00	100	7.726,00	KESBANGPOL
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	383,00	100	169,00	100	169,00	100	172,00	100	174,00	100	515,00	KESBANGPOL
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Presentase Tingkat Pembinaan dan PengembanganKetahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	-	100	125,00	100	125,00	100	127,00	100	129,00	100	381,00	KESBANGPOL
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	166,00	100	294,00	100	294,00	100	298,00	100	303,00	100	895,00	
KECAMATAN																	
KECAMATAN ARGAPURA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.400,00		2.795,00		2.795,00		2.795,00		2.795,00		8.385,00	KECAMATAN ARGAPURA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB	-	KECAMATAN ARGAPURA
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B	-	KECAMATAN ARGAPURA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100	-	KECAMATAN ARGAPURA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	32,60	100	32,60	100	34,23	100	35,94	100	37,74	100	107,91	KECAMATAN ARGAPURA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	3,60	100	3,60	100	3,78	100	3,97	100	4,17	100	11,92	KECAMATAN ARGAPURA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	9,00	100	9,00	100	9,45	100	9,92	100	10,42	100	29,79	KECAMATAN ARGAPURA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	69,00	100	69,00	100	72,45	100	76,07	100	79,88	100	228,40	KECAMATAN ARGAPURA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	166,00	10	166,00	10	174,30	10	39,02	10	40,97	10	254,28	KECAMATAN ARGAPURA
KECAMATAN BANJARAN																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.599,00		2.599,00		2.599,00		2.599,00		2.599,00		7.797,00	KECAMATAN BANJARAN
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB	1 330 ,00	BB		KECAMATAN BANJARAN
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B	11,00	B		KECAMATAN BANJARAN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100	438,00	100		KECAMATAN BANJARAN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	37,20	100	37,20	100	39,06	100	41,01	100	43,06	100	123,14	KECAMATAN BANJARAN
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	5,80	100	5,80	100	6,09	100	6,39	100	6,71	100	19,20	KECAMATAN BANJARAN
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	10,00	100	10,00	100	10,50	100	11,03	100	11,58	100	33,10	KECAMATAN BANJARAN
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	54,00	100	54,00	100	56,70	100	59,54	100	62,51	100	178,75	KECAMATAN BANJARAN
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	23,60	10	23,60	10	24,78	10	26,02	10	27,32	20	78,12	KECAMATAN BANJARAN
KECAMATAN BANTARUJEG																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.326,00		2.326,00		2.326,00		2.326,00		2.326,00		6.978,00	KECAMATAN BANTARUJEG
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN BANTARUJEG
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN BANTARUJEG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN BANTARUJEG
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	37,00	100	37,00	100	38,85	100	40,79	100	42,83	100	122,47	KECAMATAN BANTARUJEG
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	12,16	100	12,16	100	12,77	100	13,41	100	14,08	100	40,25	KECAMATAN BANTARUJEG
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	13,91	100	13,91	100	14,61	100	15,34	100	16,10	100	46,04	KECAMATAN BANTARUJEG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	105,56	100	105,56	100	110,83	100	116,38	100	122,19	100	349,40	KECAMATAN BANTARUJEG
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	121,77	10	121,77	100	127,86	10	35,25	10	37,01	20	200,12	KECAMATAN BANTARUJEG
KECAMATAN CIGASONG																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.227,00		6.227,00		6.227,00		6.227,00		6.227,00		18.681,00	KECAMATAN CIGASONG
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN CIGASONG
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN CIGASONG
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN CIGASONG
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	51,00	100	51,00	100	53,55	100	56,23	100	59,04	100	168,82	KECAMATAN CIGASONG
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	1.216,00	100	1.216,00	100	1.276,80	100	1.340,64	100	1.407,67	100	4.025,11	KECAMATAN CIGASONG
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	10,00	100	10,00	100	10,50	100	11,03	100	11,58	100	33,10	KECAMATAN CIGASONG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	180,00	100	180,00	100	189,00	100	198,45	100	208,37	100	595,82	KECAMATAN CIGASONG
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	96,88	10	96,88	100	101,72	100	16,80	100	17,64	100	136,17	KECAMATAN CIGASONG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
KECAMATAN CIKIJING																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.474,59		2.474,59		2.474,59		2.474,59		2.474,59		7.423,77	KECAMATAN CIKIJING
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN CIKIJING
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN CIKIJING
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN CIKIJING
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	47,00	100	47,00	100	49,35	100	51,82	100	54,41	100	155,58	KECAMATAN CIKIJING
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	11,00	100	11,00	100	11,55	100	12,13	100	12,73	100	36,41	KECAMATAN CIKIJING
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	10,00	100	10,00	100	10,50	100	11,03	100	11,58	100	33,10	KECAMATAN CIKIJING
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	88,00	100	88,00	100	92,40	100	97,02	100	101,87	100	136,17	KECAMATAN CIKIJING
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	32,60	10	32,60	100	34,23	100	35,94	100	37,74	100	107,91	KECAMATAN CIKIJING
KECAMATAN CINGAMBUL																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.469,00		2.469,00		2.469,00		2.469,00		2.469,00		7.407,00	KECAMATAN CINGAMBUL
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN CINGAMBUL
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN CINGAMBUL
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN CINGAMBUL
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	68,00	100	68,00	100	71,40	100	74,97	100	78,72	100	225,09	KECAMATAN CINGAMBUL
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	19,50	100	19,50	100	20,48	100	21,50	100	22,57	100	64,55	KECAMATAN CINGAMBUL
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	16,00	100	16,00	100	16,80	100	17,64	100	18,52	100	52,96	KECAMATAN CINGAMBUL
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi	Persen	100	71,00	100	71,00	100	74,55	100	78,28	100	82,19	100	136,17	KECAMATAN CINGAMBUL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
			jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan														
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	215,00	10	215,00	100	225,75	10	63,04	10	66,19	20	354,98	KECAMATAN CINGAMBUL
KECAMATAN DAWUAN																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.613,00		2.613,00		2.613,00		2.613,00		2.613,00		7.839,00	KECAMATAN DAWUAN
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN DAWUAN
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN DAWUAN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN DAWUAN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	45,93	100	45,93	100	48,23	100	50,64	100	53,17	100	152,03	KECAMATAN DAWUAN
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	24,78	100	24,78	100	26,01	100	27,31	100	28,68	100	82,01	KECAMATAN DAWUAN
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	56,00	100	56,00	100	26,01	100	48,23	100	48,23	100	136,17	KECAMATAN DAWUAN
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	58,60	10	352,00	100	58,60	10	61,53	10	64,61	20	184,74	KECAMATAN DAWUAN
KECAMATAN JATITUJUH																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.893,00		3.022,00		3.022,00		3.022,00		3.022,00		9.066,00	KECAMATAN JATITUJUH
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN JATITUJUH
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN JATITUJUH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN JATITUJUH
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	51,90	100	51,90	100	54,50	100	57,22	100	60,08	100	171,80	KECAMATAN JATITUJUH
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah potensi unggulan kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	6,00	100	6,00	100	6,30	100	6,62	100	6,95	100	19,86	KECAMATAN JATITUJUH
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	6,50	100	6,50	100	6,83	100	7,17	100	7,52	100	21,52	KECAMATAN JATITUJUH
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi	Persen	100	96,70	100	96,70	100	101,54	100	106,61	100	111,94	100	136,17	KECAMATAN JATITUJUH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
			jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan														
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	21,00	10	134,00	100	23,70	10	24,89	12	26,13	22	74,71	KECAMATAN JATITUJUH
KECAMATAN JATIWANGI																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.872,00		3.162,00		3.162,00		3.162,00		3.162,00		9.486,00	KECAMATAN JATIWANGI
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN JATIWANGI
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN JATIWANGI
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN JATIWANGI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	52,00	100	99,00	100	103,95	100	109,15	100	114,60	100	327,70	KECAMATAN JATIWANGI
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100		100	21,00	100	22,05	100	23,15	100	24,31	100	69,51	KECAMATAN JATIWANGI
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	21,00	100	16,56	100	17,39	100	18,26	100	19,17	100	54,82	KECAMATAN JATIWANGI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	47,00	100	54,00	100	56,70	100	59,54	100	62,51	100	136,17	KECAMATAN JATIWANGI
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	24,00	10	428,00	100	75,40	10	79,17	10	83,13	20	237,70	KECAMATAN JATIWANGI
KECAMATAN KADIPATEN																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.473,00		2.377,00		2.377,00		2.377,00		2.377,00		7.131,00	KECAMATAN KADIPATEN
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN KADIPATEN
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN KADIPATEN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN KADIPATEN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	21,00	100	21,00	100	22,05	100	40,00	100	58,00	100	120,05	KECAMATAN KADIPATEN
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	3,30	100	3,30	100	3,47	100	15,00	100	17,00	100	35,47	KECAMATAN KADIPATEN
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan	Persen	100	14,30	100	14,30	100	15,02	100	11,00	100	12,00	100	38,02	KECAMATAN KADIPATEN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
		ketertiban umum skala kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan														
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	82,66	100	82,66	100	86,79	100	55,00	100	61,00	100	38,02	KECAMATAN KADIPATEN
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	24,60	10	292,00	10	24,60	10	55,00	10	181,00	20	260,60	KECAMATAN KADIPATEN
KECAMATAN KASOKANDEL																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.200,00		2.265,00		2.265,00		2.265,00		2.265,00		6.795,00	KECAMATAN KASOKANDEL
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN KASOKANDEL
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN KASOKANDEL
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN KASOKANDEL
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	17,75	100	17,75	100	18,64	100	65,00	100	72,00	100	155,64	KECAMATAN KASOKANDEL
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100		100		100	0,00	100	50,00	100	55,00	100	105,00	KECAMATAN KASOKANDEL
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100		100		100	0,00	100	25,00	100	28,00	100	53,00	KECAMATAN KASOKANDEL
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	54,50	100	54,50	100	57,23	100	100,00	100	110,00	100	267,23	KECAMATAN KASOKANDEL
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	17,06	10	17,06	100	17,91	10	85,00	10	94,00	20	196,91	KECAMATAN KASOKANDEL
KECAMATAN KERTAJATI																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.871,00		2.716,00		2.716,00		2.716,00		2.716,00		8.148,00	KECAMATAN KERTAJATI
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN KERTAJATI
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN KERTAJATI
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN KERTAJATI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang	Persen	100	44,70	100	44,70	100	46,94	100	135,00	100	149,00	100	330,94	KECAMATAN KERTAJATI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
			minta pelayanan publik di kecamatan														
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	19,00	100	19,00	100	19,95	100	70,00	100	77,00	100	166,95	KECAMATAN KERTAJATI
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	18,00	100	18,00	100	18,90	100	50,00	100	55,00	100	123,90	KECAMATAN KERTAJATI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	95,00	100	95,00	100	99,75	100	100,00	100	110,00	100	309,75	KECAMATAN KERTAJATI
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	46,75	10	135,00	100	46,75	10	135,00	10	219,00	10	400,75	KECAMATAN KERTAJATI
KECAMATAN LEMAHSUGIH																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.124,00		1.932,00		1.932,00		1.932,00		1.932,00		5.796,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN LEMAHSUGIH
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN LEMAHSUGIH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN LEMAHSUGIH
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	67,00	100	67,00	100	70,35	100	114,00	100	125,00	100	309,35	KECAMATAN LEMAHSUGIH
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	13,74	100	13,74	100	14,42	100	80,00	100	88,00	100	182,42	KECAMATAN LEMAHSUGIH
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	18,53	100	18,53	100	19,45	100	44,00	100	48,00	100	111,45	KECAMATAN LEMAHSUGIH
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	83,68	100	83,68	100	87,86	100	140,00	100	154,00	100	381,86	KECAMATAN LEMAHSUGIH
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	35,00	10	83,21	100	35,37	10	110,00	10	156,00	20	301,37	KECAMATAN LEMAHSUGIH
KECAMATAN LEUWIMUNDING																	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.491,00		2.577,00		2.577,00		2.577,00		2.577,00		7.731,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN LEUWIMUNDING
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN LEUWIMUNDING
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN LEUWIMUNDING
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	22,00	100	22,00	100	23,10	100	68,00	100	75,00	100	166,10	KECAMATAN LEUWIMUNDING
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	5,00	100	5,00	100	5,25	100	40,00	100	44,00	100	89,25	KECAMATAN LEUWIMUNDING
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	7,00	100	7,00	100	7,35	100	25,00	100	28,00	100	60,35	KECAMATAN LEUWIMUNDING
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	29,00	100	29,00	100	30,45	100	115,00	100	127,00	100	272,45	KECAMATAN LEUWIMUNDING
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	23,05	10	101,00	100	26,05	10	75,00	10	143,00	20	244,05	KECAMATAN LEUWIMUNDING
KECAMATAN LIGUNG																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.152,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		9.000,00	KECAMATAN LIGUNG
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN LIGUNG
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN LIGUNG
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN LIGUNG
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	45,00	100	45,00	100	47,25	100	140,00	100	154,00	100	341,25	KECAMATAN LIGUNG
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	20,54	100	20,54	100	21,57	100	35,00	100	39,00	100	95,57	KECAMATAN LIGUNG
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan	Persen	100	17,49	100	17,49	100	18,36	100	34,00	100	37,00	100	89,36	KECAMATAN LIGUNG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
			ketertiban umum di tingkat kecamatan														
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	82,83	100	82,83	100	86,97	100	50,00	100	55,00	100	191,97	KECAMATAN LIGUNG
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	77,23	10	315,46	100	77,23	10	78,00	10	206,00	20	361,23	KECAMATAN LIGUNG
KECAMATAN MAJA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.687,00		2.645,00		2.645,00		2.645,00		2.645,00		7.935,00	KECAMATAN MAJA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN MAJA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN MAJA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN MAJA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	64,00	100	64,00	100	67,20	100	72,00	100	79,00	100	218,20	KECAMATAN MAJA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	74,73	100	74,73	100	78,46	100	55,00	100	61,00	100	194,46	KECAMATAN MAJA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	22,00	100	22,00	100	23,10	100	25,00	100	28,00	100	76,10	KECAMATAN MAJA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	47,00	100	47,00	100	49,35	100	58,00	100	64,00	100	171,35	KECAMATAN MAJA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	58,56	10	320,54	100	58,56	100	85,00	100	129,00	100	272,56	KECAMATAN MAJA
KECAMATAN MAJALENGKA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.620,00		12.371,00		12.371,00		12.371,00		12.371,00		37.113,00	KECAMATAN MAJALENGKA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN MAJALENGKA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN MAJALENGKA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN MAJALENGKA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	104,00	100	93,51	100	98,18	100	220,00	100	242,00	100	560,18	KECAMATAN MAJALENGKA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	8.068,00	100	6,17	100	6,48	100	13,69	100	15,06	100	35,22	KECAMATAN MAJALENGKA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	4,00	100	10,00	100	10,50	100	35,00	100	39,00	100	84,50	KECAMATAN MAJALENGKA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	117,00	100	147,00	100	154,35	100	210,00	100	231,00	100	595,35	KECAMATAN MAJALENGKA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	42,00	10	129,71	100	51,49	10	125,00	10	198,00	20	374,49	KECAMATAN MAJALENGKA
KECAMATAN MALAUSMA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.638,00		2.539,00		2.539,00		2.539,00		2.539,00		7.617,00	KECAMATAN MALAUSMA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN MALAUSMA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN MALAUSMA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN MALAUSMA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	53,53	100	53,53	100	56,21	100	68,00	100	95,00	100	219,21	KECAMATAN MALAUSMA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	11,33	100	11,33	100	11,89	100	40,00	100	44,00	100	95,89	KECAMATAN MALAUSMA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	11,25	100	11,25	100	11,81	100	25,00	100	28,00	100	64,81	KECAMATAN MALAUSMA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	42,83	100	42,83	100	44,97	100	100,00	100	110,00	100	254,97	KECAMATAN MALAUSMA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	43,00	10	148,67	100	42,43	100	85,00	52	164,00	100	291,43	KECAMATAN MALAUSMA
KECAMATAN PALASAH																	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.422,00		2.508,00		2.508,00		2.508,00		2.508,00		7.524,00	KECAMATAN PALASAH
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN PALASAH
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN PALASAH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN PALASAH
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	34,00	100	17,70	100	18,59	100	54,00	100	59,00	100	131,59	KECAMATAN PALASAH
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	26,00	100	6,80	100	7,14	100	55,00	100	61,00	100	123,14	KECAMATAN PALASAH
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	15,00	100	10,10	100	10,61	100	25,00	100	28,00	100	63,61	KECAMATAN PALASAH
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	52,00	100	104,50	100	109,73	100	70,00	100	77,00	100	256,73	KECAMATAN PALASAH
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	38,00	10	84,52	100	32,23	100	95,00	100	140,00	100	267,23	KECAMATAN PALASAH
KECAMATAN PANYINGKIRAN																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.267,00		2.134,00		2.134,00		2.134,00		2.134,00		6.402,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN PANYINGKIRAN
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN PANYINGKIRAN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN PANYINGKIRAN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	44,00	100	20,00	100	21,00	100	54,00	100	59,00	100	134,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	14,00	100		100	0,00	100	40,00	44	44,00	100	84,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Persen	100	8,90	100	10,00	100	10,50	100	20,00	100	22,00	100	52,50	KECAMATAN PANYINGKIRAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
		ketertiban umum skala kecamatan	umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan														
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	71,00	100	71,00	100	74,55	100	58,00	100	64,00	100	196,55	KECAMATAN PANYINGKIRAN
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	27,00	10	91,53	100	29,58	10	50,00	10	145,00	20	224,58	KECAMATAN PANYINGKIRAN
KECAMATAN RAJAGALUH																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.878,00		2.983,00		2.983,00		2.983,00		2.983,00		8.949,00	KECAMATAN RAJAGALUH
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB,		BB		KECAMATAN RAJAGALUH
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN RAJAGALUH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN RAJAGALUH
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	64,00	100	64,00	100	67,20	100	65,00	100	72,00	100	204,20	KECAMATAN RAJAGALUH
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	17,00	100	17,00	100	17,85	100	40,00	100	44,00	100	101,85	KECAMATAN RAJAGALUH
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	11,20	100	11,20	100	11,76	100	25,00	100	28,00	100	64,76	KECAMATAN RAJAGALUH
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	68,00	100	68,00	100	71,40	100	90,00	100	99,00	100	260,40	KECAMATAN RAJAGALUH
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	37,00	10	200,00	100	40,00	10	110,00	10	211,00	20	361,00	KECAMATAN RAJAGALUH
KECAMATAN SINDANG																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.673,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00		8.112,00	KECAMATAN SINDANG
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN SINDANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
		Capaian SKM Perangkat Daerah (B)	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN SINDANG
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN SINDANG
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	12,00	100	12,00	100	12,60	100	54,00	100	59,00	100	125,60	KECAMATAN SINDANG
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	17,50	100	17,50	100	18,38	100	55,00	100	61,00	100	134,38	KECAMATAN SINDANG
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	3,00	100	3,00	100	3,15	100	25,00	100	28,00	100	56,15	KECAMATAN SINDANG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	40,95	100	40,95	100	43,00	100	58,00	100	64,00	100	201,00	KECAMATAN SINDANG
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	15,00	10	48,98	100	11,43	85	85,00	100	129,00	100	225,43	KECAMATAN SINDANG
KECAMATAN SINDANGWANGI																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.761,00		2.662,00		2.662,00		2.662,00		2.662,00		7.986,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN SINDANGWANGI
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN SINDANGWANGI
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN SINDANGWANGI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	54,50	100	54,50	100	57,22	100	68,00	100	68,00	100	193,22	KECAMATAN SINDANGWANGI
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	6,30	100	6,30	100	6,62	100	55,00	100	55,00	100	116,62	KECAMATAN SINDANGWANGI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	8,20	100	8,20	100	8,61	100	35,00	100	35,00	100	70,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	148,00	100	148,00	100	155,40	100	100,00	100	100,00	100	355,40	KECAMATAN SINDANGWANGI
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	12,00	10	119,00	100	28,95	10	85,00	10	155,00	20	268,95	KECAMATAN SINDANGWANGI
KECAMATAN SUKAHAJI																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.578,00		2.628,00		2.628,00		2.628,00		2.628,00		7.884,00	KECAMATAN SUKAHAJI
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN SUKAHAJI
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN SUKAHAJI
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN SUKAHAJI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	44,00	100	44,00	100	46,20	100	16,00	100	18,00	100	80,20	KECAMATAN SUKAHAJI
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	24,00	100	24,00	100	25,20	100	40,00	100	44,00	100	109,20	KECAMATAN SUKAHAJI
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	17,96	100	17,96	100	18,85	100	26,00	100	29,00	100	73,85	KECAMATAN SUKAHAJI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	66,00	100	66,00	100	69,30	100	90,00	100	99,00	100	258,30	KECAMATAN SUKAHAJI
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	53,00	10	287,54	100	57,92	10	57,00	10	263,00	20	377,92	KECAMATAN SUKAHAJI
KECAMATAN SUMBERJAYA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.538,00		2.428,00		2.428,00		2.428,00		2.428,00		7.284,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Persen	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN SUMBERJAYA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN SUMBERJAYA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN SUMBERJAYA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	47,55	100	47,55	100	49,93	100	71,00	100	78,00	100	198,93	KECAMATAN SUMBERJAYA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	10,95	100	10,95	100	11,50	100	700,00	100	77,00	100	788,50	KECAMATAN SUMBERJAYA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	8,48	100	8,48	100	8,90	100	22,00	100	24,00	100	54,90	KECAMATAN SUMBERJAYA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	70,80	100	70,80	100	74,34	100	130,00	100	143,00	100	347,34	KECAMATAN SUMBERJAYA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10	22,50	10	140,29	100	23,30	100	66,00	100	133,00	100	222,30	KECAMATAN SUMBERJAYA
KECAMATAN TALAGA																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.889,00		2.861,00		2.861,00		2.861,00		2.861,00		8.583,00	KECAMATAN TALAGA
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B		BB		BB		BB		BB		BB		KECAMATAN TALAGA
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	C		B		B		B		B		B		KECAMATAN TALAGA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TALAGA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	25,50	100	25,50	100	26,78	100	28,11	100	110,00	100	164,89	KECAMATAN TALAGA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	12,50	100	12,50	100	13,12	100	50,00	100	55,00	100	118,12	KECAMATAN TALAGA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	14,00	100		100	0,00	100	30,00	100	33,00	100	63,00	KECAMATAN TALAGA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	58,94	100	58,94	100	61,88	100	50,00	100	55,00	100	166,88	KECAMATAN TALAGA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	21,36	10	132,72	100	21,36	90	90,00	100	134,00	100	245,36	KECAMATAN TALAGA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU (Juta Rp)	
					CAPAIAN	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp)	TARGET	PAGU (juta Rp)	TARGET	PAGU (Juta Rp)			
			dibagi jumlah desa di kecamatan														

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pj kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPD adalah IKU Pj. Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Pj. Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pj. Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 8.1
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		2023	TARGET RPD			KONDISI AKHIR
			2021	2022	TARGET	2024	2025	2026	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,81	68,56	68,85	68,90	69.00	69.20	69.20
	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,46	70,76	70,60	71,35	71,65	72,00	72,00
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,23	12,24	12,25	12,26	12,28	12,30	12,30
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,31	7,49	7,52	7,61	7,71	7,82	7,82
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.591	9.950	9.955	9.955	9,970	9,980	9.980
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,71	4,16	4,48	4,44	4,40	4,37	4,37
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,33	11,94	10,37	10,56	10,09	9,63	9,63
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	6,63	6,69	6,72	6.28	6,34	6,34
5.	Nilai Inflasi Daerah	Persen	1,81	4,86	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
6.	PDRB per kapita (ADHB)	Triliun Rupiah	34,24	37,77	39.82	42.63	45.44	47.86	47.86
7.	Indeks Gini	Poin	0,354	0,367	0,330	0,329	0,328	0,328	0,328

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		2023	TAGET RPD			KONDISI AKHIR
			2021	2022	TARGET	2024	2025	2026	
1.	Persentase penduduk miskin	Persen	12,33	11,94	10,37	10,56	10,09	9,63	9,63
2.	Rata rata Lama Sekolah	Persen	7,31	7,49	7,52	7,61	7,71	7,82	7,82
3.	Angka Harapan Hidup	Persen	70,46	70,76	70,60	71,35	71,65	72,00	72,00
4.	Prevalensi Stunting	Persen	23,00	24,30	21,00	17,36	14,61	11,86	11,86
5.	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	N/A	65,18	67,28	68.49	68,49
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65,32	64,81	66,29	67,08	68,26	69,45	69,45
7.	Nilai PDRB (ADHK)	Opini	22,79	24,30	25,85	27,58	29,31	31,17	31,17
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	5,71	4,16	4,48	4,44	4,40	4,37	4,37
9.	Indeks Indeks Trantibum	Kategori	N/A	N/A	N/A	C	C	B	B
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	CC	CC	B	B	B
11.	Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Target Kinerja	Target Kinerja		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	**Aspek kesejahteraan masyarakat**						
A.	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**						
1.1	Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) [%]	4,75	6,63	6,69	6,72	6,28	6,34
1.2	PDRB per kapita ADHB	25.964.008	28.289.006	29.493.017	31.223.404	32.927.137	34.303.401
1.3	PDRB per kapita ADHK Tahun Dasar 2010	18.262.220	18.989.900	19.877.700	20.205.102	21.238.,872	22.340.932
1.4	Indeks Gini	0,354	0,367	0,33	0,329	0,328	0,328
B.	**Fokus Kesejahteraan Sosial**						
1.5	Tingkat kemiskinan	12,33	11,94	10,37	10,56	10,09	9,63
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,81	68,56	68,85	68,9	69	69,2
1.7	Harapan Lama Sekolah	12,23	12,24	12,25	12,26	12,28	12,3
1.8	Rata lama sekolah	7,31	7,49	7,52	7,61	7,71	7,82
1.9	Usia harapan hidup	70,46	70,76	70,60	71,35	71,65	72,0
1.10	Persentase balita gizi buruk	0,04	0,03	0,02	0,02	0,17	0,015
1.11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,99%	70,17%	71,55%	71,75%	71,90%	72,10%
1.12	Tingkat pengangguran terbuka	5,71	4,16	4,48	4,44	4,40	4,37
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	B
1.15	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.16	Indeks Pembangunan Gender	85,95	86,1	86,5	86,7	86,9	87,2
1.17	Indeks Pemberdayaan Gender	61	61.5	62	62,5	63	63,5
2.	**Aspek Daya Saing Daerah**						
A.	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**						
2.1	PDRB ADHB [Triliun Rp]	34,24	37,77	39,82	42,63	45,44	47,36
2.2	PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 [Triliun Rp]	22,79	24,30	25,85	27,58	29,31	31,17
2.3	Pengeluaran per Kapita [Ribu Rupiah]	9.591	9.950	9.955	9.960	9.970	9.980

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

Tabel 8.4

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
PENDIDIKAN										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DISDIK
2.	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DISDIK
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISDIK
4.	APM PAUD	Persen	92,63	95,26	99,45	95,73	95,78	95,78	95,78	DISDIK
5.	APM SD/MI	Persen	90,52	90,68	97,35	91,25	91,3	91,3	91,3	DISDIK
6.	APM SMP/MTs	Persen	90,43	88,00	98,55	88,15	88,28	88,28	88,28	DISDIK
7.	APK Non Formal	Persen	79,00	105,41	86,55	86,60	86,73	86,73	86,73	DISDIK
8.	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Persen	-	-	-	15	17	17	17	DISDIK
KESEHATAN										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DINKES
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DINKES
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
4.	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
5.	Persentase standar kompetensi tenaga kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
6.	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
7.	Persentase Penguatan Gerakan Masyarakat Menuju Hidup Sehat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
RSUD MAJALENGKA										

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
1.	Presentasi nilai Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks/ Persen	81,00	80	81	82	84	85	85	RSUD MAJALENGKA
2	Persentasi ketercapaian Standar Pelayanan Minimal	Persen	75,00	75,5	80	81	82	84	100	
3	Hasil penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Paripurna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	
4.	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	65,00	73	75	78	79	80	80	
RSUD CIDERES										
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks/ Persen	77,00	80	81	82	84	85	85	RSUD CIDERES
2	Standar Pelayanan Minimal	Persen	73,00	75,5	80	81	82	84	100	
3	Hasil penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Paripurna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	
4.	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	80,00	73	75	78	79	80	80	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DPUTR
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DPUTR
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPKPP
4.	Debit air termanfaatkan	Persen	0	86,6	87,5	85	86,5	87,4	87,4	DPUTR
5.	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	persen	80,00	80,41	80,5	8	8	9	25	DPKPP
6.	Persentase Penduduk yang Terlayani Air Limbah	persen	68,52	68,58	68,66	5	5	5	15	DPKPP
7.	Presentase rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	persen	80,33	30,1	30,2	3	3	3	9	DPKPP
8.	Persentase jalan poros desa dalam kondisi baik	persen	85,49	85,49	85,49	25	27	29	81	DPKPP
9.	Jumlah gedung yang memiliki Sertifikat Laif Fungsi	Unit	0	0	0	0,62	1,232	1,85	1,85	DPUTR
10.	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang tertata dan berkelanjutan	Unit	11	4	4	6	7	3	16	DPUTR
11.	Persentase pelayanan jalan dalam kondisi mantap	Persen	N/A	87,8	88,3	89,5	90,5	91,5	91,5	DPUTR
12.	Persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan teruji	Persen	N/A	N/A	N/A	2	2	2	6	DPUTR

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
13.	Persentase kelembagaan jasa konstruksi yang tertib admnistrasi	Persen	N/A	N/A	N/A	8	8	8	24	DPUTR
14.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	N/A	N/A	N/A	85,56	90,98	93,23	93,23	DPUTR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DPKPP
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	B	DPKPP
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPKPP
4.	Presentase rumah tidak layak huni	Presentase	70,5	70,77	70,77	-	-	-	-	DPKPP
5.	Tersedianya dokumen rumah tidak layak huni	Dokumen	25	-	-	1	2	2	3	DPKPP
6.	Presentase rumah tidak layak huni	Persen	75	146	20		3		3	DPKPP
7.	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum	Lokasi	58.92	8	8	2	2	2	6	DPKPP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
1.	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pelayanan Publik	Lokasi	10	1	1	2	2	2	6	DPKPP
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	SATPOL PP DAMKAR
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	SATPOL PP DAMKAR
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
4.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
5.	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
6.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BPBD
7.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	BPBD
8.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
9.	persentase tanggap bencana	persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	BPBD

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
10.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	36.250	866	1.772	100	100	100	300	BPBD
11.	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	orang	36.250	866	1.772	40	40	40	120	BPBD
12	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	2.000	2.000	2.000	11.000	2.000	2.000	15.000	BPBD
13	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
SOSIAL										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DINSOS
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DINSOS
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS
4.	Persentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS
5.	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS
6.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Perlindungan dan jaminan Sosial	persen	N/A	100	100	100	100	100	100	DINSOS
7.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelahtanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS
8.	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR										
TENAGA KERJA										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DK2UKM
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DK2UKM
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DK2UKM
4.	Presentase kegiatan yang dilaksanaan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	-	0	0	0	0	80	0	DK2UKM

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
5.	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Orang	-	N/A	N/A	10	10	10	30	DK2UKM
6.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	N/A	N/A	N/A	2.300	2.300	2.300	6.900	DK2UKM
7.	Persentase Perusahaan yang Memiliki dokumen Hubungan Industrial	Persen	N/A	N/A	N/A	50	50	50	50	DK2UKM
PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DP3AKB
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DP3AKB
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB
4.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	9	20	21	22	22	23	23	DP3AKB
5.	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB
6.	Persentase perempuan kepala keluarga miskin yang meningkat pendapatannya	Persen	50	25	25	25	25	75	75	DP3AKB
7.	Persentase Data Gender	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB
8.	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Nilai (Minimal)	550	480	500,06	500,06	545,87	600,35	600,35	DP3AKB
9.	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1.	Angka Fertilitas total (TFR/Total Fertility Rate)	Anak	2,27	2,2	2,19	2,17	2,16	2,15	2,15	DP3AKB
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	79,97	79,8	80	80,09	80,11	80,15	80,15	DP3AKB
3.	Menurunnya Median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan	Usia/Tahun	N/A	19	19,5	20	20,5	21,1	21,1	DP3AKB
PANGAN										
1.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	75	75	78	78	78	78	DKP3
2.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKP3
3.	Capain SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	B	DKP3
4.	Persentase pemenuhan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan	Persen	95	95	95	95	95	95	95	DKP3

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
5.	Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKP3
6.	Tingkat ketersediaan Laporan Ketersediaan Harga dan Pasokan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKP3
7.	Persentase desa yang memanfaatkan lahan pekarangan	Persen	88	88,6	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	DKP3
8.	Jumlah desa rentan pangan yang mendapatkan penanganan kerawanan pangan	Desa	4	20	4	4	4	4	12	DKP3
LINGKUNGAN HIDUP										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DLH
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DLH
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DLH
4.	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	Persen	3	100	100	25	57,14	60	100	DLH
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	65.32	59,36	60,55	58,16	58,16	58,16	58,16	DLH
6.	Indeks Tutupan Lahan	Poin	50.97	50,99	51	50,97	50,98	50,99	50,99	DLH
7.	Persentase pemgendalian B3 dan Limbah B3	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DLH
8.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	300	DLH
9.	Capaian Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	100	0	100	100	100	100	100	DLH
10.	jumlah masyarakat dan lembaga yang memperoleh Penghargaan	Buah	9	3	3	1	1	1	3	DLH
11.	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	300	DLH
12.	Persentase sampah yang dikelola	Persen	98	99	99	99	99	99	99	DLH
13.	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka	Persen	12.37	57,41	100	7,12	8,41	9,69	9,69	DLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DISDUKCAPIL
2.	Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Penunjang Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
3.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	A	A	A	A	DISDUKCAPIL
4.	Cakupan Kepemilikan KTP-el	Persen	95	97	98	99	100	100	100	DISDUKCAPIL
5.	Cakupan Pelayanan Pindah-Datang Penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
6.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	Persen	94	97	98	99	100	100	100	DISDUKCAPIL
7.	Cakupan Pelayanan Perkawinan Penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
8.	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana SIAK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
9.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	3	7	15	17	20	22	22	DISDUKCAPIL
10.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Lingkup Kabupaten	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DISDUKCAPIL
PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DPMD
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	BB	BB	DPMD
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPMD
4.	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa Sesuai Peraturan	Persen	N/A	62,33	N/A	9,39	10,91	12,42	32,72	DPMD
5.	Persentase RT/RW yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	N/A	47	N/A	50	55	60	60	DPMD
6.	Persentase desa yang menyusun adminstrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	Persen	N/A	70	N/A	75	80	85	85	DPMD
7.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPMD
PERHUBUNGAN										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB	DISHUB
	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DISHUB
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISHUB
2.	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun	persen	46	50	52	54	55	56	56	DISHUB
	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji	persen	90	90	90	90	90	90	90	DISHUB

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DISKOMINFO
	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DISKOMINFO
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO
2.	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi	Jumlah	6	6	6	10	10	10	10	DISKOMINFO
3.	Jumlah aplikasi	Aplikasi	6	6	6	18	18	18	18	DISKOMINFO
PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
1.	Jumlah Sertifikat Elektroknik (SE) yang terakomodir sesuai standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Dokumen	1	1	1	16	16	16	16	DISKOMINFO
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1.	Presentase Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen	N/A	N/A	N/A	10	15	15	40	DK2UKM
2.	Persentase koperasi sehat	Persen	N/A	N/A	N/A	3	3	4	10	DK2UKM
3.	Persentase Koperasi Aktif	persen	N/A	N/A	N/A	5	5	6	16 00	DK2UKM
4.	Persentasi peningkatan Volume usaha Koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	N/A	N/A	N/A	1	2	2	5	DK2UKM
5.	jumlah UMKM mempunyai NIB	Unit usaha	N/A	N/A	N/A	2000	2000	2000	6000	DK2UKM
6.	Presentase usaha ultra mikro miskin yang mandiri	Persen	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	DK2UKM
7.	Persentase Rata-rata peningkatan omset usaha mikro	Persen	3	3	3	3	3	3	3	Dk2UKM
PENANAMAN MODAL										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DPMTSP
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DPMTSP
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPMTSP
4.	Nilai Realisasi Investasi	Milyar/ Triliyun	399 M	419 M	440 M	1,140 T	1,162 T	1,168 T	1,186 T	DPMTSP

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
5.	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi	Event	1	1	0	0	2	2	2	DPMTSP
6.	Persentase Pelayanan Perizinan yang Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPMTSP
7.	Persentase PMA/PMDN yang tertib LKPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPMTSP
8.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPMTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DISPORA
2.	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DISPORA
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISPORA
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda	Persen	N/A	2	3	3,5	4	4,5	4,5	DISPORA
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	17,89	21,81	52,00	21,81	23,17	24,87	24,87	DISPORA
6.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	31,73	31,73	31,95	33,47	34,99	36,51	36,51	DISPORA
7.	Tingkat Partisipasi pada Penyelenggaraan kejuaraan/Event	Persen	-	-	-	80	85	90	90	DISPORA
8.	Tingkat Partisipasi Kepramukaan	Persen	-	-	-	47,05	48	48,5	48,5	DISPORA
STATISTIK										
1.	Jumlah OPD yang meningkat Nilai Indeks Pembanguan Statistik (IPS)	Dokumen	4	4	4	248	249	251	251	DISKOMINFO
KEBUDAYAAN										
1.	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	OPK	-	N/A	N/A	10	10	10	10	DISPARBUD
2.	jumlah seni Tradisional yang direvitalisasi	Seni Tradisional	1	0	0	1	1	1	3	DISPARBUD
3.	jumlah sejarah desa/kelurahan yang dikelola	Sejarah desa/kelurahan	N/A	1	1	1	1	1	3	DISPARBUD
4.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	1,00	1	3	1	1	1	3	DISPARBUD
5.	jumlah Museum yang direvitalisasi	Museum	N/A	1	1	1	1	1	3	DISPARBUD
PERPUSTAKAAN										

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	47,00	52	51	47	49	51	51	ARPUSDA
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	1,79	2,5	1,81	1,79	I,80	1,81	1,81	ARPUSDA
KEARSIPAN										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	ARPUSDA
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	A	A	B	B	B	B	ARPUSDA
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	ARPUSDA
4.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	45,00	51	45	45,00	50	52,00	52,00	ARPUSDA
5.	Rasio pengelola arsip	Persen	100	100	100	100	100	100	100	ARPUSDA
6.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen	45,00	50	45	45,00	50	52	52,00	ARPUSDA
URUSAN PILIHAN										
KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1.	Terpenuhinya produksi perikanan tangkap	Terpenuhinya produksi perikanan tangkap	10	756,14	10	10	10	10	30	DKP3
2.	Terfasilitasinya sarana dan prasarana nelayan	Terfasilitasinya sarana dan prasarana nelayan	2	5	1	1	1	1	3	DKP3
3.	Terfasililitasinya penebaran benih ikan di perairan umum (Rawa, Situ, Sungai, Embung)	Terfasililitasinya penebaran benih ikan di perairan umum (Rawa, Situ, Sungai, Embung)	1	5	1	1	1	1	3	DKP3
4.	Jumlah total produksi perikanan budidaya kabupaten	Jumlah total produksi perikanan budidaya kabupaten	5	2	2	2	2	2	6	DKP3
5	Jumlah omset pemasaran produk perikanan	Jumlah omset pemasaran produk perikanan	1	1	1	1	1	1	3	DKP3
6	Jumlah pelaku usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	Jumlah pelaku usaha kelompok pengolahan	5	5	5	5	5	5	15	DKP3

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
		perikanan penerima manfaat								
PARIWISATA										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DISPARBUD
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DISPARBUD
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISPARBUD
4.	Jumlah destinasi layak kunjung	destinasi	-	1	1	1	1	1	3	DISPARBUD
5.	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungan	471.906	818,543	1000000	1.010.000	1.020.000	10.300.000	1.030.000	DISPARBUD
6.	Persentase Peningkatan Pelaku ekonomi Kreatif	Persen	20,00	20	20	30	30	30	30	DISPARBUD
7.	persentase Sertifikasi Pelaku ekonomi Kreatif	persen	5	5	5	3	3	3	9	DISPARBUD
PERTANIAN										
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	1,75	80	80	80	80	80	80	DKP3
2.	Persentase petani miskin yang mendapat bantuan	RTS	60,00	100	100	100	100	100	100	DKP3
3.	Peningkatan ketersediaan daging, telur dan susu per tahun	Persen	50,00	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	DKP3
4.	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	Persen	5.000	80	80	80	80	80	80	DKP3
5.	Persentase ketersediaan prasarana pertania	Persen	100	65	65	65	70	70	70	DKP3
6	Luas lahan LP2B dan LSD	Peraturan	1	1	1	1	1	1	1	DKP3
7	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menula	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	DKP3
8	Penjaminan Keamanan pangan asal hewan	Ekor / Sampel	N/A	N/A	600	600	600	600	1.800	DKP3
9	Luas lahan pertanian yang terfasilitasi penanggulangan bencana pertanian	Ha	0	0	610	6.100	6.100	6.100	18.300	DKP3
10	Tingkat jumlah usaha pertanian	Persen	N/A	N/A	N/A	2	2	2	6	DKP3
11	Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DKP3
PERDAGANGAN										

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Persen	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	DISPERDAGIN
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	DISPERDAGIN
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISPERDAGIN
4	Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terfasilitasi	Persen	12,68	8,45	5,53	3,64	3,64	3,64	3,64	DISPERDAGIN
5	Tersedia pelayanan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISPERDAGIN
6	Nilai ekspor	Persen	30,72	-28,93	5	5	5	5	15	DISPERDAGIN
7	Tingkat pengaduan konsumen	Persen	N/A	N/A	N/A	10	10	10	30	DISPERDAGIN
8	Produk yang dipromosikan	Persen	N/A	N/A	N/A	33	25	20	20	DISPERDAGIN
PERINDUSTRIAN										
1.	Pertambahan industri kecil dan menengah di kabupaten sesuai rencana	IKM	104	104	110	40	40	40	120	DISPERDAGIN
2.	Peningkatan fasilitasi perizinan usaha industri	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	DISPERDAGIN
3.	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah dalam melaporkan aktivuitasnya	Persen	N/A	N/A	N/A	56	57	60	60	DISPERDAGIN
URUSAN PENUNJANG										
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BAPPEDALITBANG
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	BAPPEDALITBANG
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	97	100	100	100	100	100	BAPPEDALITBANG
4.	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Persen	96	99	0	96	98	99	99	BAPPEDALITBANG
5.	Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD	Persen	96	0	99	96	98	99	99	BAPPEDALITBANG
6.	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD	Persen	96	100	99	96	98	99	99	BAPPEDALITBANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
1.	Persentase Rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan	Persen	78	67	70	70	75	80	80	BAPPEDALITBANG
2.	Indeks Inovasi Daerah yang Diraih	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	BAPPEDALITBANG
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BKPSDM
2.	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	BKPSDM
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BKPSDM
4.	Persentase Pemenuhan Dokumen Kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BKPSDM
5.	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Manajerial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BKPSDM
KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BKAD
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	BKAD
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BKAD
4.	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BKAD
5.	Capaian Dana Transfer	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BKAD
6.	Aset yang diamankan secara fisik dan Legal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BKAD
7.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BAPENDA
8.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	BAPENDA
9.	Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	persen	100	100	100	100	100	100	100	BAPENDA
10.	Capaian realisasi Penerimaan PAD	persen	100	100	100	100	100	100	100	BAPENDA
FUNGSI LAINNYA										
SETDA										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	SETDA

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	SETDA
3.	Capaian IKM Kabupaten	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	SETDA
4.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SETDA
5.	Capaian SAKIP Kabupaten	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	SETDA
6.	Indeks Implementasi BERAKHLAK	Nilai	N/A	N/A	N/A	63,5	64,0	64,5	64,5	SETDA
7.	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SETDA
8.	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	N/A	N/A	N/A	BB	BB	BB	BB	SETDA
9.	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	N/A	N/A	N/A	40	41	42	42	SETDA
10.	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Nilai	N/A	N/A	N/A	40	41	42	42	SETDA
11.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	54,52	64,30	65,71	67,71	68,56	70,00	70,00	SETDA
INSPEKTORAT										
1.	Persentase AKIP OPD yang dievaluasi dengan nilai BB	Persen	100	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
2.	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	Skor	N/A	N/A	N/A	77	78,5	80	80	INSPEKTORAT
3.	Persentase ketercapaian sasaran Program OPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
SEKRETARIAT DPRD										
1.	Terfasilitasinya Kebutuhan Urusan Dasar/Penunjang Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Setwan
2.	Terfasilitasinya Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Setwan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	KESBANGPOL
2.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	KESBANGPOL
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL

NO.	NDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	
4.	Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
5.	Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
6.	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
7.	Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
8.	Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
KECAMATAN										
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	KECAMATAN
2.	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	KECAMATAN
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN
4.	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN
5.	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN
6.	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN
7.	Peningkatan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN
8.	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN

Sumber: Tim Penyusun RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

BAB IX

P E N U T U P

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan daerah tahun 2024-2026. Dalam menyusun RPD ini melalui pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif, politis, serta *topdown* dan *bottom-up*. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003